HASIL-HASIL

MUNAS ALIM ULAMA & KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2019

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

HASIL-HASIL MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2019

**PONPES MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR, CITANGKOLO,
KOTA BANJAR, JAWA BARAT, 27 FEBRUARI-1 MARET 2019**

PENGANTAR

Rekonstektualisasi Fiqih dan Transformasi Pola Pikir Umat Islam Demi Perdamaian Dunia dan Kehidupan Bersama Yang Harmonis Bagi Seluruh Umat Manusia

KH. Yahya Cholil Tsaquf
(Katib 'Aam PBNU)

Nahdlatul Ulama menyambut gembira Piagam Persaudaraan Kemanusiaan yang ditandatangani oleh As-Syekh Al-Akbar Jami'ah Al-

Azhar As-Syekh Ahmad Al-Thayyib dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2019. Piagam yang dinyatakan merupakan kelanjutan dan "didasarkan atas dokumen-dokumen internasional yang telah ada sebelumnya" itu, menegaskan pandangan-pandangan yang telah diangkat sebelumnya dalam berbagai deklarasi dan dokumen internasional yang dilahirkan di lingkungan Nahdlatul Ulama selama ini, terutama sejak tahun 1984 sampai dengan 2018. Nahdlatul Ulama sangat berterima kasih dan berbesar hati bahwa gagasan-gagasan yang dikembangkan di lingkungan Nahdlatul Ulama selama ini telah memberi sumbangan yang berarti bagi upaya-upaya perdamaian dunia hingga lahirnya Piagam Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi tersebut.

Bertumpu pada sikap yang telah dinyatakan dalam Dekalarasi Nahdlatul Ulama pada International Summit of Moderate Islamic Leaders di Jakarta, 10 Mei 2016 (nuktah nomor 8), secara khusus Nahdlatul Ulama menggaris bawahi pandangan Piagam Persaudaraan Kemanusiaan Abu Dhabi bahwa pola pikir umat Islam yang mengandung pandangan-pandangan yang mendorong konflik dengan dinisbatkan kepada model-model interpretasi tertentu atas ajaran-ajaran Islam harus ditransformasikan untuk menggalang energi dunia Islam sebesar-besarnya bagi upaya membangun perdamaian dunia, termasuk dengan merekontekstualisasikan sejumlah pandangan fiqih yang tidak lagi bersesuaian dengan konteks realitas masa kini.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Islam Untuk Kemanusiaan (Al-Islam lil Insaniyyah) yang diumumkan di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, pada tanggal 22 Mei 2017, rekontekstualisasi perlu diupayakan atas sejumlah pandangan fiqih berikut:

1. Pandangan tentang status non-Muslim di tengah kehidupan bermasyarakat dan norma-norma menyangkut interaksi antara muslim dengan non-muslim;
2. Pandangan tentang model negara yang diterima oleh syariat;
3. Pandangan yang menyangkut hubungan antara syariat Islam dan hukum negara sebagai hasil dari proses-proses politik modern;
4. Pandangan menyangkut penyikapan terhadap konflik-konflik yang

melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam.

Pandangan-pandangan yang dominan di dalam *turats fiqhiyah* mengenai masalah-masalah tersebut di atas lahir bersesuaian dengan konteks realitas kesejarahan pada zamannya, yaitu realitas sistemik dari peradaban umat manusia pada masa itu. Kini, kita menghadapi realitas peradaban yang secara fundamental sama sekali berbeda. Perubahan-perubahan mendasar pada format peradaban telah terjadi, dan —sebagaimana dinyatakan di dalam Manifesto Nusantara yang telah diumumkan oleh Gerakan Pemuda Ansor di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2018—ada sekurang-kurangnya empat fenomena perubahan besar yang mewarnai lahirnya format peradaban baru pada masa kini:

1. Perubahan tatanan politik internasional
    a. Pada masa lalu, hampir setiap negara atau kerajaan menyandang identitas agama. Pada masa kini, sebagian besar negara-negara yang ada telah melepaskan identitas agama dan menggantinya dengan identitas nasional.
    b. Pada masa lalu, tidak ada rezim perbatasan antar-negara, sehingga hubungan antar-negara berlangsung senantiasa dalam kerangka interaksi militer. Bahkan negara-negara yang secara geografis bersandingan satu dengan lain cenderung terjebak dalam perang abadi di garis batas jangkauan militer masing-masing. Saat ini, dengan adanya rezim internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka perbatasan antar-negara jauh lebih terjamin kemapanannya sebagai batas-batas kedaulatan masing-masing.
2. Perubahan demografi dan kewargaan
    a. Migrasi mengikuti aspirasi dan kontak-kontak ekonomi mendorong pergerakan manusia melintasi batas-batas negara, sehingga, pada masa kini, kita mendapati potret demografis yang sangat heterogen di berbagai kawasan, termasuk tumbuhnya komunitas Muslim dalam jumlah yang signifikan di kawasan-kawasan yang pada masa lalu hanya memiliki penduduk non-Muslim saja, seperti di Eropa, Amerika, dan kawasan-kawasan

lainnya.

b. Pada masa lalu, karena setiap negara atau kerajaan menggunakan identitas agama, maka status kewarganegaraan didasarkan pula atas identitas agama dari penduduknya, dan supremasi agama penguasa dijadikan landasan penilaian. Pen-

duduk yang memeluk agama berbeda dari agama negara cenderung dipersekusi atau sekurang-kurangnya diberi status sebagai warga kelas dua. Pada masa kini, dengan dilepaskannya identitas agama, maka negara mentolerir keragaman identitas agama di antara warganya.

3. Perubahan dalam standar norma-norma (‘*urf*)

   Praktek-praktek mengabaikan sebagian hak-hak kemanusiaan yang pada masa lalu ditolerir, seperti perbudakan, penjajahan antar bangsa, persekusi dan diskriminasi atas minoritas, kini secara umum dipandang sebagai kejahatan menurut standar norma-norma keadaban.

4. Globalisasi

   Globalisasi yang didorong oleh interaksi-interaksi ekonomi dan perkembangan teknologi telah menjadikan batas-batas fisik, yaitu batas-batas geografis, maupun batas-batas politik antar-bangsa semakin kurang relevan dalam dinamika sosial. Perkembangan teknologi juga telah secara dramatis menjembatani jarak fisik, sehingga setiap peristiwa yang terjadi di manapun berpotensi memicu rangkaian konsekuensi-konsekuensi global.

K.H. Achmad Shiddiq, Rais ‘Aam terpilih pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo, 1984, membuat karya bersejarah dengan meletakkan kerangka keagamaan yang otoritatif bagi kesejajaran nilai antara *Ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan sesama Muslim), *Ukhuwwah Wathoniyyah* (persaudaraan sesama warga Bangsa) dan *Ukhuwwah Basyariyyah* (persaudaraan sesama umat manusia). Dalam Muktamar tersebut dinyatakan pula bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk final upaya umat Islam Indonesia mengenai negara. Dengan kata lain, Nahdlatul Ulama memberikan legitimasi keagamaan yang otoritatif bagi keberadaan negara-bangsa modern berikut sistem hukum yang dihasilkan dalam sistem politiknya.

Pada Muktamar ke-32 di Makassar, 2010, Nahdlatul Ulama menegaskan perjuangan demi perdamaian dunia sebagai bagian dari sikap keagamaannya. Dengan itu berarti bahwa terhadap konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam, baik konflik di antara mereka sendiri maupun berhadapan dengan kelompok dari kalangan non-Muslim, kewajiban agama menuntut diperjuangkannya resolusi konflik dan perdamaian, alih-alih melibatkan diri dalam konflik atas

nama membela kelompok yang dianggap sepihak.

Dalam format peradaban dunia saat ini, ancaman terbesar bagi kelangsungan keberadaannya adalah universalisasi konflik, yaitu ketika konflik melibatkan kelompok-kelompok yang masing-masing mengklaim identitas universal, seperti agama dan/atau etnisitas, kemudian didorong menjadi konflik semesta yang melibatkan semua penyandang identitas yang bersangkutan di seluruh dunia.

Pada masa ketika melekatnya identitas agama pada negara masih menjadi basis dari format sistemik peradaban, konflik antar-agama relatif terbatasi sebagai konflik di antara negara-negara tertentu, dan hanya melibatkan kekuatan-kekuatan militer dari negara-negara yang bersangkutan, di medan-medan pertempuran yang terbatas. Bagi Kerajaan Islam seperti Turki Usmani, misalnya, norma permusuhan dan kewaspadaan kaum muslimin terhadap non-Muslim mengemban *qashd syar'i* (tujuan syari'at) terpeliharanya keamanan kaum muslimin sebagai warga kerajaan dari ancaman bahaya yang mungkin datang sewaktu-waktu dari kekuatan militer kerajaan-kerajaan non-Muslim di sekelilingnya, dengan penjagaan oleh para prajurit kerajaan di perbatasan. Di masa kini, ketika seluruh masyarakat di segenap belahan dunia diwarnai dengan keragaman warga dari berbagai kelompok agama yang berbeda-beda yang hidup saling bertetangga satu sama lain, permusuhan dan konflik antar-agama akan berujung kerusuhan sosial dengan skala dan sebaran yang tak terkendali, yang pada gilirannya akan meruntuhkan sama sekali segala sendi kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia.

Piagam Persaudaraan Kemanusiaan Abu Dhabi adalah tonggak bersejarah yang dapat menyelamatkan dunia dari ancaman konflik semesta antar-agama. Pandangan-pandangan yang tertuang dalam deklarasi tersebut mengenai peniadaan permusuhan antar-agama, kewargaan penuh dan kesetaraan di hadapan hukum terlepas dari perbedaan latar belakang identitas agama maupun identitas primordial lainnya, serta visi memperjuangkan perdamaian, menegakkan keadilan dan membela kaum yang lemah, adalah wawasan-wawasan yang harus menjadi rujukan bagi panduan hidup umat beragama di seluruh dunia.

Disepakati dengan tanda-tangan dari Asy-Syaikh Al-Akbar Ahmad Thayyib dan Paus Fransiskus, deklarasi itu mengemban otoritas yang kokoh di hadapan para pemeluk agama. Dekalarasi itu juga dapat dipandang sebagai perwujudan dari kesepakatan di antara umat-umat beragama untuk menghentikan permusuhan antar-agama dan membatalkan semua pembenaran bagi konflik atas nama agama dimana saja, untuk selama-lamanya.

Ini adalah langkah besar berskala peradaban yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Lebih khusus, ini adalah jawaban bagi seruan yang disampaikan oleh Gerakan Pemuda Ansor pada the Global Unity Forum yang pertama di Jakarta, 11 Mei 2016, untuk "menghentikan permusuhan antar-agama dan merekontekstualisasikan elemen-elemen keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkannya". Ini juga sekaligus merupakan gayung bersambut terhadap "Seruan Nusantara" yang disampaikan oleh Gerakan Pemuda Ansor dalam the Global Unity Forum yang kedua di Yogyakarta, 25 Oktober 2018, untuk "membangun konsensus global guna mencegah dijadikannya Islam sebagai senjata politik, baik oleh Muslim maupun non-Muslim, dan memupus maraknya kebencian komunal, melalui perjuangan untuk mewujudkan tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan diatas dasar penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia".

Tantangan besar selanjutnya adalah upaya untuk mentransformasikan pola pikir dari umat beragama yang dalam realitas hingga saat ini masih diwarnai pandangan-pandangan yang problematis. Langkah-langkah nyata untuk mengupayakan transformasi itu menuntut konsolidasi global dengan mengajak —sebagaimana dinyatakan oleh Piagam Persaudaraan Kemanusiaan—semua pihak yang memiliki kehendak baik dari semua agama dan kebangsaan. Diperlukan pula strategi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan.

Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Islam Untuk Kemanusiaan (Al-Islam lil Insaniyyah) menawarkan strategi dengan lima komponen:

Pertama, identifikasi masalah dan penangkalannya. Elemen-elemen yang bermasalah dalam pandangan-pandangan keagamaan

—karena tidak sesuai lagi dengan konteks realitas kekinian—harus diidentifikasi secara akurat agar tidak terjadi generalisasi terhadap agama hingga mengarah pada fobia. Artikulasi-artikulasi yang menguatkan pandangan-pandangan bermasalah tersebut harus ditangkal agar tidak terus menyebar di kalangan umat beragama.

Kedua, resolusi konflik. Realitas konflik yang masih ada di berbagai kawasan senantiasa dijadikan pembenar untuk melestarikan pandangan-pandangan keagamaan yang problematis. Masyarakat internasional dituntut untuk lebih gigih lagi menjalankan upaya-upaya resolusi dengan membangun jembatan dialog dan bilamana perlu menerapkan tekanan global atas pihak-pihak yang terlibat agar menghentikan konflik.

Ketiga, mengembangkan wacana alternatif. Artikulasi-artikulasi keagamaan yang mempromosikan perdamaian harus terus dikembangkan untuk menekan artikulasi-artikulasi yang mendorong konflik. Dalam hal ini, Piagam Persaudaraan Kemanusiaan merupakan wujud besar lahirnya wacana alternatif itu, yang harus diikuti dengan pengembangan wacana-wacana lanjutan dan penyebaran seluas-luasnya di kalangan umat beragama.

Keempat, penyesuaian sistem pendidikan agama. Pedidikan agama melibatkan tidak hanya peserta didik anak-anak, tapi juga dewasa. Maka upaya penyesuaian perlu dilakukan segera agar membawa dampak langsung pada pola pikir umat beragama. Di antara elemen utama dari penyesuaian itu adalah mengenalkan cara pandang baru terhadap sejarah dan membangkitkan kesadaran tentang perubahan realitas peradaban, agar peserta didik dan masyarakat luas mampu menangkap nilai-nilai sejati dari agama yang harus senantiasa mendapatkan ruang manifestasi dalam konteks realitas yang berubah-ubah.

Kelima, gerakan sosial. Masyarakat perlu digalang dalam suatu gerakan untuk senantiasa memelihara harmoni sosial, menjaga kerukunan antar-umat beragama dan menangkal potensi-potensi perpecahan, lebih-lebih lagi upaya-upaya yang dengan sengaja dilakukan oleh aktor-aktor tertentu untuk memicu konflik.

Dengan ini Nahdlatul Ulama menegaskan dukungan sepenuhnya terhadap Piagam Persaudaraan Kemanusiaan dan tekad untuk bergabung bersama Al-Azhar dan Vatikan dalam perjuangan bersama mewujudkan visi mulia dari piagam tersebut. Hal ini merupakan bagian dari tekad yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Nahdlatul Ulama dalam International Summit Of Moderate Islamic Leaders (nuktah ke-16), yaitu untuk "menggalang konsolidasi komunitas Ahlus Sunnah Wal Jama'ah seluruh dunia agar sungguh-sungguh hadir sebagai pembawa kebaikan dan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan seluruh umat manusia".

Banjar Patroman, 1 Maret 2019

KHUTBAH IFTITAH RAIS 'AAM
PADA MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2019

KH Miftahul Achyar

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم، الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَيَّد أَرْكَانَ دِيْنِ الاسْلَام أَهْلَ السُّنة وَالجَمَاعَةِ وَفرَضَ عَلَيْهِمْ مَسْؤُوْلِيَّةَ حِمَايَتِهَا وَإِحْكَامِهَا نَهْضَةَ العُلَمَاءِ نَهْضَةً وَأَمَانَةً وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وليُّ المُؤْمِنِيْنَ وَخَالِقُ الخَلْقِ أَجْمَعِيْنَ وَقَيُّوْمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِمَامُ المُتَّقِيْنَ وَأَشْرَفُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَقَاعِدُ الغُرِّ المُحَجَّلِيْنَ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ

الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ الغُرِّ المَيَامِنِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْد:

فَيَا مَعَاشِرَ العُلَمَاءِ وَالزُّعَمَاءِ الأَعِزَّاءِ الأَفَاضِلِ وَالْمَشَايِيْخِ الأَجِلاَّءِ الأَبَاجِيْلِ، خُصُوْصًا رَئِيْسَ الجُمْهُوْرِيَّةِ الإِنْدُوْنِيْسِيَّةِ السَّيِّد الحاجّ جُوكُو وِيدُودُو إِنْسِيور، الرَّئِيس السَّابِعِ لِلإِنْدُوْنِيْسِيَّةِ، الرَّئِيْس السَّابِق، إِنْ شَاءَ الله وَالرَّئِيْس الجَدِيْد، مَشَايِيْخَ الأَزْهَرِ الشَّرِيْفِ الحَاضِرِ فِيْ هَذَا المَجْلِسِ خُصُوْصًا الشَّيْخَ الدُّكْتُوْر تَوْفِيْق البُوْطِيّ مِنْ سُورِيَا، وَالشَّيْخ مُصْطَفَى الزَّهْرَان مِنَ الأَزْهَرِ

جَمِيْعَ الجَمْعِيَّةِ أَوْ مَجْلِسَ الإِسْتِشَارِيَّةِ، مَجْلِسَ النُّوَّاب الشَّعْبِ، مَجْلِس النُّوَّابِ الأَقَالِيْمِ، المَحْكَمَةَ العُلْيَا المَحْكَمَةَ الدُّسْتُورِيَّة خُصُوْصًا ثَانِيًا البُرُوبِيْسُور كِيَاهِي مَعْرُوْف أَمِيْن، مُسْتَشَار UNBP وَنَجِيْبُ وَكِيْلِ رَئِيْسِ الجُمْهُوْرِيَّةِ الأَتِي إِنْ شَاءَ اللهُ

صَاحِبَ هَذَا الْمَعْهَد صَاحِبِ الفَضِيْلَةِ الكِيَاهِي مُنَوَّرْ عَبْدُ الرَّحِيْمِ وَجَمِيْعَ دِيْوَانِ الْمَشِيْخَة بِمَعْهَدِ مِفْتَاح الهُدَى الأَزْهَرِ بِبَنْجَارْ بَاتِرُوْمَانْ حَفِظَهُمُ اللهُ وَرَعَاهُمْ خُصُوْصًا وَزِيْرَ رِيْنِيْ وَ إِيْبُو سُوْسِي خُصُوْصًا وَزِيْرَ الشُّؤُوْنِ الدِّيْنِيِّة بَافَاك لُقْمَان حَكِيْم وَرَئِيْسَ الشُّرْطِي لِدَائِرَةِ جَاوَا الغَرْبِيَّة وَمُحَافِظ جَاوَا الغَرْبِيَّة وَالمُحَافِظ الإِدَارِيِّ وَالحَاكِم الإِدَارِيِّ وَالحَاضِرِيْنَ وَالحَاضِرَاتِ وَالسَّيِّدَات رَحِمَكُمُ اللهُ جَمِيْعًا

وَضُيُوْفَنَا وَالكُرَمَاءَ مُمَثِّل المُنَظَّمَاتِ وَالهَيْئَاتِ الإِقْلِيْمِيَّة وَالمَحَلِّيَّة فِي جَاوَا الغَرْبِيَّة رَحِمَكُم اللهُ جَمِيْعًا اسْمَحُوا لَنَا أَوَّلًا أَنْ أُهَنِّئَكُمْ بِأَخْلَاصِ التَّهَانِي بِمُنَاسَبَةِ المُؤْتَمَرِ وَالمُشَوَّرَة بَيْنَ العُلَمَاءِ النَّهْضِيِّيْنَ فِي هَذاَ المَعْهَدِ رَاجِيًا أَنْ تَكُوْنَ أَعْمَالُكَ وَاهْتِمَامُكُمْ وَنَشَاطَتُكُمْ فِيْ هَذِهِ الفُرْصَة الذَّهَبِيّةِ النَّافِعَةِ وَالنَّصِيْحَةِ الخَالِصَةِ مَقْبُوْلَةً عِنْدَ المَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنْتُمْ طَيِّبُوْنَ

مَا أَصْرَحَ صُدُوْرَنَا وَمَا أَفْرَحَ قُلُوْبَنَا وَمَا أَسْعَدَ حَيَاتَنَا وَجُهُوْدَنَا بِهَذَا المُلْتَقَى المُسَمَّي بِمُوْنَاسْ وَكُوْمْبِسْ وَاعْتَقَدْتُمْ الشَّرَفَ ... لِجَمِيْع المُدِيْرِيْنَ المُشْتَرِكِيْنَ الَّذِيْنَ أَجَابُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ فَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ فِيْ الدَّارَيْنِ أَمِيْنَ

لَاشَكَّ أَنَّ ذَلِكَ جَمِيْعًا يَدُلُّ عَلَى خُلُوْصِ سَرِيْرَتِكُمْ وَقُوَّةِ عَزَائِمِكُمْ عَلَى الجُهُوْدِ وَالاجْتِهَادِ وَالجِهَادِ بِبَذْلِ الوُسْعِ لِنَيْلِ المَطْلُوْبِ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا وَالعِزَّةُ لِلهِ وَلِلْإِسْلَامِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ الإِنْدُوْنِيْسِيِّيْنَ جَمِيْعًا خُصُوْصًا

لَقَدْ مَرَّتْ عَلَيْنَا فِي أَيَّامِنَا الأَخِيْرَةِ فَتْرَةٌ لَيْسَتْ كَفَتْرَةٍ عَادِيَّةٍ فَتْرَةُ انْتِخَابِ الرَّئِيْسِ الجُمْهُوْرِيَّةِ بِإِنْدُوْنِيْسِيَا كَمَا يَقُوْلُوْنَ، يُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيْهَا الكَاذِبُ، وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيُؤْمَنُ فِيْهَا الخَائِنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ وَذَلِكَ مِصْدَاقُ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْمَنُ فِيْهَا الخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الرُّوَيْبِضَة قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ يَنْطِقُ وَيَتَكَلَّمُ فِيْ أَمْرِ الأُمَّةِ، سُبْحَانَ اللهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ يَزِيْد

نُشَاهِدُ مُعْظَمَ رِجَالِنَا السِّيَاسِيِّيْنَ لَايَقُوْدُهُمْ فِي طَرِيْقِهِمْ الَّذِي يُسَمَّى الطَّرِيْقَ السِّيَاسِيَّ إِلَّا المَصْلَحَةَ الشَّخْصِيَّةَ أَوْ الطَّائِفِيَّةَ يَا سُبْحَانَ اللهِ وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ ورضِي اللهُ عَنه إِنَّ اللهَ لَمْ يُعْطِ أَحَدًا بِالفُرْقَةِ خَيْرًا لاَ مِنَ الأَوَّلِيْنَ وَلَا مِنَ الأَخِرِيْنَ لِأَنَّ القَوْمَ اَذَا تَفَرَّقَتْ قُلُوبُهُمْ ولَعِبَتْ بِهِمْ أَهْوَاؤُهُم فَلَا يَرَى أَنَّ لِلْمَنْفَعَةِ العَامَّةِ مَحَلًّا وَلاَ مَقَامًا وَلَا يَكُوْنُ الأُمَّةُ مَتَّحِدَةً بَل أَحَادًا مُجْتَمِعِيْنَ أَجْسَاداً مُتَفَرِّقِيْنَ قُلُوْبًا وَأَهْوَاءً تَحْسَبُهُم جَمِيْعًا وَقُلوبُهُمْ شَتَّى

وَقَدْ أَفْصَحَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه أَيْضًا إِنَّ الحَقَّ يَضْعُفُ بِالاخْتِلَافِ وَالافْتِرَاقِ وَأَنَّ البَاطِلَ قَدْ يَقْوَى بِالاتِّحَادِ وَالاتِّفَاق

بِتَرْحِيْبِ قُدُوْمِ وَاسْتِقْبَالِ مِئَةِ سَنَةٍ لِعُمْرِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ المَحْبُوْبَةِ جَمْعِيَّةِ نَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ نُقَدِّمُ لَكُمْ قَوْلَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهِ... إِنَّ اللهَ تعالى يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا أَمْرَ دِيْنِهَا رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالحَاكِمُ وَالبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ

أَيُّهَا السَّادَاتُ وَالسَّيِّدَاتُ المُحْتَرَمُوْنَ وَالحَاضِرِيْنَ وَالحَاضِرَاتِ المُبَجَّلُوْنَ نَحْنُ

مَعَاشِرَ مُدِيْرِي مِنْ هَيْئَةِ جَمْعِيَّةِ نَهْضَةِ العُلَمَاءَ المَرْكَزِيَّة الخَادِمِ النَهْضِيِّيْنَ
بُمَنَاسَبَةِ الْتِزَامِنَا عَلَى هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ المَهْدِيَّةِ المَحْبُوْبَةِ كَالمُقَرَّرِ فِيْ قَانُوْنِهَا وَقَرَارَاتِهَا

Di saat dunia sudah makin menunjukkan sifat pancarobanya; fitnah, tuduhan, suuzan, persaingan global yang tidak seimbang, dan

dunia sudah melangkah memasuki era revolusi industry 4.0, mari kita merenungkan, merekontekstualisasi, *I'adatun nazhar,* apa yang salah, apa yang sudah, apa yang benar, dan apa yang telah ditanamkan para pendahulu kita dalam bingkai trilogi ukhuwwah; ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wathaniyyah ukhuwwah basyariyyah, dan kita tambahkan ukhuwwah nahdhiyyah. Sebagai cerminan moral yang prima agar dampak-dampaknya tidak begitu berpengaruh dalam perjalanan anak

bangsa di era revolusi industri 4.0.

Menuju bonus demografi pada tahun 2035, dan semoga bonus demografi tersebut bukan sebagai musibah demografi, *wal iyadzu billah.*

Hadirin dan hadirat *rahimakumullah*, menyongsong usia seratus tahun Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, dimana Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ تعالى يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا أَمْرَ دِيْنِهَا

Kalaulah era industri 4.0 bisa menjadi tanda kemajuan *hadharah insaniyah,* maka harus kita imbangi dengan G4 atau empat ajaran khas Nahdlatul Ulama. Konsep besar Nahdatul Ulama sekaligus mengamalkan hadis di atas. Sebab kita dan Jam'iyyah kita perlu penyegaran-penyegaran 4G tersebut.

Yang pertama, *grand idea* yang berupa visi misi Nahdlatul Ulama. Bagaimana Nadhlatul Ulama dilahirkan. Visi misi adalah untuk menyatukan langkah, baik ulama struktural maupun ulama kultural, terutama ulama-ulama pondok pesantren dalam satu langkah, satu keputusan, menggalang kekuatan.

Dua *grand design* berupa program-program unggulan. Program kerja yang terukur. Di sini hadis mengatakan, setiap awal seratus tahun Allah akan membangkitkan, mengutus seorang, atau dua orang, atau tiga orang, atau berapa junlahnya untuk menyegarkan kembali aturan-aturan yang sudah mulai ditinggalkan. Kita hampir satu abad. Kalau usia Masehi kita masih 93 tahun, tetapi usia hijriahnya sudah mencapai 96 tahun. Insyaallah, 16 Rajab sebagai hari kelahiran hijriahnya Nahdlatul Ulama, kami harapkan Jakarta nantinya dapat dipenuhi warga Nahdiyyin dan Nahdiyyat. Tidak kurang dari 7 sampai 10 juta kita harapkan.

Kedua *grand strategy*. *Grand strategy* ini bisa diintensifkan penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dikelola dan distribusi kader-kader terbaik ke ruang-ruang yang tersedia. Kita saat ini kader kita masih banyak, ngumpul di Departemen Keagamaan. Belum ke semua ruang-ruang yang ada. Perlu ada *grand strategi*, *grand control*, system dan gerakan NU melahirkan system atau garis komando secara organisatoris dari PBNU sampai kepengurusan sampai tingkat

anak ranting.

Dari semua itu, terciptalah Nahdatul Ulama, dalam usia satu abad. Memasuki usia dua abad, NU sebagai organisasi keagamaan sosial yang sistemik, proaktif, reaktif dan responsif yang terus menerus menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin, kemaslahatan di dunia sampai akhirat dan insyaallah mampu bersaing di segala bidang dengan organisasi-organisasi lain. Kekuatan Jam'iyah Nadhatul Ulama luar biasa. Hanya lantaran biasa di luar. Karena, mereka sebagai jamaah belum berjam'iyah, maka perlu kita jam'iyyahkan, *munazhzham* Nahdatul Ulama yang nanti mengatur bagaimana warga Nahdlatul Ulama jangan tercerai berai hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Mereka mengikuti satu komando yang dikomandokan dari PBNU yang didukung para mustasyarin, menjam'iyyahkan jamaah yang besar ini dengan segala potensinya yang berkekuatan raksasa. Yang menjadi pekerjaan rumah (PR) terpenting dari sekian PR-PR yang lain, yang insyaallah menjadi salah satu bahasan penting dalam Munas dan Kombes nanti. Potensi raksasa ini kalau tidak dikelola dengan baik dan benar justru akan menjadi beban, dan mudah terpecah belah, menjadi bulan-bulanan, dan diperebutkan kelompok-kelompok yang lain.

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ ورضِي اللهُ عَنْه إِنَّ اللهَ لَمْ يُعْطِ أَحَدًا بِالفُرْقَةِ خَيْرًا لاَ مِنَ الأَوَّلِيْنَ وَلَا مِنَ الأَخِرِيْنَ لِأَنَّ القَوْمَ اَذَا تَفَرَّقَتْ قُلُوبُهُمْ ولَعِبَتْ بِهِمْ أَهْوَاؤُهُم فَلَا يَرَى أَنَّ لِلْمَنْفَعَةِ العَامَّةِ مَحَلًّا وَلاَ مَقَامًا وَلَا يَكُوْنُ الأُمَّةُ مَتَّحِدَةً بَل أَحَادًا مُجْتَمِعِيْنَ أَجْسَاداً مُتفَرِّقِيْنَ قُلُوْبًا وَأَهْوَاءً تَحْسَبُهُم جَمِيْعًا وَقُلوبُهُمْ شَتَّى

Di NU semua sudah dimiliki, tinggal bidang ekonomi yang menjadi amanah besar dari para muassis. Mari ekonomi keummatan segera kita bangkitkan.

أَيُّهَا الحُضُوْرُ رَحِمَكُمُ اللهُ فَبِالْحَقِيْقَةِ كَانَتْ أُمَّةُ الإِسْلَامِ السُّنِّيِّ مِنَ النَّهْضِيِّيْنَ فِي الإِنْدُوْنِيْسِيَا كَبِيْرَةٌ جِدًّا لَكِنْ غَيْرَ مُنَظَّمَةٍ وَمُتَكَامِلَةٍ فِيْ مُحَاوَلَةِ لَعْبِ سَائِلِ الاِعْلَامِ وَرَأْيِ العَامِّ المُضِلِّ جَمْعِيَّتَنَا المُنَظَّمَة هَذِهِ إِذًا فِي العُصُوْرِ فِي العَصْرِ الحَاضِرِ وَالمُسْتَقْبَلِ فِي حَاجَةٍ مَاسَّةِ المُلِحَّةِ إِلَى تَكْوِيْنِ أُمُوْرٍ لِمُوَاجَهَةِ الاتِّهَاجَاتِ

الفَاسِدَاتِ وَالمُفْسِدَاتِ مِنْهَا إِيْقَاظُ هَذاَ الضَّمِيْرِ الاِجْتِمَاعِيِّ فِي الأَمَّة لَا عَنْ طَرِيْقِ الدَّعْوَةِ وَالمَوْعِظَةِ فَحَسْبُ بَلْ مِنْ طَرِيْقِ عَمَلٍ جِدِّيٍّ تَكْوِيْنِ رَأْيٍ عَامٍّ أَخْلَاقِيٍّ لَهُ نُفُوْذٌ وَاحْتِرَامٌ فِي نُفُوْسِ الأُفْرَادِ بِحَيْثُ يَصْلُحُ كُلُّ امْرِئٍ إِنْ اشاته ذَقَّتْ أَوْ جَلَّتْ سَتُلَاقِي جَوَابًا سَرِيْعًا عَلَيْهَا فِي سُلُوكِ المَجْمُوْعِ فِي إِزَائِهِ شُرُوْطُ الزِّعَامَةِ وَالرَّئَاسَةِ الاِجْتِمَاعِيَّةِ لِأَنَّ الزِّعَامَة تَقْتَضِي صِفَاتٍ دَقِيْقَةٍ وَاسِعَةٍ جِدًّا يَجْمَعُ كَلِمَتَانِ الجِهَادُ وَالاِجْتِهَادُ، كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ بَسِيْطَتَانِ وَالمُجَامِعَتَانِ العَامِرَاتَانِ بِالمَعَانِي الكَثِيْرَةِ، الجِهَادُ هُوَ بَذْلُ الوُسْعِ وَغَايَةِ الجُهْدِ لِنَيْلِ أَكْبَرِ المَطْلُوْبِ وهُو طَاعَةُ اللهِ وَالخُضُوعِ لِحُكْمِهِ وِالإِسْلَامِ لَأَوَامِرِهِ وَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى جِهَادٍ طَوِيْلٍ شَاقٍّ ضِدَّ مَا يُزَاحِمُ ذَلِكَ، الاجتِهَاد أَنْ يَكُوْنَ مَنْ يَرْأَسُ هَذِهِ الجَمْعِيَّةَ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ الصَّحِيْحِ فِي النَّوَازِلِ وَالحَوَادِثِ التِي تَعْرِضُ فِي حَيَاةِ الجَمَاعَةِ وَفِي العَالَمِ وَفِي الأُمَمِ وَفِي المَسَائِلِ التِي تُفَاجِئُ وَتَجَدَّدَتْ وَيَكُوْنُ عِنْدَهُ مِنَ الذّكَاءِ وَالنَّشَاطِ وَالجِدِّ وَالعِلْمِ بِمَا يُستَدَعُ بِهِ

Demikian sambutan ifititah, yang terakhir tidak perlu saya terjemahkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

SAMBUTAN KETUA UMUM PBNU

DALAM PEMBUKAAN
MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2019

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللهِ وِالْحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ
وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تبعَ سُنَّتَهُ وَجَمَاعَتَهُ مِنْ يَوْمِنَا هَذاَ إِلَى يَوْمِ النَّهْضَةِ، أَمَّا بَعْد.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2019 kali ini mengambil tema "MEMPERKUAT UKHUWAH WATHANIYYAH UNTUK KEDAULATAN RAKYAT."

Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu Pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019. Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil Pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Karena itu, Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.

Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4.0. yang bertumpu pada penggunaan massif teknologi informasi komunikasi berbasis internet (*internet of things*), kecerdasan buatan (*artficial intelligent*) dan analisis *big data*. Revolusi Industri 4.0 berdampak luas, terutama pada sektor lapangan kerja. Menurut Mckinsey Global Institute, Revolusi Industri 4.0 akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambilalih oleh robot dan mesin. Khusus di Indonesia, akan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru yang terbentuk, tetapi ada sekitar 52,6 juta lapangan kerja yang berpotensi hilang akibat revolusi digital.

Bagian dari peluang positif Revolusi Industri 4.0. telah kita rasakan di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan transaksi online untuk memenuhi sejumlah hajat hidup masyarakat. Namun, bagian dari ancaman Revolusi Industri 4.0. adalah tergusurnya sejumlah lapangan kerja di tengah masalah pengangguran dan postur tenaga kerja yang belum bersaing. Sekitar 60% angkatan kerja kita adalah lulusan SMP ke bawah. Bagaimana nasib mereka? Dalam revolusi digital, mereka terancam terus-menerus menjadi korban pembangunan. Sektor pertanian adalah penyumbang terbesar kedua PDB Indonesia. Namun, di sektor tempat bergantung hidup 82% rakyat miskin ini, 30% adalah

petani cangkul yang masih terseok di gelombang Revolusi Industri 1.0.

NU perlu mengingatkan bahwa manusia dan kemanusiaan harus tetap merupakan dimensi utama dalam pembangunan. Tugas Pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa 'mudharat-mudharat' teknologi agar tidak mendehumanisasi pembangunan. Jepang telah bicara tentang Revolusi Industri 5.0. yang mendedikasikan capaian teknologi untuk melayani kemanusiaan (*human-centered society*). Indonesia, dengan segala kearifannya, harus mampu menyambut peluang-peluang baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan sosial yang lebih dalam.

Presiden, Rais 'Aam, para Tamu Undangan, dan hadirin-hadirat yang berbahagia.

Nahdlatul Ulama didirikan dengan dua mandat besar, yaitu peran dan tanggung jawab keagamaan (*mas'uliyah diniyah*) dan peran dan tanggung jawab kebangsaan (*mas'uliyah wathaniyah*). NU bukan hanya terpanggil untuk mengurus masalah *ubudiyah, fikrah diniyah*, atau *harakah islamiyah*, tetapi juga masalah-masalah kebangsaan. Dalam kapasitas yang dimungkinkan, NU selalu berupaya membantu program-program Pemerintah yang mendukung kesejahteraan rakyat. NU juga memastikan bahwa NKRI adalah kesepakatan final yang tidak boleh dirongrong siapa saja. Karena itu, siapa saja yang mengancam NKRI, berniat menggerogoti dan merobohkan NKRI, akan berhadapan dengan NU.

Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulam dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat kali ini akan membahas sejumlah masalah penting yang diklasifikasi dalam *Masa'il Waqi'iyyah* (mencakup bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis *money game*, dan sel punca); *Masa'il Maudhu'iyyah* (masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam Nusantara, dan politisasi agama), dan *Masa'il Diniyah Qanuniyyah* (RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha agar kedzaliman ekonomi global dapat dicegah dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual). Di bagian Rekomendasi, NU tengah mengkaji agar Pemerintah mempertimbang-

kan kembali pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang.

Khusus terkait sampah plastik, NU sangat prihatin dengan status Indonesia sebagai penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Indonesia menghasilkan sekitar 130.000 ton sampah plastik setiap hari. Hanya separo yang dibuang dan dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut yang merusak ekosistem. Ketika sampah mikroplastik berubah menjadi nanoplastik dan kemudian dimakan ikan dan seterusnya dikonsumsi manusia, limbah plastik telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mengingat semakin mendesaknya polusi plastik, NU mendesak Pemerintah melaku-

kan upaya yang lebih keras untuk menekan dan mengendalikan laju pencemaran limbah plastik di Indonesia.

Selain itu menyadari dan menyikapi posisi dan kondisi Indonesia yang rawan bencana alam, semua pihak terutama Pemerintah harus berupaya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masyarakat terutama di daerah berisiko tinggi terdampak bencana.

Nahdlatul Ulama mendorong agar hal itu dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan kapasitas (pengetahuan dan *skill*) masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis kearifan lokal terutama melalui pesantren dan madrasah; (2) Pemerintah Daerah harus menjadikan pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam rencana pembangunan; (3) melakukan simulasi rutin penanganan bencana; (4) me-

nyepakati sistem peringatan dini dan mekanisme penyelamatan diri saat terjadi bencana agar masyarakat dapat menyelamatkan diri; dan (5) mengalokasikan anggaran yang memadai.

Presiden, Rais 'Aam, para Tamu Undangan, dan hadirin-hadirat yang berbahagia.

Demikian dan mohon berkenan Bapak Presiden memberi sambutan sekaligus membuka acara Munas dan Konbes NU di Jawa Barat, 27 Februari 2019 - 1 Maret 2019.

شُكْرًا وَدُمْتُمْ فِيْ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ وَالنَّجَاحِ، وَاللهُ المُوَفِّقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيْقِ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

DAFTAR ISI

HASIL
MUSYAWARAH NASIONAL
ALIM ULAMA 2019

BAHTSUL MASAIL
AD-DINIYYAH AL-MAUDLU'IYYAH

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 02/MUNAS/III/2019

Tentang:

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYAH AL-MAUDLU'IYAH

Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama

Menimbang

a. Bahwa menjadi tugas Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama sebagai forum tertinggi kedua dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Musyawarah Na-

sional Alim Ulama perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu'iyah.

Mengingat

Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019.

Memperhatikan

a. Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah Iftitah Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H /27 Februari 2019 M;
b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu'iyah yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H/1 Maret 2019;
c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-MAUDLU'IYAH;

Pertama	:	Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu'iyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat.
Kedua	:	Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu'iyah ini.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di	:	Kota Banjar
Pada tanggal	:	24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2019

PIMPINAN SIDANG PLENO

H. Robikin Emhas, SH., MH.	Dr. KH. Marsudi Syuhud
Ketua	Sekretaris

Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama
Komisi Bahtsul Masail
Maudlu'iyah
Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari - 1 Maret 2019
KETUA

KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA'IL MUNAS NU 2019

1. NEGARA, KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM NEGARA

1.1. Mukadimah

Sampai dengan berakhirnya Turki Utsmani sebagian besar umat Islam sejak awal sejarah Islam hidup dalam kerangka negara yang menyatu dengan agama sehingga negara berfungsi sebagai negara agama dengan identitas Islam.

Mengikuti logika negara-agama itu maka status kewarganengaraan ditetapkan berdasarkan identitas agama. ada warga penuh yaitu kaum muslimin dan ada warga negara kelas dua yaitu kafir *dzimmi*. Dan selebihnya adalah dunia yang wajib diperangi yaitu kafir *harbi*.

Semua ini tak terpisahkan dari keberadaan syariah yang dipandang secara mutlak membutuhkan paksa fisik dari negera untuk penerapannya. Sedangkan syariah itu sendiri dipandang sebagai norma-norma yang ditetapkan oleh Allah swt atau sekurang-kurangnya merupakan hasil penafsiran melalui suatu disiplin yang ketat (*thariqat al-istinbath*) dalam menafsirkan hukum-hukum Allah.

Sesudah runtuhnya Turki Utsmani dunia Islam terpecah-pecah menjadi banyak negara yang justru mayoritas atau sebagian besar tidak lagi menyatakan diri sebagai negara agama, tetapi memilih menjadi negara kebangsaan atau negara nasional tanpa identitas agama yang resmi.

Termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai negara Pancasila. Status kewarganegaraan yang didasarkan pada identitas agama pun tidak lagi diberlakukan, bahkan di negara-negara yang secara formal menyatakan diri sebagai negara Islam. Misalnya Malaysia dan Brunei Darus Salam.

Demikian juga hal-hal yang terkait dengan penetapan hukum, *thariqat al-istinbath* atau *manhaj al-ijtihad* sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama tidak lagi difungsikan dalam menyusun hukum-hukum negara.

1.2. Pandangan Islam menyikapi bentuk negara bangsa

Negara bangsa adalah sebuah system organisasi, di mana orang-orang dengan identitas yang sama hidup di dalam Negara dengan perbatasan yang jelas, tidak dikenal perbedaan kelas berdasarkan golongan, ras dan agama.

Dalam pandangan Islam, pembahasan mengenai konsep negara bangsa masuk dalam kategori fikih siyasah sedangkan bidang siyasah masuk bagian kajian fikih mu'amalah. Dan dalam hal muamalat ini berlaku kaidah*al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah*. Dengan demikian selama tidak dalil yang melarang maka dianggap sah. Karena *al-'ilmu bi 'adamid dalil dalil*.

Keyakinan (*al-'ilm*) ketiadaan dalil saja sudah cukup sebagai dalil kebolehan untuk mendirikan negara bangsa. Faktanya, Nabi saw pernah mendirikan negara Madinah yang selaras dengan prinsip negara bangsa dalam masyarakat modern.

بِسْمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمّدٍ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إنّهُمْ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النّاسِ.... وَإِنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

"Bismaillahirrahmanirrahim. Ini adalah Piagam dari Muhammad. Nabi saw di antara kaum Mukminin dan Muslimin dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka kemudian menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka semua adalah satu umat, lain dari komunitas manusia lainnya... Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum Mukminin selama dalam peperangan. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan kaum Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Hal ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Karena hal demikian akan merusak diri

dan keluarganya."[1]

Di sisi lain negara adalah wasilah, maka dalam persoalan mu'amalah-siyasiyah, syari'at Islam mempersilahkan kepada umat Islam untuk menentukan satu bentuk negara. Dengan perkataan lain, Islam tidak meletakkan satu pola baku tentang sistem pemerintahan. Sejauh negara membawa kemaslahatan maka ia telah selaras dengan spirit keislaman.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ اَلسِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

"Siyasah adalah kebijakan yang nyata-nyata menjadikan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi kerusakan meskipun tidak dibuat oleh Rasulullah saw dan disinggung oleh wahyu"[2]

1.3. Status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Keputusan Muktamar ke-29 NU tahun 1994 di Cipasung-Tasikmalaya menyatakan bahwa:

"Tata hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut dengan "Ukhuwah Basyariyah". Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai."

Acuan fiqhiyyah dari pendapat jumhurul fuqaha` (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) yang mengatakan bahwa *'illat al-jihad al-qitali* (alasan hukum) untuk bolehnya/wajibnya perang melawan pihak lain adalah kezaliman dan *al-hirabah* (kezaliman dan perilaku perusakan) yang dilakukan pihak-pihak lain.

---

1 Ibnu Hisyam, *as-Sirah an-Nabawiyyah*, (Bairut: Dar al-Jail, tt), juz, III, h. 32, 33, dan 34.

2 Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, tt), h. 17

قَرَّرَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ مَالِكِيَّةٍ وَحَنَفِيَّةٍ وَحَنَابِلَةَ أَنَّ مَنَاطَ الْقِتَالِ هُوَ الْحِرَابَةُ وَالْمُقَاتَلَةُ وَالْإِعْتِدَاءُ وَلَيْسَ الْكُفْرَ فَلَا يُقْتَلُ شَخْصٌ لِمُجَرَّدِ مُخَالَفَتِهِ لِلْإِسْلَامِ أَوْ لِلْكُفْرِ إِنَّمَا يُقْتَلُ لِاعْتِدَائِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ

"Jumhurul ulama dari madzhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali menetapkan bahwa alasan memerangi adalah permusuhan dan penyerangan bukan kekafiran. Maka seseorang tidak boleh dibunuh semata-mata karena bersebrangan dengan agama Islam atau kafir, tetapi ia boleh dibunuh karena melakukan penyerangan terhadap Islam"[3]

Kaidah fikih mengatakan *al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (Ada/tidak adanya hukum tergantung ada tidaknya 'illat). Ini artinya perang tidak boleh terjadi/dilakukan selama tidak terjadi kezaliman/perilaku merusak. Sebaliknya boleh terjadi/harus dilakukan bila terjadi kezaliman atau perilaku merusak. Ketentuan ini berlaku umum bagi siapa saja baik non-Muslim maupun Muslim.

Fuqaha Syafi'iyyah dalam hal ini disebut sebagai kelompok minoritas yang mengatakan bahwa *'illat al-jihad* (alasan hukum) dilakukannya perang adalah *al-kufr* (kekufuran). Akan tetapi di dalam kitab *Takmilah al-Majmu`* salah satu kitab acuan madzhab Syafii ditemkan penjelasan bahwa pada dasarnya *al-'alaqah baina al-muslimin wa ghairuhum mabniyatun 'ala al-musalamah* (Hubungan antara muslim dan non-Muslim adalah perdamaian). Hal ini juga senada dengan pendapat Ibnu Shalah yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Atsar al-Harb*-nya.

إِنَّ الْإِسْلَامَ أَسَّسَ عَلَاقَةَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِهِمْ عَلَى الْمُسَالَمَةِ لَا عَلَى الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ

---

3 Wahbah az-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadlaya al-Mu'ashirah*, Damaskus-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1431 H/2010 M, juz, VII, h. 103

"Sesungguhnya Islam telah meletakkan dasar relasi kaum Muslimin dengan selainnya berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan, bukan peperangan dan kekerasan"[4]

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّ الْأَصْلَ هُوَ إِبْقَاءُ الْكُفَّارِ وَتَقْرِيرُهُمْ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا أَرَادَ إِفْنَاءِ الْخَلْقِ وَلَا خَلَقَهُمْ لِيُقْتَلُوا وَإِنَّمَا أُبِيحَ قَتْلُهُمْ لِعَارِضِ ضَرَرٍ وُجِدَ مِنْهُمْ لَا أَنَّ ذَلِكَ جَزَاءٌ عَلَى كُفْرِهِمْ فَإِنَّ دَارَ الدُّنْيَا لَيْسَتْ دَارَ جَزَاءٍ بَلِ الْجَزَاءُ فِي الْأَخِرَةِ

"Ibnu Shalah berkata: 'Bahwa hukum asalnya adalah menetapkan orang-orang kafir dan mengakui eksistensi mereka. Sebab, Allah tidaklah hendak menghancurkan makhluk dan tidak pula menciptakan mereka untuk dibunuh. Akan tetapi dibolehkan membunuh mereka dengan alasan madlarat yang timbul dari mereka sendiri, bukan sebagai balasan atas kekafiran meraka. Sebab, negeri dunia bukanlah rumah tempat pembalasan karena pembalasan itu kelak di akhirat."[5]

Status non-Muslim dalam negara bangsa adalah warga negara (*muwathin*) yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara yang lain. Mereka tidak masuk dalam kategori-kategori kafir yang ada dalam fikih klasik, yakni *mu'ahad*, *musta`man*, *dzimmi*, dan *harbi*. Karena keempat kategori tersebut lahir dalam konteks negara yang secara mutlak menyatu dengan identitas agama. Perbedaan kepentingan atau agama tidak boleh menjadi alasan permusuhan antara yang satu dengan yang lainnya.

1.4. Pandangan Islam tentang produk perundangan atau kebijakan negara yang dihasilkan oleh proses politik modern

Produk UU atau kebijakan negara yang lahir dari proses politik moderen adalah bagian dari kesepakatan anak bangsa.Jika produk terse-

---

4 'Adil Ahmad Abdul Maujud dkk, *Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1428 H/2007 M), juz, XXIV, h. 117. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi Fiqh al-Islami*, h. 130-135 dan 788.

5 Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, cet ke-3, 1419 H/1998 M), h. 107.

but tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka bersifat mengikat (*mulzim syar'i*) dan wajib ditaati.[6]

إِذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوبُهُ وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةٌ

"Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkarawajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnahmaka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, makabiladidalamnya terdapat kemaslahatanpublik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkaramubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, -maka tidak wajib dipatuhi-."[7]

وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ إِذَا كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ.

"Ketahuilah, bahwa kewajiban mentaati imam dalam perintah mubah atau sunnah adalah apabila perintah tersebut mengandung kemaslahatan umum".[8]

Di pihak lain pertimbangan apakah suatu produk hukum bertentangan dengan syariat atau tidak harus secara konprehensip mengikuti kaidah metodologis di dalam syariat itu sendiri, termasuk pemahaman tentang posisi dan penerapan dalil-dalil sebagai sumber hukum syar'i.

Perlu dipahami bahwa hukum syari'i adalah hukum yang punya cantolan dengan dalil syar'i, baik langsung atau tidak langsung. Yang langsung itu diambli dalil primer yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedang yang tidak langsung diambil dari dalil-dalil sekunder seperti *qiyas*,

---

6 Lihat Hasil Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang *Relevansi Qanun Wadh'i (Hukum Positif) dan Hukum Syar'i*.

7 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112.

8 Muhammad Arafah al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al- Fikr, t. th.), juz I, h. 407.

ijma', *istihsan*, dll.

Sedangkan hukum syar'i yang langsung ada dua kemungkinan. Pertama diambil dari dalil yang sepenuhnya *qath'i*, baik *wurud* maupun *dalalah*-nya. Kedua, hukum syar'i yang tidak sepenuhnya tidak *qath'i* yaitu bisa *qath'i al-wurud zhanni ad-dalalah*, *zhani al-wurudl qath'i ad-dalalah*, *zhanni al-wurud wa ad-dalalah*.

Apabila disimpulkan adanya pertentangan antara hukum positif dengan hukum syar'i maka harus dikoreksi dengan cara-cara konstitusional dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melawan pemerintah yang sah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ» : وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَالحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Dari Ibnu Umar ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda: 'Mendengar dan kepatuhan itu wajib bagi seorang muslim dalam hal yang ia sukai dan ia benci selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan maka ia tidak boleh mendengarkan dan mematuhinya'. Dan dalam bab ini juga terdapat riwayat yang serupa dari Ali, Imran bin Hushain dan al-Hakam bin Amr al-Ghiffari. Dan menurut at-Tirmidzi hadits ini tersebut masuk dalam kategori hadits hasan-shahih."[9]

قوله (اَلسَّمْعُ) ... قَالَ الْمُطَهَّرُ يَعْنِي سَمْعُ كَلَامِ الْحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَوَاءٌ أَمَرَهُ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الْإِمَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ لِلْأَحَادِيثِ

9 HR. At-Tirmidzi

الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ

"Sabda Rasulullah saw "mendengar"...Menurut al-Muthahhar mendengar perintah penguasa (al-hakim) mentaatinya adalah wajib bagi setiap muslim, baik perintah tersebut sesuai dengan selera hatinya atau tidak, dengan syarat penguasa tersebut tidak memerintahkannya kepada kemaksiatan, karenanya jika memerintahkan kepada kemaksiatan maka tidak boleh mentaatinya, namun tetap tidak boleh baginya (muslim) untuk memberontaknya. An-Nawawi di dalam kitab Syarhu Shahihi Muslim menyatakana bahwa menurut jumhurul ulama ahli sunnah baik dari kalangan fuqaha`, ahli hadits maupun kalangan teolog, bahwa imam tidak boleh dilengserkan karena kefasikan, kezaliman, dan menelantarkan hak pihak lain, bagitu juga tidak boleh memberontaknya, tetapi wajib menasehati dan memperingatkanny berdasarkan sejumlah hadits yang menjelaskan masalah tersebut."[10]

1.5. Sikap NU terhadap konflik di berbagai belahan dunia

Konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam, baik konflik di antara mereka sendiri maupun kalangan non muslim, menuntut adanya resolusi perdamaian. Dalam konteks ini NU memandang bahwa upaya memperjuangkan perdamaian dunia merupakan kewajiban agama karena merupakan upaya untuk mengakhiri fitnah. Sedangkan melibatkan diri ke dalam konflik berarti memperbesar fitnah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي فَقَالَا أَلَمْ يَقُلْ اللهُ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ

10 Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), juz, V, h. 298.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu anhuma, datang kepadanya dua orang laki-laki terkait fitnah yang menimpa Ibnu Zubair. Mereka berkata: ‘Sesungguhnya orang-orang telah berbuat sesuatu kepada Ibnu Zubair, sementara engkau adalah Ibnu Umar dan sahabat Nabi. Apa yang menghalangimu untuk turut serta dalam masalah ini? Ibnu Umar menjawab, ‘Yang mencegahku adalah bahwa Allah telah mengharamkan darah saudaraku (muslim)’. Mereka kembali bertanya: ‘Bukankah Allah berfirman “…dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 193). Lantas Ibnu Umar menjawab, ‘Kami telah berperang agar tidak ada lagi fitnah dan agama ini menjadi milik Allah. Sementara kalian berperang agar menimbulkan fitnah dan agama ini menjadi milik selain Allah.”[11]

Memperjuangkan perdamaian juga bagian dari sikap adil yang menjadi perintah al-Qur’an, meskipun terhadap orang yang dibenci.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah , karena adil iu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[12]

Disamping itu merujuk pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, NU merekomendasikan “…agar pemerintah aktif terlibat dalam penyelesaian konflik terutama yang melibatkan umat Islam seperti konflik Palestina-Israel, konflik di Thailand Selatan, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam kesederhanaan dan kesetaraan sekal-

11 HR. Bukhari

12 QS. Al-Maidah [5]: 8.

igus menghilangkan ego-ego sejarah, ideologi, ekonomi dan politik. Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini perlu ditingkatkan, termasuk memfasilitasi ormas-ormas keagamaan untuk melakukan mediasi tersebut sebagai bagian dari second track diplomacy.

Karena itu terhadap konflik yang terjadi di belahan dunia, NU memilih sikap untuk memperjuangkan perdamaian ketimbang melibatkan diri ke dalam konflik.

HASIL KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2019

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 04/KONBES/III/2019

Tentang:

PROGRAM NAHDLATUL ULAMA

Konferensi Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang

a. Bahwa Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama adalah forum permusyawaratan tertinggi kedua di organisasi Nahdlatul Ulama untuk menetapkan Program Nahdlatul Ulama yang merupakan pedoman kerja bagi Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat sesuai dengan khittah dan tujuan didirikannya Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtima'iyah Nahdlatul Ulama;

b. Bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat;

c. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari masyarakat bangsa sejak kelahirannya bertekad memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

d. Bahwa Nahdatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtima'iyah yang bergerak dibidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, dan

berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmatnya;

e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 perlu menetapkan Program Kerja Nahdlatul Ulama tahun keempat dalam masa khidmat 2015-2020.

Mengingat

a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926.

b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019.

Memperhatikan

a. Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah Iftitah Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H /27 Februari 2019 M;

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Program yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019;

c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N
Menetapkan:

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG PROGRAM NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2019-2020;

Pertama	:	Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Program Nahdlatul Ulama sebagai pedoman kerja Nahdlatul Ulama masa khidmat 2019-2020;
Kedua	:	Mengamanatkan kepada Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program yang ditetapkan dalam Program Nahdlatul Ulama;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di	:	Kota Banjar
Pada tanggal	:	24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2019

PIMPINAN SIDANG PLENO

H. Robikin Emhas, SH., MH.	Dr. KH. Marsudi Syuhud
Ketua	Sekretaris

HASIL KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2019

KOMISI PROGRAM

Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama
Komisi Program
Pondok Pesantren
Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari - 1 Maret 2019
KETUA
WAKIL KETUA

PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

Sebagai Permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama (NU) setelah Muktamar, Konferensi Besar (Konbes) merupakan forum yang strategis posisinya. Konbes NU 2019 di Banjar, Jawa Barat merupakan Konferensi Besar kedua, setelah penyelenggaraan Munas-Konbes 2017 di Mataram, NTB. Pertemuan yang dihadiri 34 Pengurus Wilayah se Indonesia ini sangat penting untuk mengevaluasi perkembangan pencapaian amanah Muktamar Jombang 2015 hingga akhir tahun 2018. Muktamar NU Jombang 2015 mengamanahkan pengembangan 9 bidang dasar; yakni (1) Penguatan dan Penyebaran Ajaran Aswaja, (2) Pengembangan Kualitas SDM, (3) Kaderisasi, (4) Pendidikan Politik Jamaah NU, (5) Pelayanan Kesehatan, (6) Ekonomi Kerakyatan, (7) Ketenagakerjaan, (8) Pendidikan dan Perlindungan Hukum, (9) Penguatan Organisasi dan Kelembagaan. Disamping itu, ditetapkan 4 program prioritas yakni; Bidang Pendidikan, (2) Bidang Kesehatan, (3) Bidang Ekonomi dan (4) Bidang Kaderisasi.

Penyelenggaraan Munas Konbes Banjar, Jawa Barat 2019 mempunyai nilai strategis, mengingat menjelang masa akhir kepengurusan PBNU pada tahun 2020, sehingga tidak hanya dibutuhkan identifikasi pencapaian program sampai akhir Desember 2018, namun penting sekali mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2019-2020. Dalam periode 2017-2018 situasi dan kondisi internal dan eksternal PBNU mengalami pelbagai perubahan. Perubahan – perubahan kebijakan tentunya sangat mempengaruhi rencana kerja PBNU kedepan, sehingga dibutuhkan penyesuaian perencanaan program sampai akhir periode kerja PBNU 2020.

Secara sistematis *langkah pertama* Komisi Program Panitia Munas

-Konbes Banjar, Jawa Barat 2019 sebagai berikut; *Pertama* memahami kembali Hasil Komisi Program Muktamar Jombang 2015, Hasil Rapat Kerja PBNU-1 di Acasia Hotel-Jakarta, 2015, Hasil Rapat Kerja PBNU-2 di Kantor PBNU, Jakarta, 2016 dan Hasil Rapat Pleno di Kempek-Cirebon serta Hasil Komisi Program Munas Konbes-1 di Mataram, NTB tahun 2017. *Langkah Kedua*, melakukan pengumpulan informasi pencapaian unit pelaksana program yang terdiri dari Lembaga dan Badan-badan otonom serta badan khusus dan panitia *ad hoc* PBNU, terutama terkait dengan 9 program dasar dan 4 bidang prioritas, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kaderisasi dalam periode 2017 hingga Desember 2018. *Langkah Ketiga,* mengidentifikasi permasalahan umum dan pelbagai isu-isu strategis, yang mencakup tantangan dan peluang eksternal serta kelemahan-kelemahan internal yang diasumsikan akan mempengaruhi pencapaian amanah Muktamar sampai akhir periode 2020.

Peserta Munas-Konbes Banjar, Jawa Barat 2019 melalui Sidang Komisi Program akan melakukan pendalaman, membuat kesepakatan dan rekomendasi atas pelbagai isu strategis terkait dengan pelaksanaan program di masa mendatang.

Dengan memohon hidayah dan *mau'nah* dari Allah SWT dan *syafa'at* dari Nabi Muhammad SAW kita berharap draf ini dapat dipahami, mendapat masukan dan komentar sehingga hasil kesepakatan Komisi Program dapat seperti yang kita harapkan. Semuanya ini perlu dijalankan dengan keikhlasan dan berharap menjadi amal dan ibadah kita.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, Maret 2019

Dr. Syahrizal Syarif, MPH, PhD
Ketua Komisi Program
Munas-Konbes Banjar, Jawa Barat 2019

PANITIA MUNAS-KONBES NU BANJAR – JAWA BARAT 2019
KOMISI PROGRAM

Ketua : **Syahrizal Syarif**
Sekretaris : **Suwadi D Pranoto**
Anggota : Ali Masykur Musa
Anggia Ermarini
Ferry Rahman
Hisyam Said
Ali Yusuf
Ahmad Sudrajat
Muhammad Afifi
Hendro S
Ahmad Nurul Huda
Fathu Yasik
Arifah Fauzi
Dwi Winarno

PROGRAM KERJA NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2019-2020

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Program Kerja Nahdlatul Ulama masa kerja 2019-2020 merupakan bagian dari Program Kerja Nahdlatul Ulama 2015-2020 sebagai hasil Muktamar NU Jombang, Jawa Timur 2015. Program Kerja ini disusun berdasarkan tiga langkah utama, yaitu pertama, identifikasi program dasar dan program prioritas berdasarkan amanah Muktamar NU Jombang 2015 yang kemudian mendapat penajaman dalam Rakernas PBNU 1 di hotel Acasia, Jakarta, Rakernas PBNU 2 di kantor PBNU, Kramat Raya 164, Jakarta dan Rapat Pleno PBNU di Pesantren Kempek, Cirebon, serta Munas-Konbes Mataram, NTB, 2017 sejalan dengan perubahan dan tantangan di lingkungan internal dan eksternal PBNU. Pada dasarnya terdapat 9 Program Dasar dan 4 program Prioritas yang terdiri atas; Program di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi kerakyatan dan bidang kaderisasi.

Kedua, pencapaian yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program, yaitu Lembaga, Badan Otonom dan Pengurus Wilayah serta Badan Khusus dan Panitia *Ad Hoc* yang dibentuk oleh PBNU pada periode tahun 2017 hingga Desember 2018. Ketiga, identifikasi berbagai isu strategis dan hambatan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik pada aspek internal institusi maupun situasi kondisi eksternal unit pelaksana program.

Melalui Sidang Komisi Program pada Munas-Konbes Banjar, Jawa Barat 27-28 Februari–1 Maret 2019, maka materi program kerja akan dibahas dan mendapat pengesahan melalui Sidang Pleno pada tanggal 1 Maret 2019. Program Kerja Nahdlatul Ulama masa Khidmat 2019-2020 menjadi acuan untuk pelaksanaan program PBNU hingga akhir masa kepengurusan PBNU 2020.

Penyusunan program kerja ini merupakan hasil kerja Panitia Pusat Komisi Program Munas–Konbes 2019 melalui rapat-rapat Sidang

Komisi dan Diskusi Kelompok Terarah dengan membahas topik-topik tertentu sehingga didapat pengayaan dan pendalaman topik yang dibawakan oleh narasumber ahli pada bidangnya. Adapun beberapa topik yang berhasil diselenggarakan, antara lain FGD bidang ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, kaderisasi, dan kebencanaan. Juga ditelaah dokumen yang terkait dengan MoU, Laporan Lembaga dan Badan Otonom, serta kegiatan Badan *Ad Hoc* yang dibentuk untuk kegiatan tertentu. Telaah dokumen terutama untuk melihat aspek pencapaian program, ruang lingkup kegiatan, sasaran, dan sumber pembiayaan. Di samping itu diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program.

Draft Program kerja in akan dibahas melalui Sidang Komisi Program Munas-Konbes Banjar 2019 dengan terlebih dahulu dibahas di masing-masing pengurus wilayah, sehingga mendapat pendalaman terutama terkait dengan aspek relevansi dan dampak program di tingkat Wilayah.

Secara sistematis, Program kerja ini dimulai dengan analisis stakeholder yang mencakup kebijakan eksternal dan internal PBNU yang mempengaruhi arah dan pelaksanaan program PBNU, Visi, Misi, Program Dasar, Pencapaian Program dan Permasalahan umum serta rekomendasi bagi pelaksanaan program hingga tahun 2020. Permasalahan umum maupun khusus tiap bidang dan rekomendasi akan menjadi fokus utama pembahasan dan kesepakatan dalam sidang – sidang komisi program dalam Munas-Konbes di Banjar, Jawa Barat 2019.

1.2. ANALISIS STAKEHOLDERS

Analisis *Stakehoders* dilihat dari 2 aspek; eksternal dan internal. Perhatian diberikan pada aspek kebijakan atau perundang-undangan yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi NU dimasa depan.

1.2.1. Eksternal

Pemerintah pada tanggal 10 Juli 2017 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (Perppu) no 2 tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Perppu ini sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. PBNU sangat mendukung keluarnya Perppu tersebut. Pada 1 Agustus 2017 berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 di atas, melalui SK Menhukham No AHU 01.08.tahun 2017 Hizbut Thahir Indonesia (HTI) dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Pada 6 September 2017, keluar Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Perpres ini menjadi hasil akhir dari kegigihan Ketum PBNU dan seluruh jajaran NU hingga di daerah untuk menolak kebijakan 5 hari sekolah yang dicanangkan Mendikbud melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah yang jelas akan menggerus eksistensi ribuan Madrasah Diniyyah di lingkungan NU.

UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – BPJS terdiri atas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. Sistem Jaminan sosial ini akan sangat berdampak pada masyarakat khususnya kaum Nahdliyin karena berada dalam strata masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Amanah bagi PBNU agar kaum Nahdliyin mendapat manfaat yang maksimal atas keluarnya Undang Undang terkait Jaminan sosial ini. Di samping itu implementasi dari undang-undang ini juga akan berdampak pada pemberian pelayanan kesehatan baik pada tingkat pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (Klinik Pratama) maupun rujukan (Rumah sakit) di lingkungan NU. PBNU harus mengambil kesempatan atas terbukanya peluang untuk menjadi pemberi pelayanan kesehatan. Tahun 2019, seluruh penduduk Indonesia diharapkan telah tercakup dalam BPJS (Universal Coverage) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan reforma agraria, percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah rakyat, dan perhutanan sosial dalam rangka melakukan redisribusi lahan di tanah yang lebih berkeadilan. Tidak kurang 12 juta sertifikat tanah rakyat telah dise-

rahkan. Sementara lahan sosial telah dibagikan 1.3 juta hektar telah dibagikan dan 3 juta hektar ditargetkan pada tahun 2019. Adapun undang undang reforma agraria sedang dalam proses penetapan. Nahdlatul Ulama secara terus menerus menyuarakan perlunya reformasi agraria yang lebih adil sehingga lahan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang tertentu saja dan seseorang atau kelompok memiliki lahan ratusan ribu hektar bahkan jutaan hektar.

Badan Pusat Statistik mengumumkan pada bulan Pebruari 2019 bahwa pendapatan per kapita orang Indonesia mencapai Rp 56 juta atau US$ 3.927 per tahun, yang menempatkan Indonesia naik menjadi negara kelas menengah atas. Dengan asusmsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5.1% diperkirakan pada tahun 2045 pendapatan per kapita Indonesia bisa mencapai US$19.794. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik ini harus menjadi peluang bagi PBNU untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nahdliyin dengan terobosan di bidang ekonomi kerakyatan.

Tahun 2019 dinyatakan sebagai tahun politik karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara serentak akan melakukan pemilihan Presiden – wakil presiden, anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab dan DPD dalam waktu serentak pada tanggal 17 April 2019. Keadaan ini akan sangat mempengaruhi politik warga NU, apalagi pada saat ini KH Makruf Amin yang merupakan mantan Rais 'Aam PBNU menjadi calon wakil Presiden Joko Widodo. Situasi ini akan sangat mempengaruhi perkembangan NU di masa depan.

1.2.2. Internal

Pelaksanaan program-program NU sangat tergantung dari bekerjanya fungsi dan tugas pokok unit pelaksana program yang terdiri atas Lembaga, Badan Otonom dan Panitia *Ad Hoc* yang dibentuk PBNU sesuai kebutuhan. Pelaksanaan Program ini harus mendapat dukungan penuh dari fungsi kesekretariatan dan mendapat arahan, pembinaan, koordinasi dari Ketua PBNU sesuai penugasan bidang masing-masing. Pelaksanaan program harus sejalan dan mengarah pada pencapaian dan target yang yang telah ditetapkan dalam Muktamar NU

2015 di Jombang. Perencanaan tahunan perlu dilakukan oleh setiap unit pelaksana program. Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan adanya instrumen kendali manajemen berupa supervisi, monitoring dan evaluasi. Mekanisme rapat harus berjalan dengan baik demikian juga sistem informasi, dokumentasi dan sistem pelaporan sesuai kerangka waktu, tiga bulanan, semester dan tahunan. Ada tidaknya pedoman pengelolaan manajemen dan pedoman keuangan juga sangat mempengaruhi kredibilitas Lembaga dan badan otonom.

Fungsi pembinaan oleh Ketua PBNU yang membawahi Lembaga dan wilayah dengan baik berdampak pada belum baiknya komunikasi, koordinasi dan integrasi antar Lembaga dan BANOM yang sering kali melahirkan program yang tumpang tindih. Fungsi ini perlu ditingkatkan di masa mendatang.

Sampai saat ini pendataan anggota melalui kartu anggota NU (kartanu) belum berjalan dengan baik, padahal disadari merupakan potensi pendanaan organisasi secara mandiri. Namun saat ini terjadi perkembangan yang mengembirakan terkait kemandirian organisasi di masa depan. Berfungsinya LAZISNU dengan baik ternyata menimbulkan harapan potensi dana mandiri yang besar, juga aktifitas mengumpulan KOIN-NU di beberapa daerah berkembang sangat luar biasa. Perkembangan yang mengembirakan juga pada bidang pendidikan, kesehatan, kaderisasi dan LAZISNU – NU Peduli.

Meningkatnya jumlah Perguruan Tinggi NU menjadi 34 UNU, meningkatnya pengelolaan dan pengembangan program LP Maarif, berdirinya PAUD diwadahi Muslimat NU dan majunya kegiatan RMI yang berdampak pada berkembangnya Pesantren di lingkungan NU. Banyaknya kader-kader NU yang mendapat beasiswa di berbagai bidang di China, Mesir, Inggris, Australia dan USA juga di dalam negeri sangat mengembirakan. Aktivitas PCI NU di luar negeri juga sangat membanggakan.

Bidang kesehatan sangat berkembang dalam hal penataan organisasi, dengan berdirinya badan pelaksana kesehatan, asosiasi rumah sakit NU, Asosiasi PT Kes NU hingga berdirinya Perhimpunan Dokter NU yang berada sebagai badan semi otonom ISNU. Di samping itu, LKNU juga mendapat kepercayaan untuk melakukan berbagai ke-

giatan terkait penanggulangan penyakit HIV/AIDS, TB, Stunting dan Diabetes Melitus tipe-2.

Bidang kaderisasi program Madrasah Kader NU, PKP-NU, kader Dai muda dan pelatihan takmir masjid telah dilakukan secara masif yang akan berdampak pada peningkatan kapasitas pengurus struktur NU di pelbagai tingkatan di masa depan. Di samping itu GP Ansor, Fatayat, IPPNU dan IPNU juga telah mempunyai sistem pengkaderan yang baik.

Program NU Peduli yang digerakkan oleh wakil ketua umum dan beberapa ketua PBNU terkait dengan dukungan LAZISNU, LPBINU, LKNU, Banser Bagana, UNUSIA dan lain-lain, telah mampu membawa bendera kemanusiaan NU Peduli di kancah kebencanaan Nasional dengan kerja nyata baik pada tahap tanggap darurat, transisi dan rehabilitasi di daerah bencana Propinsi NTB, SULTENG, Banten dan Lampung. Bahkan telah berhasil diselenggarakan Saresehan Kebencanaan di Lampung.

Adanya inisiasi menuju kemandirian finansial melalui NU-Cash dan Koin NU patut mendapat dukungan secara organisatoris. Demikian pula dengan inisiasi pendirian Omnus-Mart. Kesemua ini membutuhkan keterbukaan dan kerja professional untuk bisa maju, terutama memberi kesempatan bagi semua warga NU untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kesejahtaraan ini.

Hal yang paling menonjol dalam tahun 2018 adalah peran NU sebagai garda terdepan penjaga NKRI dan menjaga kesatuan bangsa dengan mengedepankan Islam Nusantara. Posisi ini membuat NU berhadapan langsung dengan pengusung paham kekhalifahan, Wahabi, kelompok radikal dan kelompok teroris yang mengatas namakan gerakan Islam. Lagu Subhanul Wathon telah menjadi lagu wajib dalam seluruh acara resmi NU sebagai komitmen cinta tanah air warga NU. Islam Nusantara ternyata tidak hanya mendapat respon positif dari dalam negeri melainkan juga di dunia Internasional. Dunia menilai pandangan Islam Nusantara dan Moderasi NU sebagai faktor penting yang membuat kehidupan masyarakat di Indonesia aman, jauh dari keadaan kehidupan umat Islam di Timur Tengah yang terus dilanda konflik.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI NU

Menjadi ***Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtima'iyah*** yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

2.2. MISI NU

NU mempunyai misi;

2.2.1. Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang) dan *I'tidal* (bersikap adil), serta *Tasamuh* (Toleran).

2.2.2. Mengembangkan beragam khidmah bagi jamaah NU guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah NU.

2.2.3. Mempengaruhi para penetap kebijakan maupun Undang Undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.

2.3. TUJUAN

Tujuan NU antara lain;

1. Terbentuknya karakter jamaah NU yang mencerminkan nilai-nilai *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang) dan *Tasamuh* (toleran), dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi.

2. Terbangunnya jami'yah maupun jamaah NU yang memiliki kemandirian di bidang ekonomi, sosial dan politik.

3. Menguatnya peran, fungsi manajemen kelembagaan, sistem informasi manajemen di semua tingkatan.

4. Berkembangnya fasilitas dan model peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta kaderisasi.
5. Meningkatnya jaringan dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam maupun luar negeri.

3. PROGRAM DASAR

Program dasar merupakan amanah Muktamar NU Jombang, Jawa Timur 2015 yang telah mendapat pendalaman dalam pertemuan Rakernas PBNU 1 di Hotel Acacia Jakarta, Rakernas PBNU 2 di Gedung PBNU, Jakarta, Rapat Pleno PBNU di Pesantren Kempek, Cirebon serta Munas Kombes Mataram, NTB 2017.

3.1. Penguatan dan Penyebaran ajaran Aswaja

Warga Nahdlatul Ulama menghadapi ancaman dari ideologi/paham/ajaran Islam transnasional. Kelompok Islam transnasional memandang sesat praktek, tradisi dan amaliah NU. Serangan dilakukan melalui media cetak maupun elektronik, diskusi dan seminar serta kegiatan dakwah lainnya. Warga Nahdliyin resah bahkan dapat ragu atas apa yang diyakini. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar praktek tradisi Islam Aswaja. Juga kurangnya bimbingan dari para pemimpin, tokoh maupun pengurus NU.

Untuk itu, NU perlu menguatkan pemahaman warga NU terhadap dasar-rujukan tradisi dan amaliah NU, sekaligus menyebarluaskan ajaran Islam *a la Ahlusunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah* (Aswaja). Aswaja *an-Nahdliyah* merupakan ajaran Islam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui transmisi dan genealogi atau jalur sanad yang sah dan terpercaya sampai kepada Rasulullah SAW, sahabat dan pengikutnya.

Pemahaman NU berada pada jalan tengah di antara dua kutub ekstrim yaitu ekstrim 'aqli dan ekstrim naqli. Karakter Aswaja *an-Nahdliyah* diterjemahkan secara operasional sebagai; *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (tegak lurus) dan *tasamuh* (toleran), baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam kehidupan sosial

kemasyarakatan.

Penguatan Aswaja *an-Nahdliyah* ditujukan bagi Pengurus NU, kader maupun jamaah NU di seluruh penjuru, daerah terpencil maupun daerah transmigrasi. Hal ini untuk membangun kesamaan pemahaman tentang nilai perjuangan, paham Aswaja dan menjadi landasan organisasi di lingkungan NU. Penyebaran Aswaja juga perlu kepada pihak di luar NU dalam dan luar negeri dalam rangka mewujudkan perdamaian, ketentraman ummat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Penguatan dan penyebarluasan Aswaja *an-Nahdliyah* melalui program Pendidikan formal di madrasah/sekolah/perguruan tinggi, kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, kegiatan diskusi, seminar/workshop, saresehan tingkat nasional, regional maupun internasional dan kegiatan dakwah lainnya. Dapat juga dilakukan melalui media elektronik (Online, TV, Radio) maupun media cetak, seperti jurnal, majalah buletin, booklet, buku saku, dll.

Hasil yang diharapkan

1. Tersusunnya standardisasi materi Aswaja baik untuk lingkungan internal NU maupun bagi khalayak luas.
2 Penjabaran Islam Nusantara sebagai strategi kebudayaan Aswaja dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni-budaya Islami, meneguhkan pilar-pilar kebangsaan dan penguatan peradaban manusia.
3. Aswaja *an-Nahdliyah* menjadi panduan pemikiran, amaliah dan gerakan NU.
4. Nilai-nilai serta karakter Aswaja (tawassut, tawazun, tasamuh) menjadi tuntunan kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
5. Adanya da’i Aswaja di setiap PCNU dan pos-pos strategis.

3.2. Pengembangan Kualitas SDM

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan. NU telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menata kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan hankam. Sumber daya manusia NU merupakan asset, sebagai modal sosial dan pelaku utama Jam'iyah menjadi kekuatan untuk menggerakkan Jam'iyyah maupun Jama'ah NU.

NU sebagai Jam'iyyah maupun Jama'ah sangat diperhitungkan oleh komponen bangsa ini dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegera sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Sumber Daya Manusia yang memiliki intergitas, dibentuk melalui program kaderisasi yang berkelanjutan, massif dan didukung tenaga professional, di samping melalui lembaga pendidikan.

Pendidikan sebagai ikhtiar membangun karakter Asawaja yakni memiliki cara berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran Aswaja. Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal di lingkungan NU perlu di bawah satu atap yaitu badan pengembangan, pengelolaan, penyelenggaran pendidikan. Badan tersebut memiliki struktur dari pusat, wilayah sampai tingkat cabang. Badan tersebut juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum, standarisasi manajemen, insfratruktur dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan dan pendirian pendidikan di lingkungan NU diharapkan berada dalam satu payung hukum yaitu Badan Hukum Perkumpulan NU (BHP-NU). Adapun pendidikan yang dimaksud terdiri dari:

- Pendidikan formal yang diselenggarakan di madrasah/sekolah/ Pesantren, baik kejuruan maupun umum, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- Pendidikan non formal atau informal yang diselenggarakan di Pesantren, Raudlotul Atfal (RA), PAUD, majlis taklim, kursus keterampilan dan pelatihan. dll.

Hasil yang diharapkan Bidang Pendidikan;

1. Terbentuk manusia berkarakter Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mabadi' khaira Ummah yang mampu beradaptasi dengan perkembangan peradapan yang dipengaruhi revolusi industri 4.0.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren, Pendidikan dasar dan menengah di lingkungan LP Maarif, dan Perguruan Tinggi – Universitas Nahdlatul Ulama.
3. Terbentuknya Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP)- NU sebagai keterwakilan PBNU dalam Perguruan Tinggi.
4. Berdirinya lembaga pendidikan tinggi, sekolah tinggi, diploma, vokasional, dan madrasah, di semua tingkatan Propinsi/ Wilayah, Kabupaten/ Cabang.
5. Mengupayakan beasiswa bagi peserta didik di setiap perguruan tinggi dan beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk staf pengajar.
6. Mengembangkan kerjasama antar Lembaga Pendidikan baik sesama Lembaga Pendidikan di dalam maupun luar negeri.

3.3. Kaderisasi

Kaderisasi perlu dilakukan bagi jamaah yang berada di struktur organisasi NU maupun non struktur, dilakukan secara formal maupun non formal berkelanjutan dan berjenjang.

Pengembangan sumber daya manusia, berorientasi pada pengenalan diri secara terpadu antara aspek objektifitas dan subyektifitas. Pengembangan aspek obyektifitas membangkitkan semangat melawan dan mengubah keadaan yang tidak diinginkan menjadi realitas yang diharapkan. Sedangkan pengembangan aspek subyektifitas harus mampu membangkitkan semangat untuk memperbaharui peran sesuai dengan realitas yang diharapkan. Obyektifitas berkaitan dengan tindakan (aksi), subyektifitas terkait dengan pemikiran (refleksi). Daur aksi refleksi akan terus berulang, diharapkan melahirkan kesadaran baru guna mengubah keadaan di lingkungan NU.

Kaderisasi di lingkungan NU dilakukan melalui:

- Pendidikan kader :
  a. Kader struktural melalui Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU), yaitu bagi pengurus NU di semua tingkatan (mulai dari tingkat PBNU sampai dengan Ranting), Pengurus Lembaga, Lajnah dan pengurus Badan otonom. Sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam memimpin, menggerakkan warga dan mengelola organisasi.

  b. Kader Keulamaan melalui Program Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK), yaitu menyiapkan calon pengurus Syuriah NU di semua tingkatan kepengurusan NU, juga di lingkungan pesantren dan luar pesantren. Sebagai upaya untuk melahirkan ulama muda yang siap menjadi pengurus Syuriah.

  c. Kader Penggerak melalui Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKP NU), yaitu kader NU yang memiliki tugas khusus memperkuat, mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan dan ideologi NU sebagai jiwa dan perekat dalam menggerakan warga dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sosial, berbangsa dan bernegara untuk tegaknya Islam Aswaja.

  d. Kader Fungsional, yaitu menyiapkan kader yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai:
     - Pelatih/fasilitator/instruktur, dalam kegiatan pelatihan maupun pendidikan untuk kaderisasi.
     - Peneliti, yang diharapkan mampu menjalankan kegiatan penelitian di lingkungan NU.
     - Pemimpin Tim untuk kegiatan Bahtsul Masail.
     - Pemimpin Tim untuk menyelenggarakan rukyatul hilal.
     - Pendamping/penggerak/penyuluh/pemberdayaan masyarakat.

  e. Kader Profesional, yaitu kader NU yang disiapkan bisa memasuki posisi tertentu yang berada di eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi maupun di perusahaan negara, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.

- Mempromosikan, menempatkan dan memfasilitasi kader NU dalam berbagai peluang posisi, di tingkat nasional maupun Internasional. Hal ini agar terjadi mobilitas horizontal maupun vertikal bagi para kader NU.

Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya kinerja Lembaga dan Badan Otonom serta badan khusus PBNU dan kinerja PWNU, PCNU, MWC dan Ranting.
2. Tersusun Model Kaderisasi dan Penyelenggaraan yang lebih sistematis dan mempunyai instrumen monitoring dan evaluasi yang baik.
3. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Nasional yang dikelola secara profesional. Badan penyelenggara kaderisasi MKNU, PPWK, Penggerak NU, Fungsional dan kader Profesional.
4. Lahirnya para kader terlatih, kader struktural, kader keulamaan, kader penggerak NU, kader fungsional, relawan pendamping desa, pemimpin penyelenggara Bahtsul Masail serta pemimpin pemantau rukyatul hilal.
5. Terselenggaranya penyelenggaraan kaderisasi di masing-masing perangkat organisasi NU di semua tingkatan secara terencana dan berkelanjutan.

3.4. Pendidikan Politik Jama'ah NU

Terjadi perubahan sosial politik mendasar di masa reformasi seperti amandemen UU Dasar 45, muncul berbagai UU maupun kebijakan yang baru. Peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan menjadi lebih penting. Sistem desentralisasi dengan kebijakan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan kekuasaan besar pada pemerintahan daerah, kabupaten/ kota. Kebijakan tersebut memungkinkan terbukanya ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat menjadi hak asasi manusia. Partisipasi di bidang politik bisa

dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan UU maupun kebijakan lebih berorientasi kepada kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pro rakyat miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya.

NU sebagai jamaah maupun sebagai jam'iyah merupakan salah satu komponen bangsa yang senantiasa mendorong negara untuk memberikan perhatian dan pemihakan kepada kelompok masyarakat yang termarjinalkan, masyarakat tereksklusi maupun masyarakat miskin (*al-mustadl'afien*).

Hasil yang diharapkan

1. Tumbuhnya kesadaran jama'ah NU tentang posisi NU sebagai komponen bangsa pendiri dan pengawal NKRI, Pancasila, dan senantiasa mengawal, mengamankan negara dari ancaman kelompok radikal.
2. Tumbuhnya kesadaran pengurus maupun jama'ah NU tentang pentingnya terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan di tingkat desa serta pengawalan terhadap pelaksanaannya.
3. Tumbuhnya kesadaran pengurus maupun jama'ah NU untuk mengkritisi dan terlibat secara aktif dalam rancangan UU, kebijakan pembangunan di semua bidang, di tingkat Nasional maupun daerah. Perlu dijaga agar UU/ kebijakan mencerminkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, etika, moral dan nilai dasar ke aswajaan.

3.5. Pelayanan Kesehatan

NU merupakan mitra pemerintah dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Dalam tiga puluh tahun terakhir telah terjadi peningkatan kesehatan masyarakat yang signifikan. Angka Kematian Bayi telah turun dengan drastis, walau angka

kematian ibu masih tinggi dibanding dengan angka kematian ibu di negara tetangga ASEAN lainnya.

Umur Harapan Hidup saat ini sudah 72 tahun, dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa (BPS, 2018), dimana 53 juta jiwa (20%) adalah kelompok kelas menengah yang menjadi tumpuan perkembangan ekonomi Indonesia. Dari sisi kesehatan, Indonesia masih menghadapi beban penyakit menular, terutama TB, Malaria dan diare. Meningkatnya kelompok kelas menengah menimbulkan beban penyakit tidak menular, seperti Stroke, Kanker, Diabetes, penyakit jantung. Di samping itu, Indonesia juga masih mempunyai beban HIV/ AIDS dimana Indonesia merupakan negara dengan jumlah kejadian HIV baru tercepat di ASEAN.

NU perlu terlibat dalam penetapan kebijakan di bidang kesehatan, penguatan sistem kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan dimanfaatkan. Selain itu juga harus terlibat dalam penggerakan mobilisasi masyarakat, dan upaya perubahan perilaku sehat.

Penguatan SDM yang berkualitas di lingkungan NU melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan melalui; pelayanan kesehatan di tingkat desa, Fasilitas Rumah sakit, Klinik maupun Balai Pengobatan. Untuk mempercepat pembangunan fasiltas pelayanan kesehatan di lingkungan NU yang masih terbatas, maka dirasakan perlu adanya badan khusus yang melakukan percepatan pendirian fasilitas kesehatan. Badan tersebut memiliki struktur organisasi di tingkat pusat, wilayah dan cabang NU, bertanggung jawab langsung kepada PBNU.

Badan Penyelenggara Bidang Kesehatan Nahdlatul Ulama (BPBK-NU) akan melakukan standarisasi bidang pengelolaan/manajemen, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis dan pengembangan pelayanan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik yang berbasis

masyarakat, maupun pusat pelayanan kesehatan (RS, Klinik, Balai Pengobatan Rumah Bersalin).

2. Berdiri Badan Penyelenggara Bidang Kesehatan Nahdlatul Ulama (BPBK-NU), struktur organisasinya di tingkat pusat, wilayah, sampai tingkat Cabang. Dewan pengurus di wilayah di tunjuk PWNU ditetapkan PBNU, di cabang ditunjuk PCNU ditetapkan PBNU.
3. Berdiri Pusat-pusat pelayanan kesehatan di kota/Kabupaten/ PCNU difasilitasi oleh BPBK-NU.
4. Tersedianya berbagai macam alat medis yang sesuai dengan kebutuhan klien/Pasien dan perkembangan ilmu serta teknologi bidang kesehatan.

3.6. Ekonomi Kerakyatan

Visi dan cita-cita NU tercapainya Kesejahteraan dan Rasa Keadilan bagi jamaah NU melalui berbagai program yang dilaksanakan.

Jamaah NU terdiri dari berbagai profesi di antaranya, pedagang (formal dan informal), pengusaha (di bidang jasa maupun non jasa), buruh (sektor formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri), pegawai (negri maupun swasta), konsultan, guru (swasta maupu negeri), ABRI, politisi, nelayan dan petani.

Profesi sebagai petani merupakan bagian besar dari jama'ah NU. Bagi generasi muda NU yang hidup di desa profesi sebagai petani tersebut cenderung ditinggalkan dan lebih memilih pergi ke kota untuk menekuni profesi yang baru sama sekali atau melanjutkan profesinya yang sewaktu di desa juga ditekuni yaitu sebagai tukang bangunan dll. Masalahnya bagaimana NU bisa memberikan perhatian kepada para jama'ah NU dengan profesinya masing-masing itu, mendorong meningkatkan taraf kesejahtaraan maupun rasa keadilan bagi jama'ah NU. Berbagai bidang/sektor yang bisa digunakan sebagai titik masuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan warga/jama'ah di antaranya ialah bidang perekonomian, ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum.

Orentasi pengembangan perekonomian NU melalui berbagai pro-

gam aksi maupun advokasi kedepan hendaknya; *pertama*, bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melibatkan partisipasi pelaku ekonomi yaitu masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. *Kedua,* ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga,* memihak kepada orang miskin, marjinal dan mereka yang tereksklusi terstigma karena agama maupun kepercayaannya. *Keempat,* mendayagunakan sumber daya manusia yang ada secara optimal untuk menjawab melimpahnya tenaga kerja yang tidak bisa masuk dalam pasarkerja, tetapi tidak untuk mengekploitasi. *Kelima,* tidak melakukan kerusakan lingkungan, serta tidak berlebih-lebihan memanfaatkan sumberdaya alam dan menjaga keberlangsungannya. *Keenam,* mengantisipasi terjadinya bonus demografi (2010-2035) dengan mendorong kepada pihak-pihak pengambil kebijakan, agar bonus demografi dimanfaatkan secara optimal bukan malah menjadi petaka buat bangsa ini. Ketujuh, menumbuhkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Perhatian pengembangan sektor pertanian dan perikanan hendaknya menjadi utama karena secara demografis sebagian besar jama'ah NU berada di pedesaan, daerah terpencil maupun wilayah transmigrasi. Apalagi dengan diberlakukannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanpa mengesampingkan sektor ekonomi lain yang berkembang di perkotaan khususnya sektor informal karena secara demografis telah terjadi migrasi penduduk dari desa ke kota secara signifikan yang didalamnya banyak juga jama'ah NU.

Dari sisi pengelola maupun pelaku perekonomian dilingkunan NU mesti berpegang teguh pada prinsip dasar membangun manusia unggul atau "Mabadi Khaira Ummah" (*As-Shidqu*/jujur, *Al-Amanah wal wafa bil 'Ahd*/amanah dan menepati janji, *Al-'Adalah*/ bersikap adil, *At-Taawun*/gotong royong dan tolong menolong, *Al-Istiqamah*/ Konsisten).

Sudah saatnya NU memperkuat jejaring internal pelaku ekonomi kalangan jama'ah NU baik berdasarkan domisili (antar kota, antar propinsi, antar pulau) maupun jenis usaha ekonomi yang di kembangkan, baik secara individu maupun berkelompok. Jejaring tersebut dimaksudkan untuk saling memperkuat usaha masing-masing maupun

secara bersama dibidang produksi, distribusi maupun pemasaran, permodalan dan manajemen menuju terwujudnya perekonomian NU yang kuat dan mandiri.

Seluruh program perekonomian di lingkungan NU akan efektif dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang disebut diatas jika didukung dengan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang dimaksud ialah sebuah Badan Penyelenggara Perekonomian NU (BPP-NU) yang dibentuk untuk itu.

Hasil yang diharapkan

1. Terbentuknya Badan Penyelenggara Perekonomian – NU (BPP-NU) yang berkedudukan di pusat dan memiliki struktur organisasi sampai di tingkat Kab/kota/cabang NU. Bertanggung jawab langsung kepada PBNU, bentuk kelembagaannya terdiri dari dewan pengurus dan dewan pelaksana (executive). Dewan pengurus ditunjuk dan ditetapkan oleh PBNU dengan periode masa jabatan sesuai dengan PBNU. Dewan pelaksana (executive) bekerja secara profesional direkrut dan ditetapkan oleh dewan pengurus. Dewan pengurus di wilayah di tunjuk PWNU di tetapkan PBNU ditingkat cabang ditunjuk PCNU diangkat PBNU.
2. Tumbuhnya kesadaran dan praktek wiraswasta, mengembangkan agroindustri, pertanian, perikanan, perkebunan bagi jama'ah NU.
3. Jama'ah NU dapat memanfaatkan fasilitas yang pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan usaha produktif kreatif, bekerjasama dengan kementrian tenaga kerja mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan, dengan perusahaan swasta untuk *job training*.
4. Terwujudnya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas permodalan bagi UKM melalui lembaga keuangan khusus atau unit kerja khusus di lembaga keuangan yang sudah ada bagi jama'ah NU maupun masyarakat luas, untuk mewujudkan perekonomian yang kuat dan mandiri.
5. Terbentuk dan berfungsinya kelompok usah produktif maupun

UKM jama'ah NU di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam bentuk koperasi maupun non koperasi dalam berbagai sektor perekonomian yang dikembangkan oleh jama'ah NU, sehingga bisa mengakses permodalan serta dukungan manajemen, dan *capacity building* dari Induk Koperasi NU (*Syirkah Mu'awanah*), dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok usaha produktif khususnya dan warga/jama'ah NU umumnya.

6. Terjadinya jejaring antar pelaku ekonomi dikalangan jama'ah NU dalam wadah Perhimpunan Saudagar NU, baik berdasarkan domisili (antar kota, antar propinsi, antar pulau) maupun jenis usaha ekonomi yang dikembangkan, untuk saling memperkuat usaha masing-masing maupun secara bersama di bidang produksi, distribusi maupun pemasaran, permodalan dan manajemen menuju terwujudnya perekonomian NU yang kuat dan mandiri.
7. Meningkatnya peran dan kontribusi NU dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan sebagai pengejawantahan dari "**Arus Baru Ekonomi Indonesia**".

3.7. Tenagakerjaan

Bagian yang masih belum mendapat perhatian yang otimal dari NU ialah terhadap SDM yang masuk dalam lapangan kerja sebagai buruh perusahaan swasta maupun BUMN, baik yang berada di dalam maupun diluar negeri (Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita) termasuk tenaga kerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Tenaga kerja diatas berasal dari desa mayoritas dari keluarga jama'ah NU. Pada TKI/TKW/PRT bisa membantu tumbuhnya kemandirian ekonomi keluarganya. Banyak tenaga kerja yang juga jama'ah NU belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja karena berbagai faktor baik internal perusahaan. Bahkan di antara mereka ada yang mendapat perlakuan tidak adil.

Karena itu perhatian yang besar terhadap SDM NU yang berada dalam sektor ketenagakerjaan akan memberikan kontribusi terhadap membaiknya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Hasil yang diharapkan

1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran para tenagakerja/buruh dari jama'ah NU terhadap hak-haknya serta kewajibannya ditempat kerja mereka masing-masing sehingga dapat memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka.
2. Terkonsolidasikannya para tenaga perkerja/buruh dari jama'ah NU yang tersebar di beberapa regioal kawasan industri maupun pusat-pusat perusahaan pelayanan jasa baik yang di dalam maupun di luar negeri dalam satu wadah organisasi buruh yang dinaungi oleh Sarbumusi NU.
3. Berkembangnya organisasi buruh warga/jama'ah NU dan mampu memperjuangkan dan melindungi hak-hak sebagai buruh baik di sektor formal maupun informal, baik mereka yang ada di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan aturan yang ada.

3.8. Pendidikan dan Perlindungan Hukum

Pengetahuan hak-hak maupun kewajiban sebagai masyarakat terkait dengan masalah-masalah hukum sangat diperlukan. Mereka juga memerlukan perlindungan hukum manakala sedang bermasalah hukum. Pengetahuan yang memadai atas aspek hukum akan juga memberikan percaya diri dalam mengahadapi masalah hukum yang menimpanya. Dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang bisa memberikan ketentraman, ketenangan jika jama'ah NU mendapatkan masalah hukum di tempat kerjanya maupun perkara hukum yang lainnya.

Melalui pendidikan dan perlindungan hukum diharapkan para jama'ah NU memperkuat kemampuan mereka memperoleh hak-hak mereka. Tumbuhnya kepercayaan diri dalam mengelola hidup dan menolak pendekatan kekuasaan, menolak faham serba negara maupun serba penguasa dalam kehidupan bermasyarakat. Itu semua merupakan pintu menuju terwujudnya kesejahteraan dan rasa keadilan bagi mereka.

Hasil yang diharapkan

1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran hukum bagi jama'ah NU sehingga `memahami hak-haknya sebagai warga negara.
2. Setiap jama'ah NU yang sedang bermasalah dengan hukum mendapatkan bantuan hukum dari NU agar bisa memperoleh rasa keadilan atas keputusan masalahnya.
3. Terselenggaranya kajian kritis terhadap berbagai UU, kebijakan maupun peraturan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan cenderung merugikan bagi masyarakat termasuk jama'ah NU. Kajian menjadi bahan advokasi kepada pihak pemangku kepentingan maupun bahan *judicial review* di MK, dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat yang bisa menjadi pintu masuk untuk mewujudkan kesejahteraan maupun rasa keadilan.
4. Terjadinya jejaring di antara lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh jama'ah NU dengan lembaga Advokasi dan bantuan hukum NU di semua tingkatan organisasi NU. Saling mendukung, tukar informasi dan pengalaman serta meningkatkan kapasitas dalam berbagai aspek. Melakukan penyuluhan, pendidikan dan bantuan hukum serta advokasi sebagai pintu masuk tumbuhnya keasadaran hukum dan rasa keadilan warga NU.

3.9. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan

Menjadikan NU *Jam'iyyah Diniyyah Islamiyah wa Ijtima'iyyah* adalah sebagai wadah untuk mencapai visi maupun cita-cita NU secara lebih efektif. Melalui wadah itu bisa dilakukan penataan kelembagaan, organisasi dan program sehingga menjadikan NU sebagai jamiyah yang kuat, efektif dan mandiri dalam berkhidmat kepada warga/jama'ah NU.

Perangkat organisasi sudah dibentuk, dasar berorganisasi dirumuskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga dengan turunannya yang berupa Pedoman Organisasi dan Pedoman Administrasi. Kebijakan operasional dengan aspek kelembagaan, program, keuangan dan aset sudah dirumuskan. Rekomendasi kritis masalah

kenegaraan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan, dirumuskan pada Muktamar, Munas dan Kombes, dipublikasikan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Masalahnya ialah berbagai perangkat, kebijakan, rekomendasi hasil Muktamar maupun Munas dan Kombes belum berjalan optimal. Karena itu perlu langkah pembenahan, pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Pelaksanaan mandat, fungsi, peran dan tanggung jawab serta tugas masing-masing unit pelaksana organisasi di semua tingkatan organisasi NU harus bisa lebih dioptimalkan.

NU perlu mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan berbagai organisasi sosial di dalam dandi luar negeri, organisasi profit maupun pemerintah. Persoalan ketersediaan dana masih menjadi problem besar. Beberapa Cabang NU ternyata mampu melakukan penataan di bidang mobilisasi SDM maupun dana dalam menjawab persoalan kebutuhan dana.

Perlu penataan organisasi antara lain; penataan ulang lembaga maupun lajnah disesuaikan dengan kebutuhan NU, koordinasi dan sinkronisasi kerja-kerja perangkat organisasi NU. Mengefektifkan komunikasi, informasi, koordinasi PBNU dengan jajaran organisasi di bawahnya. Optimalisasi mobilisasi sumber daya serta mengembangkan dan memperkuat jaringan maupun kerjasama dengan pihak-pihak di dalam maupun diluar negeri.

Hasil yang diharapkan

1. Terciptanya penegakan pelaksanaan AD/ART, PO, PA dan Kebijakan NU di semua tingkatan organisasi NU. Fungsi pengawasan Syuriah NU perlu lebih ditingkatkan dan diefektifkan.
2. Terjadinya komunikasi, koordinasi secara periodik antara Lembaga, Lajnah dan Badan otonom dengan pengurus NU di semua tingkatan organisasi. Terjadi sinkronisasi, evaluasi dan bimbingan serta saran-saran terhadap perencanaan maupun pelaksanaan program atau kegiatan Lembaga, Lajnah dan Banom.
3. Terbangunnya budaya organisasi, terciptanya kerja terencana,

efektif , efisien, dalam suasana kerja yang menyenangkan dan sesuai dengan nilai “Mabadi’ Khaira Ummah”.

4. Berlakunya model perencanaan di lingkungan NU yang mengikat untuk semua jajaran di semua tingkatan organisasi NU. Perencanaan dimaksud adalah sebagai berikut:
   - Perencanaan jangka Panjang (untuk masa sepuluh tahun), yang dirumuskan, ditetapkan dan disahkan oleh forum Muktamar NU, tentang Program Dasar NU.
   - Perencanaan Prioritas Program (untuk jangka waktu lima tahun), yang dirumuskan, ditetapkan dan disahkan oleh Forum Rapat Pimpinan Terbatas di tingkat PBNU (Pengurus harian Syuriah dan tanfidziah) melibatkan Ketua dan Sekretaris pengurus Lembaga/Lajnah, Banom dan Pengurus (Ketua+Sekretaris) Wilayah NU, sebagai jabaran dari program dasar 10 tahun. Waktunya segera setelah susunan kepengurusan PBNU maupun Lembaga, Lajnah dilantik.
   - Perencanaan Tahunan yang dirumuskan, ditetapkan dan disahkan dalam forum Rapat Pengurus NU (Pengurus Harian Tanfidziyah) dan Ketua serta Sekretaris Pengurus Lembaga, Lanjah dan Banom di semua tingkatan organsiasi NU, dilaksanakan setiap sekali.
5. Terumuskannya kebijakan dan konsep mobilisasi sumber daya NU, yang bisa menjadi acuan untuk diterapkan di semua tingkatan organisasi NU. Sehingga kegiatan mobilisasi sumber daya khususnya sumber dana bisa lebih optimal, terkordinasi secara baik, tidak tumpang tindih, dan tidak terkesan saling berebut antar komponen organisasi NU, hasil mobilisasi dana dikelola dan terdistribusikan sesuai dengan aturan yang ada.
6. Terbangunnya sistem dan manajemen keuangan NU yang bisa dipakai untuk semua perangkat NU di semua level organsiasi NU sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
7. Berkembangnya sistem dan media informasi, komunikasi (elektronik maupun cetak) di lingkungan NU dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin hal-hal berikut:

- Efektifitas penyebaran informasi tentang sikap ataupun pandangan NU dalam merespon kebijakan, peristiwa, kondisi maupun masalah yang ada di masyarakat.
- Komunikasi organisasi dari PBNU ke jajaran organisasi di bawahnya dan sebaliknya bisa berjalan lancara, efektif dan efisien.
- Terpublikasikannya pelaksanaan program maupun kegiatan organisasi di lingkungan NU oleh PBNU secara reguler dalam bentuk Laporan Tahunan yang termasuk di dalamnya publikasi tentang neraca keuangan yang sudah teraudit.
- Teridentifikasi pengurus maupun jama'ah NU dalam data base yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan SDM, maupun kebutuhan organisasi lainnya.

8. Tercipta dan meningkatnya jaringan kerja NU dengan pihak-pihak pemangku kepentingan baik yang ada di dalam maupun diluar negeri untuk membangun kesepahaman, kerjasama, sharing dan persahabatan dengan menumbuhkan saling percaya satu sama lain guna mewujudkan kepentingan bersama untuk kemaslahatan ummat, bangsa dan negara.

4. PENCAPAIAN PROGRAM

Dalam periode 2015 – Desember 2018 unit pelaksana program yang terdiri dari Lembaga, Badan Khusus dan Panitia *Ad Hoc* telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain;

4.1. Keaswajaan

Nahdlatul Ulama yang berfaham *Ahlussunah wal Jamaah*, telah melakukan aksi penyadaran dalam bentuk dakwah dan penguatan faham ke-NU-an dalam rangka menangkal ideologi keagamaan radikal yang dilakukan kelompok tertentu serta secara aktif menjaga keberagamaan/kebhinekaan bangsa, Pancasila dan keutuhan NKRI.

Melalui berbagai kegiatan; Madrasah Kader NU, Pelatihan Kader

Penggerak NU, Pelatihan Kader Muharik Mesjid, Pelatihan kader pada siswa LP Maarif, Pelatihan Kader di Badan otonom dan forum-forum pengkaderan lainnya di sampaikan pengertian Aswaja, sikap aswaja, amaliah dan tradisi islami warga NU, serta metode berfikir warga NU (*fikrah Nahdliyah*).

Rais 'Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyatakan Aswaja NU mempunyai kekhususan: "Tiga aspek rumusan Islam Nusantara, yaitu bahwa Islam Nusantara di samping sebuah pemikiran (*fikrah*), juga sebuah gerakan (*harakah*) dan amaliyah".

Pada dasarnya ada 4 jenis kaderisasi yang dikembangkan PBNU dalam rangka peningkatan kapasitas sumber dayanya, pertama MKNU yang merupakan kaderisasi struktural-menyiapkan kader untuk menjadi pengurus NU di setiap tingkatan, kedua PKPNU yang merupakan kader penggerak, ketiga kader keulamaan untuk peningkatan penguatan Syuriah, dan keempat kaderisasi fungsional yang dilakukan oleh badan otonom atau penyiapan kader untuk birokrasi eksekutif maupun legislatif. Pelatihan MKNU dan PKPNU telah dilakukan secara masif di seluruh Wilayah di Indonesia.

4.2. Kesehatan

4.2.1. Penataan organisasi di lingkungan LKNU terus dilakukan dengan dibentuknya beberapa sayap; Badan Pelaksana Kesehatan NU (BPKNU)-berfungsi mendampingi percepatan pembangunan fasilitas kesehatan-Klinik Pratama dan Rumah Sakit (diketuai DR. dr Zulfikar), Asosiasi Rumah Sakit NU (ARSINU) untuk menjaga dan meningkatkan mutu RS di lingkungan NU (ketua Dr. dr Zulfikar), Asosiasi PT kes NU (APTIKES-NU) yang diketuai dr Hardadi SpPD, dan Perhimpunan Dokter NU (PDNU) dengan ketua dr Niam, yang berada dibawah ISNU karena perhimpunan ini berbasis keanggotaan yang diharapkan pada Muktamar 2020 akan disyahkan sebagai badan otonom PBNU.

4.2.2. ARSINU Jawa Timur berhasil menempatkan 8 RSNU untuk menjadi wahana internship. Hal ini berarti rumah sakit

tersebut mendapat tenaga dokter yang mendapat gaji dari pemerintah. Sedangkan 12 RSNU dalam proses untuk menjadi wahana Internship berikutnya. Sekitar 50% anggota ARSINU saat ini sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Hal ini merupakan dukungan dan kemitraan NU dalam menerapkan Jaminan Kesejahteraan Nasional.

4.2.3. LKNU telah menjadi Principal Recipient Rounde-9 HIV – Global Fund 2010-2016. LKNU melakukan program penjangkauan dan pendampingan orang dengan HIV +, di 22 Propinsi yang mencakup 65 kabupaten/ kota. Saat ini LKNU menjadi sub-resipien lembaga Yayasan Spiritia dalam skema program New Funding Modle untuk 2018-2020, bekerja di 6 Propinsi dan 22 kabupaten/ Kota menangani penemuan kasus pada 3 kelompok kunci LSL, Waria dan Penasun.

4.2.4. LKNU penerima penghargaan rekor MURI dalam pengendalian TB melalui program Ketok 1000 pintu, yang diserahkan pada acara World TB Day, bertempat di Balai Kota DKI pada tanggal 1 April 2017. Melalui program TB-Cepat, LKNU ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyakit TB di 8 Propinsi yang didukung oleh USAID.

Saat ini LKNU menangani program penanggulangan TB melalui Program Global fund sebagai Sub-resipien khusus Kemenkes RI di 61 Kabupaten/ Kota di 10 Propinsi. Kegiatan LKNU mencakup aspek penemuan kasus TB baru, pendampingan pasien TB, intervensi kasus TB resistensi obat dan berbagai kegiatan advokasi untuk dukungan terhadap program. LKNU mendapat kontrak kerja bermitra dengan Kemenkes RI selama 3 tahun, 2018-2020 senilai US$ 11 juta.

4.2.5. Program penanggulangan masalah stunting pada anak ikut ditangani oleh LKNU bekerjasama dengan UNICEF selama tahun 2016 yang dilakukan di Propinsi Jawa Tengah. Pada bulan September 2018 dilakukan program sosialisasi Stunting di Pondok Pesantren Al Amanar al Azhari,

Depok, Jawa Barat.

4.2.6. LKNU bekerjasama dengan the Word Diabetes Foundation (WDF) telah melakukan penyadaran masyarakat tentang penyakit Diabetes melalui klinik-klinik NU di wilayah Jakarta pusat, Jakarta Selatan, Depok, Blitar dan Jombang, berlangsung tahun 2017-2019.

4.2.7. LKNU bekerjasama dengan Kedubes China di Jakarta membangun fasilitas MCK dan air bersih di Pesantren 10 titik di Banten dan Jawa Barat.

4.2.8. PDNU telah melakukan rakernasnya yang pertama di kota Malang. PDNU akan berupaya untuk meningkatkan SDM tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di kalangan NU. PDNU juga akan berupaya untuk melakukan deradikalisasi di fakultas- fakultas kedokteran. PDNU meminta dukungan semua agar pada Muktamar NU 2020 PDNU dapat menjadi badan otonom di lingkungan PBNU.

4.3. Pendidikan

1.1.1. LP-Ma'arif NU telah melakukan penguatan Aswaja dan Ke-NU an di lingkungan Pendidikannya, berupa pelatihan dasar maupun lanjutan.

1.1.2. LP-Ma'arif NU berhasil melaksanakan Perwimanas II -2017 bertempat di Magelang yang diikuti oleh 6000 peserta dari 34 provinsi. Terjadi peningkatan baik jumlah peserta maupun jumlah propinsi yang ikut, dimana Pergamanas I tahun 2015 bertempat di Ponpes KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon yang diikuti oleh 3000 peserta yang terdiri dari 22 provinsi.

1.1.3. Sejak tahun 2013, LP Ma'arif telah mempunyai 11.185 satuan pendidikan (66%) yang menggunakan Badan Hukum Perkumpulan NU.

1.1.4. LP-Ma'arif NU telah melakukan penguatan mutu tata kelola satuan pendidikan dengan program Pendamping-

an MBS, Pembentukan Satuan Penjamin Mutu Internal, dan Penguatan Sistem Informasi Manajemen, dengan jumlah satuan Pendidikan 13.000.

1.1.5. LPTNU telah melakukan kegiatan pendampingan PT – PT UNU yang baru (34 PT). Mendorong penguatan SDM dengan mengirim tenaga pengajar untuk menempuh Pendidikan S3 di Luar Negeri. Saat ini 13 tenaga pengajar sedang menempuh Pendidikan S3 di China dan sejumlah peserta gelombang berikutnya akan diberangkatkan baik untuk S2 maupun S3.

1.1.6. Untuk mempersiapkan akreditasi PT, maka LPTNU telah melakukan klinik akreditasi bagi UNU yang telah berdiri. LPTNU juga memfasilitasi terlaksananya MOU dengan perguruan tinggi di LN.

1.1.7. Penerapan SPMI juga telah diterapkan di berbagai PT di lingkungan NU

1.1.8. Telah juga dilakukan kerjasama dengan Universitas Terbuka dalam pengembangan E-Learning.

1.1.9. RMI melakukan kegiatan advokasi dan pendampingan proses badan hokum bagi pesantren – pesantren yang belum berbadan hukum.

1.1.10. RMI bekerjasama dengan kementerian Pertanian dalam program rintisan peternakan.

1.1.11. RMI juga telah mendorong agar kurikulum pesantren berbasis saintek agar tidak tertinggal dengan zaman yang berubah.

1.1.12. Di beberapa pesantren telah di buka model mini-mart untuk peningkatan kewirausahaan pesantren.

1.3. Lembaga Kemashlahatan Keluarga (LKKNU)

1.3.1. LKKNU telah melakukan konsolidasi organisasi dan penyusunan rencana strategis dalam rapat koordinasi na-

sional pada 21-22 oktober 2018 yang dihadiri pengurus LKKNU tingkat wilayah dan Cabang se Indonesia.

1.3.2. Bekerja sama dengan Kementerian Desa, PT Pegadaian, Kementerian Agama RI, LKKNU melakukan seminar nasional untuk Penguatan Keluarga Mashlahah oktober 2017 dan April 2018.

1.3.3. LKKNU telah melakukan kegiatan Revitalisasi keluarga Mashlahah bekerja sama dengan Kementerian Agama RI dan PW DIY 2018.

1.3.4. Madrasah Keluarga Mashalah yang terkait relasi suami – isteri, pengasuhan anak, KDRT, Remaja Ceria dan Kesehatan Reproduksi telah dilakukan LKKNU pada bulan Desember 2017 hingga April 2018 bekerjasama dengan Pemprop DKI, PKK, Pengelola RPTRA.

1.3.5. LKKNU telah melakukan program Penguatan Ekonomi Keluarga berupa workshop perencanaan keuangan keluarga bekerja sama dengan PT Pegadaian di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jakarta April – Desember 2018.

1.3.6. LKKNU bekerja sama dengan Kementerian Agama pada 2-4 Agustus 2018 melakukan pelatihan bersertifikat untuk pembimbing calon pengantin. Terdapat 40 orang pengurus LKKNU yang mendapat sertifikat.

1.3.7. Program Penguatan Ekonomi Keluarga LKKNU bekerjasama dengan PT Pegadaian di lakukan di Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur Desember 2017 sampai Januari 2018.

1.4. Lembaga Falakiyah

1.4.1. Lembaga Falakiyah NU (LFNU) adalah lembaga yang menentukan awal bulan hijriyah melalui metode rukyat hilal. Takwim hijriyah yang digunakan LFNU adalah Imkan Rukyat MABIMS yang juga digunakan oleh Malay-

sia, Brunei dan Singapore.

1.4.2. LFNU memberi perhatian pada masalah Kalender Hijriah Internasional terutama ketika Kementerian Agama RI sudah memberi rekomendasi kriteria MABIMS baru bagi kalender Hijriah Internasional.

1.4.3. Hingga saat ini hanya dua lokasi rukyat yg dimiliki NU, yaitu balai rukyat Condro dipo , kab gresik dan Falak Park PCNU Blitar. Sudah saatnya PBNU punya Falak Park dengan perangkat rukyat klasik dan moderen.

1.5. Pemberian Beasiswa

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada kader-kader NU, PBNU melakukan fasilitasi beasiswa pendidikan ke luar negeri. Sampai tahun 2015, kader NU yang bersekolah di Australia 10 orang, di USA 5 orang, dan di Rusia 50 mahasiswa. Selain itu terdapat 30 mahasiswa di Maroko, 20 mahasiswa di Sudan dan puluhan mahasiswa ke Mesir.

Pada tahun 2017 kader NU yang sekolah di Maroko untuk pendidikan strata 1 berjumlah 29 orang sementara mahasiswa S2 berjumlah 5 orang dan mahasiswa doctoral 4 orang. Adapun di Sudan PBNU mengirim 20 orang untuk pendidikan S1, 2 orang tingkat master, dan 3 orang tingkat doktoral.

Untuk mempelajari Islam Nusantara, terdapat mahasiswa 40 orang dari Pattani, Thailand, dan 20 orang dari Afghanistan yang belajar di Indonesia.

Dalam periode Januari 2017 hingga Desember 2018, kembali PBNU mengirim mahasiswa ke Maroko sejumlah 66 mahasiswa, 13 mahasiswa doktoral ke China, Sudan 20 mahasiswa, ke Mesir 30 mahasiswa disamping 45 orang mengikuti program short course dai di Mesir.

4.7. Lembaga Pengembangan Aset

Lembaga Pengembangan Aset Nahdlatul Ulama berhasil mengalihkan badan hukum yayasan menjadi Badan Hukum Perkumpulan NU, antara lain:

a. Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya
b. Rumah Sakit Islam (RSI) Demak
c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tuban
d. Sertifikat tanah gedung PBNU
e. Sertifkat tanah Parung (STAINU)
f. Tanah Kawi-Kawi di Jakarta Pusat .

4.8. Pengembangan Teknologi Informasi

4.8.1. Media Center – NU online.

Melakukan pengembangan teknologi informasi untuk menyebarluaskan ajaran Aswaja NU sekaligus menangkal aliran Islam garis keras yang menyerang ideologi, ajaran maupun amaliah NU. Juga dimaksudkan untuk mempublikasikan berbagai kegiatan PBNU, lembaga dan banom di lingkungan NU melalui NU-on line dan Radio NU. Saat ini PBNU telah mempunyai channel TV sendiri yang berfungsi dan terus berkembang yaitu NU Channel.

NU Online telah menempati rangking pertama di antara portal – portal berbasis Islam lainnya di Indonesia.

4.8.2. Pengembangan media cetak, Jurnal Taswirul Afkar, Risalah NU, jurnal Ma'arif, dan lain-lain terus berkembang dengan baik dengan jangkauan yang luas.

4.9. Lembaga Takmir Mesjid

Lembaga Takmir Masjid telah melakukan labelisasi ribuan masjid NU dan telah menjangkau ribuan Ta'mir Masjid (DKM/Dewan Kesejahteraan Masjid) serta mendistribusikan secara gratis belasan ribu kaleng

GISMAS (*Gerakan Infak Sedekah Memakmurkan Masjid dan Masyarakat*) dalam rangka upaya pemandirian ummat melalui masjid dan reposisi masjid menjadi sebagai pelayan jamaah.

4.10. NU Cash dan Omnus Mart

Selama tahun 2018, PBNU telah meluncurkan dua program pengembangan ekonomi, pertama NU Cash, dan kedua Omnus (Outlet Mitra Nusantara) Mart. Aplikasi NU Cash diperkenalkan ke publik pada Oktober 2018. Berbasis layanan uang elektronik (*e-money*) dan pembayaran elektronik (*m-payment*) hasil kerjasama PBNU dan PT E2Pay Global Utama yang telah mengantongi ijin dari Bank Indonesia. Saat ini menjangkau transaksi untuk pembelian pulsa dan paket data, *e-bill payment* (tagihan telepon rumah, tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon pasca-bayar, tagihan asuransi, tagihan internet dan TV kabel), dan NU-*Payment* (pembayaran zakat, wakaf, Donasi, dan iuran Anggota NU). Ke depan fitur tambahan yang akan disematkan adalah QR Payment, belanja merchant, NU Edu (pembayaran biaya pendidikan), dan *balance transfer* (pengiriman uang). NU Cash sendiri merupakan respon atas perkembangan finansial berbasis teknologi (revolusi industry 4.0) untuk memudahkan dan mempercepat urusan masyarakat, dalam hal ini khususnya kalangan nahdliyin.

Adapun Omnus Mart diprakarsai oleh Lembaga Perekonomian NU (LPNU) bekerjasama dengan PT Indogrosir, indomaret dan alfamaret. Sejak ditandatanganinya MoU pada April 2018, retail modern Omnus Mart telah berdiri setidaknya di 8 lokasi, Maulinajun dan Wangon (Banyumas), Parung (Bogor), Gandaria (Jakarta Selatan), Cidempet dan Kempek (Cirebon), Karangan (Trenggalek), Kulon Beteng (Banyuwangi). Kelebihan Omnus dibanding usaha sejenis adalah tiap toko diperkenankan menjual seluas-luasnya produk masyarakat (kuota untuk warga NU 300 produk) sehingga upaya untuk membangun kemandirian ekonomi nahdliyin dapat terus berlangsung.

4.11. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI-NU)

4.11.1. LPBI-NU bermitra dengan Pemerintah Australia (DFAT) melaksanakan program peningkatan kesiap siagaan bencana di Propinsi Jawa Tengan dan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menghasilkan dokumen kajian resiko bencana, pembentukan relawan santri siaga bencana, penyusunan rencana peringatan dini, SOP Tanggap darurat disertai simulasi penanganan bencana.

4.11.2. LPBI-NU mendapat penghargaan dari BNPB karena keberhasilan menggerakan 5 juta jiwa dalam rangka Simulasi Penanganan Bencana dalam rangka Hari Kesiap siagaan bencana 2018.

4.11.3. LPBI-NU aktif sebagai Presidium dan anggota dalam Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB)- badan gabungan Pemerintah, LSM, ormas dan PBB yang bergerak dalam Pendidikan pengurangan resiko kebencanaan di masyarakat.

4.11.4. LPBI-NU juga aktif dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI) – organisasi lintas agama untuk kebencanaan dan kemanusiaan.

4.11.5. LPBI-NU secara aktif terlibat dalam NU-Peduli terpadu dengan LAZIS-NU dan Lembaga dan banom lainnya di NTB, Sulawesi Tengah, Banten dan Lampung Selatan. Keterlibatan baik dalam masa Tanggap darurat, transisi darurat maupun masa pemulihan.

4.11.6. LPBI-NU mendirikan 150 bank Sampah Nusantara bekerja sama dengan Kementerian LHH, BNI, Kemensos, Kemenpora. Selain pengelolaan sampah juga memproduksi barang kerajinan daur ulang. Selain itu ada kegiatan “ngaji plastik” untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya sampah plastik dan mengembangkan tehnik “NUbricks”.

4.11.7. LPBI-NU saat ini sedang melakukan pengolahan air wudhu untuk air minum dengan metode river osmosis.

4.11.8. Bersama LAZISNU- NU Care, LPBI-NU melakukan kegiatan kemanusiaan bagi komunitas Rohingya baik di Myanmar maupun di Bangladesh melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia Myanmar (AKIM) yang diketuai Ali Yusuf yang juga ketua LPBI-NU. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendukung penuh kegiatan itu dan bahkan Presiden Jokowi memberikan apresiasi ketika berkunjung ke kamp medis AKIM di Cox's Bazar, Kamp pengungsi di Bangladesh.

4.12. LAZISNU – NU Peduli

Sepanjang 2018 berbagai kejadian bencana yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan material cukup besar direspon PBNU dengan menetapkan NU Peduli sebagai lembaga *ad hoc*. Badan ini mensinergiskan Lazisnu, LPBI-NU, dan LKNU sebagai aktor utamanya dan berbagai lembaga maupun Banom (Ansor, Muslimat, Fatayat, IPNI-IPPNU, dan lain-lain) sebagai pendukungnya. Respon cepat diberlakukan dengan membentuk NU Peduli, bekerjasama dengan PWNU dan PCNU, di daerah terdampak bencana untuk memudahkan berbagai kegiatan di fase tanggap darurat, transisi, dan pasca bencana.

Pada fase tanggap darurat gempa Lombok, NU Peduli telah mendistribusikan makanan siap saji dan mendirikan dapur umum yang menyasar 37.000 jiwa. Distribusi sembako, nutrisi khusus anak, terpal, tenda, *family kit*, *hygiene kit* untuk 52.390 jiwa. Distribusi kebutuhan khusus anak dan perempuan untuk 33.762 jiwa. Pelayanan kesehatan dan distribusi obat dan pelayanan kesehatan untuk 4.525 jiwa. Kemudian layanan psikososial bagi 8.000 orang dewasa dan 2.032 anak-anak.

Di fase transisi, hingga Februari 2019, NU Peduli kembali melakukan berbagai aktivitas sosial. Melakukan distribusi sembako, nutrisi khusus anak, terpal dan tenda bagi 41.092 jiwa. Mendirikan masjid/musholla darurat sebanyak 28 unit dan masjid semi permanen 1 unit.

Mendirikan madrasah darurat sebanyak 41 unit. Mendirikan hunian sementara sebanyak 603 unit. Mendirikan fasilitas air bersih dan MCK di 18 titik. Distribusi *family kit* bagi 5.810 keluarga. Distribusi *hygiene kit* bagi 541 keluarga. Distribusi *school kit* bagi 1093 anak. Distribusi kebutuhan khusus anak dan perempuan 587 jiwa. Pelayanan kesehatan bagi 7.234 jiwa. Pelayanan psikososial bagi 7.234 orang dewasa dan 3.582 anak-anak.

Sementara ketika terjadi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulteng, NU Peduli kembali berkiprah. Pada fase tanggap darurat, NU Peduli telah mendistribusikan makanan siap saji dan mendirikan dapur umum yang mencakup 37.000 jiwa. Mendistribusikan sembako, nutrisi khusus anak, terpal, tenda, *family kit* dan *hygiene kit* bagi 52.390 jiwa. Distribusi kebutuhan perempuan dan anak bagi 33.762 jiwa. Pelayanan kesehatan dan distribusi obat 4.525 jiwa. Pelayanan psiko sosial bagi 8.000 orang dewasa dan 3.032 anak-anak

Distribusi sembako, nutrisi khusus anak, terpal, dan tenda untuk 41.092 jiwa. Memperbaiki 7 unit masjid/musholla darurat, mendirikan 4 unit masjid semi permanen, dan membangun 1 masjid permanen. Memperbaiki 15 unit madrasah. Membangun fasilitas MCK dan fasilitas air bersih di 12 titik. Membangun 139 unit hunian sementara. Menditribusikan *family kit* dan *hygiene kit* bagi 4.000 keluarga. *School kit* bagi 2.000 anak. Pelayanan kesehatan dan distribusi obat untuk 3.113 jiwa. Kemudian layanan psikososial bagi 6.315 orang dewasa dan 3.550 anak-anak.

Selain dua bencana besar di atas, NU Peduli juga terlibat dalam penanganan korban bencana tsunami Lampung dan Banten yang terjadi akhir tahun lalu.

Masih di tahun yang sama, terlibat dalam berbagai penanganan bencana banjir ataupun longsor di Ponorogo, Pacitan, Brebes, Jakarta, Banjarnegara, Cirebon, dan Banyuwangi. Lalu gizi buruk di Papua. Juga berpartisipasi aktif mengirimkan bantuan dan tim medis ke Myanmar dan Bangladesh bagi pengungsi Rohingya.

5. PERMASALAHAN UMUM

Berdasarkan kajian dokumen terkait dan sidang komisi program Munas Konbes Banjar 2019 maka didapat beberapa masalah umum.

5.1 Bagaimana menurunkan amanah Muktamar Jombang 2015 menjadi rencana aksi di tingkat unit pelaksana tugas yaitu Lembaga dan Banom dan badan adhoc yang dibentuk.

5.2 Bagaimana memaksimalkan fungsi kendali manajemen pelaksanaan program di seluruh Lembaga dan Banom di lingkungan PBNU

5.3 Bagaimana memaksimalkan fungsi Ketua-ketua PBNU sebagai Pembina Lembaga, Banom dan Pengurus Wilayah binaannya.

5.4 Bagaimana memaksimalkan dukungan kesekretariatan PBNU terhadap tugas pokok dan fungsi Ketua-Ketua PBNU dan Wakil Sekjen terkait.

5.5 Bagaimana mewujudkan berjalannya rapat-rapat, baik pleno, rapat koordinasi Ketua-ketua PBNU beserta wasekjen pendamping dengan lembaga dan Banom yang terkait.

5.6 Bagaimana mewujudkan adanya Laporan tengah tahun dan akhir tahun semua lembaga dan banom.

5.7 Bagaimana Sistem Keanggotaan NU (Kartanu) berjalan.

5.8 Bagaimana mewujudkan Sistem Informasi Organisasi PBNU terpadu yang menghubungkan PBNU, PWNU, PCNU sampai MWC NU.

5.9. Bagaimana dapat disusunnya rencana strategis 2020-2025 menyongsong satu abad NU dan menjadi kajian dalam Muktamar 2020.

6. REKOMENDASI

Hasil Sidang Komisi Program Kerja merekomendasikan :

1. Penjabaran Islam Nusantara sebagai strategi kebudayaan dan dakwah Aswaja dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni-budaya Islami, meneguhkan pilar-pilar kebangsaan dan penguatan peradaban manusia.
2. Menjadikan Materi keaswajaan sebagai muatan wajib pendidikan di semua jenjang mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi.
3. Penyediaan jumlah kecukupan instruktur Madrasah Kader NU melalui kegiatan ToT instruktur MKNU yang bersertifikasi.
4. Pengembangan materi pembelajaran integrasi sains dan agama, misalnya penerapan perhitungan faraid dan zakat dalam pembelajaran matematika di lembaga pendidikan, khususnya SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi.
5. Menumbuhkembangkan basis-basis produksi ekonomi warga NU dan mendorong berkembangnya model teknologi keuangan seperti NU-Cash, waralaba ritail misalnya Omnus-Mart, NU-Mart, ANTUM, Warung Nusantara, serta model keuangan dan bisnis berbasis koperasi.
6. Meningkatkan peran dan kontribusi NU dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan sebagai pengejawantahan dari "arus baru ekonomi Indonesia".
7. Menjadikan NU Peduli sebagai ikon gerakan kemanusiaan NU dengan mensinergikan fungsi lembaga dan banom NU terkait.
8. PBNU menyusun peta jalan penguatan pendidikan NU menuju satu abad dalam aspek badan hukum, kelembagaan, manajerial, sumberdaya manusia, dan infrastruktur.
9. Perlu pendirian universitas/institut di setiap propinsi oleh PWNU, dan pendirian sekolah tinggi/politeknik/akademi komunitas berbasis pesantren oleh PCNU.
10. Setiap kerjasama dengan pihak lain perlu mempertimbangkan aspek alih pengetahuan dan teknologi serta azas kemanfaatan bagi

NU.

11. Percepatan pendirian fasilitas kesehatan baik berupa rumah sakit maupun klinik pratama di setiap provinsi dan kabupaten/kotamadya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
12. Mendorong Perhimpunan Dokter NU menjadi badan otonom.
13. Materi Keluarga Maslahah hendaknya menjadi muatan pembelajaran di pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi.
14. Perlu pengembangan fasilitas rukyat hilal di cabang NU dan pembelajaran falakiyah di lembaga pendidikan, khususnya SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi.
15. Mendorong literasi media di kalangan warga NU, mensinergikan media-media di lingkungan NU, dan meningkatkan kualitas produksi konten serta memaksimalkan fungsi diseminasi informasi kerja lembaga dan badan otonom.
16. Program kerja setiap Lembaga dan Badan Otonom harus merujuk pada hasil keputusan Muktamar NU ke-33 di Jombang 2015, serta memperhatikan nilai-nilai ideologi ke-Islaman *a la Ahlusunnah wal Jamaah an-Nahdliyah* dan nilai kebangsaan.
17. PBNU memotori upaya-upaya serius untuk melakukan perbaikan pengelolaan organisasi termasuk komunikasi, koordinasi, sinergi dan pembinaan Lembaga dan Banom.
18. PWNU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja hasil Konferensi Wilayah dan Cabang dengan tetap memperhatikan hasil Muktamar.

7. PENUTUP

Program Kerja PBNU Masa Khidmat 2019-2020 ini diharapkan dapat menjadi pegangan unit pelaksana program, Lembaga, Banom dan panitia *Ad Hoc* yang dibentuk sesuai kebutuhan. Para Ketua PBNU juga dapat menggunakan dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan mengendalikan manajemen sesuai bidangnya. Selain itu, program kerja ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pencapaian

program pada akhir periode masa khidmat 2020 nantinya.

Dalam perjalanannya program kerja harus diturunkan dalam perencanaan tahunan unit pelaksana program sehingga mendapat penajaman dalam hal target, sasaran dan indikator keberhasilan. Perlu dikembangkan instrumen kendali manajemen, yaitu supervisi, monitoring dan evaluasi agar dapat diukur pencapaian program dengan lebih baik.

Program kerja ini menjadi pijakan pengembangan program kerja untuk Muktamar NU tahun 2020 yang akan datang. Hal ini menjadi penting ketika NU akan menyongsong 100 tahun NU pada tahun 2026.

HASIL
KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA 2019

KOMISI ORGANISASI

Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulam

Komisi Organisasi

Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari - 1 Maret 201

KETUA

WAKIL KETUA

NOTULEN

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 05/KONBES/III/2019

Tentang:

KEORGANISASIAN

Konferensi Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang

a. Bahwa menurut Pasal 75 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama hasil Muktamar Jombang 2015, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar adalah forum permusyawaratan tertinggi dibawah Muktamar yang memiliki kewenangan untuk membahas pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat;

b. Bahwa salah satu masalah strategis yang menuntut perhatian organisasi dan memerlukan pembahasan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2019 adalah penyesuaian beberapa peraturan organisasi yang dirasa tidak sesuai lagi dengan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama 2015, agar bisa dijadikan acuan dalam melakukan percepatan program organisasi dan berlaku bagi seluruh komponen organisasi Nahdlatul Ulama tanpa kecuali;

c. Bahwa Nahdlatul Ulama harus tumbuh dan berkembang lebih baik dan lebih maju mengikuti perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi serta memiliki performance

yang dapat diartikan sebagai penampilan atau prestasi penilaian kinerja, karena kinerja dapat dijadikan sebuah ukuran keberhasilan bagi organisasi dalam pencapaiannya dan kinerja juga bisa menjadi sebuah gambaran prestasi bagi sebuah organisasi;

d. Bahwa ketentuan tentang pedoman administrasi yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi, oleh karena itu harus disesuaikan dengan perkembangan.

Mengingat

a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22 huruf d;

b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 75.

Memperhatikan

Keputusan Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N
Menetapkan:

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG KEORGANISASIAN

Pertama : Isi beserta uraian hasil-hasil sidang Komisi Organisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua	:	Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Lembaga, Badan Khusus, dan Badan Otonom disemua tingkatan untuk melaksanakan seluruh isi dan maksud dari peraturan sebagaimana diktum pertama;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
Ditetapkan di	:	Kota Banjar
Pada tanggal	:	24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2019
PIMPINAN SIDANG PLENO

H. Robikin Emhas, SH., MH.	Dr. KH. Marsudi Syuhud
Ketua	Sekretaris

Tim Perumus Hasil Komisi Organisasi
Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 2019
Ponpes Miftahul Huda Citangkolo, Kota Banjar – Jawa Barat

Koordinator	: H. Andi Najmi Fuaidi, SH
Sekretaris	: Dr. H. Ulil Abshar Hadrawi
Anggota	: Drs. H. Qohari Kholil
	H. Miftah Faqih, MA
	Dra. Hj. Marhamah Mujib, M.Ag
	Dr. KH. Moh Buchori Muslim, Lc., MA
	Abdul Rozak, SH
	Harianto Oghie
	H. Abdullah Mas'ud, M.Si
	Drs. H. Saifullah Ma'sum
	H. Saiful Munir, SH., M.Kn.

BERITA ACARA SIDANG KOMISI ORGANISASI
KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2019

Pada Hari ini Kamis Tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 H/28 Februari 2019 M.

Bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Citangkolo – Banjar, Jawa Barat.

Telah dilaksanakan Sidang Komisis Organisasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 dengan bahasan sebagai berikut :

1. Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Perubahan Atas Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama Nomor : 01Tahun 2006 Tentang Harta Benda/Kekayaan Milik Organisasi Nahdlatul Ulama dan Organisasi Di Lingkungan Nahdlatul Ulama.
2. Rekomendasi Draft Perubahan/Penambahan AD/ART NU untuk Muktamar NU 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya dengan sebenar-benarnya.

Wallahul Muwafiq ilaa Aqwamith Thorieq

Pimpinan Sidang

H. Andi Najmi Fuaidi, SH	Dr. H. Ulil Absor Hadrawi
Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN MUNAS-KONBES NU BANJAR – JAWA BARAT 2019
KOMISI ORGANISASI

Perubahan / Penambahan Pasal/Ayat dalam
Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
pada Muktamar NU yang Akan Datang

1. PENDAHULUAN

Melihat dinamika NU tiga tahun terakhir ini, perlu kiranya peninjauan kembali AD/ART hasil Muktamar NU 33 di Jombang untuk menjawab berbagai permasalahan keorganisasian. Sidang Pleno Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Banjar – Jawa Barat memutuskan usulan perubahan dan penambahan terhadap AD/ART NU pada muktamar NU yang akan datang dan Perubahan Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Aset NU:

Pertama, perubahan terhadap ART NU Pasal 12 dan Pasal 52 (4) tentang kewenangan pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC-NU) dan kewenangan mengesahkan kepengurusan MWC-NU dikembalikan kepada PWNU.

Kedua, perubahan ART NU Pasal 51 dengan menambahkan definisi tentang istilah rangkap jabatan partai politik, jabatan politik dan jabatan publik.

Ketiga, usulan penambahan pasal tentang **Tata Urutan Peraturan di Lingkungan Nahdlatul Ulama** di ketentuan penutup Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

Keempat, perubahan penulisan/penyebutan istilah/kata/diksi "**Organisasi**" menjadi "**Perkumpulan**" yang ada dalam AD dan ART NU

Kelima, perubahan mekanisme pemilihan ketua Tanfidziyah menggunakan sistem AHWA dengan melibatkan Ra'is 'Aam/Ra'is terpilih.

Keenam, pembatasan periodisasi Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama.

Ketujuh, selain enam rekomendasi tersebut, sidang pleno juga

mengesahkan perubahan **Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Aset**.

2. KEPUTUSAN

2.1. Usulan Perubahan Terhadap ART NU Pasal 12 Tentang Kewenangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU)

Pada dasarnya struktur organisasi tidak jauh berbeda dengan konstruksi sebuah bangunan. Demikian pula sebuah struktur organisasi dibuat secara berjenjang dan bertingkat untuk saling mendukung. Otoritas pembentukan dan pengesahan diberikan kepada kepengurusan dua tingkat di atasnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari kepengurusan satu tingkat di bawah pemberi legalitas (satu tingkat di atas kepengurusan yang disahkan). Dengan demikian setiap tingkat (level) kepengurusan dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama akan berfungsi secara baik dan saling melengkapi. Keberadaan MWC NU merupakan penyangga utama PCNU dan untuk memastikan kekokohan MWC NU hendaknya ditentukan legalitasnya oleh PWNU atas dasar rekomendasi dari PCNU. Dengan demikian proses evaluasi dan monitoring terasa lebih mudah dan hasilnya lebih obyektif. Oleh karena itu usulan perubahannya akan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama mengeluarkan Surat Kepu-

tusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 52

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Ra'is 'Aam dan Ketua Umum.

(2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar dengan Rekomendasi Pengurus Wilayah.

(4) Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Wilayah dengan Rekomendasi Pengurus Cabang.

(5) Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan Rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(6) Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan Rekomendasi Pengurus Ranting.

2.2. Usulan Perubahan ART NU Pasal 51 tentang Rangkap Jabatan dan Kaitannya dengan Pemahaman Istilah Partai Politik, Jabatan Politik dan Jabatan Publik

Pembahasan rangkap jabatan selalu menjadi isu penting dan menarik untuk diikuti para anggota, aktifis, dan pengurus NU dalam setiap Muktamar. Rangkap jabatan menjadi salah satu kata kunci bagi kader NU yang meniti karir politik. Terutama setelah Muktamar NU ke-26 di Situbondo tahun 1984, NU memutuskan untuk kembali kepada khittah 1926. Sementara itu pemaknaan atas khittah itu sendiri tidak pernah final (selalu banyak tafsir). Masing-masing memiliki perspektifnya tersendiri sesuai dengan kepentingannya. Maka terbentang ruang penafsiran yang memanggil perdebatan baik yang mengatasnamakan kepentingan pribadi maupun kepentingan NU sebagai Jam'iyyah. Terlebih ketika musim politik tiba, maka pembicaraan tentang khittah NU tidak pernah terlewatkan. Karena secara alamiyah, NU dengan ja-

maahnya memiliki potensi politik yang sangat besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya kader NU yang sukses memenangi pertarungan politik di Indoneisa, baik dalam legislatif maupun eksekutif, baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dampak langsung dari kesuksesan ini adalah terpaparnya kepengurusan NU oleh bias politik praktis yang secara perlahan menjauhkan substansi perjuangan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Meskipun dalam kenyataannya kekuasaan politik dapat membantu merealisasikan tujuan NU (AD NU Pasal 8 ayat 2) yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Dengan mempertimbangkan segala aspek kemaslahatan dan kemudharatan bagi NU maka perlu penegasan makna terkait jabatan partai politik, jabatan politik dan jabatan publik sebagaimana terdapat dalam ART NU pasal 51, dimana dalam pasal tersebut tidak ada ayat yang menegasikan pengertian/penjelasan terkait definisi jabatan partai politik, jabatan politik dan jabatan publik, sehingga pemahaman dan pengelompokan jabatan partai politik, jabatan politik dan jabatan publik sering dimaknai sama/berbeda. NU sebagai organisasi besar boleh dan bisa saja membuat definisi tentang itu, dengan demikian Pasal 51 Ayat (5) tidak ujug-ujug mengklasterkan/mengelompokkan jabatan politik dan jabatan publik, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan langsung berikut ini:

BAB XVI
RANGKAP JABATAN

Pasal 51a

(1) Jabatan Partai Politik adalah jabatan/kedudukan/posisi seseorang dalam struktur sebuah partai politik yang sah menurut undang-undang.
(2) Jabatan politik adalah jabatan/kedudukan/posisi seseorang di luar partai politik yang didapat melalui proses kontestasi yang

melibatkan masyarakat secara langsung.

(3) Jabatan publik adalah jabatan/kedudukan/posisi seseorang di luar partai politik yang didapat tanpa melalui proses kontestasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

(4) Jabatan publik merupakan penugasan pemerintah kepada warga negara secara langsung melalui Surat Tugas.

2.3. Usulan penambahan pasal pada Ketentuan Penutup di Pasal 104 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama tentang Tata Urutan Peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga Ketentuan Penutup akan berbunyi demikian:

Pasal 104a

Tata urutan Peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah:

a. Qanun Azazi
b. Anggaran Dasar (AD)
c. Anggaran Rumah Tangga (ART)
d. Peraturan Nahdlatul Ulama (PO)
e. Peraturan PBNU
f. Peraturan PWNU
g. Peraturan PCNU
h. Peraturan Banom di masing-masing tingkatan
i. Ketentuan Lembaga

2.4. Perubahan penulisan/penyebutan istilah/kata/diksi "Organisasi" yang ada di AD/ART NU menjadi "Perkumpulan"

Terkait Pasal 1 AD-NU secara eksplisit akan disebutkan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.

2.5. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/ Ketua Tanfidziyah Menggunakan Sistem *Ahlul Halli wal Aqdi* (Ahwa) dengan melibatkan Rois Aam/Rois Syuriyyah terpilih.

2.6. Pembatasan Periodesasi Ketua Tanfidziyah

Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah bisa menjabat selama-lamanya dua periode masa jabatan.

2.7. Perubahan Atas Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Harta Benda/Kekayaan Milik Organisasi Nahdlatul Ulama dan Organisasi Di Lingkungan Nahdlatul Ulama

KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengubah Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama Nomor 01 Tahun 2006

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Harta benda/kekayaan milik Nahdlatul Ulama adalah harta benda/kekayaan yang menjadi milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian, pemberian pihak lain(Hibah), permohonan hak dan atau wakaf.
2. Harta benda/kekayaan bergerak adalah harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpu-

lan Nahdlatul Ulama yang dapat dipindah tempatkan seperti; alat tarnsportasi, kelengkapan kantor, surat-surat berharga, dan sebagainya.

3. Harta benda/kekayaan bergerak adalah harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Nahdlatul Ulama yang tidak dapat dipindahtempatkan seperti; tanah dan bangunan.
4. Harta benda/kekayaan lainya yaitu berupa harta benda/kekayaan bergerak, hak cipta, surat berharaga yang diperoleh dari wakaf, hibah dan pembelian yang telah menjadi milik Perkumpulan Nah-

Menimbang

a. Bahwa harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus dipertanggung jawabkan kepada umat, dan oleh karenanya harus dikelola, diperbadayakan dan dikembangkan sebagaimana mestinya;
b. Bahwa penyelamatan, penertiban, pemeliharaan, pengelolaan, pemberdayaan, dan pegembangan harta benda/kekayaan milik Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mengikuti prinsip-prinsip manajemen professional, dan oleh karenanya harus diatur melalui ketentuan dan keputusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama..

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN.1960-104 TLN.20043)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 2004 tentang Wakaf;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

Milik (I-N 1977-38,TLN. 3107)

5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-7028. H .T.01.05. Th. 89, Tambahan berita Negara RI tanggal 15/9-1989 Nomor 74; tentang Organisasi Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum;
6. Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 12 Juli 2004 Nomor: 199/ DJA/1988/A/7 tentang Penunjukan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Pendidikan dan Sosial yang dapat mempunyai tanah/tanah wakaf dengan status Hak Milik;
7. Keputusan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur;
8. Pasal 30 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXIV pasal 97;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Keputusan Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama Nomor 01/KBNU/VII/2006 tentang Keorganisasian;
11. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 45/A.II.04/02/2016 tentang Penulisan Nama Badan Hukum Perkumpulan Nadhlatul Ulama di dalam Buku Sertifikat.

Memperhatikan Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di kota Banjar Jawa Barat, tanggal 28 Februari 2019;

dlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

5. Tanah adalah Harta benda/kekayaan milik Perkumpulan berupa tanah yang diperoleh dari hasil pembelian, pemberian pihak lain (hibah) dan wakaf.
6. Tanah Hak Guna Bangunan adalah tanah yang diberikan oleh Negara dengan batasan waktu yang telah ditentukan, harta tanah tersebut dikelolah, diberdayakan dan dikembangkan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
7. Tanah Hak Usaha adalah tanah yang diberikan oleh Negara dengan batsan waktu yang telah ditentukan utntuk dikelola oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang akan digunakan untuk usaha produltif.
8. Tanah Hak Pakai adalah tanah yang diberikan oleh negara atau pihak lain dengan batasan waktu yang telah ditentukan untuk dikelolah oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
9. Pendelegasian adalah pemberian kewenangan dan hak pengelolaan, dan penguasaan harta benda/kekayaan milik Perkumpulan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada jenjang kepengurusan yang ada di bawahnya dan Perangkat Perkumpulan Ulama.
10. Bangunan adalah bangunan yang dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk kegiatan Perkumpulan dan sarana pelaksana program Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
11. Perkumpulan Nahdlatul Ulama mempunyai struktur kepengurusan yangterdiri dari kepengurusan tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting.

12. Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah kepengurusan Lembaga, Badan Otonom, Badan Khusus baik tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting dan termasuk di dalamnya adalah Badan Pelaksana serta Badan Usaha.
13. Harta benda/kekayaan Wakaf adalah harta benda/kekayaan yang diperoleh dari seseorang atau lembaga sebagai wakaf kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
14. Nadzir adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk oleh dan diwakili Perkumpulan Nahdlatul Ulama untuk menerima harta benda/ kekayaan wakaf yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
15. Badan Pelaksana adalah sebuah Unit kelembagaan di Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang menjadi organ yang berfungsi untuk melaksanakan unit-unit program, terutama sebagai akibat dari perubahan status badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud oleh surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No 277/AII03/7.2002 tentang kebijakan Umum Penentuan Status Hukum dan Penataan Yayasan, Aset, dan Kekayaan di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama.
16. Badan usaha adalah unit kelembagaan usaha berupa perseroan terbatas, Perseroan Comanditer/CV atau lainya yang didirikan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB II
JENIS HARTA BENDA/KEKAYAAN

Pasal II

(1) Harta Benda Wakaf
(2) Tanah Hak Milik
(3) Tanah Hak Guna Bangunan
(4) Tanah Hak Guna Usaha

(5) Tanah Hak Pakai
(6) Bangunan milik Nahdlatul Ulama
(7) Harta benda/kekayaan lainya

BAB III
PROSES KEPEMILIKAN

Bagian Pertama
Wakaf

Pasal 3

(1) Wakaf dapat dilakukan oleh seseorang dan atau lembaga yang mewakafkan harta benda/kekayaan kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(2) Harta benda/kekayaan wakaf diterima oleh nadzir yang ditunjuk oleh PerkumpulanNahdlatul Ulama.
(3) Nadzir atas nama PerkumpulanNahdlatul Ulama dapat melakukan perbuatan hukum berupa menerima wakaf dari wakif yang kemudian diadministrasikan dalam proses perwakafan.

Bagian Kedua
Pembelian

Pasal 4

(1) Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama atas nama PerkumpulanNahdlatul Ulama dapat melakukan pembelian tanah dan bangunan.
(2) Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat melakukan pembelian harta benda/kekayaan lainya atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(3) Tanah dan bangunan yang telah dibeli merupakan harta benda/ kekayaan milik dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(4) Harta benda/kekayaan lainya yang telah dibeli merupkan harta benda/kekayaan milik dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau perangkat organisasi Nahdlatul Ulama.

(5) Yang dimaksud badan hukum Nahdlatul Ulama adalah badan hukum : Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.

Bagian Ketiga
Hibah atau Pemberian

Pasal 5

(1) Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat menerima hibah atau pemberian tanah, bangunan dan harta benda/kekayaan lainya.

(2) Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat menerima pemberian harta benda/kekayaan lainya atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(3) Tanah dan Bangunan yang telah diserahkan oleh seseorang dan atau lembaga kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah milik Perkumpulan Nahdlatul ulama.

(4) Harta benda/kekayaan lainya yang telah diserahkan oleh seseorang dan atau lembaga kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama merupakan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB IV
NADZIR

Pasal 6

(1) Pengurus Nadzir terdiri dari Pengurus Nahdlatul Ulama atau Pe-

ngurus Lembaga, Badan Otonom, Badan Pelaksana, Badan Khusus dan Badan Usaha yang terkait di masing-masing tingkatan

(2) Penentuan pengurus Nadzir berdasarkan Keputusan rapat Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan

BAB V
PENDELEGASIAN

Pasal 7

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendelegasikan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan Badan Pelaksana untuk melakukan tindakan hukum berupa menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda Wakaf, hasil pembelian, hibah.

(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pembuatan Surat Kuasa bertindak dalam bentuk Akta Notaris

BAB VI
KOORDINASI PENGELOLAHAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Sistem koordinasi pengelolaan dan pengembangan harta benda/ kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diperuntukkan bagi kepentingan bidang tertentu, pembinaanya dapat dilakukan oleh lembaga, Badan Pelaksana, Badan Khusus dan Badan Otonom terkait.

BAB VII
PENGALIHAN HARTA BENDA/KEKAYAAN

Pasal 9

(1) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda/kekayaan tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda/kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh atau dibeli oleh Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama tanpa persetujuan pengurus Perangkat Perkumpulan yang bersangkutan.

(3) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka seluruh harta benda/kekayaannya menjadi milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 10

(1) harta benda/kekayaan milik Nahdaltul Ulama diadministrasikan dan didokumentasikan atas namaPerkumpulan Nahdaltul Ulama berkedudukan di Jakarta melalui lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama.

(2) Lembaga Wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan berkewajiban mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda/kekayaan milik PerkumpulanNahdlatul Ulama.

(3) Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama melaporkan kegiatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya yang dilakukan khusus untuk itu.

Pasal 11

Pada akhir masa jabatan kepengurusan lembaga Wakaf dan pertahanan Nahdlatul Ulama disemua tingkatan wajib menyerahkan seluruh dokumen harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Nahdlatul Ulama yang baru dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang dikelolah dan dikembangkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, Lembaga, Lajnah, Badan Otonom, Badan Khusus dan Badan Pelaksana serta Badan Usaha Nahdlatul Ulama.

(2) Pengurus Nahdlatul Ulama disemua tingkatan berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh aktiftas Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama pada tingkatanya yang terkait dengan harta benda/kekayaan milik PerkumpulanNahdlatul Ulama.

BAB X
LARANGAN

Pasal 13

(1) Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelola, Pengembang dan semua pihak dilarang menjual, mengalihkan hal atas harta benda/kekayaan tidak bergerak milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama kepada pihak lain tanpa persetujuantertulisdariPengurus

Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelolah, pengembang dan semua Pihak dilarang menyalahgunakan harta benda/milik kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XI
SANKSI HUKUM

Pasal 14

Pengurus Nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelolah, Pengembang dan pihak lain yang ikut melakukan kejahatan terhadap kekayaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dengan cara melanggar ketentuan pasal 13, maka kepadanya diberikan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Undang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENULISAN DALAM SERTIPIKAT

Pasal 15

(1) Semua harta benda/kekayaan tidak bergerak milik -Perkumpulan-Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang belum atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus diubah dan atau dialihkan ke atas nama badan hukum : Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.

(2) Pendirian unit-unit usaha, unit-unit sosial dan unit-unit keagamaan yang menggunakan nama dan lambang Nahdlatul Ulama (hak kekayaan intelektual Nahdlatul Ulama) harus menggunakan Badan Hukum: Perkumpulan Nahdaltul Ulama berkedudukan di Jakarta.

(3) Penulisan nama Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama di dalam buku Sertifikat Wakaf maupun Sertifikat Hak Milik Nahdlatul Ulama adalah: **Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.**

Pasal 16

Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar – Jawa Barat
Pada tanggal : 23 Jumadil akhir 1440 H./ 28 Februari 2019 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI

KH. Masdar Farid Mas'udi
Ketua

H. Robikin Emhas, SH. MH.
Sekretaris

HASIL KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA 2019

KOMISI REKOMENDASI

Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama
Komisi Program
Pondok Pesantren
Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari - 1 Maret 2019
KETUA
WAKIL KETUA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 06/KONBES/III/2019
Tentang:
REKOMENDASI

Konferensi Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan negara yang sejahtera, makmur dan berkeadilan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan politik yang berbentuk perundang-undangan yang memberikan harapan besar bagi terwujudnya negara yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan tersebut, namun hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan;
b. Bahwa Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama perlu memberikan arahan yang positif dan kreatif sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang kompeten dalam proses pemulihan krisis menuju Indonesia yang bersih dan bermartabat sebagai tanggungjawab moral Nahdlatul Ulama terhadap arah perkembangan Indonesia ke depan;
c. Bahwa untuk memberikan arahan yang posistif dan keratif sebagai sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas khidmah Nahdlatul Ulama dalam mencapai Tujuan.

Mengingat

a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
b. Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019.

Memperhatikan

a. Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah Iftitah Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H /27 Februari 2019 M;
b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Rekomendasi yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019;
c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG REKOMENDASI;

Pertama	:	Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama sebagai masukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam rekomendasi ini.
Kedua	:	Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga untuk melaksanakan dan atau mensosialisasikan maksud dan isi naskah Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di	:	Kota Banjar
Pada tanggal	:	24 Jumadil Akhir 1440 H/ 1 Maret 2019

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA 2019
PIMPINAN SIDANG PLENO

H. Robikin Emhas, SH., MH.	Dr. KH. Marsudi Syuhud
Ketua	Sekretaris

TIM PERUMUS REKOMENDASI

1. Masduki Baidlowi (Ketua merangkap Anggota)
2. M. Khalid Syeirazi (Sekretaris merangkap anggota)
3. Rumadi Ahmad (Anggota)
4. Ahmad Sueady (Anggota)
5. Alissa Wahid (Anggota)
6. Arifin Junaidi (Anggota)
7. Tuti Nurbaiti (Anggota)
8. Perwakilan PWNU Sulawesi Selatan
9. Perwakilan PWNU Jawa Timur
10. Perwakilan PWNU Jawa Tengah
11. Perwakilan PWNU Bali
12. Perwakilan PWNU Lampung

KEPUTUSAN MUNAS-KONBES NU BANJAR – JAWA BARAT 2019
KOMISI REKOMENDASI

1. Konteks

Beberapa waktu lalu terjadi peristiwa penting, penandatangan Piagam Persaudaraan Kemanusiaan *(Watsiqat al-Ikhwah al-Insaniyah)* yang dilakukan oleh As-Syekh al-Akbar Jami'ah al-Azhar As-Syekh Ahmad Al-Thayyib dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi (4/2/2019). Deklarasi itu mengemban otoritas yang kokoh di hadapan para pemeluk agama dan bisa dipandang sebagai perwujudan dari kesepakatan umat bergama untuk menghentikan permusuhan antar-agama dan membatalkan semua pembenaran konflik atas nama agama dimana saja.

Sebagai organisasi yang terus menerus menyuarakan pentingnya moderatisme beragama, perdamaian dan kemanusiaan, NU menyambut gembira penandatangan piagam tersebut. Piagam yang dinyatakan merupakan kelanjutan dan "didasarkan atas dokumen-dokumen internasional yang telah ada sebelumnya" itu menegaskan pandangan-pandangan yang telah diangkat sebelumnya dalam berbagai deklarasi dan dokumen internasional yang dilahirkan di lingkungan NU, terutama sejak awal 1980-an sampai dengan 2018.

NU sangat berterima kasih dan berbesar hati bahwa gagasan-gagasan yang dikembangkan telah memberi sumbangan yang berarti bagi upaya-upaya perdamaian dunia hingga lahirnya Piagam Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi tersebut. NU juga ingin menegaskan dukungan sepenuhnya terhadap Piagam Persaudaraan Kemanusiaan dan tekad untuk bergabung bersama al-Azhar dan Vatikan dalam perjuangan bersama mewujudkan visi mulia dari piagam tersebut. Hal ini merupakan bagian dari tekad yang telah dinyatakan dalam Deklarasi NU dalam berbagai kesempatan.

Bertumpu pada sikap yang telah dinyatakan dalam Dekalarasi NU pada International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) di Jakarta, 10 Mei 2016 (nuktah nomor 8), secara khusus NU meng-

garisbawahi pandangan Piagam Persaudaraan Kemanusiaan Abu Dhabi bahwa pola pikir umat Islam yang mengandung pandangan-pandangan yang mendorong konflik dengan dinisbatkan kepada model-model interpretasi tertentu atas ajaran Islam harus ditransformasikan untuk menggalang energi dunia Islam bagi upaya membangun perdamaian dunia, termasuk dengan merekontekstualisasikan sejumlah pandangan keagamaan agar lebih relevan dengan realitas masa kini.

Kini, kita menghadapi realitas peradaban yang berubah secara fundamental. Perubahan- perubahan mendasar pada format peradaban telah terjadi yang ditandai dengan beberapa fenomena perubahan besar, antara lain: *pertama,* perubahan tatanan politik internasional, yang antara lain ditandai dengan perubahan identitas negara atau kerajaan yang awalnya menyandang identitas agama. Sekarang, sebagian besar negara-negara yang ada telah melepaskan identitas agama dan menggantinya dengan identitas nasional.

*Kedua,*Perubahan demografi, yang antara lain disebabkan perubahan identitas negara. Pada masa lalu, karena setiap negara atau kerajaan menggunakan identitas agama, maka status kewarganegaraan didasarkan pula atas identitas agama dari penduduknya, dan supremasi agama penguasa dijadikan landasan penilaian. Penduduk yang memeluk agama yang berbeda dari agama negara cenderung dipersekusi atau sekurang-kurangnya diberi status sebagai warga kelas dua. Pada masa kini, dengan dilepaskannya identitas agama, maka negara mentolerir keragaman identitas agama di antara warganya. Demikian juga dengan arus migrasi yang mengikuti aspirasi dan kontak-kontak ekonomi mendorong pergerakan manusia melintasi batas-batas negara, sehingga, pada masa kini, kita mendapati potret demografis yang sangat heterogen di berbagai kawasan, termasuk tumbuhnya komunitas Muslim dalam jumlah yang signifikan di kawasan-kawasan yang pada masa lalu hanya memiliki penduduk non-Muslim saja, seperti di Eropa, Amerika, dan kawasan-kawasan lainnya

Ketiga, perubahan standar norma-norma. Hal ini misalnya bisa dilihat dari praktek-praktek mengabaikan sebagian hak-hak kemanusiaan yang pada masa lalu ditolerir, seperti perbudakan, penjajahan

antar bangsa, persekusi dan diskriminasi atas minoritas, kini secara umum dipandang sebagai kejahatan menurut standar norma-norma keadaban yang diakui dunia internasional.

Keempat, adanya globalisasi yang didorong oleh interaksi-interaksi ekonomi dan perkembangan teknologi telah menjadikan batas-batas fisik, yaitu batas-batas geografis, maupun batas-batas politik antar-bangsa semakin kurang relevan dalam dinamika sosial. Perkembangan teknologi juga telah secara dramatis menjembatani jarak fisik, sehingga setiap peristiwa yang terjadi di manapun berpotensi memicu rangkaian konsekuensi-konsekuensi global. Revolusi industri 4,0 telah mempercepat perubahan globalisasi dan membawa implikasi besar bagi tata dunia.

Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan fundamental tersebut, dalam MusyawarahNasional 1981 di Kaliurang, NU membuat karya bersejarah dengan meletakkan kerangka keagamaan yang otoritatif bagi kesejajaran nilai antara *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan sesama warga bangsa) dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan sesama umat manusia). Dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 NU juga menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk final upaya umat Islam Indonesia mengenai negara. Dengan kata lain, NU memberikan legitimasi keagamaan yang otoritatif bagi keberadaan negara-bangsa moderen berikut sistem hukum yang dihasilkan dalam sistem politiknya.

Pada Muktamar ke-32 di Makassar, 2010, NU menegaskan perjuangan demi perdamaian dunia sebagai bagian dari sikap keagamaannya. Dengan itu berarti bahwa terhadap konflik- konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang melibatkan kelompok- kelompok dari kalangan umat Islam, baik konflik diantara umat Islam sendiri maupun berhadapan dengan kelompok dari kalangan non-Muslim, kewajiban agama menuntut diperjuangkannya resolusi konflik dan perdamaian, bukan melibatkan diri dalam konflik.

Piagam Persaudaraan Kemanusiaan Abu Dhabi adalah tonggak bersejarah yang dapat menyelamatkan dunia dari ancaman konflik

semesta, baik antar-agama maupun intern- agama. Pandangan-pandangan yang tertuang dalam deklarasi tersebut mengenai peniadaan permusuhan antar-agama, kewargaan penuh dan kesetaraan dihadapan hukum terlepas dari perbedaan latar belakang identitas agama maupun identitas primordial lainnya, serta visi memperjuangkan perdamaian, menegakkan keadilan dan membela kaum yang lemah, adalah wawasan-wawasan yang selama ini menjadi orientasi keberagamaan NU. Atas dasar itu, NU akan terus berkomitmen untuk menjaga moderatisme beragama, perdamaian dan kemanusiaan.

Dalam skala nasional, pada 17 April 2019 yang akan datang, bangsa Indonesia mempunyai hajatan besar Pemilihan Umum. Pemilu tahun ini merupakan pengalaman pertama dimana dilakukan Pemilu serentak, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II. Pemilu bukan saja momentum sirkulasi elit, tapi juga sebagai penanda peradaban Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia akan menjadi rujukan internasional bila mampu melewati saat-saat krusial –termasuk momentum Pemilu— dengan aman dan damai. NU, umat Islam dan seluruh warga negara Indonesia harus memanfaatkan momentum ini dengan memilih putra-putri terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa. Umat Islam—terutama warga NU--mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan bangsa ini berjalan dalam ril yang benar dan konsensus nasional tetap terjaga.

Menjaga negara bukan hanya wujud kecintaan pada negeri, tapi juga tanggung jawab untuk memastikan warisan ulama-ulama kita berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak. Negara Republik Indonesia yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil perjuangan yang sangat Panjang dari para pendahulu, termasuk ulama-ulama di nusantara. Ulama-ulama nusantara telah memberi warisan teladan dan nilai-nilai penting yang menjadi pondasi kebangsaan kita. *Pertama*, teladan penyebaran Islam yang dilakukan dengan penuh perdamaian, tanpa pertumpahan darah. Islamisasi yang terjadi di nusantara tidak dilakukan dengan semangat permusuhan dan kemarahan, tapi dilakukan dengan semangat *bil hikmah wal mau'idhatil hasanah.* Inilah yang menjadikan Islam benar-benar berakar kuat dan

dipeluk oleh lebih dari 87 persen masyarakat Indonesia. *Kedua,* karakter masyarakat yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (berimbang) dan *tasamuh* (toleran). Karakter ini dibentuk melalui proses yang sangat panjang melalui proses Islamisasi yang damai.*Ketiga,* keberhasilan para ulama untuk mendamaikan antara Islam dan kebangsaan dengan mewariskan Pancasila sebagai dasar negara RI. Warisan ini melampangkan bagi kita untuk menjadikan umat yang religious dan nasionalis. *Keempat,* adanya organisasi massa Islam yang berkarakter moderat dan bisa menjadi negara disatu sisi, dan penjaga moderatisme Islam di sisi yang lain. NU merupakan salah satu warisan luhur yang sudah terbukti setia pada negera tanpa syarat. Meskipun sering dipinggirkan secara politik, hal itu sama sekali tidak menjadi alasan bagi NU untuk melakukan pemberontakan atau meruntuhkan sendi-sendi negara. *Kelima,* peleburan identitas Islam dan budaya. Islam dan budaya tidak dipertentangkan tapi saling menguatkan.

Itulah warisan dan nilai luhur Islam Nusantara dengan kekhususan-kekhususan yang dimiliki. Pengalaman Islam nusantara tersebut menjadi modal sosial luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia yang didasarkan pada kekuatan tradisi. Kekuatan tradisi Islam nusantara tersebut akan terus menjadi keislamaan dan kebangsaan kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Dengan kerangka tersebut, hajatan Pemilu yang kita lakukan setiap lima tahun bisa dilihat sebagai upaya untuk merawat nilai-nilai Islam nusantara, terutama yang terkait dengan Islam dan kebangsaan. Oleh karena itu, warga NU harus menyukseskan pemilu dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kepemimpinan nasional yang kuat di masa yang akan datang. Pemilu tidak boleh berubah menjadi alat pemecah belah masyarakat. Perbedaan pilihan politik adalah hal biasa dalam demokrasi. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

2. Konsen NU terhadap Kebijakan Pemerintah

NU mempunyai kepentingan besar untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar diorientasinya untuk

mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi warga negara Indonesia. Hal ini bisa dilakukan jika semua kebijakan berpihak kepada rakyat, mengurangi kesenjangan sosial antar daerah dan atar kelompok masyarakat. Kebijakan pemerintah harus benar-benar diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat *(tashaaruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manutuh bi al-maslahah).* Terkait dengan hal tersebut, NU melalui Munas dan Konbes 2019, ingin menegaskan beberapa kebijakan sebagai berikut:

2.1. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

Kebutuhan akan energi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, bahkan menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak (*al-hajat al-'ammah*). Ketersediaan sumber energi mutlak untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Keduanya saling membutuhkan dan memanfaatkan. Oleh karena itu, energi pada dasarnya sama dengan membahas kehidupan dan keberlangsungannya (*hifzh an-nafs wa al-hayat*).

Indonesia bukan negara yang kaya atas sumber energi fosil, tetapi bauran energi masih didominasi oleh sumber energi tak terbarukan. Cadangan energi fosil terbatas dan terus menurun. Rasio penggantian cadangan (*reserves to replacement ratio*) lebih rendah dari rasio pengurasan. Seiring pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, konsumsi meningkat sementara produksi menurun. Indonesia telah menjadi importer netto minyak pada 2003 dan diperkirakan menjadi importer netto gas pada 2020. Dari segi konsumsi, dibanding negara-negara kawasan, konsumsi energi per kapita Indonesia relatif masih rendah. Rasio elektrifikasi belum mencapai 100 persen. Di sisi lain, pengarusutamaan pemanfaatan EBT (Energi Batu Terbarukan) masih jalan di tempat. Porsi EBT dalam bauran energi saat ini masih berkisar 6%. Pada 2030, porsi EBT diproyeksikan mencapai 25% terhadap bauran dan pada 2050 menjadi 31% terhadap bauran.

Kita tidak bisa lagi terus-menerus bergantung pada energi fosil. Ketersediaan sumber energi fosil selain tidak dapat diperbarui juga semakin menipis baik di Indonesia maupun di dunia. Menurut para ahli, dengan pola konsumsi seperti sekarang, dalam waktu hanya belasan hingga puluhan tahun cadangan minyak dan gas Indonesia

akan habis. Ini antara lain bisa dilihat dari naiknya harga minyak dalam negeri dan tidak stabilnya harga minyak di pasar internasional. Oleh karena itu, demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan mengantisipasi kelangkaan energi, upaya-upaya menuju pengolahan energi terbarukan merupakan alternatif terbaik untuk dilakukan.

2.2. Menangkal Hoaks dan Mendorong Literasi Digital

Kemajuan teknologi informasi seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memberi *mashlalah* dan kemudahan-kemudahan bagi manusia, namun di sisi lain juga membawa *mafsadat* yang bisa mengancam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi menyisakan limbah yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Limbah informasi itu antara lain adalah maraknya peredaran berita bohong (hoaks) berbalut fitnah dan hasutan kebencian.

Hoaks bisa diartikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks.

Survei Daily Sosial (2018) terhadap 2032 pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa 81.25% responden menerima hoaks melalui Facebook, sekitar 56.55% melalui WhatsApp, sebanyak 29.48% melalui Instagram, dan tak kurang dari 32,97% responden menerima hoaks di Telegram. Masih ada platform media sosial lainnya yang juga dibanjiri hoaks, misalnya Twitter, namun jumlahnya di bawah 30%. Banyaknya pendistribusian hoax di Facebook, WhatsApp, dan Instagram karena tiga aplikasi ini paling populer, paling banyak digunakan di Indonesia.

Hoaks masuk ke dalam pori-pori kehidupan social masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan, dari masalah kesehatan, makanan, politik, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), hingga bencana alam. Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Januari 2017 menunjukkan bahwa jenis hoax di media sosial yang

diterima oleh 1.116 respondennya didominasi isu politik dan pemerintahan (91.80%) dan SARA (88.60%). Isu-isu lain seperti kesehatan, makanan, dan bencana alam angkanya berada di bawah 50%. Kecenderungan penggunaan tema politik dan SARA sebagai komoditas utama produsen hoaks juga terlihat dari data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Sepanjang Desember 2018, frekuensi hoax terkait isu politik menempati peringkat pertama (40.90%) sedangkan frekuensi hoaks SARA menempati posisi kedua (17%).

Hal yang paling mengkhawatirkan belakangan ini adalah digunakannya hoaks dalam propaganda politik yang dibungkus dengan isu SARA. Hoax politik mengandung isu SARA dan sebaliknya isu SARA dikaitkan dengan isu politik. Hoaks politik bernuansa SARA perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua karena berisi hasutan dan kerap merekayasa ketersinggungan, yang dikenal dengan pelintiran kebencian *(hate spin)*. *Hate spin* adalah usaha-usaha sengaja oleh para pengobar kebencian untuk mengada-adakan atau merekayasa kebencian.

Hoaks dan hasutan kebencian harus dilawan, di samping efek social yang ditimbulkan, tapi juga karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman yang dipahami NU, sebagaimana tertuang dalam *mabadi' khaira ummah.* Hoaks dan hasutan kebencian mengandung bahaya, antara lain: merendahkan martabat manusia; menyuburkan prasangka dan diskriminasi dapat memicu kekerasan/kejahatan kebencian, konflik antar kelompok dan paling buruk dapat menyebabkan pembersihan etnis *(ethnic-cleansing).*

Upaya menangkal hoaks pada dasarnya merupakan upaya untuk merawat akal sehat *(hifzh al- 'aql)* sebagai salah satu *dharuriyat* yang harus dilindungi.Karena itu, bersama melawan hoaks merupakan aktifitas syar'i yang perlu dilakukan bersama. Sebaliknya, orang-orang yang sengaja memproduksi hoaks untuk berbagai kepentingan pada dasarnya merupakan aktifitas yang berlawanan dengan prinsip syariat Islam, *hifzh al-'aqli.*

2.3. Perdamaian Papua

Meskipun pemerintah telah berusaha keras untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan politik di Papua dan Papua Barat pasca UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001, namun gerakan-gerakan yang sifatnya separatis dan tuntutan kemerdekaan masih berlanjut hingga kini. Bahkan ada kecenderungan bahwa gerakan ini makin menguat di ranah internasional. Sementara kekuatan riil mereka tidak begitu besar di dalam negeri namun respon represif dan kekerasan akan menciptakan trauma di dalam masyarakat Papua dan Papua Barat juga akan berdampak dan memancing simpati luar negeri.

NU memiliki hubungan historis yang sangat erat dengan perdamaian Papua terutama yang direpresentasi melalui tokoh NU, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sudah dipersiapkan ketika Gus Dur menjadi presiden, meskipun penandatangannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Gus Dur juga yang mengembalikan harkan dan martabat rakyat Papua dengan mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Bendera bintang kejora yang begitu ditakuti juga diperbolehkan untuk dikibarkan asalkan posisinya di bawah bendera merah putih. Hal ini menunjukkan, NU berkepentingan untuk menjaga perdamaian di Papua dan kebijakan berkeadilan untuk rakyat Papua.

2.4. Produk Tembakau Alternatif

Masyarakat Indonesia –terutama warga NU-- sangat akrab dengan tembakau. Bukan saja karena banyak warga NU yang merokok, tapi tidak sedikit warga NU yang kehidupan ekonominya juga bergantung pada tembakau. Karena itu, kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah terhadap persoalan tembakau, baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kehidupan warga NU.

Di pihak lain, kini tembakau sudah menjadi industri, mendatangkan pendapatan negara yang tidak kecil. Indonesia juga menjadi pasar produk tembakau yang luar biasa. Bukan hanya industri rokok dalam negeri, tapi juga banyak sekali perusahaan rokok dari berbagai nega-

ra yang menjadikan Indonesia sebagai pasar. Meski mendatangkan devisa negara namun industri tembakau juga membawa dampak kesehatan. Industri rokok seolah hidup seperti pepatah: "disayang, tapi selalu ingin ditendang". Di satu sisi mendatangkan devisa, namun di pihak lain dianggap merusak kesehatan.

Memperhatikan dua arus yang sama-sama kuat tersebut, sangat penting dipikirkan untuk mendorong produk tembakau yang beriko kesehatan lebih rendah dengan mengembangkan produk-produk alternatif. Konsep alternatif rokok atau produk tembakau yang berisiko lebih rendah sudah ditemukan pada tahun 1976 ketika Profesor Michael Russell menyatakan: "Orang merokok karena nikotin tetapi meninggal karena tar". Karena itu, rasio tar dan nikotin dapat menjadi kunci menuju merokok yang beresiko kesehatan lebih rendah. Sejak saat itu, ditetapkan bahwa bahaya merokok hanya disebabkan oleh racun yang muncul akibat pembakaran tembakau. Sebaliknya, produk tembakau tanpa pembakaran dan produk nikotin murni dianggap lebih resiko bahaya jauh lebih rendah meski masih memiliki potensi menyebabkan adiksi/ketergantungan.

Beberapa negara seperti Jepang, AS, Inggris dan UE menekankan perlunya membantu perokok untuk beralih ke produk alternatif yang lebih baik atau yang dampak kesehatannya berkurang, jika tidak bisa berhenti merokok. Negara-negara tersebut memberikan akses terhadap informasi mengenai produk tembakau alternatif yang lebih baik kepada publik dan memfasilitasi publik untuk dapat mengakses produk-produk ini. Negara-negara tersebut menganggap bahwa penelitian yang ada sekarang ini cukup untuk mendorong mereka mengadopsi prinsip tembakau berisiko rendah.

Di Indonesia, produk tembakau berisiko rendah atau produk tembakau alternatif secara resmi oleh pemerintah. Sejak tahun 2010, produk vape (lebih banyak dikenal sebagai rokok elektrik) semakin banyak bermunculan, dengan 466 varian tersedia di pasar dan jumlah pengguna serta peritel yang semakin banyak – meski tidak ada peraturan/status hukum produk tersebut. Selain itu, sulit untuk mendapatkan respon dari pemangku kepentingan industri tembakau mengenai keberadaan jenis produk ini. Pemerintah juga belum cuk-

up terbuka untuk mengembangkan produk tembakau alternatif yang bisa mengurangi resiko merokok dengan dibakar. Pemerintah –melalui Kementerian Kesehatan—seringkali masih menganggap sama saja antara produk tembakau yang dibakar dan tidak dibakar tanpa didasarkan pada riset yang memadai.

Di tengah gencarnya kampanye anti rokok dengan narasi besar "rokok adalah sumber segala jenis penyakit", munculnya produk tembakau alternatif harus dilihat sebagai jalan baru yang bisa mengurangi resiko orang merokok di satu sisi, dengan tetap memperhatikan persoalan ekonomi, sosial budaya, di sisi yang lain.

Produk tembakau alternatif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau regulasi di Indonesia dikategorikan sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) tarif cukainya lebih tinggi dari produk tembakau biasa. Intinya, produk tembakau alternatif hanya dilihat sebagai obyek cukai yang bisa mendatangkan devisa negara. Di luar persoalan cukai, belum ada pembicaraan yang memadai persoalan produk tembakau alternatif termasuk dalam berbagai regulasi yang dimiliki pemerintah Indonesia. Meletakkan produk tembakau alternatif dalam keranjang HPTL belum cukup. Pemerintah harus mempunyai kerangka baru regulasi pertembakauan dengan meletakkan produk tembakau alternatif yang bisa mengurasi resiko sebagai jalan baru produk tembakau di Indonesia.

2.5. Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 adalah sistem industri yang bertumpu pada penggunaan teknologi, terutama teknologi informasi. Dalam sistem ini, proses bisnis didominasi oleh mesin dan keterhubungan antar mesin yang sangat efisien. Walhasil, proses bisnis tidak memerlukan banyak sumber daya manusia.

Industri 4.0 mempengaruhi bagaimana warga berperilaku ekonomi. Misalnya, sebelum era aplikasi jasa transportasi makanan, orang perlu memiliki restoran untuk bisa berjualan makanan. Dengan aplikasi, orang bisa berbisnis dari dapur rumahnya, dan memasarkannya

melalui penjualan aplikasi online. Demikian juga petani di desa, dapat langsung menjangkau pembeli di kota, melewati *middle-men (blanthik)* berupa tengkulak. Ini menimbulkan efisiensi dalam proses bisnis. Biaya menjadi lebih rendah, kesempatan terbuka lebar bagi orang-orang yang dapat memanfaatkannya.

Namun peluang ini juga membawa dampak-dampak yang perlu dipertimbangkan dan diantisipasi, misalnya:

1. Pekerjaan kasar *(blue-collar)* dengan persyaratan ketrampilan dan pendidikan rendah seperti buruh *assembly* (perakitan) akan menjadi minimal.
2. Industri jasa akan meningkat pesat, karena akses terhadap pasar menjadi lebih terbuka melalui IoT *(Internet of Things).*
3. Akibat IoS *(the Internet of System),* pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan mesin dan teknologi informasi akan semakin mendominasi, baik di sektor manufaktur maupun jasa.
4. Hubungan antar manusia dalam area industri berkurang jauh, karena sebagian manusia bekerja secara soliter, berhadapan dengan mesin.
5. Karakter relasi antara industri/produsen dengan pasar/konsumen berubah secara total. Pasar dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan melalui internet, dan lebih mudah untuk menuntut pertanggungjawaban atas kualitas layanan/produk.
6. Revolusi Industri 4.0 berpotensi mempertajam kesenjangan ekonomi warga, sebagaimana yang terjadi di negara Amerika Serikat dimana perusahaan-perusahaaan teknologi informasi dengan valuasi sangat tinggi menciptakan lapis kelompok kaya baru di tingkat yang sangat tinggi.

3. Rekomendasi

3.1. Internal

3.1.1. Wawasan Islam Nusantara sebagai Solusi Per damaian Dunia

NU perlu lebih berperan aktif dalam upaya menolong dunia internasi-

onal yang terlibat konflik. Dengan modal wawasan Islam nusantara, NU mempunyai legitimasi moral yang sangat kuat untuk menolong berbagai kawasan dunia Islam yang terlibat dalam konflik sosial keagamaan. Di samping sebagai organisasi Islam terbesar dengan akar sosial yang kokoh, wawasan keagamaan NU yang *tawastuh, tasamuh* dan *tawazun* akan bisa mengeliminasi kecurigaan yang meningkat kepada Islam di berbagai belahan dunia, seperti di China, Myanmar, Eropa, AS dan sebagainya. NU dengan wawasan Islam nusantara mempunyai daya ungkit karena bukan bagian dari konflik-konflik keagamaan yang meningkat di berbagai kawasan.

NU perlu menjalin kontak yang lebih intensif dengan pihak-pihak lain yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan perdamaian dunia dan resolusi konflik di berbagai kawasan, termasuk berkolaborasi dengan pihak yang mengeluarkan Piagam Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi. NU juga perlu mengaktifkan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di berbagai negara, bukan saja untuk mengkampanyekan wawasan Islam nusantara, tapi juga sebagai jaringan untuk mendorong lebih aktif keterlibatan NU dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Warga NU perlu terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilu. Bukan hanya hadir ke TPS untuk memilih calon presiden, DPR, DPD, DPRD I/II, tapi juga tidak mengotori pemilu dengan politik uang, penyebaran hoaks dan fitnah, serta berkonflik karena perbedaan politik. Pemilu harus kita sukseskan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pemilu 2019 harus dipastikan berjalan dengan aman dan menghasilkan pemimpin yang legitimate. Seluruh elemen dan warga NU harus menjadi bagian dari gerakan tersebut.

PBNU perlu: a) menyusun tatacara dan mekanisme pendirian badan usaha yang mengatasnamakan NU. Hal ini penting karena sekarang ini banyak elemen NU yang berinisiatif membuat badan usaha mengatasnamakan NU dan berpotensi – bahkan sebagian sudah—adanya konflik akibat tidak adanya menanisme tersebut. b) membentuk badan usaha milik NU (BUM-NU) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan saham mayoritas dimiliki jam’iyah NU dan pimpinan perusahaan dijabat exofficio PBNU.

PBNU dan seluruh elemen NU perlu kembali menjadikan masjid sebagai pusat gerakan. Bahkan, sudah saatnya ada tim advokasi khusus mengingat banyaknya terjadi benturan dan perebutan penguasaan masjid yang dikelola warga NU.

PBNU perlu menyusun mekanisme penanganan bencana. mengingat NU sering terlibat dalam penanganan bencana yang melibatkan berbagai lembaga dan berbagai tingkatan kepengurusan NU.

PBNU perlu membuka *International Office* yang secara khusus mengurusi kerjasama-kerjasama NU dengan dunia internasional dalam berbagai program.

3.2. Eksternal

3.2.1. Wawasan Islam Nusantara sebagai Solusi Perdamaian Dunia

Pemerintah perlu mendorong lebih aktif untuk mengkampanyekan wawasan Islam nusantara dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta mempunyai agenda khusus untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan dunia. Wawasan Islam nusantara dengan 5 (lima) *khashaish* (karakteristik) yang disebutkan di bagian awal, mempunyai kemampuan dan legitimasi sebagai actor yang menyediakan solusi. Pemerintah perlu memanfaatkan Islam nusantara sebagai alat *bargain* Indonesia di dunia internasional.

3.2.2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

3.2.2.1. Pemerintah harus lebih serius melakukan pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mengacu pada Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2010-2025 dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, yang menargetkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional minimal sebesar 23% pada 2025.Langkah lebih serius harus dilakukan karena saat ini penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia baru sekitar 6,8% dari keseluru-

han energi yang dikelola. *Road map* pengembangan EBT harus jelas dan faktor keekonomian tidak boleh mendeterminasi kebijakan.

3.2.2.2. NU mendukung pemanfaatan EBT secara maksimal. Mengingat kebutuhan energi dalam skala besar dan EBT tidak mampu mencukupi kebutuhan energi nasional, pemerintah bisa mempertimbangkan energi nuklir dengan tetap meletakaan kemanan dan keselamatan sebagai faktor kunci.

3.2.2.3. NU mendorong perlunya revisi UU Migas No. 22/2001 yang nasionalis, memihak kepentingan nasional, dan mendukung pencapaian kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi.

3.2.3. Keadilan untuk Rakyat Papua

Pembangunan dan afirmasi di Papua dan Papua Barat perlu lebih ditingkatkan sebagai implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pemerintah perlu mengevaluasi aspek-aspek dari UU Otsus tersebut yang belum dilaksanakan dan potensial menjadi alasan bagi lahirnya kembali kelompok orang untuk menuntut kemerdekaan. Dalam kerangka itu, dialog dan pembangunan pemerintah perlu melibatakan komunitas-komunitas agama dan sosial termasuk kalangan di luar Papua dan Papua Barat secara intensif, terutama melalui pendekatan persuasif dan kultural untuk saling memahami untuk memperkuat semangat ke-bhineka-an dan moderatisme-inkusif.

3.2.4. Memperkuat Literasi Digital

Diperlukan langkah strategis pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat literasi digital agar masyarakat mempunyai sikap kritis atas segala informasi yang diterima. Karena itu, untuk melawan hoaks dan pelintiran kebencian, paling tidak perlu melakukan dua langkah secara simultan, yaitu: literasi digital harus terus diperkuat sebagai upaya untuk memberi daya imun kepada

masyarakat dari pengaruh hoaks dan pelintiran kebencian. Masyarakat harus diberi kemampuan untuk mendeteksi kebenaran informasi yang diterima. Di pihak lain, orang-orang yang dengan sengaja memproduksi hoaks, melakukan pelintiran kebencian dengan maksud apapun, harus mendapatkan tindakan hukum yang tegas. Hal ini diperlukan karena hoaks belakangan ini telah menjadi industri. Banyak orang yang menggunakan hoaks dan pelintiran kebencian sebagai "lapangan pekerjaan" baru untuk menghancurkan kredibilitas orang atau kelompok yang dibenci.

3.2.5. Produk Tembakau Alternatif

3.2.5.1. Produk tembakau alternatif harus diperkuat dengan dukungan kebijakan yang memadai. Regulasi terkait tembakau yang ada lebih melihat produk tembakau sebagai obyek cukai daripada mendorong produk tembakau yang beresiko kesehatan lebih rendah. Pemerintah juga perlu mendorong dikembangkannya produk tembakau alternatif dengan resiko yang lebih rendah berbasis UMKM. Hal ini penting untuk memantapkan keberlangsungan produk tembakau alternatif bukan hanya berorientasi pada industri tembakau alternatif dalam skala besar tapi juga perlu memperhatikan UMKM.

3.2.5.2. Pemerintah perlu mengembangkan pusat-pusat riset untuk mendukung produk tembakau alternatif dengan resiko rendah. Sekarang ini pemerintah kurang punya kepedulian dan cenderung menyamakan semua jenis produk tembakau dianggap sebagai hal yang membahayakan kesehatan.

3.2.5.3. Pengaturan produk tembakau alternatif harus dipastikan memberi pemihakan kepada petani tembakau dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Pengaturan ini tidak boleh justru menyuburkan impor bahan tembakau dari luar.

3.2.6. Revolusi Industri 4.0

3.2.6.1. Pemerintah perlu mempersiapkan enabling environment (semesta yang memampukan) untuk terwujudnya Industri 4.0 dengan landasan keadilan sosial, di mana tidak ada warganegara yang tertinggal oleh revolusi ini.

3.2.6.2. Pemerintah perlu mengubah dan menyelaraskan strategi besar (grand strategy)pendidikan nasional, agar dapat merespon karakteristik Industri 4.0.

3.2.6.3. Pemerintah perlu membuat kebijakan afirmatif bagi wilayah non kota besar, agar semesta kecil setempat dapat mengejar ketertinggalan seperti innfrastruktur teknologi informasi, perangkat legal, pelatihan-pelatihan industri, daan pengembangan sumber daya manusia.

3.2.6.4. Pemerintah Daerah perlu membuat strategi besar untuk mengoptimalkan potensi daerah dan menangkap peluang peningkatan kesejahteraan rakyat melalui Industri 4.0.

3.2.6.5. Pemerintah harus mempunyai skema yang jelas untuk mereduksi pengangguran terbuka dan program perlindungan sosial inklusif akibat dari revolusi industri.

Catatan:

PWNU Lampung mengajukan surat permohonan sebagai tuan rumah Mukatamar NU ke-34 tahun 2020 yang akan datang dan didukung sebagian besar peserta Komisi Rekomendasi.

Banjar, 1 Maret 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I
International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL)

LAMPIRAN II
Global Unity Forum
Dari Medan Perang Radikalisme Keagamaan Menuju Hidup Berdampingan Secara Damai Mewujudkan *Ummah Wahidah* (*the Unity of Mankind*)

LAMPIRAN III
بيان (جيراكان بيمودا أنصار) بخصوص الإسلام الإنساني نحو إعادة زرع التعاليم الإسلامية في سياق ينشد سلام العال والانسجام بين الحضارات

LAMPIRAN IV
بيان نوسانتارا أعَدَّته وأصْدَرَته

LAMPIRAN V
وثيقـة الأخوة الإنســـانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك

LAMPIRAN VI
Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU; Sebuah Catatan Pendek

LAMPIRAN VII
Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan

LAMPIRAN VIII
Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (*Mashlahah ‘Ammah*) dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

LAMPIRAN IX
Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Lingkungan Hidup

LAMPIRAN I

DEKLARASI INTERNATIONAL SUMMIT OF MODERATE ISLAMIC LEADERS (ISOMIL)
10 MEI 2016

بلاغ نهضة العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ٧٠١)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٠٧)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج:٨٧)

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهقي)

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا ، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا (رواه مسلم)

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (رواه النسائ)

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِفْقَ فِى الْأَمْرِ كُلِّهِ (متفق عليه)

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

قَالَ بْنُ بَطَّالٍ فِيهِ الحَضُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الخَلقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ وَالتَّخْفِيفُ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكُ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ (انظر ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بيروت-دار المفرفة، ٩٧٣١ه، ج، ٠١، ص. ٠٤٤)

مِنَ الْمَعْلُوْمِ اَنّ النّاسَ لاَبُدّ لَهُمْ مِنَ الْاِجْتِمَاعِ وَالْمُخَالَطَةِ ِلأَنّ الْفَرْدَ الْوَاحِدَ لاَيُمْكِنُ اَنْ يَسْتَقِلّ بِجَمِيْعِ حَاجَاتِهِ، فَهُوَ مُضْطَرٌّ بِحُكْمِ الضّرُوْرَة اِلَى الْاِجْتِمَاعِ الّذِيْ يَجْلِبُ اِلَى اُمّتِهِ الْخَيْرَ وَيَدْفَعُ عَنْهَا الشّرّ وَالضّيْرَ. فَالْإِتّحَادُ وَارْتِبَاطُ الْقُلُوْبِ بِبَعْضِهَا وَتَضَافُرُهَا عَلَى اَمْرٍ وَاحِدٍ وَاجْتِمَاعُهَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَهَمّ اَسْبَابِ السّعَادَةِ وَاَقْوَى دَوَاعِى الْمَحَبّةِ وَالْمَوَدّةِ. وَكَمْ ِبهِ عُمّرَتِ البِلاَدُ وَسَادَتِ الْعِبَادُ وَانْتَشَرَ الْعِمْرَانُ وَتَقَدّمَتِ الْاَوْطَانُ وَاُسّسَتِ الْمَمَالِكُ وسُهّلَتِ المسَالِكُ وَكَثُرَ التّوَاصُلُ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَوَائِدِ الْاِتّحَادِ الّذِيْ هُوَ اَعْظَمُ الْفَضَائِلِ وَأَمْتَنُ الْاَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ (الرئيس الأكبر لجمعية نهضة العلماء الشيج العالم العلامة هاشم أشعري, مقدمة القانون الأساسي لجمعية نهضة العلماء)

١. تقدم الجمعية أفكار وخبرات إسلام نوسانتارا للعالم كالمنهج الذي يصلح اقتدائه علما بأن الدين قد ساهم مساهمة كبيرة في تكوين التقدير للحضارة الإنسانية والتعايش والسلام.

٢. لم تقصد الجمعية بتقديم هذه الأفكار فرض تطبيقها على العالم، وإنما الدعوة إلى التجمعات الإسلامية لاستذكار الإبداعات والحيويات النابغة

من التلاقح التاريخي بين روح الإسلام و تعاليمه مع الثقافات المحلية في أنحاء العالم التي أظهرت الحضارات الكبيرة كما حدثت في نوسانتارا .

٣. إن إسلام نوسانتارا ليس دينا جديدا ولا مذهبا حديثا وإنما هو مظهر من مظاهر تطبيق الإسلام الذي ينمو طبيعيا في أوساط ثقافات نوسانتارا ولم يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي يمارسها أهل السنة والجماعة في أنحاء العالم.

٤. إنه في نظر إسلام نوسانتارا ، لم يكن هناك أي تعارض بين الدين والوطنية علما بأن حب الوطن من الإيمان. فمن ليس له الوطنية فلا وطن له ومن لا وطن له فليس عنده تاريخ. ومن ليس له تاريخ ليس له ذاكرة.

٥. وفي نظر إسلام نوسانتارا ، أن الإسلام لم يأمر أتباعه بالسيطرة والهيمنة على العالم ، ولكن يدفعهم على التحلى بمكارم الأخلاق لأن هذه طريقة يحقق الإسلام رحمة للعالمين.

٦. يعتزم إسلام نوسانتارا على اتباع روح الإسلام وتعاليمه الأساسية بما فيه التوسط والتوازن والتسامح والاعتدال ، وتجنب أعمال العنف والإكراه والتطرف والتشدد.

٧. تشاطر جمعية نهضة العلماء باعتبارها أكبر جمعيّات أهل السنة والجماعة في العالم أحزان معظم المسلمين و غير المسلمين في أنحاء العالم الذين تعرضوا لأعمال العنف ويشعرون بالقلق الشديد عن تصاعد التطرف الديني والإرهاب والأزمات في الشرق الأوسط وموجات الخوف من الإسلام في الغرب.

٨. نظرت جمعية نهضة العلماء إلى أن التفسيرات المختلفة للدين بطرق معينة أصبحت عاملة أساسية مؤثرة على تفشى التطرف والتشدد والتنطع وسط

الأمة الإسلامية.

٩. ترى الجمعية بأن عددا من الدول في الشرق الأوسط تعمدت على استغلال اختلاف المفاهيم الدينية والعداوة بين الدول وسيلة لها لتوسيع نفوذها دون النظر إلى عواقبها الوخيمة على الإنسانية كلها ، وذلك من خلال التنافس في كسب السلطات (من خلال التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري) ثم تعميم الأزمات إلى أنحاء العالم. أن هذا الاستغلال هو الذي يدعم انتشار التطرف في أنحاء العالم.

٠١. إن التشدد والتطرف الديني قد لعب دورا مباشرا في تصاعد موجات الخوف من الإسلام وسط المجتمع غير المسلم.

١١. تعتمد حكومات بعض الدول في الشرق الأوسط على شرعيتها السياسية من التفسيرات الدينية التي تحثّ على التطرف الديني والإرهاب. إن مشكلة التطرف الديني يمكن معالجتها والتغلب عليها إذا كانت تلك الدول تستعد للانفتاح وتبنى االمصادر البديلة لسياستها.

١٢. وإن جمعية نهضة العلماء مستعدة للقيام بواجبها على المشاركة في تسوية هذه المشكلة.

١٣. أن الفقر وانعدام التوازن الاقتصادي يساهمان أيضا في تفشى التطرف والتشدد وإنهما يستغلان من قبل عدد من الدول الغنية لشن الحملات الشنيعة في عدد من الدول الأخرى.

١٤. تصر جمعية نهضة العلماء على حكومة إندونيسيا لاتخاذ دور فعال وبناء لأجل تسوية الأزمات متعددة الأبعاد في الشرق الأوسط ولا تسمح الجمعية لأي طرف كان للتخلى عنها بل تجعلها بضاعة لكسب الأرباح.

١٥. تدعو الجمعية جميع الأمم من كل فئات وأديان وطوائف التي لها حسن

النية للإتفاق على عدم تسييس الدين ، وتهميش من كان له سوء النية لاستغال الدين وإشاعة الفساد فيما بينهم.

١٦. تبذل الجمعية جهودها لتحقيق السلام في العالم حيث يكون الإسلام والمسلمون رحمة للعالمين.

LAMPIRAN II

PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR
Jl. Kramat Raya No. 65 A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-316929
Website : http//www.ansor.or.id E-mail : gpansor@yahoo.com

Global Unity Forum

Dari Medan Perang Radikalisme Keagamaan Menuju Hidup Berdampingan Secara Damai
Mewujudkan *Ummah Wahidah* (*the Unity of Mankind*)
Jakarta, 12 Mei 2016

I. Dasar Pemikiran

Saat dunia tersandung ke tubir jurang kekacauan, mereka yang memahami watak paradoks agama mempunyai tanggung jawab unik untuk membantu menghentikan gelombang kebencian dan kekerasan komunal yang mengancam memusnahkan umat manusia.

Sejak serangan 9/11 yang dahsyat, sedikit pemimpin politik—di dunia Muslim atau Barat—yang telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk mengakui sebuah kebenaran yang sangat jelas: bahwa ajaran-ajaran agama bisa berguna untuk membangun atau menghancurkan peradaban.

Sepanjang sejarah, nilai-nilai luhur agama telah mengilhami keagungan individual dan peradaban. Namun sejarah juga membuktikan bahwa agama bisa berguna sebagai alat pengagungan diri dan penaklukan yang efektif. Sejarah Islam, seperti sejarah Kristen, menyediakan bukti yang cukup atas fakta ini. Persitiwa terbaru di Myanmar, dan prilaku Jepang dalam Perang Dunia II, menggambarkan bagaimana Budhisme dan Shintoisme telah digunakan untuk sebuah tujuan yang sama, seperti dilakukan seorang Hindu pembunuh Gan-

dhi.

Konflik atas nama agama telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah. “Akar penyebab” masalah ini adalah watak manusia sendiri, dan secara khusus, kecenderungan yang sangat manusiawi para penganut agama untuk memandang diri mereka sebagai sebuah kelompok yang eksklusif, yang sama sekali berbeda, dan lebih unggul, dari mereka yang mengikuti sekte yang lain. Kapan pun dan di mana pun pandangan ini menonjol, agama bisa menjadi penyebab atau digunakan sebagai alasan yang nyaman untuk, konflik.

Sebuah pandangan agama yang eksklusif melahirkan pemisahan diri. Ketika dikawinkan dengan kekuasaan politik, ia juga mengilhami diskriminasi terhadap mereka yang menganut keyakinan lain. ISIS, al-Qaeda dan pembersihan atas nama agama baru-baru ini di Timur Tengah hanyalah manifestasi kontemporer dari fenomena klasik ini, yang telah menuai panen duka dan kesedihan yang pahit sepanjang sejarah manusia.

Penolakan pemerintah untuk mengakui dan melawan pandangan dunia keagamaan ISIS dan al-Qaeda—yakni, interpretasi supremasis Wahhabi atas al-Qur’an, Sunnah dan hukum Islam klasik—mengubah pemerintahan-pemerintahan ini tidak mampu melindungi warga mereka sendiri dari menyebarnya ancaman ekstremisme keagamaan dan fenomena pantulannya di Barat, Islamofobia.

Standar ganda adalah biasa pada kedua sisi dari pembagian agama mana pun. Misalnya, di mana pun umat Islam mendapati diri mereka minoritas, mereka menuntut kebebasan, keadilan, dan kesejajaran di hadapan hukum. Namun kapan pun mereka menjadi mayoritas, umat Islam cenderung mendiskriminasi agama minoritas, sebagaimana terlihat jelas di seluruh dunia Islam dan bahkan di jalanan kota-kota Eropa saat ini. Prilaku ini muncul dari penggabungan agama dengan identitas kelompok, yang menciptakan sebuah batasan psikologis dan emosional antara diri sendiri dan “yang lain.”

Jika kita ingin mundur dari jurang kekacauan, kita perlu meruntuhkan tembok pemisah keagamaan dan mengakhiri penyalahgunaan keyakinan sektarian kita sendiri, yang begitu sering digunakan untuk

membenarkan kebencian, diskriminasi, dan kekerasan terhadap yang lain. Alih-alih, kita harus melihat agama sebagai sumber ajaran-ajaran mulia yang mendorong kita mengembangkan *akhlakul karimah* dan menjadi *rahmah* bagi seluruh makhluk, atau *rahmatan lil-'alamin* (QS. 21: 107).

Ini adalah aspek spiritual agama yang mengajak kita untuk benar-benar menjadi manusia (yakni, manusiawi) dan memanusiakan—bukannya mempersetankan—yang lain.

> *"Dan jika Allah menghendaki, Dia pasti menjadikan kamu semua satu umat (ummatan wahidah); tetapi [Dia berkehendak lain] untuk menguji kamu melalui apa yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah melakukan kebaikan! Hanyalah kepada Allah kamu semua pasti kembali, lalu Dia akan membuatmu benar-benar mengerti tentang apa yang kamu perselisihkan" (QS. 5: 48).*

Ayat ini, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. pada tahun terakhirnya di Madinah, menunjukkan bahwa adalah tidak mungkin pun dikehendaki bagi kelompok mana pun untuk memaksa yang lain menganut satu agama.

Setiap umat manusia adalah "anak Adam," dan bersama-sama kita menyusun satu komunitas (*ummah wahidah*) bersatu untuk mengabdi sebagai khalifah Allah di bumi (*khalifah fil-ardl*)—sebuah istilah yang al-Qur'an gunakan lebih untuk makna keahlian spiritual daripada politik.

Jika kita ingin mengakhiri lingkaran setan kekerasan primordial atas nama agama, kita harus mengakui bahwa banyak tradisi ortodoks agama yang mendorong para penganutnya melakukan pemisahan diri dan, seringkali, melakukan diskriminasi terhadap yang lain. Ajaran-ajaran seperti itu tertanam dalam di dalam hukum Islam klasik (*fiqh*) sendiri.

Fiqh merupakan respon para ahli hukum Islam, dan para penguasa, terhadap lingkungan-lingkungan yang kacau dan terkadang brutal pada masa dan tempat mereka. Manakalah lingkungan berubah, *fiqh* seharusnya merespon dengan tepat. Sebagaimana *ushul fiqh* (teori hukum Islam klasik) ajarkan: *al-hukm yaduru ma' al-'illati wujudan wa*

'adaman. "Hukum ada bersama, dan tak terpisahkan dari, alasan keberadaannya."

Para pemuda adalah target rekrutmen primer ISIS dan al-Qaeda. Kita tidak bisa melindungi para pemuda Muslim dari seruan "ekstremisme keras" tanpa mengubah persepsi kita sendiri tentang agama, dan kewajiban-kewajiban yang ia bebankan kepada kita.

Taruhannya sangatlah besar. Tersebarnya ancaman ekstremisme religius dengan sangat cepat, yang sedang mempertentangkan umat Islam dan non-Muslim di seluruh dunia—bersama dengan urbanisasi massal, proliferasi nuklir, dan rentannya ekonomi global dewasa ini untuk digunakan sebagai gangguan—menuntut tindakan bertanggung jawab dari mereka yang berada dalam posisi mencegah bencana. Karena jika kita terus memahami dan mempraktikkan agama kita tanpa melakukan adaptasi dengan realitas-realitas saat ini, mungkin tidak ada masa depan bagi kebanyakan kita.

II. Seruan GP Ansor

Yakin bahwa Islam telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai "rahmat bagi seluruh makhluk," dan sebagai cara untuk menyempurnakan akhlak mulia, Gerakan Pemuda Ansor menyeru untuk mengakhiri konflik atas nama agama, dan kepada para Ulama yang mumpuni untuk menguji dengan hati-hati dan membicarakan elemen-elemen *fiqh* yang mendorong pemisahan, diskriminasi, dan/atau kekerasan kepada siapa pun yang dipahami sebagai "non-Muslim."

III. Tindakan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan komitmen kami bersama untuk mengembangkan sebuah rencana yang efektif dan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kongkret yang dibutuhkan demi suksesnya mengakhiri pemisahan tak sengaja, diskriminasi, permusuhan, dan konflik atas nama agama pada semua tingkatan masyarakat, termasuk lokal, regional, nasional, dan memperluas aktivitas-aktivitas ini secara global.

Ditandatangani oleh

Gerakan Pemuda Ansor

Yaqut Cholil Qoumas
KetuaUmum

Pemuda Katolik Karolin Margaret Natasa Ketua Umum	DPP Gerakan Muda Kristen Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Michel Wattimena Ketua Umum
PerhimpunanPemuda Hindu (Peradah) D Sures Kumar Ketua Umum	Coptic Christian Samuel Tadros Senior Fellow at the Hudson Institute's Center for Religious Freedom
Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) Bambang Patijaya Ketua Umum	Fons Vitae Ms. Virginia Gray Henry Founder and Director

LAMPIRAN III

بيان (جيراكان بيمودا أنصار) بخصوص الإسلام الإنساني
نحو إعادة زرع التعاليم الإسلامية في سياق ينشد سلام العالم والانسجام بين الحضارات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء : ١٠٧)

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهقي)

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة : ١٩٥)

عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُوْنَ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مُرِيْدًا بِرَبِّهِ مُقْبِلًا بِشَأْنِهِ

«إن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم الإسلامي المعاصر يتمثل في أن نحقق الانسجام بين فهمنا الإنساني المحدود للقانون الإسلامي وروحه المقدسة – وذلك لكي نُبرزَ رحمةَ اللهِ وعطفه، ولكي نأتي ببركات السلام والعدل والتسامح لعَالَمٍ يعاني". ~ الشيخ عبد الرحمن وحيد، رئيس المجلس التنفيذي لجمعية نهضة

العلماء (٤٨٩١-٩٩٩١) والرئيس الرابع لجمهورية إندونيسيا.

«إن الشريعة، حين تُفهَم بالشكل المناسب، فإنها تُعَبِّر عن القيم الدائمة وتُجسِّدها. إن القانون الإسلامي، من ناحية أخرى، هو نتاجُ الاجتهادِ (التفسير) الذي يعتمد على الظروف (الحُكمُ يدور مع العلَّة وجودًا وعدمًا) والحاجات وذلك لكي يتم مراجعتها باستمرار وفق الظروف المتغيرة على الدوام لنمنع القانون الإسلامي من أن يعاني من الفوات الزمني (كي لا يصبح متأخرًا زمنيًا) ويصير صلبًا وغير مترابطٍ – ليس فقط في حيوات المسلمين المعاصرين وأوضاعهم، وإنما أيضًا مع القيم الأزلية الأساسية للشريعة نفسها". ~ الشيخ عبد الرحمن وحيد.

«إن كل شيء يتغير، ولذلك يجب أن نتغير نحن أيضًا. يجب أن يتغيرَ العلماءُ، لأن الفشلَ في تحقيقِ ذلك الأمرِ سوف يؤدي حصريًا إلى العار والشعور بالإحراج». ~ الشيخ ميمون زُبَير، المستشار الأعلى للمجلس الأعلى لنهضة العلماء.

«في رأيي، يجب على القرآن أن يوفر حلولًا للإنسانية – ليس فقط للمسلمين ولكن للغرب كذلك. "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (الأنبياء: ٧٠١). ماذا يعني هذا؟ كل الخلق، وكل البشر، بمن فيهم هؤلاء الذين لا يؤمنون (بالإسلام) يجب أن يشعروا بالحب والرحمة وإلا سوف نبقى محتجزين في إشكاليتنا المعاصرة». دكتور. أ. صيافي معاريف، رئيس سابق، المجلس الرئيسي لجمعية المحمدية.

«دعونا لا ننتقص من قدر التفسيرات المبكرة للقرآن. إن مجرد وجود تفسير جديد يُمَثِّلُ كلَّ التفاعلِ الذي ننشده (تجاه ما حدث من قبل). أظن أننا لو تحدثنا بشكل صافٍ عن التأويل والمعرفة الواسعة الاطّلاع، فلن تكون هناك مشكلة. بالأخص لو كانت غايتنا تتمثل في أن نتحقق من الكيفية التي يمكن بها للقرآن أن يلائم عصرنا الحاضر. لأن الناس يقولون دومًا إن القرآنَ صالحٌ لكل الأزمنة والأمكنة. ولكن إن تم تطبيق التفسيرات القديمة في عصرنا، بالطبع سيصبح الذين يحيون الآن في حالة تَشَتُّتٍ وتحيُّر". ~ الشيخ أ. مصطفى بصري، رئيس بيت الرحمة للدعوة الإسلامية رحمة للعالمين والرئيس السابق للمجلس الأعلى

لنهضة العلماء.

«منذ ٤١ قرنًا، ووفق الاستخدام الوحيد لكلمة الشريعة في القرآن، يخبرنا الله بأن الإنسانية قد مُنِحَت «شريعة من الأمرِ» (الجاثية: ٨١). إن هذا الطريق، طريق الإرشاد الأخلاقي والحكمة، يقود إلى تحقيق هدف حياة الإنسان: أن يعرف الطبيعة الروحية والأبعاد الحقيقية للواقع، الجوهر الذي هو الحب. هذا الطريق يتم الحديث عنه إجمالًا في سورة (مريم: ٦٩)، «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَـٰنُ وُدًّا». ويتم إنذار المسلمين أيضًا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (المائدة: ٤٥). إن الحب هو جوهر الإسلام. ~ الشيخ كبير هيلمينسكي.

كُلُّ شَيْءٍ يَجْرِيْ عَلَى التَّقْدِيْرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَعْرِفُ التَّقْدِيْرَ إِلَّا بَعْدَ الْوَقَعِ فَعَلَيْنَا الْاِخْتِيَارُ وَعِنْدَ اللهِ الْاِخْتِيَارُ فَمَنْ وَافَقَ اخْتِيَارُهُ بِاخْتِيَارِاللهِ فَهُوَ سَعِيْدٌ ~ الشيخ الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط با علوي.

استضافت جيراكان بيمودا أنصار (جي بي أنصار GP Ansor–) وبيت الرحمة للدعوة الإسلامية رحمة للعالمين ملتقىً دوليًا للعلماء (الباحثون المسلمون) في يومي الواحد والعشرين والثاني والعشرين من مايو ٧١٠٢، في مدرسة بحر العلوم بطَمباك بيراس، جومبانج، شرق جافا – مكان مولد جمعية نهضة العلماء وحركة شبابها اليافعين، (جي بي أنصار GP Ansor–).

بعد مناقشة مكثفة ومشاورات مع الخبراء في عديد المجالات المرتبطة بالموضوع المذكور أعلاه والذين شاركوا في ملتقى العلماء، قررت (جي بي أنصار GP Ansor) أن تقوم بتبنّي بيان "(جيراكان بيمودا أنصار) بخصوص الإسلام الإنساني"، كما يلي:

الجزء الأول

(I)

السياق

١- في نظرية القانون الإسلامي الكلاسيكي تُمَثِّل (أصول الفقه) والأحكام (مفردها: حُكم)، استجابةً للواقع. والغرضُ من مقاصدِ الشريعة هو ضمان المقومات الروحية والمادية القويمة للإنسانية.

٢- قام الفقهاء السنّيون ذوو السلطة، الإمام الغزالي والإمام الشاطبي بتحديد خمسة مكونات أوّلية لمقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل ، والمال.

٣- الأحكام الدينية قد تكون كونية وغير متغيرة مثل الأمر الإلهي بأن يجاهد الإنسان ليحوز التميُّز الأخلاقي والروحي – أو ربما تكون مشروطة لو أنها – أي هذه الأحكام – تخاطب قضية محددة تنبع من داخل الظروف الآخذة في التغير دوماً على مستوى الزمان والمكان.

٤- بما أن الواقع يتغير، ومشروط – في مقابل الكوني – فإن الأحكام الدينية يجب أن تتغير أيضًا لتعكسَ الظروف المتغيرة في الحياة على كوكب الأرض بشكلٍ مستمر. كانت هذه هي الحالة أثناء القرون الأولى من الإسلام، فانبثقت العديد من المذاهب الإسلامية وتطورت. وخلال القرون الخمسة الماضية، مع ذلك، فإن ممارسة الاجتهاد (والاجتهاد هو استدلال شرعي مستقل، يتم توظيفه لاستخراج أحكام دينية جديدة) قد تضاءلت وانقضت في العالَم المسلم السُنّي.

٥- عندما ينشدُ المسلمون المعاصرون الهداية الدينية، فإن المصدر المرجعي صاحب السلطة، والأكثر انتشارًا ووثوقية، ومقياس الأرثوذكسية

الإسلامية بالفعل، هو مجموعُ كتابات الفكر الإسلامي الكلاسيكي (التراث) وبالأخص (الفقه) – والذي بلغ مداه الأقصى، على مستوى التَطَوُّر، في العصور الوسطى ثم حدث أن تجَمَّدَ في محله، وبشكل كبير لم يتغير حتى وقتنا الحالي.

٦- يوجد الآن تباين كبير بين بنية الإسلام الأرثوذوكسي والسياق الفعلي (المعيشي) لواقع المسلمين نتيجة للتغييرات الهائلة التي قد حدثت منذ نمت تعاليم الإسلام الأرثوذوكسي بشكل مُتَعاظم قرب نهاية حقبة العصور الوسطى.

٧- هذا الانفصال بين العقائد الأساسية للإسلام الأرثوذوكسي وواقع الحضارة المعاصر يمكنه أن يؤدي بالمسلمين لخطر مادي وأخلاقي وروحي، وغالبًا ما يحدث ذلك، لو أنهم أصروا على التعامل مع عناصر معينة في الفقه بصرف النظر عن سياقها الحالي. ومن هذه القضايا المُرَكَّبَة التي تستقر في قلب هذه المفارقة ما يلي:

- الممارسات المعيارية (التنظيمية) التي تحكم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، بما يتضمن الحقوق والمسؤوليات ودور غير المسلمين الذين يحيون في مجتمعات ذات أغلبية مسلمة، والعكس؛

- العلاقات بين العَالَم المسلم والعَالَم غير المسلم، بما يشمل الأهداف الملائمة وقانون الحرب؛

- وجود الدول القطرية الحديثة وصلاحيتها – أو نقصها وما تعلق به – باعتبارها أنظمة سياسية تحكم حياة المسلمين؛

- ومؤسسات الدولة والأنظمة التشريعية القانونية، والقوانين التي تنبثق من العمليات السياسية الحديثة، وعلاقاتها بالشريعة.

٨- إن عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والحروب الأهلية، والإرهاب، كل ذلك يبزِغُ من محاولة يقوم بها مسلمون محافظون بشكل رجعي، لكي يقوموا بتطبيق عناصر معينة من الفقه في سياق لم يعد متوافقًا مع الأحكام الدينية الكلاسيكية السالفة الذِكر.

٩- أي محاولةٍ لإنشاء دولة إسلامية عالمية (الإمامة العظمى)، والمعروفة كذلك باسم الخلافة، سوف تؤدي فقط إلى كارثة تصيب المسلمين، باعتبار أن كل طامِحٍ سيتقاتل مع من يشاركه نفس النزوع للسيطرة على العالم الإسلامي بأسره.

١٠- من تاريخ الإسلام عقب وفاة الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم)، يوضح لنا سيدنا علي (زوج ابنة الرسول فاطمة) أن أي محاولة لاكتساب أو تعزيز سلطة سياسية/ عسكرية في هيئة الخلافة سوف يكون مصحوباً، بشكل حتمي، بذبح أعداء هذا المرء، وسيتسبب كذلك بمأساة للاجتماع المسلم ككل، بالتحديد مع بداية سلالة جديدة حاكمة.

١١- عندما يقترنُ هذا المجهود مع الأمر الأرثوذوكسي بالانخراط في حرب هجومية ضد غير المسلمين – حتى يتحولوا للإسلام أو يستسلموا للحكم الإسلامي، وذلك كي يكون العالم بأكمله مُوَحَّدًا تحت راية الإسلام – فإن هذا الأمر يمثل استدعاءات لصدامٍ أزلي ودائم، والذي تزداد جاذبيته وتأخذ في الاتساع من وجهة نظر المسلم، وهذا الأمر مُتَجَذِّرٌ في التاريخ وتعاليم الإسلام نفسها.

١٢- بالفعل، إن العناصر السلطوية بالفقه تَصِفُ هذا النزاع باعتباره إلزامًا دينيًا – والذي، في أوقات ما، يصير مُحتَّمًا على المجتمع المسلم بشكلٍ عام، والآخرين، وعلى كل ذكرٍ مسلمٍ بالغٍ، معتمدًا على الظروف المرتبطة بالأمر – لأن هذه الأحكام الدينية انبثقت في وقت كان الصراع فيه بين الإسلام والدول المجاورة غير المسلمة، عالمياً بشكل تقريبي.

١٣- لو أن المسلمين لا يخاطبون العقائد الأساسية للأرثوذوكسية الإسلامية التي تعطي السلطة وتوصي بشكل صريح على ممارسة هذا العنف، فإن أي فرد - في أي وقت - يمكنه أن يُطوِّع التعاليم الأرثوذوكسية للإسلام لكي يناهض ما يدّعون بأنها القوانين غير الشرعية والسلطة لدولة كافرة ويقومون بذبح أخوانهم المواطنين، بغضِّ النظر عن إذا ما كانوا يحيون في العالم الإسلامي أو في الغرب. هذا هو السياق الدموي الذي يربط عديد الأحداث الحالية بعضها البعض، من مصر، وسوريا، واليمن لشوارع مومباي، وجاكرتا، وبرلين، ونيس، وستوكهولم، ووستمنستر.

١٤- إن الانقسام المجتمعي، وأفعال الإرهاب، والتمرُّد، والحروب الفورية -والتي تُرتكَب كلها باسم الإسلام - سوف تستمرُ في إيذاء المسلمين ووضعهم في البلاء، وتُهَدِّدُ الإنسانية ككل، حتى يتم الإقرار بهذه القضايا وحلها بشكل منفتح.

١٥- من الواضح أن العالم بحاجة إلى أرثوذوكسية إسلامية مغايرة، وهي نفسها التي سوف يعتنقها أغلبية المسلمين ويتَّبعونها.

١٦- إن السؤال الذي يواجه الإنسانية - المسلمون وغير المسلمين على السواء - هو: كيف يمكننا أن نُشَجِّعَ ونضمن بشكل حاسم ونهائي، أن مثل هذا البديل لا يظهر فقط، ولكن يصبح بمثابة أرثوذوكسية مهيمنة؟

تاريخ الجهود لإعادة زرع التعاليم الإسلامية في سياق أرخبيل الملايو

١٧- في مغايرة للانفصال بين الملامح الرئيسية/ المفتاحية للأرثوذوكسية الإسلامية والواقع الفعلي في أغلب البلدان الإسلامية، بورِكَت إندونيسيا بالقدوة التاريخية، لهؤلاء العظماء، مثل الـ «والي سونجو» (أو الأولياء التسعة)، الذين تحولوا لـ «إسلام نوسانتارا» (إسلام الهند الشرقية).

أكد هؤلاء الأولياء التسعة وأتباعهم على الحاجة المُلِحَّة لإعادة موضعة التعاليم الإسلامية والتكيف مع الوقائع الآخذة في التغيُّر زمانياً مكانياً، وتقديم الإسلام، لا بما هو إيديولوجيا استعلائية أو أداة للغزو والفتح، وإنما كطريق من طرق عدة يحصل البشر من خلالها على الكمال الروحي.

١٨- واتساقاً مع تعاليمهم، بدأ الإسلامُ يَتَجَذَّرُ عبر أغلب أرخبيل الهند الشرقية، مساهمًا في توطيد عمق وجمال حضارة النوسانتارا القارَّة بالفعل مع الاحتفاظ بالانسجام المجتمعي بدلًا من تمزيقه.

١٩- تلتزم نهضة العلماء وحركة شبابها اليافعة (جي بي أنصار - GP Ansor) بحمل إرثها النبيل. ولقرابة القرن، قام علماء نهضة العلماء بتطوير كيانٍ شاسعٍ ومديدٍ من الخطاب الديني الذي ليس فقط يُؤَمِّنُ شرعية إندونيسيا باعتبارها دولة قومية متعددة الأديان وتعددية بالعموم، وإنما أيضًا يخدم كمشروع تجريبي رائد يستعرض مدى جدوى التعاون بين العلماء ورجال الدولة لتطوير أنظمة سوسيو-سياسية، لاهوتية-شرعية، حديثة والتي تُعَزّز رخاء المسلمين وغير المسلمين على السواء.

٢٠- أثناء الكونجرس السابع والعشرين الخاص بها، والمقام في سيتوبوندو، شرق جافا في عام ٤٨٩١، قام الرئيس المُنتَخَب للمجلس الأعلى لنهضة العلماء، كياي حاجي أحمد صدّيق، بتأسيس إطار عمل لاهوتي لمبدأ الأخوة والذي لم يكن مقصورًا على المسلمين (أخوة إسلامية)، وإنما يشمل كل المواطنين (أخوة وطنية)، وبالفعل، أخوة كل البشرية (الأخوة البشرية).

٢١- في عام ٢٩٩١ - في ملتقى دولي للعلماء المسلمين في لامبونج، تحت إشراف وتوجيه الحاج عبد الرحمن وحيد - أقرَّت نهضة العلماء بأن السياق المتغير للواقع يستلزم بالضرورة خلق تفسيرات جديدة للقانون الإسلامي والتعاليم الإسلامية الأرثوذوكسية.

٢٢- في نفس هذا الملتقى/ المؤتمر، أصدرت نهضة العلماء قرارًا ينص على: لو أن المجتمع المسلم لا يستطيع أن يجد الأفراد الذين يرتقون لمرتبة المُجْتَهِدِ (وهو الشخص المُخَوَّل له أن يمارس الاستدلال المستقل ليخرج بقانون إسلامي)، فإن العلماء يجب أن يتحملوا عبء المسؤولية وأن يمارسوا الاجتهاد الجمعي (استخدام الاستدلال المستقل لصياغة قانون إسلامي)، والذي يسمى بـ "الاستبانة الجماعية".

٢٣- لقد أسبغ العلماء على الأمة الإندونيسية NKRI) شرعية لاهوتية عميقة وأصيلة، من خلال التقديم لعددٍ من النقاشات الدينية القوية لصالحها. إن الأسس العقلية اللاهوتية التي وظّفَها العلماء لجعل NKRI شرعية كانت نتاج الاجتهاد الجديد والذي لا يمكن أن يوجد في النصوص السلطوية للفقه والمستَمَدَّة من قانون الفكر الإسلامي الكلاسيكي.

٢٤- وأكثر من ذلك، نجح هذا الاجتهاد الجديد في تأمينِ الدعمِ لأغلبية ساحقة من المسلمين الإندونيسيين، بينما، في الآن نفسه، يساعد هذا الاجتهاد في تشكيل الرؤى والعقلية الدينية.

تهديدٌ لكل الإنسانية

٥٢- إن العالم الإسلامي يقبع الآن في وسط أزمة تستشري بشكل سريع، بدون أي بادرة ظاهرة للانحسار أو لهدوء الأوضاع. ومن ضمن التجليات الأكثر وضوحًا لهذه الأزمة الصراعات الدامية المُسْتعِرَة الآن على امتداد رقعة هائلة من المناطق المأهولة بالمسلمين، من إفريقيا والشرق الأوسط وحتى حدود الهند؛ والاضطراب الاجتماعي المتفشي بامتداد العالم الإسلامي؛ والانتشار غير المحدودِ للتطرُّف الديني والإرهاب؛ والمدُّ المرتفعُ للإسلاموفوبيا عند الشعوب غير المسلمة، في استجابة مباشرة لهذه التطورات.

٢٦- إن أغلب الفاعلين السياسيين والعسكريين المنشغلين بالصراعات يسعون وراء أجنداتهم التنافسية بدون اعتبار التكلفة التي تُدفَع من حيوات الناس وبؤسهم. لقد أدَّى هذا الأمرُ إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، واشتداد الرغبة، والتسريع، بشكل دراماتيكي، من انتشار حراك ثوري إسلاموي في الواقع يُهَدِّدُ استقرارَ وأمنَ العالمِ بالأكمل، من خلال استدعاء مسلمين للانضمام لتمردٍ عالمي مُوَجّه ضد النظام العالمي القائم.

٢٧- وبمعنى آخر، فإن الكارثة التي تكتنف العالم الإسلامي ليست مقصورة على الصراعات المُسَلَّحَة في مناطق متنوعة ومتفرقة. وبسبب القيمة الترانسندنتالية «المتعالية» المنسوبة إلى الإيمان الديني بواسطة أغلبية المسلمين، فإن المنافسة من أجل السلطة في العالم الإسلامي تشتمل بالضرورة على مركب طائفي/ إيديولوجي (أي: ديني).

٢٨- عديدُ الفاعلين – كإيران، ولكن الأمر لا يقتصر على إيران والسعودية وداعش والقاعدة وحزب الله وقطر والإخوان المسلمين وطالبان وباكستان – يتلاعبون، بازدراء شديد، بالعاطفة الدينية في صراعهم للحفاظ على السلطة السياسية والاقتصادية والعسكرية أو الاستحواذ عليها وكذلك لتدمير أعدائهم. وهم يفعلون ذلك من خلال التوظيف النفعي لعناصر أساسية في القانون الإسلامي الكلاسيكي (الفقه)، والذي ينسبون له سلطة مُقَدَّسَة وذلك لكي يقوموا بتعبئة الدعم البشري لخدمة أهدافهم الدنيوية.

٢٩- ومما يَظْهَرُ كردٍّ فعلٍ على هذه الظاهرة، يقتبس الإصلاحيين الغربيون والقوميون الهندوسيون والرهبان البوذيون في سريلانكا وميانمار العناصر المتطابقة المتعلقة بالإسلام الأرثوذكسي وتصرفات المسلمين، وذلك لتبرير تصوّرهم عن الإسلام باعتباره إيديولوجيا سياسية هدّامة مُخَرِّبَة، بدلًا من اعتبارها دينًا مُستحقًا لحمايات دستورية وكذلك الاحترام.

حدد إعلان ISOMIL Nahdlatul Ulama عام ٦١٠٢

السبب الأساسي لهذه الأزمة المتصاعدة بسرعة

٠٣- نُشِرَ –بوضوح – في إعلان نهضة العلماء، في القمة الدولية للقادة المسلمين المعتدلين، في مايو ٦١٠٢:

٨- تعتبر نهضة العلماء أنماطًا محددة من تفسير الإسلام بمثابة العامل الأكثر بروزًا وخطورة والمُسَبِّب لانتشار التطرف الديني بين المسلمين.

٩- خلال عديد العقود المنصرمة، قامت حكومات متعددة في الشرق الأوسط باستغلال الاختلافات الدينية، وتاريخ العداء بين الطوائف، بدون مراعاة لعواقب مثل هذه السياسات على الإنسانية بشكل عام. ومن خلال تحويل الاختلافات الطائفية لسلاح، سعت هذه الحكومات لممارسة كلٍ من القوة الناعمة والصارمة، وقامت بتصدير نزاعاتها للعالم بأكمله. لقد قامت بروباجاندا الحملات الطائفية بتغذية التطرف الديني عن عمد، وقامت بتأجيج انتشار الإرهاب عبر العالم بالكامل.

٠١- هذا الانتشار للتطرف الديني، والإرهاب، يساهم بشكل مباشر في بزوغ الإسلاموفوبيا على امتداد العالم غير المسلم.

١١- تستند حكومات معينة في الشرق الأوسط شرعيتها السياسية من هذه التأويلات والتفاسير الإشكالية للإسلام بالتحديد والتي تدعم وتنعش التطرف الديني والرعب. تحتاج هذه الحكومات لتطوير مصدر بديل للشرعية السياسية لو أن العالم يريد تجاوز تهديد التطرف الديني والرعب.

١٢- تعرب نهضة العلماء عن استعدادها للمساعدة في هذا الجهد.

١٣- تناشد نهضة العلماء أصحاب النوايا الحسنة من كل إيمان ودولة للانضمام في بناء إجماع عالمي، لا يهدف إلى تسييس الإسلام، ولتهميش هؤلاء الذين يستغلون الإسلام بطريقة تهدف لإلحاق الأذى بالآخرين.

١٤- ستكافح نهضة العلماء لتوحيد مجتمع أهل السنة والجماعة للوصول إلى عالم يكون فيه الإسلام والمسلمون مستفيدين ويساهمون في رخاء الإنسانية.

اتصال نقدي

٣١- سواء كان المسلمون واعين أو لا، راغبين في ذلك أو لا، فإنهم يواجهون اختيارًا بين عديد الرؤى للمستقبل. هل سيكافحون لإعادة خلق الوحدة الدينية، السياسية، والإقليمية التي طالت غيبتها تحت شعار الخلافة – وبالتالي السعي لاسترجاع الاستعلائية الإسلامية – كما تنعكس في ذاكرتهم الجمعية ولا تزال راسخة بقوة في المنظومات الفكرية السائدة (مجموعة النصوص المؤسسة للثقافة)، وكما تنعكس عبر العالم، في هيئة الإسلام الأرثوذوكسي السلطوي؟ أم هل سيكافحون في تطوير حساسية دينية جديدة تعكس النتائج الواقعية لحضارتنا الحديث، وتساهم لانبثاق النظام العالمي العادل والمنسجم بحق، والمؤسَّس على احترام المساواة في الكرامة والحقوق لكل إنسان حي؟

٣٢- إن الاختيار الأول يقود بوضوح في اتجاه صدام عالمي اجتياحي – أو، باستخدام لغة المتطرفين السنَّة والشيعة – يشبه أهوال يوم القيامة.

ولكي نتصور الدمار الذي سينجم، لن يحتاج المرء سوى تأمل احتمالية تسيُّد المسلمين في صراع وجودي مع العالم غير المسلم، والذي تضم قوته العسكرية الولايات المتحدة وروسيا والصين.

٣- إن أي جهد لتوحيد القيادة السياسية والعسكرية للعالم الإسلامي بأكمله سوف تُطلقُ إعصارًا، في ذاتها ومن ذاتها، على مقياس واسع. الانتشار النووي، ازدياد التحضر، طبيعة الاقتصاد العالمي الهشَّة والمتداخلة، والتشتت الجغرافي للمسلمين، كل هذا يضمن أن أي محاولة للتوحيد السالف الذكر ستمثل تهديدًا لأعمدة الحضارة نفسها.

٣٤- ويتطلب الاختيار الثاني – والمتمثل في تطوير حساسية دينية جديدة تعكس الظروف الواقعية لعالمنا المعاصر – نوعًا جديدًا من الشجاعة بالكلية، بالإضافة إلى الإلمام بحكمة ومعرفة يتصفان بالعمق والاتساع فيما يتعلق بالعالم الذي نحيا فيه. سيتطلب الأمر من المسلمين إعادة تقييم عدد من المبادئ التي لا تُمَس والراسخة بصرامة في قلب الأرثوذكسية الإسلامية، وتطوير تعاليم دينية جديدة ملائمة للعصر الحديث، وتعبئة الدعم السياسي الضروري لإقامة سلطة دينية بديلة قادرة على نشر والدفاع عن هذه التعاليم الجديدة بينما يتم تقبلُّها تدريجيًا وملاحظتها في ميدان الممارسة العملية من خلال المجتمع المسلم ككل، وأخيرًا تنشئ أرثوذكسية سلطوية جديدة.

الجزء الثاني

(II)

خريطة الطريق

٣٥- إن الاستراتيجية والأفعال اللازمة لمخاطبة الأزمة المتفاقمة بوتيرة سريعة في العالم الإسلامي تمتد إلى ما بعد المجال الفكري، ولا يمكن اختزالها لصيغة مبسطة تتعلق بتطوير أفكار لاهوتية جديدة قادرة على حسم جدالٍ ما لصالحها مع هؤلاء الذين يلتزمون بتبني اللأفكار القديمة. أي مجهود كوني لإصلاح العناصر الإشكالية في تعاليم الأرثوذوكسية سوف يفشل حتمًا لو لم يكن متضَمِّنًا ومصحوبًا بحملة جدّيَّة، سوسيو-ثقافية على المدى الطويل، سياسية، دينية وتعليمية لتحويل فهم المسلمين فيما يتعلق بالالتزامات الدينية وطبيعة الإسلام الأرثوذوكسي نفسه.

٣٦- بالرغم من أن العلماء (الباحثون الدينيون المسلمون) يلعبون دورًا حيويًا في هذا المسعى، إلا أنهم لن يستطيعوا تحقيق المهمة وحدهم. لأننا نعيش في عصر يتميز بالتخويف والتهديد بالإرهاب والعنف، ويتم تحدي حق الحكومات في احتكار العنف بشكل يومي من قِبَلِ الجماعات المتطرفة، والتي غالبًا يتم دعمها ماليًا من حكومات معادية تقارب الإسلام – وبالأخص، العناصر الأساسية بالفقه - بما هو السلاح الأكثر القوة لمهاجمة وتدمير أعدائهم.

٣٧- أكثر من ذلك، تسعى أغلبية الحكومات في العالم المسلم إلى الحفاظ على التحكم الفعال في المؤسسات الدينية وما يتم تلقينه وتعليمه فيها. في ضوء هذه الظروف، يجب على الحكومات التي تُبدي استعدادها لتبني

مقاربة حكيمة وإنسانية للأزمة الموجودة بالإسلام أن تنضم لهذا المسعى، كفاعلين أساسيين، لو أنه من المقدر لهذا الأمر أن ينجح. وبالعكس، فإن الحكومات التي تتدخل في الشؤون المحلية لدول أخرى - تحديدًا في مجال الدين - يجب أن يتم إدانتهم وفق أفعالهم.

لا يحق لأي دولة أن تتلاعب بالتعاليم النبيلة للدين وتستغلها كسلاح في خضم تنافسها مع قوى معادية لها.

٣٨- تشمل العناصر الأساسية لأية جهود متناسقة وطويلة المدى لمعالجة الأزمة المتفشية داخل العالم الإسلامي ما يلي:

- تحديد التهديد واحتواؤه.
- تسوية النزاعات.
- الاجتهاد لوضع تعاليم الدين الإسلامي في سياق مختلف يناسب العصر الحديث من خلال خطاب لاهوتي جديد؛
- تطوير وتبنّي منهج دراسي تعليمي جديد على امتداد العالم الإسلامي؛
- والحركات الأهلية لحشد اتفاق مجتمعي وبناء إرادة سياسية لحل الأزمة.

تحديد التهديد واحتواؤه

٤١- لا يمكن إحراز أي تقدم بشأن تحييد تهديد ما لم يكن هذا التهديد مفهومًا ومحددًا.

٤٢- إنه من الكذب والسلبية أن ندَّعي أن نشاط القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، وغيرها من التنظيمات ليس له علاقة بالإسلام، أو إنه مجرد انحراف

عن تعاليم الدين الإسلامي. ففي واقع الأمر، تُعَدُّ هذه الممارسات نتاجًا للوهابية وغيرها من التيارات الأصولية للإسلام السني.

٤٣- على مدار أكثر من خمسين عامًا، نشرت المملكة العربية السعودية تفسيرًا محافظًا متطرفًا مهيمنًا للإسلام بين المسلمين السنيين على مستوى العالم. وكما يتضح من تاريخ رابطة العالم الإسلامي وغيرها من كيانات الدعوة الوهابية، سلكت الرابطة هذا النهج في نفس الوقت الذي عملت فيه بالتنسيق مع النشطاء المتشابهين في الميول والتابعين لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإسلامية، وغيرها من المجموعات التي لا حصر له والتي تضع الإسلام في إطار سياسي وتسعى لإعادة إحياء عقائد بالية للشريعة الإسلامية تستند إلى الصراع الدائم مع من لا يعتنقون الإسلام.

٤٤- تسارعت جهود المملكة العربية السعودية لفرض عقيدة متطرفة للإسلام السني بعد سقوط الشاه رضا بهلوي في عام ٩٧٩١، وظهور الشيعة في إيران كقوة عنيفة ومزعزعة للاستقرار بشكل كبير في سياق سياسات الشرق الأوسط.

٤٥- خلال القرن السادس عشر الميلادي/ العاشر الهجري، احتلت الدولة الصفوية ما يُعرف اليوم بأذربيجان وإيران، وأجبرت السكان الأصليين على اعتناق الإسلام الشيعي. وساعدت هذه السياسة على تشكيل هوية سياسية ودينية متميزة لإيران في مقابل المنافسين الأساسيين للدولة الصفوية وهم الإمبراطوريات العثمانية والأوزبكية ومغول الهند، والتي اعتنقت الإسلام السني.

٤٦- وقد أدَّت قسوة السياسة الدينية للصفويين، والتي وصلت إلى الاختيار بين تغيير العقيدة والأفكار أو الموت، إلى تحول جماعي لعقيدة الأغلبية العظمى من متحدثي الفارسية والأذربيجانية، والذين اختاروا البقاء داخل حدود الإمبراطورية الصفوية.

٤٧- عندما أَسَّسَ آية الله الخميني جمهورية إيران الإسلامية في ٩٧٩١، تعمد تبني شعور شيعي رجعي يجمع بين شعور الضحية والاستشهاد والأفكار التي تدعو إلى التعصب والعداء لمن يُعتقد أنهم خانوا سيدنا علي وذريته. وتبنى دستور جمهورية إيران الإسلامية الجديدة عقيدة الخميني التي تقضي بالولاية التامة للفقيه، والتي أسست منطقًا لاهوتيًا للسلطة الدينية الشيعية وفتحت المجال لممارسة القوة المطلقة من قِبَلِ الوليِّ الأعلى.

٤٨- وقد زعزعَ الأسلوبُ الذي اتخذته إيران لممارسة سياستها الخارجية منذ عام ٩٧٩١ استقرارَ الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشكل كبير، وأثار ردَّ فعلٍ متهورٍ من المملكة العربية السعودية، تَبَنَّته الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ضمني، كان له تبعات سلبية مؤثرة على الإنسانية جمعاء.

٤٩- تتشابك النظرة الوهابية المتطرفة للإسلام - والتي لا تتبناها المملكة العربية السعودية وقطر فحسب، ولكن يتبناها أيضًا تنظيم القاعدة، وداعش – بشكل معقد مع عناصر الشريعة الإسلامية والتي تعزز مفاهيم الكره والعنف الطائفي.

تتسم الوهابية بالعداء الشديد للشيعة. كما تتميز بالكراهية المتأصلة – العنيفة في بعض الأحيان – للمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين والمسلمين السنيين الذين لا يتشاركون معهم نفس المنظور الوهابي الصلب والسلطوي عن الإسلام.

٥٠- وسعيًا لحشد المسلمين السنيين في مواجهة إيران، قامت السعودية بإطلاق شيطان على العالم، هذا الشيطان يهدد سلامة المسلمين الروحية والدنيوية. إنها تفعل ذلك من خلال ترسيخ وتلقين عقيدة الكراهية الدينية للمسلمين، وتعليمهم تجاهل الرسالة الأساسية للإسلام باعتباره مصدرًا للحب الكوني والرحمة. لقد سقطت حكومة باكستان فريسة لنفس هذا الإغواء، في تنافسها الدائم مع الهند.

٥١- تتجاهل سياسة الولايات المتحدة العلاقة المباشرة المتواجدة بين السعودية والدعم القطري للحركات الأصولية الرجعية، وانتشار الإرهاب عبر العالم.

٥٢- وقد حذَّر الرئيس الإندونيسي السابق، ورئيس جمعية نهضةُ العلماء - الشيخ عبد الرحمن وحيد - الولايات المتحدة عام ٢٠٠٨، قائلًا: "إن الإسلام الوسطي سيحظى بفرصة أعظم للتغلب على التطرف الإسلامي حين تتوقف محاولات قادة الغرب لتعزيز المتطرفين الإسلاميين. إن السعودية تُحيك لعبة ماكرة؛ فإنها تُمول المتطرفين الإسلاميين في حين أنهم يحاولون في الغرب إظهار الجانب "الإنساني" للإسلام. وتلك الأمور غير قابلة للتسوية."

٥٣- من الضروري أن نزيل حجاب الوهم الذي تستخدمه الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، حين يسعون لاستخدام الإسلام كوسيلة لخدمة مصالحهم السياسية، والاقتصادية، والعسكرية أينما كانوا.

٥٤- يجب مساءلة هؤلاء الذين يوظِّفون العقائد الإشكالية للفقه /الإشكاليات الفقهية سرًا و/أو علانيةً لتحقيق أهدافهم العالمية ومطالبتهم بتغيير سلوكهم متى كان ذلك ممكنًا.

٥٥- يجب على كل من إيران، والمملكة العربية السعودية، وقطر عدم السماح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وبالأخص فيما يختص بالدين والسياسة. فعلى أي أمة في العالم ألا تسمح وتنأى بنفسها عن التعرض لأي تدخل في شؤونها الداخلية من قِبل إيران، أو المملكة العربية السعودية، أو قطر.

٥٦- لا ينبغي إعفاء مُعَارَضَة السعودية لكل من إيران وتنظيم الدولة الإسلامية (داعِش) وتنظيم القاعدة من المسئولية لترويجها لتلك الإيدِيُولُوجِيّة التي تحث وتُحيي وتُحرك التَطَرُّف السُني والإرهاب.

٥٧- تتطلب الرفاهة الروحية والدنيوية للمسلمين والإنسانية عمومًا أن تتخلى المملكة العربية السعودية عن استراتيجية "الوهابية/الراديكالية العالمية" التي تنتهجها حاليًا في سعيها لاحتواء إيران، فإن إحدى المبادئ الأساسية في الإسلام السُني: أنه يحرم مواجهة الشر بالشر.

٥٨- يدعو جيراكان بيمودا أنصار الناس وأمم العالم، الذين هم ضحايا جماعية لسياسة كل من السعودية وإيران، يدعوهم إلى المطالبة بتوقف تلك الحكومات عن تمويل الحركات المتطرفة، التي توفر بيئة خصبة للراديكالية وتجنيد مسلمي السُنة من قِبل الجماعات الإرهابية.

٥٩- وكذلك يدعو كل من الحكومات المسلمة وغير المسلمة دومًا إلى تبين وضبط علاقاتها مع السعودية، وقطر، والولايات المتحدة، وإيران في ظل إجراءاتهم فيما يختص التطرف الإسلامي.

٦٠- من المستحيل على الباحثين الإسلاميين محاسبة "جهات الشر"، سواء أكانت حكومية أو غيرها على تصرفاتها بصورة مباشرة، فمثلًا من المستحيل للحكومات الفردية في العالم الإسلامي، مهما حسنت نواياها، إنجاز هذا الهدف بمفردها.

٦١- إن تغيير تصرفات الدول الراعية لإِيدِيُولُوجِيّة التطرف والإرهاب سوف يتطلب إرادة سياسية ومشاركة حازمة مع القوى الكبرى، التي تتضمن الولايات المتحدة، ومستوى غير مألوف من التعاون الدولي الذي يتضمن المعنيين بالأمر من الساسة، ومسئولي الحكومة، ومن لديهم الخبرة المطلوبة لتقديم المشورة إليهم.

٦٢- في الوقت الحاضر، من المؤسف نقص هؤلاء الخبراء في الأوساط الحكومية عالميًا، خصوصًا في أمريكا الشمالية وأوروبا.

٦٣- إنَّ الاتفاق المجتمعي والإرادة السياسية اللازمين لتحديد واحتواء التهديد الذي يشكله التطرف الإسلامي غائبان حاليًا.

٦٤- إن هذا يُزيد من الخطورة، حيث إنه عندما يخرج الاتفاق المجتمعي أخيرًا من الغرب تحت ضغط تصاعُد الهجمات الإرهابية المدمرة. فإن هذا سيحشد غالبية غير المسلمين لعداء الإسلام، وتعجيل الانتشار الواسع للصراع الأخلاقي والإثني/ العِرقي.

٦٥- في ضوء هذه الظروف، ومن أجل تجنب التهديد الوشيك بالصراع العالمي، يقدم جيراكان بيمودا أنصار النصح لقادة الرأي الغربي وواضعي السياسات بأن:

- أولًا، لا ضرر. وتتضمن هذه القاعدة عدم الحثِّ أو تبني سياسات مضِلة بما فيها تلك التي تسمح لحركات التطرف مثل الوهابية، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإسلامية أو الدول الراعية لهم بما فيهم المملكة العربية السعودية، وقطر، وباكستان أن تُملي إرادتها أو حتى تقوم بالتأثير بشكل ملموس على شروط المشاركة الغربية مع المسلمين.

- وإذ يُسلَم بأن الإرهاب والتطرف الإسلامي ينبثق من نسيج معقد من العوامل التاريخية، والدينية، والسوسيو-ثقافية، والاقتصادية والسياسية والتي تتطلب جميعها حنكة ومعاملة دقيقة.

    - ومن أهم تلك العوامل التاريخية والدينية هي الوحدة الدينية، الديموغرافية، والسياسية والإقليمية المثالية للعالم الإسلامي التي طالت غيبتها، كما تنعكس في ذاكرتهم الجمعية ولا تزال راسخة بقوة في المنظومات الفكرية السائدة (مجموعة النصوص المؤسسة للثقافة)، وكما تنعكس عبر العالم، في هيئة

الإسلام الأرثوذوكسي السلطوي؛

- ○ ومن ضمن تلك العوامل السياسية والإقتصادية التنافس الشرِس المُستَعِر على الثراء والسلطة في الشرق الأوسط، والدور الحيوي الذي تلعبه أموال النفط (دولارات بترولية) في تمويل انتشار التطرف الديني والجماعات المسلحة التابعة لبعض الجهات.

- إنشاء فهم واضح عن الإسلام ورؤى واسعة بين المجتماعات الإسلامية حول العالم يتأرجح من الكراهية الدينية والاستعلاء إلى المفهوم الروحي والإنساني وممارسة الإسلام.

- تأسيس الفهم، لضمان أن الخبرة المكتسبة بالجهد لن يمكن أن يتم فُقدانها خلال تبادل الموظفين.

- فعندما يتم اكتساب الخبرات اللازمة، يتم تنمية الاستراتيجيات المُحكَمة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى لتهميش وتكذيب إيديولوجيا الكراهية الدينية التي تحُض وتُحرِك الإرهاب بوضع غاية نهائية محددة بوضوح: التصاعد العالمي لسطوة التعددية، والفهم الروحي المتسامح لإسلامٍ يتمتع بالسلام ويتم التعايش به في العالم الحديث.

- وضع تلك الاستراتيجيات في حيز التنفيذ واقترانها بالتعددية، وقادة المسلمين المتسامحين، والمؤسسات المستقيمة النزيهة، والحكومات الإسلامية المتشابهة في الأفكار،عن طريق صنع مجموعة كبيرة من البرامج بصورة منظمة وممنهجة؛

- تنقيح وتهذيب البرامج المذكورة والاستراتيجيات بشكل مستمر

لاستيعاب الدروس المستفادة على مدارعملهم.

- تنمية وحفظ الاتفاق المجتمعي اللازم لضمان التماسك والترابط السياسي بشكل حماسي وبصورة ممنهجة أثناء تنفيذ سياسة سليمة تظل على مدار عقود أو حتى أجيال، حتى يتم ترسيخ أرثوذوكسية إسلامية مغايرة لا تُمَس.

٦٦- وكما كتب الشيخ عبد الرحمن وحيد في صحيفة وول ستريت Wall Street Journal بالافتتاحية والتي نشرت في ديسمبر ٢٠٠٥: " بالتعرُّفِ على المشكلة، ووضع حد للمشاحنات المتغلغلة داخل الدول وتَبَنِّي خطة متماسكة طويلة المدى (يتم تنفيذها بالالتزام والقيادة الدولية) فهل يمكننا أن نبدأ بوضع العراقيل للحدِّ من زحف وتفشّي الأفكار المتطرفة وأن نأمل بإيجاد حل لأزمات العالم... قبل أن يبدأ الاقتصاد العالمي والحضارة الحديثة بالانهيار في مواجهة الهجمات المدمرة.

«يستطيع المسلمون وينبغي عليهم كذلك أن ينشروا مفهومًا عن الإسلام الحق بأنفسهم وتكذيب اِيدِيُولُوجِيّا التطرف. ويتطلب تحقيق تلك المهمة فهم ودعم الحكومات والمنظمات، والأفراد الذين يدعمون نفس الأفكار حول العالم. إن هدفنا يجب أن يكون إنارة القلوب والعقول للإنسانية، وعرض رؤية مغايرة مقنعة عن الإسلام تعيد إِيدِيُولُوجِيا الكراهية المتعصبة إلى مُستقرها في الظلام من حيث انبعثت وبحيث تصبح في غياهبِ النسيان".

تسوية النزاعات

٦٧- يشهد العالم الإسلامي صراعات عدة جارية على امتداد جوانبه. كل منها قد يكون تم استغلاله بالفعل من قِبل المسلمين المتطرفين لترويج مروية مفادها أن الغرب وجموع غير المسلمين يحاربون الإسلام، ومن ثمَ فعلى المسلمين واجب ديني بأن يُشمروا عن سواعدهم ويحملوا أسلحتهم للدفاع عن إخوانهم المسلمين وعن دينهم ضد الهجوم المستمر الذي يشنه الكفار.

٦٨- إن المسلمين الذين ينساقون وراء تلك الأكاذيب نفسيًا وعاطفيًا سيُضمرون الكره والعداوة تجاه غير المسلمين.

٦٩- إن تسوية النزاعات أمر ضروري لدحض تلك الأكاذيب وإحباط نداءاتها.

٧٠- ينبغي أن يتم تأطير تسوية النزاعات بشكل واضح كجهد يشترك بتحقيقه جميع الناس المخلصين من كل عقيدة وكل أمة لمنع الجرائم الوحشية وإرساء العدل، بغض النظر عن عقيدة أي من الضحية أو الجماعة أو الأفراد مرتكبي الجريمة.

٧١- بعبارة أخرى يمكن القول بأنه ينبغي تأطير تسوية النزاعات، والسعي بإخلاص لتكون كجهد دولي ديني مشترك لصالح الإنسانية جمعاء لا تستغله المناورات والتلاعبات المُنافِقَة ولا التي تنشد تعظيم وزيادة قوتها وسلطتها والتي تقوم بها الجهات الفاعلة الحكومية و/أو الغير حكومية.

٧٢- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (المائدة: ٨)

الاجتهاد لزرع تعاليم الدين الإسلامي في سياق مختلف يناسب العصر الحديث من خلال خطاب لاهوتي جديد

٧٣- إن المكانة التي يحتلها مجموع كتابات الفكر الإسلامي الكلاسيكي (التراث)، اعتمادًا على أسس الأرثوذوكسية الإسلامية القياسية، تقود غالبية المسلمين لاعتبار المكونات الفردية لهذا القانون بمثابة تعبير ثابت نهائي مُطلَق للشريعة، ومن ثمَّ يجب على الإنسان طاعة الوصايا المقدسة دون النظر للمنطق أو التضحية المطلوبة لعمل ذلك.

٧٤- في هذا القانون، يمكن للمرء أن يواجه شروطًا مرجعية ترتبط بظواهر موجودة بالفعل أثناء إنشاء القانون ولكنها لم تعد تتوافق مع أي كيان موجود ظاهريًا. ففي الماضي، أفضى ظهور تلك الظواهر – على سبيل المثال: دولة إسلامية عالمية (الدولة الإسلامية) يحكمها فرد واحد (الإمام) يقود المجتمع الإسلامي لمقاتلة جيرانه من دول غير المسلمين – إلى تصاعد ممارسات معينة، تتضمن الشرط المنطقي المتعلق بأن مسلمًا واحدًا فقط يصبح هو إمام هذه الدولة الإسلامية المُوَحَّدَة.

٧٥- تحدث مجموعة كبيرة من المشاكل عندما يقوم المسلمون المعاصرون باستخدام تلك الشروط المألوفة كمرجع لعالم تغير كليًا بمرور الوقت. في حقيقة الأمر، يتم استخدام مصطلحات من الماضي بشكل انعكاسي كمرجع لواقع مختلف وجديد تمامًا، عادة بدون أي وعي بأن تلك الظروف المتغيرة تقضي بأن المسلمين يجب أن يتبنوا الأحكام المرتبطة بذلك لعكس وإظهار الواقع الجديد.

٧٦- والفشل في تحقيق ذلك يدفع بعض المسلمين لرفض سلطة الدولة القاطنين بها؛ للمطالبة بأن يتم حكمهم وفقًا لأحكام الماضي (التي يطلقون عليها الشريعة)؛ وحتى شنّ حرب ضد إخوانهم المواطنين باسم الشريعة.

٧٧- من الصعب على المسلمين المعاصرين أن يستخدموا الاجتهاد (وهو استدلال شرعي مستقل) لتأسيس أحكام جديدة لأن تلك العملية يتم عرقلتها بالعديد من العوامل، بما يتضمن:

- إن المعايير اللازمة للعمل كمُجْتَهِدِ (وهو الشخص المُخَوَّل له أن يمارس الاستدلال المستقل ليخرج بقانون إسلامي) معايير فائقة وعديدة الشروط ومتطلبة بشكل شبه مستحيل تحقيقه؛

- إن غياب أي شرط أساسي للعمل بالإجتهاد، هو لأن أصول الفقه (منهجية استدلال شرعي مستقل، يتم توظيفه لاستخراج قانون إسلامي جديد) لا تأخذ في اعتبارها التغييرات في السياق السوسيو-تاريخي للمجتمع الإسلامي باعتباره عملًا أصليًا بطبيعته أو يتطلب اجتهادًا.

- إن دراسة الظروف المحيطة بوحي الآيات القرآنية الفردية وأسباب ورود أحاديث الآحاد غير متطورة، لذلك فإن المسلمين عمومًا ليسوا واعين بأن هناك ضرورة ورابطًا قويًا بين النص والسياق متى درس أي فرد القرآن والسنة.

٧٨- إن الغالبية العظمى من الاجتهاد الجديد والتي تم عملها على مدار القرن الماضي تم تجاهلها وتهميشها لأنها لم تحدث كجزءٍ من عملية يمكن أن تضمن شرعية لاهوتية وسلطة للنتاج المذكورللاجتهاد.

٧٩- يعكس نمط سلوك المسلمين ولعًا بالمظاهر الرسمية للدين ونقص أي اهتمام بالمفاهيم الصوفية والممارسة التي لعبت، على نحو تقليدي، دورًا حيويًا في رفع الجانب الروحي لدى المسلمين بشكل متزايد. فمع انتشار الوهابية، تم القضاء على العديد من تلك الممارسات تحت بند البدعة (الابتداعات). وقد أفضى ذلك إلى ظهور ظاهرة واسعة الانتشار لأشخاص

متدينين ظاهريًا بنفوس فاسدة.

٨٠- وقد تمت الهيمنة على السجلات التاريخية لقانون الأرثوذوكسية الإسلامية- بما فيه سير النبي محمد، صلَّى الله عليه وسلم، من قِبل العديد من الروايات المفصلة عن المعارك التي صاحبت كفاح الدين الجديد للسعي للخروج وسط عصر ومجتمع رفض قدومه بعنف. إن السجلات التاريخية التي تصف الأبعاد الإنسانية والروحانية للإسلام متفرقة مُبعثرة وتبدو أقل بكثير في أغلب الأحيان، فإنهم لا يُشكلون جزءًا متكاملًا للجانب القصصي للتاريخ الإسلامي نَاهِيكَ عَن السرد الأولي منها.

٨١- وهذا يستمر في لعب دور عظيم في تشكيل عقلية المسلمين حتى يومنا هذا. وكنتيجة لذلك، يشعر العديد من المسلمين أن الإسلام محاصر بالمخاطر والتهديدات مما وَلَّدَ شعورًا بانعدام الثقة والشكِّ في جميع غير المسلمين وأصبحوا يتوقون للحصول على الغَلبة العسكرية والسياسية فتهاوى الكمال الروحي والذي كان يُشكل الهدف والجوهر الأساسي للدين.

٨٢- إن الإنجازات العظيمة للعالم الإسلامي عادة ما يُنظر إليها بطريقة اختزالية كمجرد ثمرة للنجاح العسكري والسياسي مع تجاهل الدور الحيوي الذي لعبه التبادل الثري المفتوح بين الحضارات والذي أنتج بالفعل تلك الإنجازات العظيمة. على الجانب الآخر، فيرجع انهيار الحَرَاك السوسيو ثقافي والأنظمة التي أدت لنجاح الإسلام سياسيًا وعسكريًا لما يفوق ألف عام إلى الفشل في مراقبة الممارسة الدينية بشكل صحيح، مما يستوجب عقاب الله في حين أنهم يتجاهلون حقيقة أن ذلك الانهيار كان نتيجةً لعمليات واضحة عقلانيًا وتبرز بشكل طبيعي جدًا.

٨٣- يعزز هذا التصورُ عقليةً رجعيةً بين المسلمين وميلًا لرفض التطور الذي حققته الحضارة المعاصرة بما فيه البنيه السوسيو-سياسية. وهو يحرض المسلمين أيضًا على رفض ثراء الثقافات المتنوعة وتحقيق الحلم الوهمي

في إعادة بناء، في الوقت الحاضر، نموذج نقي من كمال ثقافي، وسياسي، واجتماعي لم يوجد قط.

٨٤- فهناك حاجه ملحة لوجود حركة اجتماعية وحملة واسعة لتعزيز الوعي بأهمية التغيير إلى سيادة السياق السوسيو-تاريخي وكيفية تأثير ذلك على تحكيم العقل فيما يخص النصوص الدينية متضمنًا الخطاب الفكري للعلماء ومصدر التعاليم الإسلامية، وأقصد، القرآن والسُنة.

٨٥- من الضروري وجود حركة اجتماعية وحملة واسعة لتعزيزالصوفية - أي البعد الروحاني وممارسة الإسلام.

٨٦- ينبغي على العلماء، والباحثين، والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الفكرية الأخرى التشجيع على حشد كل المصادر المتاحة وتجنيدها لمواجهة أهم القضايا المرتبطة بالأزمات التي تشكلت بواسطة الانفصال الهائل المتواجد بين الرؤى التي تحتويها الإسلام الأرثوذوكسي الكلاسيكي وبين الحضارة المعاصرة من خلال الجهود المبذولة مثل:

- خلق مجموعة من الأفكار الجديدة القيّمة التي ظهرت كبديل لقانون الفكر الإسلامي التقليدي- مصنفا إياها بناءً على مقياس أكاديمي مناسب وموضوعي، وتعزيز الشرعية والقبول الكبير، الآخذ في الانتشار، للأفكار المذكورة؛

- إجراء دراسة واسعة تفضي إلى ظهور خطاب جديد فيما يختص بعلم تفسير القرآن، وعلم تفسير الحديث، والمنهجية التي يتم من خلالها خلق أحكام دينية جديدة تؤدي إلى تبني مبادئ المرونة والتكيف للتصدي إلى الظروف السوسيو-تاريخية المتغيرة دائمًا داخل هيكل تلك الأنظمة العلمية.

- إجراء دراسة واسعة من أجل وضع الأبنية السوسيو-سياسية كواقع فعلي للحضارة المعاصرة ودمجها داخل إطار رؤية الإسلام في سبيل تحقيق علاقة منطقية، وعادلة، ومنسجمة بين الإسلام والمؤسسات السوسيو-سياسية المتواجدة في عالمنا المعاصر.

- إجراء دراسة واسعة حول التاريخ الإسلامي وحياة النبي مُحمد، صلَّى الله عليه وسلم، لتطوير سرد قصصي أكثر شمولية عن طريق التركيز بشكل أكبر على الأبعاد الإنسانية والروحانية الموجودة داخل المصادر التاريخية المتاحة.

٨٧- من الضروري تعزيز وتوحيد السلطات الدينية والسياسية وحشدها من أجل دعم الرؤى الدينية التي تدعو لإرساء السلام وتحقيق الانسجام بين الحضارات.

تطوير وتبنّي منهج دراسي تعليمي جديد على امتداد العالم الإسلامي

٨٨- ما دامت العناصر الإشكالية للفكر الإسلامي الكلاسيكي يتم نقلها من جيل إلى التالي عبر أنظمة تعليمية تتحكم بها الدولة بشكل منظَّم، فسيكون من الصعب إذا لم يكن مستحيلًا، ظهور أرثوذكسية إسلامية بديلة.

٨٩- من المهم ملاحظة أن المدارس الدينية المتطرفة في البلاد مثل باكستان تمولها وتتحكم بها الدولة بصورة فعالة وإن كان ذلك من قِبل المملكة العربية السعودية، وقطر، والدول المانحة الأخرى، بموافقة و/أو من خلال التعاون الفعال للدولة المضيفة.

٩٠- ولتطوير حساسية دينية جديدة تعكس الظروف الفعلية لعالمنا المعاصر، فمن الضروري أن يتعاون العلماء والمعلمين ومسئولو الحكومة في تطوير

وتبنّي منهج دراسي تعليمي جديد يعلم الطلاب الأخلاق الكريمة (الفضائل والصفات النبيلة)؛ ويقدم معرفة واسعة عن التاريخ الإسلامي والعالمي والفلسفة، ويكون أساسًا راسخًا للأنظمة العلمية؛ والقدرة على دمج العقل والإيمان بشكل متكامل، وهو الأمرالذي يتطلب عمقًا روحانيًا ودرجة من الحكمة نادرًا ما نقابلها في منهج ترعاه الحكومة، ولكنها تُعتبر الضرورة القصوى لمستقبل الإسلام والحضارة نفسها.

٩١- بتعبيرات الشيخ مصطفى بصري، الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى لجمعية نهضة العلماء "يدَّعي الناس غالبًا أن العقل والدين لا يتوافقان وهذا الأمر سُخف وغير صحيح....فحسب فهمي، فإن العلماء ينبغي أن يكونوا أهل الفكر وأهل الفكر لابد أن يكونوا روحانيين. فيجب عليهم أن يعملوا جنبًا إلى جنب ويسعوا لاستعادة القيم التي أرسلها الله إلينا عبر رسوله (صلَّى الله عليه وسلم) في وقتنا وعمرنا الحالي. فيجب استغلال وتحقيق كلٍ من تلك العناصر سواءً كات متجسدة داخل أفراد منفصلة أو مجتمعة في واحد. على سبيل المثال، مفكر ينعم بقدرة روحية كبيرة أو مفكر يعمل جنبًا إلى جنب مع الروحانية "عالِم" (باحث ديني). كلا الطريقين ليسا المشكلة، فالأمر الحيوي هو أن تلك القيمتين (الوضوح الفكري والروحي) تعملان سويَاظن ويصحبهم تنفيذ برنامج تعليمي من أجل عرض الكيفية التي يمكن أن تكون تعاليم الإسلام بها نعمة للبشرية جميعها. فبدون الجهد المضني الذي تبذله تلك الأطراف مجتمعة، من الصعب فعلًا أن نأمل أو نتوقع أن نحقق هذا الهدف."

٩٢- وبالتالي، وبالإضافة إلى المعلومات المكتسبة، والقدرة على التفكير النقدي والحصول على المهارات الضرورية لحياة عملية، فينبغي أن يُطور التعليم الإسلامي أيضًا الكيان الداخلي للإنسان. بدون إثارة النزعات الروحانية الجوهرية مثل الحضور، الضمير (المحاسبة)، الإخلاص (إخلاص)، الوعي بأثر أعمالنا (تقوى)، وتذكر الله (ذكر الله)، فإننا إلى الآن لم نحقق مصيرنا

كبشر.

٩٣- « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» (الرعد ٢٨). «...وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» (العنكبوت ٥٤).

٩٤- فعند إدراج القيم السامية ومفهوم واسع للإسلام كرحمة للعالمين (مصدر للحب والرحمة والعطف بالعالم) في برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ، فمن الممكن تحصين الشباب ضد مغريات التطرف الديني والكراهية.

٩٥- إن منظومة التعليم التي تشجع التسامح الديني، والاحترام والانسجام بناءً على تعاليم القرآن واقتداءًا بالرسول سوف تسبق منطقيًا وتُسهل خروج أرثوذوكسية دينية جديدة تتجلى خطوطها العريضة داخل المنهج المذكور.

الحركات الأهلية لحشد اتفاق مجتمعي وبناء إرادة سياسية لحل الأزمة

٩٦- إن الأزمة المتصاعدة بسرعة داخل المجتمع الإسلامي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصالح السياسية والتصرفات الانتقادية غير الإنسانية للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والتي يجب مواجهتها سياسيًا.

٩٧- وترتبط الأزمة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالصراع بين جموع المسلمسن وغير المسلمين بسبب العناصر الإشكالية التي عفا عليها الزمن داخل مجموع كتابات الفكر الإسلامي الكلاسيكي وبسبب الفشل داخل المناهج والأنظمة التعليمية المُطَبَّقَة في أغلب أنحاء العالم الإسلامي.

٩٨- كل واحدة من هذه القضايا يجب مواجهتها بطريقة مناسبة من قِبل السلطات المختصة المستعدة لتحمل عبء القيام بذلك الأمر.

٩٩- نظرًا للطبيعة المعقدة، والحساسة، والخطيرة والمثيرة للجدل في أنحاء عدة من العالم، للقضايا المعنية، من الواضح أن التقدم الفعلي يمكن أن يتم من خلال سياق ظهور اتفاق مجتمعي.

١٠٠- لا يوجد أي سبب للتوقع بأن الشخصيات السياسية في العالم الإسلامي أو الغربي سوف تتصرف بشكل يخالف مصالحهم الخاصة من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة. بينما قد يقوم القادة ذوي البصيرة النافذة بالقيام بذلك لبعض الوقت، فإن التماسك السياسي والجهود المستدامة اللازمة لمواجهة تلك القضايا المعقدة بشكل فعّال، كل ذلك يمكن أن ينتج كنتيجة للاتفاق المجتمعي.

١٠١- جيراكان بيمودا أنصارهي أكبر حركة شبابية إسلامية (الشباب اليافعون) حيث يبلغ عدد أعضائها ما يفوق ٥ مليون عضو. منهم ما يقرب من ٧,١ مليون عضو ينتمون لحركة باريسان أنصار سيرباجونا وهي حركة ميليشيا نشطة. وتُشكل (جي بي أنصار –GP Ansor) الجبهة الأمامية وعنصر الحركة الأولي داخل أكبر منظمة إسلامية – نهضة العلماء- وأداة أوليّة للتعبئة الشعبية لأتباع جمعية نهضة العلماء.

١٠٢- تتضمن المهمة الأساسية لجي بي أنصار (GP Ansor) الدفاع عنNKRI) الأمة الإندونيسية(؛ بموجب دستور ٥٤٩١ والذي أسس إندونيسيا كأمة تعددية، متعددة الأديان؛ بينكا تونجال ايكا («الوحدانية وسط التعددية»)؛ والقيم الروحانية الكبيرة للإسلام السني مثل الإنسانية والتي ازدهرت بشكل متجانس مع حضارة الهند الشرقية الموجودة مسبقًا ومع الثقافات لإنتاج «إسلام نوسانتارا».

١٠٣- أعلنت جي بي أنصار (GP Ansor) في ٠٣ مارس ٧١٠٢ بدء إطلاق الجهود المتضافرة لتعزيز الإسلام الإنساني عن طريق تطوير وتفعيل وعمل

استراتيجية عالمية لإعادة زرع تعاليم الإسلام الأرثوذوكسي السلطوي ومن ثمَّ توفيق عناصر إشكالية معينة للفقه مع واقع الحضارة المعاصرة والتي تختلف سياقها وظروفها بشكل كبير عن تلك التي انبثق منها القانون الإسلامي الكلاسيكي.

١٠٤- وقد عينت جي بي أنصار (GP Ansor) رسلًا ومبعوثين إلى العالم الإسلامي، وإلى الأمم المتحدة، وأمريكا وأوروبا ينقلون بيان جي بي أنصار (GP Ansor) إلى أطراف استراتيجية مختلفة داخل الساحة الدولية ويشركوهم في الحوار وكذلك تطوير شبكة دولية تؤدي إلى خروج حركة عالمية والتي ينبغي أن يتم تكريسها لرفاه الإنسانية جمعاء وتعزيز حضارة عالمية حقيقية مستلهمة من الإسلام الإنساني على سبيل المثال: الإسلام رحمة للعالمين والتي تعني أن الإسلام هو نعمة لجميع الخلق.

١٠٥- في كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى لجمعية نهضة العلماء "يحي خليل ستاكوف": "لم يسعَ الإسلام الإنساني لغزو أي أحد ولم يأتِ للدمار كما يفعل هؤلاء المتطرفون".

١٠٦- إن حركة الإسلام الإنساني مكرسة لتسهيل انبثاق الاتفاق المجتمعي بين المسلمين وغير المسلمين على حدٍ سواء لمنع تسييس قضية الإسلام والحيلولة دون إساءة استخدام الدين لتعزيز الكراهية الطائفية والاستعلائية والعنف.

١٠٧- سيتطلب بناء الحركات الأهلية التعاون بين قادة الرأي الكبار في المجال الديني، والثقافة الشعبية، والحكومة، والأعمال، ووسائل الإعلام العامة وكذلك سيتطلب تعاونًا بين عددٍ لا يُحصى من الأفراد باختلاف أعراقهم، وثقافتهم، وجنسيتهم، وعقيدتهم في خدمة المُثُلِ الإنسانية المشتركة.

١٠٨- فينبغي أن يكون الشخصيات الدينية البارزة والمثقفون نموذجًا يُحتذى به

في خدمة حركة الإسلام الإنساني وأن يكونوا منارة تجذب إليها الآخرين للانضمام لهم.

١٠٩- يدعو جيراكان بيمودا أنصار مشاهيرالمفكرين للمساعدة بإرساء الأساس كما يدعو الفنانين للتعبير عن رؤية الإسلام الإنساني والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانبثاق الواقع الجديد الذي يدعو المؤمنين لكل الأديان وجميع الأمم إلى نبذ ومنع استخدام الدين كوسيلة لتبرير الكراهية والعنف تجاه إخوانهم الذين يتبنون إيمانًا مختلفًا.

١١٠- تعتبر حركة الإسلام الإنساني، وحدها وبحد ذاتها، تعبيرًا عن ذلك الواقع المُسْتَجَد وبالتالي يعكس الظروف المتغيرة للقرن ١٢.

١١١- ولتسهيل خروج الإسلام الإنساني كحركة جماهيرية عالمية و إعادة زرع التعاليم الإسلامية من أجل تحقيق السلام بالعالم والانسجام بين الحضارات. ينبغي أن يعقد جيراكان بيمودا أنصار منتدى وحدة عالمي يدعو ممثلي كل الديانات الرئيسية للانضمام إلى جيراكان بيمودا أنصار في إصداربيان يدعو لإنهاء الصراع باسم الدين ونبذ استخدام الدين لتشريع أو تعزيز الكراهية الطائفية والاستعلائية والعنف.

١١٢- من منظور أصول الفقه (نظرية القانون الإسلامي الكلاسيكي)، فإن هذا سيعتبر الأساس الشرعي للاجتهاد الجديد الذي يعكس الواقع البديل للعلاقات بين الأديان في القرن ١٢. إن إعادة زرع التعاليم الإسلامية سوف تدعم بدورها الجهود المبذولة لاحتواء التطرف الديني وتسوية النزاع والتحول إلى منهج دراسي تعليمي بما سيؤدي لتحقيق الغرض من الأحكام (مقاصد الشريعة) والتي تدعو إلى تعزيز الرفاه المادي والروحاني للإنسانية.

وَاللهُ يُوَفِّقُنَا فِيْمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ

الجزء الثالث

(III)

قائمة جزئية بالوثائق التي تم استشارتها من قبل اللجنة والتي صاغت «إعلان جيراكان فيمودا أنصارحول الإسلام الإنساني»

Dorsey, James. "Creating Frankenstein: The Impact of Saudi Export of Ultra-Conservatism." Singapore, Nanyang Technological University, S. Rajaratnam School of International Studies. 24 July 2016.

—. "Pakistan's Lurch Towards Ultra-conservatism Abetted by Saudi-inspired Pyramid Scheme." Singapore, Nanyang Technological University, S. Rajaratnam School of International Studies. 18 April 2017.

Lohlker, Rüdiger. "Theology Matters: The case of jihadi Islam." Jakarta: *Strategic Review*. July – September 2016.

Maemun, Abdul Ghofur. "Contemporary Ijtihad." Jombang, Indonesia: Presentation delivered to international gathering of *ulama* hosted by Gerakan Pemuda Ansor and Bayt ar-Rahmah, 21 – 22 May 2017.

Staquf, Yahya Cholil. "How Islam learned to adapt in Nusantara." Jakarta: *Strategic Review*. April – June 2015.

Wahid, Abdurrahman. "God Needs No Defense." Forward to *Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes Are Choking Freedom Worldwide*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Wahid, Abdurrahman, editor. *The Illusion of an Islamic State*. Jakarta: LibForAll Foundation, The Wahid Institute, Maarif Institute, 2011.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

HUMANITARIAN
ISLAM
الإسلام للإنسانية

ANSOR

BAYT AR
RAHMAH

بيان نوسانتارا أعَدَّته وأصْدَرَته
جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة
في جوكجاكرتا، إندونيسيا
52، أكتوبر، 8102
(ترجمه للعربية: إسلام سعد – باحث ومترجم مصري).

نداء لذوي النفوس الصافية من كل إيمان وأمة
ليشاركوا في بناء إجماع عالمي
لمنع استخدام الإسلام كسلاح في السياسة،
سواء أقام بذلك المسلمون أم غير المسلمين،
وللحدِّ من انتشار الكراهية الجماعية
من خلال تعزيز انبثاق نظام عالمي عادل ومُتَجَانِس بحق،
يتأسس على احترام الحقوق والكرامة المتساوية
لكل إنسان.

#LetUsChooseCompassion

LAMPIRAN IV

بيان نوسانتارا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“

~ القرآن الكريم، ٧: ١٥٦.

”Bhinneka Tunggal Ika – الوحدة عبر التعدُّد“.

~ الشعار الرسمي لدولة إندونيسيا، مكتوبًا على رمز دولتها، ”جارودا بانساشيلا Garuda Pancasila“.

” Agama ageming aji – الدين (الحق) رداء ترتديه الأرواح التي وُهِبَت النُبْل“.

~ حكمة جاوية من سيرات ويداتاما Serat Wédatama، ١:١.

”وَأَهَبُكُمْ قَلْبًا جَدِيدًا، وَأَضَعُ فِي دَاخِلِكُمْ رُوحًا جَدِيدَةً، وَأَنْتَزِعُ مِنْ لَحْمِكُمْ قَلْبَ الْحَجَرِ وَأُعْطِيكُمْ عِوَضًا عَنْهُ قَلْبَ لَحْمٍ“.

~ حزقيال، XXXVI. ٢٦.

”أَحِبَّ الرَّبَّ إِلَهَكَ بِكُلِّ قَلْبِكَ وَكُلِّ نَفْسِكَ وَكُلِّ فِكْرِكَ! ٣٨ هَذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الْعُظْمَى الأُولَى. ٣٩ وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: أَحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ! ٤٠ بِهَاتَيْنِ الْوَصِيَّتَيْنِ تَتَعَلَّقُ الشَّرِيعَةُ وَكُتُبُ الأَنْبِيَاءِ!“.

~ متى، XXII، ٣٧ – ٤٠.

تتفق رسالة النبي محمد (صلى الله عليه وسلَّم) بشكل عام مع كل شيء نُقل بواسطة الأنبياء الأوائل. أتى كل الرسل الذين أرسلهم الله للإنسانية – ومنهم موسى، ويسوع، وإبراهيم ومحمد – برسالة واحدة تتطابق مبادؤها الأساسية: أولًا، اعبد الرب إلهك بكل تفانٍ، ثانيًا، واجب يتعلق بتحلّي المرء بالأخلاق الكريمة».
~ سيد محمد طنطاوي، شيخ الأزهر الأكبر (سابقًا).

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ». ~ حديث شريف، سنن النسائي.

«كن أمينًا ومنفتحًا على الدوام؛ ليس ثمَّة حاجة لأن تكون خائفًا».
~ الحاج عبد الرحمن وحيد.

يُمَثِّل بيان نوسانتارا إنجازًا مهمًا في سياق حملة منظمة طويلة الأجل – تهتدي بالقيادة الروحية لأكبر منظمة للمسلمين على مستوى العالَم – صُمِّمَت لمنع استخدام الإسلام كسلاح في السياسة، سواء أقام بذلك المسلمون أم غير المسلمين، وللحدِّ من انتشار الكراهية الجماعية من خلال تعزيز انبثاق نظام عالمي عادل ومُتَجَانِس بحق، يتأسس على احترام الحقوق والكرامة المتساوية لكل إنسان.
بيان نوسانتارا أَعَدَّته وأَصْدَرَته جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة، في المنتدى العالمي الثاني للوحدة، المقام في جوكجاكرتا، إندونيسيا في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر، ٢٠١٨.

حيث إن

١– في اليوم التاسع والعاشر من شهر مايو ٢٠١٦، أقامت مؤسسة نهضة العلماء (NU) القمة الدولية للقادة المسلمين المعتدلين (ISOMIL) في جاكرتا،

إندونيسيا، والذي حضره ٤٤ باحثًا مسلمًا من ٣٠ دولة. في ختام القمة، أصدر المجلس المركزي لنهضة العلماء إعلانًا من ستة عشرة نقطة حدَّدَت العوامل الهامة التي تقود التطرف الإسلاموي والإرهاب عبر العالَم، وناشدت "الناس أصحاب النفوس الصافية من كل إيمان ليشاركوا في بناء إجماع عالمي بعدم تسييس الإسلام" وأكَّدَ بشكل صريح أن مؤسسة نهضة العلماء "ستكافح لتوحيد مجتمع أهل السنة والجماعة (المسلمون السُّنِّيون) لتشييد عالَم يكون فيه الإسلام والمسلمون محسنين ويساهمون في خير الإنسانية" (إعلان نهضة العلماء ISOMIL، النقطتان ١٥ و١٦)؛

٢- في يوم ١٢ مايو ٢٠١٦، أصدر المنتدى العالمي الأول للوحدة - بالرعاية المشتركة لجيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة - تصريحًا من ثلاث ورقات يتضمن «نداء من جيراكان بيمودا ... لوضع نهاية للصراع باسم الدين، وأن يفحص العلماء المسلمون المخضرمون عناصرَ الفقه التي تشجع على التفرقة والتمييز و/أو العنف تجاه الذين يتم النظر إليهم على أنهم غير مسلمين، وأن يتوجهوا بفكرهم إلى هذه العناصر.

٣- في يوم ٣٠ مارس ٢٠١٧، أعلن كُلٌّ من جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة انطلاق جهد مُنَسَّق لتنمية الإسلام للإنسانية من خلال تطوير، والعمل على تنفيذ، إستراتيجية عالمية لإصلاح أو إعادة غرس تعاليم الأرثوذوكسية الإسلامية السلطوية في سياقها ونتيجة لذلك يتم التوفيق بين عناصر إشكالية مُحَدَّدَة في الفقه (الذي عادة ما يتم الخلط بينه وبين الشريعة أو "الهدي الإلهي") وواقع الحضارة المعاصرة التي تختلف أوضاعها وسياقها بشكل بارز عن الأوضاع والسياق الذين انبثق منهم القانون الإسلامي الكلاسيكي؛

٤- في يوم ١٨ إبريل ٢٠١٧، أصدر المؤتمر الدولي رقم ٢١ لجيراكان بيمودا أنسور مرسومًا رسميًا (رقم ٠٤/KONBES-XXI/IV/٢٠١٧) بعنوان: رؤية جيراكان بيمودا أنسور بخصوص الاهتمامات الإستراتيجية لإندونيسيا وأجندة الأمن القومي في سياق اضطراب الديناميات الجيو-سياسية الراهنة. يوضح

هذا المرسوم، جزئيًا: «لا تقتصر الأزمة المحيطة بالعالم الإسلامي من كل جانب على الصراعات المسلحة المستعرة في مناطق متعددة ومختلفة. وسواء أكانوا واعين بذلك الأمر أم لا، راغبين فيه أم لا، يجد ١,٦ بليون مسلم حول العالَم أنفسهم في خضم أزمة دينية عميقة. وستتكفل كيفية استجابتهم بتحديد المستقبل، ليس فقط للمسلمين عبر العالم، وإنما كذلك مستقبل الحضارة الإنسانية نفسها».

٥- في يوم ٢٢ مايو ٢٠١٧، استضافت كل من جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة تجمعًا دوليًا شارك فيه قرابة ٣٠٠ باحث مسلم في مدرسة بحر العلوم PP (Madrasah) Bahrul 'Ulum في جومبانج Jombang بشرق جاوة Java لـ "تطوير إستراتيجية لتجسيد الإسلام باعتباره بركة للحضارة العالَمِيَّة". وفي ختام هذا الحدث أصدرت جيراكان بيمودا أنسور إعلان جيراكان بيمودا أنسور بخصوص الإسلام للإنسانية: وهي وثيقة من ٨٠٠٠ كلمة قامت بالاشتغال على مقاصد الشريعة؛ كما قامت بتحليل السلوك الذي يقوم عبره الفاعلون في الدولة والفاعلون خارج آليات اشتغال الدولة «بالتلاعب بالعاطفة الدينية دون مبالاة في سعيهم الحثيث للحفاظ على السلطة السياسية والاقتصادية والعسكرية أو حيازتها ... بالاعتماد على العناصر الأساسية للفقه التي ينسبون إليها سلطة إلهية لحشد الدعم سعيًا وراء تحقيق أهدافهم الدنيوية»؛ **وتمَّت المناداة بـ «انبثاق نظام عالَمي عادِل ومنسجم يتأسس على الاحترام للحقوق والكرامة المتساوية لكل إنسان»**؛ وتمَّ تجهيز خارطة طريق مُفَصَّلة لمواجهة «مبادئ الفقه البَالِيَة التي تنبني على صراع أزلي مع الذين لا يُجِلُّون الإسلام ولا يخضعون له»؛

٦- في يوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٨، أطلقت جيراكان بيمودا أنسور حملة قومية باسم Kirab Satu Negeri للردِّ على ثلاثة تهديدات أساسية تواجه إندونيسيا من خلال إعادة التأكيد على دور الإسلام باعتباره مصدرًا للوحدة والقوة عبر التعدُّد بدلًا من الاستقطاب والتَّفَرُّق. كانت الحملة في جزء منها استجابة لانتخابات جاركارتا الشرسة عام ٢٠١٧ والتي تسببت في هزيمة الحاكم

المسيحي الصيني الذي كان متسيدًا وقتها باسوكي تيجاهاجا بورناما Basuki Tjahaja Purnama («أهوك "Ahok") وإدانته اللاحقة بناء على تُهَمٍ بالتجديف.

تنبع كل التهديدات محل التساؤل من استخدام الدين كسلاح وسوء استعماله لأغراض سياسية. تشمل هذه التهديدات: أولًا، الجماعات المتطرفة التي ترفض وجود إندونيسيا باعتبارها دولة قومية ذات ديانات متعددة وتُقِرُّ مفهوم التعددية؛ ثانيًا، يزعم المتطرفون احتكارًا للتفسير والممارسة الصحيحين للإسلام ويسعون لفرضهما على الآخرين؛ وثالثًا، إخفاق الأغلبية الصامتة في التعبير علنًا عن اعتراضهم على هذه التهديدات والاشتباك معها.

انطلقت Kirab Satu Negeri ("مسيرة أمة واحدة") من خمس نقاط على امتداد حدود أرخبيل إندونيسيا الفسيح في يوم ١٦ سبتمبر، واستمرت على امتداد طرق متعددة على جزر إندونيسيا الرئيسية مُوَحِّدَةً ملايين الناس من مختلف أشكال الإيمان والأعراق في تأكيد إضافي على رؤية التراث الإندونيسي باعتباره مصدرًا للانسجام والتوافق، لا التفرُّق؛

٧- في يومي ٢٥ و٢٦ أكتوبر ٢٠١٨، استضافت كل من جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة قمة دولية لقادة دينيين وثقافيين وسياسيين: المنتدى العالمي الثاني للوحدة. وأقيم بالاشتراك مع Kirab Satu Negeri، وناقش المشاركون الحاجة لإعادة تنشيط القيم التعددية والمتسامحة القارَّة في قلب الإجماع القومي الإندونيسي؛ والحاجة لإحياء فهم وممارسة الدين بما هو رحمة (الحب الكوني والتَّعَاطُف)؛ والحاجة لإطلاق جهد عالمي للحدِّ من انتشار الكراهية الجماعية، والاستعلائية والعنف، وهي كلها مكونات لتهديد أعمق للسلام والأمن العالَمِيَّين ومكونات لتهديد يطال الأمن الوطني الخاص بكل أمة على كوكب الأرض.

الجزء الأول

السياق

٨- بموجب بيان نوسانتارا تم إدراج عدد من الملاحظات تتعلق بطبيعة وغرض مقاصد الشريعة التي تمَّ التعبير عنها في النقاط ١ – ٨ من إعلان جيراكان بيمودا أنسور بخصوص الإسلام للإنسانية في مايو ٢٠١٧:

١- في نظرية القانون الإسلامي الكلاسيكي تُمَثِّل (أصول الفقه) والأحكام (مفردها: حُكْم)، استجابةً للواقع. والغرضُ من مقاصدِ الشريعة هو ضمان المقومات الروحية والمادية القويمة للإنسانية.

٢- قام الفقهاء السنّيون ذوو السلطة، والإمام الغزالي والإمام الشاطبي بتحديد خمسة مكونات أوّلية لمقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.

٣- قد تكون الأحكام الدينية كونية وغير متغيرة ـــ مثل الأمر الإلهي بأن يجاهد الإنسان ليحوز التميُّز الأخلاقي والروحي - أو ربما تكون «مشروطة» لو أنها - أي هذه الأحكام - تخاطب قضية محدَّدَة تنبع من داخل الظروف الآخذة في التغير دومًا على مستوى الزمان والمكان.

٤- بما أن الواقع يتغير، ومشروط - في مقابل الكوني - فإن الأحكام الدينية يجب أن تتغير أيضًا لتعكسَ الظروف المُتَغَيِّرَة في الحياة على كوكب الأرض بشكلٍ مستمر. كانت هذه هي الحالة أثناء القرون الأولى من الإسلام، فانبثقت العديد من المذاهب الإسلامية وتطوَّرَت. وخلال القرون الخمسة الماضية، مع ذلك، تضاءلت ممارسة الاجتهاد (والاجتهاد هو استدلال شرعي مُسْتَقِل، يتم توظيفه لاستخراج أحكام دينية جديدة) وانقضت هذه الممارسة في العالَم المسلم السُنّي.

٥- عندما ينشدُ المسلمون المعاصرون الهداية الدينية، فإن المصدر المرجعي صاحب السلطة، والأكثر انتشارًا ووثوقية، ومقياس الأرثوذكسية الإسلامية بالفعل، هو مجموعُ كتابات الفكر الإسلامي الكلاسيكي (التراث) وبالأخص (الفقه) – والذي بلغ مداه الأقصى، على مستوى التَطَوُّر، في العصور الوسطى ثم حدث أن تجمَّدَ في محله، وبشكل كبير لم يتغير حتى وقتنا الحالي.

٦- يوجد الآن تباين كبير بين بنية الأرثوذكسية الإسلامية والسياق الفعلي (المعيشي) لواقع المسلمين نتيجة للتَغَيُّرات الهائلة التي قد حدثت منذ نَمَت تعاليم الأرثوذكسية الإسلامية بشكل مُتَعاظم قرب نهاية حقبة العصر الوسيط.

٧- يمكن لهذا الانفصال بين العقائد الأساسية للأرثوذكسية الإسلامية وواقع الحضارة المعاصر أن يؤدي بالمسلمين لخطر مادي وأخلاقي وروحي، وغالبًا ما يحدث ذلك، لو أنهم أصروا على التعامل مع عناصر معينة في الفقه بصرف النظر عن سياقها الحالي. ومن هذه القضايا المُرَكَّبَة التي تستقر في قلب هذه المفارقة ما يلي:

- الممارسات المعيارية (التنظيمية) التي تحكم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، بما يتضمن الحقوق والمسؤوليات ودور غير المسلمين الذين يحيون في مجتمعات ذات أغلبية مسلمة، والعكس صحيح؛
- العلاقات بين العَالَم المسلم والعَالَم غير المسلم، بما يشمل الأهداف الملائمة وقانون الحرب؛
- وجود الدول القطرية الحديثة وصلاحيتها – أو نقصها وما تعلق به – باعتبارها أنظمة سياسية تحكم حياة المسلمين؛
- ومؤسسات الدولة والأنظمة التشريعية القانونية، والقوانين التي انبثقت من العمليات السياسية الحديثة، وعلاقاتها بالشريعة.

٨- إن عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والحروب الأهلية، والإرهاب، كل ذلك يبزِغُ من محاولة يقوم بها مسلمون محافظون بشكل رجعي، لكي يُطَبِّقوا عناصر معينة من الفقه في سياق لم يعد متوافقًا مع الأحكام الدينية الكلاسيكية السالفة الذِكر.

إطلاق الإصلاح أو إعادة غرس التعاليم البَالِيَة والإشكالية للأرثوذوكسية الإسلامية في سياقها

٩- بكلمات الحاج يحيى خليل ستاكوف Kyai Haji Yahya Cholil Staquf (السكرتير العام للمجلس الأعلى بمؤسسة نهضة العلماء): "يُمَثِّل بيان نوسانتارا خطوة واقعية تبادر بمقتضاها جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة، رسميًا ومؤسسيًا، بعملية تهدف لمصالحة العناصر الإشكالية الموجودة بالأرثوذوكسية الإسلامية مع «الوقائع الحضارية» للقرن الحادي والعشرين».

١٠- تصف الأجزاء X – III في بيان نوسانتارا (النقاط ١٤ – ٩٨) السياق التاريخي والجيو-سياسي والديني للقرار والمرسوم المشترك لجيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة الصادر في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ والذي يعتمد الإصلاح أو إعادة غرس تعاليم بَالِيَة محدَّدَة تنتمي للأرثوذوكسية الإسلامية في هذه الفترة الحَرِجَة من تاريخ العالَم. توضح هذه البنود أيضًا القيم والمبادئ الإسلامية الأساسية وكذلك الرؤية الإسلامية الأساسية للعالَم التي تؤسس وتحاكي هذا المسعى: أي، الرحمة (الحب الكوني والتَّعَاطُف) وتجسيدات أخرى لـ (الأخلاق الكريمة).

١١- تناقش الأجزاء X – III بشكل مُحَدَّد:

III- كيف تُوَضِّح تجربة إندونيسيا التهديد العالمي الذي تطرحه السياسات الإسلاموية ولماذا قد تسهم استجابة نهضة العلماء لهذا التهديد في خلق سلام وأمن عالَمِيين (النقاط ١٤ – ٤٠)؛

IV- حركة الإسلام للإنسانية الساعية للقضاء على الممارسة المنتشرة لاستخدام الدين في التحريض على الكراهية والعنف تجاه الآخرين (النقاط ٤١ – ٤٨)؛

V – منظور إسلامي عن طبيعة الاستبداد وترياقه، الأخلاق الكريمة (النقاط ٤٩ – ٦٤)؛

VI – التقسيم الثنائي العميق بين المُثُل والممارسة القارّة في قلب كلٍّ من النظامين الديني والعلماني، بل والقارَّة كذلك في الطبيعة الإنسانية نفسها (النقاط ٦٥ – ٧٦)؛

VII – التهديد الحضاري الذي تطرحه السلسلة المترابطة بين نسق محدد من الدوجما والقوة الاقتصادية والسياسية والتكنولوجيا (بمعنى آخر، تهديد الاستبداد) (النقاط (٧٧ – ٨٦)؛

VIII – "الحكمة الحضارية" القديمة لـ نوسانتارا (أرخبيل الملايو) التي عززت الانسجام المجتمعي والتعايش السلمي بين أناسٍ من مختلف الأعراق والثقافات وأشكال الإيمان (النقاط ٨٧ – ٩١)؛

IX – التعاطف بما هو قيمة كونية تشترك فيها جميع الأديان والشعوب (النقاط ٩٢ – ٩٤)؛

X – كيف تتحرك جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة بشكل منظم ومؤسسي لمواجهة العناصر البَالِيَة والإشكالية (أي؛ المُتَغَيُّرات، المشروطة تاريخيًا) داخل نسق الأرثوذوكسية الإسلامية والتي تمنح نفسها للاستبداد، بينما يتم العمل على وضع هذه الجهود في إطار مبادرة أكبر لرفض أي وكل أشكال الاستبداد وتعزيز انبثاق حضارة عالَمِية مُسْبَغ عليها كرم الأخلاق (النقاط ٩٥ – ٩٨)؛

١٢- يوظف الجزء XI من البيان (النقاط ٩٩ – ١٧٣) علم أصول الفقه – منهجية الاستدلال الشرعي المُسْتَقِل المُسْتَخْدَمَة في إنشاء الفقه أو القانون الإسلامي – لاستكشاف لماذا يكون من الجائز والضروري لاهوتيًا على الباحثين المسلمين المعاصرين إعادة غرس التعاليم البَالِيَة للأرثوذوكسية الإسلامية السلطوية في سياقها والمُسْتَخْدَمَة في تبرير الكراهية الدينية والاستعلاء الديني والعنف الديني. يشرح البند رقم ١١،٢ لماذا تستلزم الأوضاع المُتَغَيِّرَة اجتهادًا جديدًا لضمان سلامة الإنسانية (مقاصد

الشريعة). ويضم البند رقم ١١,٣ المقالة التاريخية للحاج عبد الرحمن وحيد "ليس الله في حاجة للدفاع من أحد God Needs No Defense"، بينما يؤسس بند رقم ١١,٥ إطارًا لانبثاق ما يسميه بيان نوسانتارا بـ فقه الحضارة العالَمِيَّة الواحدة المُتَصَهِّرَة.

١٣- يرسي البيان في تقرير نوسانتارا استخلاصاته التي وَقَّعَ عليها المشاركون في المنتدى العالمي الثاني للوحدة في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨.

الجزء الثالث

التهديد المتواصل للسياسات الإسلاموية
في إندونيسيا ما بعد سوهارتو وتشعُّباته:
دعم سلام وأمن عالَمِيَّين عبر الإسلام للإنسانية

١٤- لقد كان المَدُّ المتصاعِد للإسلاموية في أشكالها التي لا تعد ولا تحصى من ضمن الظواهر الأجدر بالملاحظة في إندونيسيا على مدار العشرين عامًا المنصرمة. وهي تتفاوت من بريمان بيرجوبا preman berjubah (عصابات ترتدي زي العرب) لنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لحركات التبشير والهداية، والشبكات التعليمية والأحزاب السياسية، وحتى الجماعات الإرهابية المُنْتَسِبَة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

١٥-فرديًا وجميعًا، تهدد هذه التطوُّرات وحدة إندونيسيا وشعبها، في الغالب عبر طرق أعمق وأكثر غموضًا من الصراعات الدموية المستعرة باسم الإسلام في مناطق بها تَنَوُّعات من البشر مثل أمبون Ambon وبوسو Poso وآتشيه Aceh.

١٦- ورغم ذلك، ليس هذا التهديد بجديد على الإطلاق. فبعد وقبل تحقيق إندونيسيا للاستقلال، اضطر الآباء المؤسسون للاشتباك مع التَّوَتُّرِ المتواجد بين الأرثوذوكسية الإسلامية ومُثُل الدولة القومية الحديثة. في يونيو ١٩٤٥، توصَّل أعضاء اللجنة التحضيرية للاستقلال (PPKI) لإجماع مؤقت في ميثاق جاكارتا والذي شَكَّل لاحقًا الأساس لقاعدة تمهيدية تخص دستور إندونيسيا. وقد تضمنت في الأصل إلزامًا يقع على المسلمين ويتعلق بالخضوع القانون الإسلامي (الشريعة).

١٧- في سياق مفاوضات ممتدة، أَقْنَعَ القوميون المسلمون العلمانيون، ومنهم سوكارنو Soekarno ومحمد حاتا Muhammad Hatta، رفقاءهم من أعضاء اللجنة لإلغاء سبع كلمات - "مطلوب من المسلمين الالتزام

بالقانون الإسلامي" – من المبدأ الأول للبانشاسيلا Pancasila التي تمثِّل الفلسفة السياسية الأساسية لإندونيسيا المُسْتَقِلة حديثًا. حاجج حاتا بشكل مُقْنِع أن المناطق ذات الأغلبية الهندوسية والمسيحية في جزر الهند الشرقية سترفض الانضمام لجمهورية إندونيسيا لو أن دستورها يحتوي على بذور دولة إسلامية.

١٨- لكن، رغم تَبَنِّي أعضاء اللجنة لدستور ١٩٤٥ (UUD-٤٥) بالإجماع، لم يتم حلّ التوتُّر البادي في جدلهم الدائر حول ميثاق جاكرتا قط ويستمر في تعكير الاجتماع الإندونيسي ليومنا هذا.

١٩-شهدت انتخابات الجمعية التأسيسية في عام ١٩٥٥ عودة ظهور الجدل الضاري المتعلق بشكل الحكومة الذي يجب على إندونيسيا تَبَنِّيه: ثيوقراطية إسلامية أو دولة قومية علمانية. وبعد سنوات من التلاعبات السياسية والصراع، ضرب الرئيس سوكارنو بقبضة من حديد في يوليو ١٩٥٩ لإنهاء الجدل عبر حَلِّ الجمعية التأسيسية وإعادة فرض دستور ١٩٤٥ بناء على مرسوم رئاسي.

٢٠- بالإضافة إلى شلِّ حركة الصراع التشريعي، كانت خمسينيات القرن العشرين أيضًا فترة ثورات مسلحة تقوم باسم الإسلام. ومنذ عام ١٩٤٩ – ١٩٦٢ ازدهرت حركة دار الإسلام/ Tentara Islam Indonesia (الدولة الإسلامية/ الجيش الإسلامي الإندونيسي) في غرب جاوة Java، وجنوب سولاوسي Sulawesi، وجنوب كاليمنتان Kalimantan، وآتشيه. أقرَّت دار الإسلام/ TII الشريعةَ فقط باعتبارها مصدرًا قانونيًا/ شرعيًا للقانون، بينما يقومون بترويع خصومهم وقطع رؤوسهم. في سومطرة Sumatra وسولاوسي رفعت الحكومة الثورية لجمهورية إندونيسيا (PRRI) لافتة الإسلام لأن حزب ماسيومي Masyumi الإسلامي – المتأثر بهزيمته السياسية على يدي سوكارنو، وكياي وهاب حسب الله Kyai Wahab Hasbullah (رئيس نهضة العلماء) وإندونسيين قوميين آخرين – كان مُشْتَرِكًا بقوة في ثورة PPRI/ بيرمستا Permesta (١٩٥٨ – ١٩٦١) المدعومة من وكالة المخابرات

المركزية CIA.

٢١- تُظْهِر هذه التجارب التاريخية أن الإسلاموية -خصوصًا باعتبارها حركة سياسية مبنية على الهوية الدينية- تمثِّل تهديدًا متواصلًا ومستترًا بالفعل لوجود الدولة المُوَحَّدَة لجمهورية إندونيسيا (NKRI) بوصفها دولة قومية متعددة دينيًا وتُقِرُّ التعددية (بانشاسيلا).

٢٢-في ظل نظام حكم سوهارتو، قُمِعَ هذ التهديد باستمرار وبصعوبة مُعْتَبَرة، لكن لم يتم تصفيته بشكل كامل. يمكن القول بأن المَدَّ المتصاعِد للإسلاموية في إندونيسيا ما بعد سوهارتو يُشَكِّل "ارتدادًا" للتطلُّع الإسلاموي الدائم وضغطه المصاحِب لتحويل إندونيسيا من أمة بانشاسيلا لدولة إسلامية.

٢٣- إن التكتلات الاجتماعية بناء على الهوية الدينية ظاهرة طبيعية. تكمن المشكلة في تعاليم الأرثوذكسية الإسلامية في حقيقة أن هذه المبادئ تتجسد دائمًا باعتبارها شكلًا من الهوية السياسية، مع ميل ملحوظ لتبجيل الإطلاقية وأجندة معلنة أو خفية للهيمنة على النظام السياسي الموجود مهما كانت طبيعته وشكله. سواء أكان هذا الصراع المتعلق بحيازة السيادة السياسية يتم بشكل سافر أم في السر، يظل هذا الأمر ببساطة رهن الإستراتيجية والتكتيكات.

٢٤- قد يكون التحليل المُفَصَّل ضروريًا بُغْيَة الوصول لفهم شامل لهذه المسألة، ويتضمن التحليل دراسة الأبعاد التاريخية لهذا الظاهرة. رغم ذلك، ثَمّ شيء لا يمكن إنكاره: إن التطلُّعَ لاكتساب الإسلام هيمنة سياسية هو بالفعل جزء جوهري من تعاليم الأرثوذكسية الإسلامية، لو أننا طَبّقْنا مصطلح "الأرثوذكسية الإسلامية" لوصف "مصفوفة من المذاهب اللاهوتية المقبولة عند أغلبية المسلمين باعتبارها المقياس المرجعي الديني السلطوي".

٢٥- وكيف يمكن ألّا يكون الوضع هكذا؟ تتضمن الأرثوذكسية الإسلامية خطابًا مستفيضًا يتعلق بالقانون العمومي، في شقيه المدني والجنائي، والذي يوصَف عمومًا باعتباره "قانون الله" (الشريعة) - أو على الأقل "تفسير

قانون الله" (الفقه)- والذي يلزم تطبيقه في الحياة اليومية. من الواضح أنه لا يمكن تحقيق ذلك بدون الهيمنة السياسية عبر هؤلاء الراغبين في تطبيق الشريعة (وفي حقيقة الأمر، الفقه)، وهو ما يَصِفُ الأجندة الإسلاموية بدقة.

٢٦- رأى سوهارتو الضغط السياسي الإسلاموي باعتباره تهديدًا لسلطته الخاصة. وبالتالي، تَبَنَّى إستراتيجية سياسية وعسكرية للقمع، مقترنة بامتيازات رمزية تم التفاوض حولها بحرص لتهدئة الجماعات الإسلاموية. ونتائج هذه المفاوضات ظاهرة بوضوح في إندونيسيا ما بعد سوهارتو: تضمين التعليم الديني في المناهج المدرسية؛ وإقامة مجلس علماء إندونيسيا (MUI)؛ وإنشاء نظام قانوني إسلامي يمارس سلطة قانونية على الزواج، والطلاق، والزواج مرة أخرى والميراث للمسلمين فقط؛ و"عطاءات سياسية" تمَّ تقديمها لمسايرة المؤسسات والمنظمات الإسلامية؛ وتأسيس بنوك "وفق الشريعة"؛ وإنشاء جمعية المفكرين المسلمين الإندونيسيين (ICMI) بدعم الحكومة، وكل هذا على سبيل المثال لا الحصر.

٢٧-وكما فعل محمد علي في مصر، وأتاتورك والبهلويون في إيران، أخفق نظام سوهارتو في مواجهة التعاليم الإشكالية داخل نسق الأرثوذكسية الإسلامية التي تؤسس وتحاكي التهديد الإسلاموي الدائم، وهو الأمر الذي يمكن فعله فقط عبر عملية إصلاح أو إعادة غرس الأرثوذكسية الإسلامية نفسها في سياقها.

٢٨- وبورِكَت مؤسسة نهضة العلماء (NU) خلال تاريخها بامتلاك قادة وقفوا في صف الدولة القومية الإندونيسية على حساب الثيوقراطية وسَعوا بكل أصالة لخير الدولة المُوَحَّدَة لجمهورية إندونيسيا (NKRI) ونجاحها السياسي. ومن القادة الأبرز في مجموعة قادة نهضة العلماء نجد عبد الوهاب حسب الله وعبد الرحمن "جوس دور Gus Dur" وحيد. وقد وَظَّف كل واحد منهما سلطته الدينية باعتبارهما رئيسين للمنظمة الإسلامية الأكبر في العالَم لحشد جمهورهم والتحرك إستراتيجيًا عبر طرق أثبتت كونها

مصيرية لبقاء الدولة المُوَحَّدَة لجمهورية إندونيسيا (NKRI)، والبانشاسيلا ودستور ١٩٤٥ في أوقات غلب عليها اليأس بحق.

٢٩- أثناء خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر، تصَدَّى كياي وهاب لحزب ماسيومي منعًا لاستعادة ميثاق جاكرتا وتحويل إندونيسيا إلى دولة إسلامية؛ ودَعَمَ سوكارنو والجيش الإندونيسي في قمع الثورات التي قامت بها حركة دار الإسلام وPPRI/ بيرمستا Permesta؛ ووالى سوهارتو لمنع الاستحواذ الشيوعي على السلطة، وهو الأمر الذي تَسَبَّبَ في تأثيرٍ مُدَمِّرٍ كما حدث في روسيا، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، والصين، وكوريا الشمالية والتبت.

٣٠- خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، حشد "جوس دور" نهضة العلماء لتساهم في التأكيد على انتقال إندونيسيا الناجح من السلطوية للديمقراطية، وبالتالي أنقذ أمته من المصير الذي ابتلع سوريا، واليمن، وليبيا، ودمَّر محاولات الديمقراطية الهشَّة في مصر وروسيا.

٣١- شجَّع كياي وهاب و"جوس دور" نخبة من علماء نهضة العلماء لتطوير خطاب ديني قَدَّمَ بديلًا متينًا للتعاليم البَالِيَة الإشكالية في الأرثوذوكسية الإسلامية. وكان من شأن هذا الخطاب الإسلامي البديل تقوية شرعية الدولة المُوَحَّدَة لجمهورية إندونيسيا (NKRI)، والبانشاسيلا، ودستور ١٩٤٥، والشعار القومي لإندونيسيا "الوحدة عبر التعدُّد Bhinneka Tunggal Ika" ـــــ وقام بحشد وتعبئة جمهور كبير من تابعي نهضة العلماء على مستوى القاعدة الشعبية لدعم هذا الخطاب البديل. لكن "المهمة" التي أخذها كياي وهاب، وجوس دور وأتباعهم على عاتقهم أبعد ما تكون عن الاكتمال. فكما لاحظ جوس دور نفسه، "يلزم عليـ[نا] الحفاظ على وجود حوار مستمر بين الإسلام والدستور".

٣٢- لا توجد إجازة لممارسة القمع السياسي والعسكري في إندونيسيا، بالتحديد في عصر الإصلاح التالي على سوهارتو. لم تَعُد ممارسة السلطة التي لا رقابة عليها مُجْدِيَة وذلك لأن القوى الديناميكية انبثقت في سياق مجتمع مدني يراقب أفعال الحكومة بشكل ثابت. ونتيجة لذلك، لا يمكن للحكومة التصرف

اعتباطيًا لإلجام شهوة الإسلاميين السياسية ـــ ولا حتى للدفاع عن الدولة المُوَحَّدَة لجمهورية إندونيسيا (NKRI)، والبانشاسيلا، والدستور.

٣٣- وكنتيجة طبيعية لهذه التطورات على المستوى الديمقراطي ومستوى حقوق الإنسان، أصبح "التوتُّر الديالكتيكي" القائم بين الإسلام والدولة المُوَحَّدَة لجمهورية إندونيسيا (NKRI) محكومًا بشكل كبير ـــ وكذلك حُدِّدَت النتائج السياسية ـــ بواسطة التفاعل المُعَقَّد للقوى المتنافسة في الاجتماع ككل.

٣٤- عبر عصر الإصلاح الديمقراطي بعد سوهارتو، تَبَنَّت نهضة العلماء موقفًا حازمًا وبَيِّنًا يؤيد دستور ١٩٤٥ (NKRI/UUD–٤٥)/ البانشاسيلا لإحباط الجهود التي تسعى لتحويل إندونيسيا من دولة قومية ذات سيادة – تُستقى قوانينها ودستورها عبر عمليات تنتمي للسياق السياسي الحداثي - إلى ثيوقراطية يتشارك حكامها التطلعات الإسلامية الدائمة للهيمنة السياسية وإقامة خلافة كونية.

٣٥- هناك القليل من الشَّكِّ في أن محصلة هذا الصراع داخل إندونيسيا ستتأثر بقوى العولمة التي تُحْضِر الناس والأفكار من أقاصي الأرض للتفاعل اليومي مع المسلمين الإندونيسيين في سياق الصالح والطالح على حدٍّ سواء.

٣٦- وطالما ظَلَّت التعاليم البَالِيَة ابنة العصور الوسطى في الأرثوذكسية الإسلامية تشتغل باعتبارها مصادر مهيمنة للسلطة الدينية عبر العالم الإسلامي، سيستمر الإسلاميون الإندونيسيون في اجتذاب السلطة والتدعيم من التطورات الحاصلة في العالَم ككل. وهذا الأمر صائب بالأخص طالما استمرت الجهات الفاعلة من الدول الرئيسية – ومنها إيران، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وباكستان – في تحويل التعاليم الإشكالية للأرثوذكسية الإسلامية لسلاح، وذلك في سعيهم لتحقيق أجنداتهم الجيو-سياسية الخاصة.

٣٧- لقد قادت هذه الاعتبارات الشخصياتِ الرئيسية داخل مؤسسة نهضة العلماء – ومنهم "جوس دور" خلال الشهور والسنوات التي سبقت وفاته، والرئيس الأسبق لنهضة العلماء كياي حاج مصطفى بصري Kyai

Haji A. Mustofa Bisri – لاستنتاج أنه من المستحيل حَلّ التوتر بشكل نهائي، وهو توتُّر جوهري في طبيعته بين الأرثوذوكسية الإسلامية و(NKRI/UUD–٤٥) طالما استمررنا في تحديد جهودنا بالسياق الوطني أو الإندونيسي المحض فيما يتعلق بالتهديد الإسلاموي الدائم.

٣٨- يتطلب الحفاظ على التراث الحضاري الفريد لإندونيسيا – الذي أنتج الدولة المُوَحَّدَة لجمهورية إندونيسيا (NKRI) باعتبارها دولة قومية متعددة دينيًا وتؤيد التعدُّديَّة بشكل عام – التطبيق الناجح لإستراتيجية كونية تعمل على تطوير أرثوذوكسية إسلامية جديدة تعكس الظروف الواقعية للعالَم الحديث الذي يلزم على المسلمين الحياة فيه وممارسة إيمانهم.

٣٩- إن هذا الجهد العالمي الذي تَمَّ بالفعل إطلاقه بواسطة شخصيات وعناصر أساسية في نهضة العلماء ـــــ بما تتضمنه من منظمة للشباب يصل عددهم لـ ٥ مليون، جيراكان بيمودا أنسور ـــــ ليس فقط نتيجة طبيعية حتمية للجهود الرامية إلى هزيمة التحطيم الإسلاموي لإندونيسيا. إنه أمر حيوي لسلامة كل أمة في العالَم وللحفاظ عليها عمليًا، وهي أي أمة تُسْتَقَى قوانينها من عمليات سياسية حديثة ولا يرغب شعبها وحكوماتها في الاندراج تحت حكم خلافة إسلامية عالَمِيَّة أو استنفادها بواسطة الصراع للحيلولة دون تأسيس هذه الخلافة.

٤٠- إن عملية إصلاح أو إعادة غرس الأرثوذوكسية الإسلامية في سياقها أمر مصيري لرخاء المسلمين وغير المسلمين على حدٍّ سواء، وذلك لأنها شرط ضروري ولازم لأي حل عقلاني وإنساني للأزمة المتعددة الأبعاد التي أصابت ويلاتها العالَم الإسلامي لأكثر من قرن، وهي لا تكتفي بعدم إظهار أي علامة على الخمود ـــــ رغم الخسائر والبؤس الذي حاق بالحيوات الإنسانية، وهي خسائر آخذة في التزايد ـــــ وإنما بالأحرى، تُهَدِّد بالطغيان على الإنسانية ككل، بل وابتلاعها كذلك.

الجزء الرابع

الإسلام للإنسانية

٤١- أطلقت جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة للدعوة الإسلامية رحمةً للعالَمين حركة الإسلام للإنسانية في الثلاثين من شهر مارس ٢٠١٧، وقد استلهمت الرسالةَ الأساسيةَ للإسلام والبعثة النبوية للنبي محمد صلَّى الله عليه وسلّم.

٤٢- تتعلق الرسالة الأولى للإسلام بأن الدين يهدف لأن يكون رحمة للعالَمين ومصدرًا لحب وتعاطف كونيين ـــ وأن يكون مرنًا ومستجيبًا لاحتياجات الإنسانية في كل زمان ومكان.

٤٣- يقوم الإسلام للإنسانية على الفرضية الأساسية عند أهل السنة والجماعة وتعاليمهم (الإسلام السني) المتعلقة بأن الغاية الحقيقية للدين هي الحياة الإنسانية المُكْتَمِلَة من المنظور الروحي والمنظور الاجتماعي. يلبي الدين وظيفته الروحية بمساعدة الناس في الحصول على أخلاق كريمة واستيعاب كامل لمعنى وجوهر الحياة. ومن المنظور الاجتماعي، يدعو الدين إلى إقامة الانسجام والعدالة وييسر أمرهما.

٤٤- يدعو الدين كل البشر، دون استثناء، لتحقيق أقصى إمكانياتهم.

٤٥- غالبًا ما ينجح الرواد الدينيون الذين يحاكون الدين في تغيير مسار حضارات بأكلمها. إلا أن نجاحهم نفسه قد يؤدي إلى ظهور تفسيرات مُعَيَّنَة للدين تُشَكِّل الأساس لجماعات مُنَظَّمَة تقوم بتقسيم الإنسانية بدلًا من توحيدها. يمكننا من داخل كل تقليد ديني أن نجد هؤلاء الذين يروجون للكراهية تجاه الآخرين باسم الله. بالفعل، يزخر العالم بجماعات تُوَظِّف الدين سعيًا وراء أهداف لها علاقة ضئيلة، أو لا علاقة لها، بالغاية الجليلة للدين ذاته.

٤٦- تسعى حركة الإسلام للإنسانية إلى استعادة الطبيعة الإنسانية التي ينظر لها الإسلام باعتبارها فطرته النقية والأصليةــــ ويُرمَز لها بفعل الله، ألا وهو نفخ الروح/ الحياة في النَّبِي آدم ـــــ وإزالة الممارسة المنتشرة المتعلقة

باستخدام الدين لإثارة الكراهية والعنف تجاه الآخرين.

٤٧- تقف الفطرة في تقابل أساسي مع الطغيان الذي يُسْكِتُ صوت الضمير المُحَرِّر ويُخْضعه لإملاءات القوة الجشعة.

٤٨- وكما تكون الفطرة نفيًا للطغيان، يكون الدين الحق وهو يتجسد اجتماعيًا نفيًا لهيمنة الآخرين.

الجزء الخامس

منظور إسلامي عن طبيعة الطغيان وترياقه، الأخلاق الكريمة

٤٩- يُعلّمنا الإسلام أن الله أسبغ على البشر القدرة على الاختيار، والانخراط في سلوك إيجابي (بمعنى، فضيل وبَنَّاء) أو سلوك سلبي (بمعنى، أناني وتدميري). تعتمد شخصية المرء على نزوعه/ نزوعها، وعاداته/ عاداتها، واختياراته/ اختياراتها التي يحددها/ تحددها عبر مسار الحياة. ويكون تطوير أخلاق كريمة أو مذمومة نتاج هذه الاختيارات والسلوك.

٥٠- في غياب ضبط النفس، يعزز الدافعُ الإنساني الفطري السعيَ وراء البهجة وتجنُّب الألم ـــ سواء أكان جسديًا أم عاطفيًا أم نفسيًا ـــ وتعزيز الأنانية، والظلم والسعي المُتَعَنّت وراء السلطة للإرضاء الشخصي. من منظور إسلامي يكون هذا الأمر جذر الطغيان، سواء أتم تجسيده على مقياس فردي أم جماعي.

٥١- على المستوى الشخصي، يلزم على كل شخص مغالبة طغيان أناه أو أناها وحواسه/ حواسها. يستدعي الضميرُ (''الصوت داخل الإنسان'') المرءَ ليتصرف وفق سلوك فاضل أو نبيل. وحينما يخفق الناس في كبح شهيتهم للإرضاء الشخصي ويتصرفون قَصْدًا ضد مصالح الآخرين غير مبالين

بمعاناتهم، فإنهم يطورون أخلاقًا مذمومة.

٥٢- على المستوى الاجتماعي، يقوم الطغاة بتخريب وقمع الضمير الفردي على مستوى وظيفته وتجسداته العمومية، عبر تحريض البشر على إطلاق العَنان لغرائزهم الأساسية بينما يثبطون و/ أو يعاقبون السلوك الكريم.

٥٣- من منظور إسلامي، قد يكون الطاغية أي شخص "يحكم" بطريقة قمعية ـــ بمعنى آخر، يُشَكِّل أو يتحكم في ـــ تصرفات الآخرين عبر ممارسة السلطة السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو السوسيو-ثقافية، بطريقة لا مفر من تأثيرها الضار المُتَشَدِّد.

٥٤- من طبيعة الطغاة أن يطالبوا بإجلال تصريحاتهم والارتقاء بها فوق إصدار الأحكام عليها أو نقدها، وتُطاع رغباتهم دون سؤال كما لو كانوا آلهة.

٥٥- تتطلب خدمة الله (أي أن تستسلم له) على النقيض من خدمة الطاغية شجاعة هائلة وأخلاقًا كريمة. وذلك لأن الخدمة الحقَّة لله تستتبع تحرير الإنسان لنفسه من الارتباط بالحواس بينما يتم نبذ الاستمالات و/ أو مقاومة تهديدات الطاغية، سواء أكان الطغيان من الداخل (طغيان الأنا والهوى) أم من الخارج.

٥٦- تتطلب خدمة الله أن يستسلم المرء - أي يتبع ويطيع - للصوت الواضح للضمير الذي ينادي على كل إنسان ليخدم الحقيقة.

٥٧- في الإسلام، الحَقُّ اسمٌ من أسماء الله التسعة والتسعين. أن تخدم الحقيقة يعني أن تخدم الله.

٥٨- غالبًا ما يزعم الطغاة أنهم يتصرفون باسم قوى أسمى ويسعون حثيثًا وراء غاية حميدة، قد تتضمن الترويج لقيم دينية أو قيم ممدوحة من الإيديولوجيا العلمانية. ويتكون الاختبار الأقصى لهذه المزاعم من التحقق بدون تَحَيُّز سواء أكانت الأفعال محل الشك تُجَسِّد وتشجع على السلوك الكريم أم الذميم.

٥٩- من منظور إسلامي، تتجسد الأخلاق الكريمة في شكل التواضع؛ والرحمة (الحب والتَّعَاطُف الكونيان)؛ والشكر؛ والنية الصالحة؛ وسمات كريمة

أخرى تنشأ طبيعيًا عن حالة من الوعي بتجاوز الذات والتَّجَرُّد لله (بمعنى آخر، حالة الإسلام).

٦٠- يُشْتَق مصطلح الرحمة من الجذر الثلاثي (ر – ح – م) كما في الرحمن والرحيم، وهما اسمان من أسماء الله التسعة والتسعين. وتحتوي الأسماء الثلاثة على الأمان المُحِب كرَحِمِ الأم.

٦١- يستلزم السلوك الكريم التعامل بتعاطف ومعاملة الآخرين باحترام.

٦٢- «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ ~ القرآن الكريم ٢١ : ١٠٧.

٦٣- «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاقِ» ~ حديث نبوي.

٦٤- إن مهمةَ كل نبي إلهامُ البشر برؤية للكمال الأخلاقي والروحي، وتشجيعهم على نيل هذه المكانة الكريمة، ومن ثمّ تقويتهم على تحدي الطغيان النابع من داخل الذات ومن خارجها بشجاعة.

الجزء السادس

الدين، والقَبَلِيَّة والإيديولوجيا العلمانية

٦٥- لقد أظهر البشر عبر التاريخ وبشكل مدهش سلوكيات متعددة ـــــ كريمة، وفي المقابل أيضًا قاسية وذميمة ـــــ ويفعلون ذلك باسم الدين.

٦٦- يأمر كل تقليد ديني كبير أتباعه باتِّباع منظومة مشتركة من المقاييس الإنسانية والأخلاقية، مشابِهَة لحدٍ ما للمقاييس المذكورة سلفًا في ما يتعلق بالإسلام.

٦٧- رغم ذلك، أُصيبت الإنسانية لآلاف السنين بالخُصومة والعداوة والعنف المُرْتَكَبين باسم الدين وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تكوُّن هوية أخلاقية أو ”قَبَلِيّة“ واقعية.

٦٨- مرارًا وتكرارًا، لقد تلاعب الساعون للسلطة الدنيوية بالشعور الديني في

سعيهم الحثيث إلى الحصول أو الحفاظ على السيادة السياسية والاقتصادية والعسكرية وكذلك للهيمنة على خصومهم. وقد أدى ذلك إلى معاناة لا حصر لها وخسارة للحياة، وعَجّلَت بإبادة حضارات كاملة.

٦٩- يثير هذا الأمر سؤالًا يتعلق بطبيعة الدين وممارسته، ويمكننا السعي لتجاهل تشعبُّات الدين لكن، لن يكون بمقدورنا الهرب منها.

٧٠- لاحظ الدكتور روديجر لوهلكر Dr. Rüdiger Lohlker في مقاله: "للاهوت أهميته: حالة الإسلام الجهادي": "يُسَبِّب إنكار أهمية الدين بشكل سطحي في الغرب التغاضي عن عنصر أساسي في الفكر الجهادي والممارسة الجهادية. هذا الأمر بَيِّن فيما يتعلق بالنغمة المتكررة عقب كل هجمة إرهابية جديدة، وأعني: "الإسلام دين سلام". إن الادعاء بأن الدين يُحَفِّز السلوك الإيجابي فقط بين البشر، والإنكار الضمني لأن الدين قد يُشَرْعِن السلوك السلبي لا يمكنه الصمود للتدقيق الفكري. يمدنا التاريخ بأمثلة لا حصر لها للسلوكين الإيجابي والسلبي المشرعَنَيْن دينيًا....
إن السبيل الوحيد لتفكيك هذا الشكل العنيف للدين هو تطوير أشكال بديلة للدين قادرة على مقاومة لاهوت العنف الذي يتميز باعتذاريين يطالبون بالسلطوية ويُشَرْعِنون لها، والتجانس السوسيو-ثقافي والديني، والتحديد الصارم للحدود، إلخ [أي، الطغيان]".

٧١- يميل الأتباع الدينيون لرؤية إيمانهم وفق مصطلحات مثالية، بينما يحددون وينقدون مواطن الضعف عند الآخرين سريعًا. وبشكل مثير للسخرية، غالبًا ما يقع منتهجو الإلحاد في قبضة طريقة تفكير دوجمائية يحاولون فرضها على الآخرين عبر النبذ المجتمعي، والحرمان من الحقوق الاقتصادية و/أو الأمور المفروضة بواسطة الحكومة. تقترح الفظائع المُرْتَكَبَة باسم الإلحاد المَيَّال للعنف - بما يتضمن القتل الجماعي واستعباد شعوب بأكملها - أن الخطأ (أي الميل للدوجمائية والطغيان) قد يكمن في الطبيعة الإنسانية بدلًا من كونه دالًا على صفات جوهرية للدين ذاته.

٧٢- رغم ذلك يبقى السؤال: كيف يمارس البشر أشكال إيمانهم المُحَدَّدَة واقعيًا

بما هم أفراد وباعتبارهم ينتمون لإطار أوسع في الاجتماع ككل؟ هل نُطَبِّق الدين باعتباره وسيلة للحصول على الخير الروحي والمادي الأصيل لأنفسنا ولأخواننا من البشر في هذه الحياة والآخرة؟ أم باعتباره أداة لإشباع طموحاتنا الدنيوية وسلاحًا مرعبًا نهاجم به الأعداء ونقضي عليهم؟

٧٣- تتعلق هذه الأسئلة، عند تعديلها لتشمل وجهة نظر لا-أدرية أو إلحادية، بنفس القَدْرِ، بهؤلاء الذين يعتنقون إيديولوجيا سياسية علمانية - مثالية ظاهريًا - باعتبارها وسيلة لتعزيز الخير الفردي والجَمْعي.

٧٤- رغم التقدم التكنولوجي والمادي الهائل الذي حُقِّقَ في مسار التاريخ الإنساني، يتعين علينا حَلّ الثنائية العميقة بين المُثُل والممارسة - جَمْعِيًا، وعلى مقياس عالمي - والتي لا تستقر فقط في قلب أنظمة الإيمان الدينية والعلمانية، وإنما في الطبيعة الإنسانية نفسها.

٧٥- ثَمَّ وعيٌ قليلٌ، وفعليًا ليس ثَمَّة إجماع في المجال العام، فيما يتعلق بهذه الثنائية. بدلًا من ذلك، ثَمَّ نزوع كوني على نحو وثيق يضع من خلاله المرء أجندته أسفل عَلَمٍ مثالي بينما ينبذ الآخرين باعتبارهم أشرارًا، أو حمقى و/ أو عميانًا عن النقائص "البديهية" القارَّة في عقيدتهم الدينية أو العلمانية.

٧٦- ونتيجة لذلك، يتواجد تحيُّز هائل وشرس يبرز على شكل عدم اتفاق عنيف فيما يتعلق بطبيعة ومقصد الإيديولوجيات الدينية والسياسية وأدوارهم الخاصة في المجتمع ـــ وبما يشمل، بشكل ضمني، الدور الملائم للحكومة ذاتها.

الجزء السابع

التهديد الحضاري الذي تطرحه السلسلة المترابطة بين الدوجما والقوة الاقتصادية والسياسية والتكنولوجيا (أي، تهديد الطغيان)

٧٧- ناقش إعلان جيراكان بيمودا أنسور عن الإسلام للإنسانية، بإسهاب، التهديد الذي يطال الحضارة الحديثة والذي تطرحه "مبادئ الفقه البَالِيَة التي تنبني على صراع أزلي مع الذين لا يُجِلُّون الإسلام ولا يخضعون له" (نقطة ٤٢). رغم ذلك، لا تُشَكِّل هذه المبادئ الإشكالية للأرثوذوكسية الإسلامية التهديد الوحيد – ولا حتى التهديد الأساسي ربما – لمستقبل الإنسانية. وذلك لإمكانية تَجَسُّد الدوجمائية سريعًا تحت مظاهر إيديولوجية متعددة سواء أكانت في شكل ديني أم علماني تتلاءم طبيعيًا مع الطغيان.

٧٨- ومع ذلك، تَمَكَّن الإسلاميون، بسهولة، من استغلال العناصر الإشكالية في الأرثوذوكسية الإسلامية ليُسَرْبِلوا أجندتهم السياسية بأصالةً دينية، وقد كان لذلك الأمر نتيجة كارثية وبعيدة المدى عملت على تقوية القوى الدوجمائية حول العالم. ولا زالت التشعُّبات الكاملة لهذه العملية تَتَكَشَّف وتهدد بإنتاج تَجَذُّر دائم للسياسة على المستوى العالمي. وهذا تطور مُقْلِق، تحديدًا لأنه يحدث في وقت تترابط وتتضامن وتمتزج فيه شعوب وثقافات وحضارات متعددة في هذا العالَم بشكل متزايد.

٧٩- في العالَم الإسلامي والمناطق ذات الأغلبيات المسلمة، استخدم الإسلاميون الدعوة المُدَوِّيَة (أو النفير) لإقامة دولة إسلامية ليطلقوا العنان للحروب الأهلية، وأعمال التمرُّد وحملات الإرهاب التي تركت المدن في خراب، وقتلى لا يمكن حصرهم والملايين من المُشَرَّدين على امتداد قوس جغرافي يمتد من الساحل الغربي حتى جنوبي الفلبين. ولقد دامت الكثير من هذه الصراعات لعقود، وعلى الرغم من الخسائر المروعة لهذه الصراعات، إلا أنها

لم تُظهر أي إشارة تدل على انحسارها في العقود الآتية من الزمان.

٨٠- إن الإدراك المنتشر عن المسلمين والإسلام باعتبارهم تهديدًا لغير المسلمين نتيجةٌ مباشرة ومُتَعَمَّدَة لأفعال الجماعات الإسلامية، واستخدامهم الماكر لبروباجاندا تنقل الصور الرمزية للواقع البائس الذي يسعون لخلقه بقوة. إن مخاوف آتية من الماضي مثل الاستعباد، والصلب، والإعدام العام لذوي الميول المثلية جنسيًا، والزُّناة، والكُفَّار، والمُرْتَدِّين والسَّحَرَة يتم استدعاؤها وإعادة توظيفها باعتبارها مُكوِّنات صالحة لنظام اجتماعي إسلامي وتُبَث لجمهور عالَمي مشمئز.

٨١- لقد قوى الإرهاب الإسلاموي عناصره الانتهازية سياسيًا في المجتمعات غير المسلمة، تمامًا كما يفعل الساعون للحفاظ على السلطة أو الاستحواذ عليها باستغلال عنف كهذا لدعم الأجندات السياسية الخاصة بهم.

٨٢-لا يهدد تصميمُ الحزب الشيوعي في الصين على بناء دولة رَقَابة توتاليتارية متقدمة تكنولوجيًا سكانَ الصين فقط، وإنما يهدد فعلًا كل من يتواجدون داخل مجال تأثيرها، ويشهد على ذلك سكان التبت وشرق تركستان. بالفعل، لقد استغل الحزب الشيوعي في الصين القلق العالَمي بخصوص الإرهاب الإسلاموي ليحصن مشروعه من النقد الدولي، ولقد رأى ملايين المسلمين الأويغوريين في شرق تركستان وطنهم يتحول إلى أرض اختبار لطرق جديدة من القمع التوتاليتاري تُطَبَّق بشكل جذري يمكن تصديره للعالَم بأكمله. (انظر مرسوم أنسور رقم KONBES-XXI//٠٤ ٢٠١٧/IV، رؤية جيراكان بيمودا أنسور بخصوص الاهتمامات الإستراتيجية لإندونيسيا وأجندة الأمن القومي في سياق اضطراب الديناميات الجيو-سياسية الراهنة.

٨٣- في جنوب وجنوب شرق آسيا تم استغلال التهديد الملموس للإسلام لمنح الشرعية لأنماط محلية لإيديولوجيات حصرية وسلطوية دينية وسياسية. تهدد الاستعلائية البوذية الأقلياتِ المسلمة في مينامار وسريلانكا، بينما تهدف الإيديولوجيا الهندوسية القومية السائدة Hindutva إلى إخضاع

المسلمين والمسيحيين وآخرين في جنوب آسيا.

٨٤- في العالَم الغربي، ساهم الإرهاب الإسلاموي ــــ وفي حالة أوروبا، تدفُّق اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقياــ بشكل كبير في إحداث استقطاب عميق يهدد نزاهة الأنظمة الديمقراطية لهذه المجتمعات. وعند اليسار واليمين السياسيَّين أصبحت المواقف تجاه الإسلام ميدان قتال تمثيليًا ينتمي لصراع أكبر سعيًا وراء السلطة، ويُسَيِّس الإسلام ويترك المسلمين مُسْتَضْعَفين أمام أي انهيار في النظام السياسي.

٨٥- إن الجهود المبذولة بواسطة الشركات والحركات الإيديولوجية والحكومات في الغرب للتحكُّم في التكنولوجيا، وما تتضمنه من ذكاء اصطناعي، للتلاعُب بالرأي العام وتقييد حرية التعبير تطرح تهديدًا لا يقل في خطورته عن تهديد الطغيان، وبالأخص عندما يتم ربطه – بشدة – بالجهود السوسيو-ثقافية والاقتصادية والتشريعية والإدراية لتحقيق نفس الأجندة.

٨٦- وعلى الرغم من التباين السطحي البادي بين هذه التهديدات، إلا أنها تتشارك عددًا من السمات. ويرتبط كل تهديد، بشكل معقد، لنزوع إنساني جوهري ينشد الهيمنة على الآخرين أو يسعى لذلك. ويوضح كل تهديد الخطرَ المطروح عبر إقران العقيدة – سواء أكانت علمانية أم دينية – مع أجندة ساسية مدعومة بمصالح اقتصادية كبيرة واستخدام التكنولوجيا لفرض التطابق على الآخرين (في الواقع، "هوية قَبَلِيَّة")، وسحق روح كل مَنْ تُسَوِّل له نفسه معارضة هذه الأجندة.

الجزء الثامن

حضارة نوسانتارا

٨٧- لآلاف السنوات، كانت نوسانتارا (أرخبيل الملايو) مفترق طرق حضاريًا وموطنًا لمصفوفة واسعة من الشعوب والثقافات والاعتقادات الدينية. ووفق الحكمة الجَمْعِيَّة لسكان هذه الجُزُر، طَوَّروا حضارة فريدة تأسست على مبدأ «الوحدة عبر التعدُّد» (bhinneka tunggal ika) والتي ألهمت تأسيس إندونيسيا باعتبارها دولة متعددة دينيًا وتِقِرُّ التعددية.

٨٨- يكمن عنصر أساسي في هذه "الحكمة الحضارية" القديمة .. في القدرة، ليس فقط على التقاط وإنما أيضًا إعطاء الأولوية – فرديًا وجَمْعيًّا – للجوهر الروحي للدين بدلًا من العناصر الشكلية والدوجمائية المحضة التي سريعًا ما تقوم بتسليم نفسها لتوظيفها كسلاح، وحينما تقع في الأيادي السيئة، تعزز الصراع بدلًا من الوحدة الاجتماعية.

٨٩- هذه السمة المُمَيِّزَة لمجتمع نوسانتارا – أي، النزوع لوضع الحكمة الروحية بدلًا من الدوجما كالعَمُود المركزي للحياة السوسيو-ثقافية والدينية والسياسية – مَكَّنَت حضارة نوسانتارا من اعتناق جوهر الأديان الوافدة عليها حديثًا؛ وإبطال آثارها التي يُحْتَمَل تَسَبُّبها في الخلاف والشقاق؛ وتحويل التعددية الدينية إلى مصدر للوحدة والقوة الاجتماعية، بتنمية التواضع والتَّعَاطُف والاحترام للآخرين بدلًا من الخوف والكراهية. ومن خلال تعزيز الانسجام المجتمعي والتعايش السلمي بين أصحاب الأعراق والثقافات وأشكال الإيمان المتنوعة لمدى كبير، خدم الدين سكان نوسانتارا باعتباره طريقًا لنيل النبل الروحي بدلًا من كونه وسيلة براجماتية للحصول على الامتياز و/ أو الاستعلاء إزاء الآخرين.

٩٠- وباعتبارنا ورثة لهذه الحضارة النبيلة، والواقعة تحت حصار تنظيم من القوى القاهرة ـــــ وبما يتضمن عولمة الثقافة، وعدم الاستقرار الجيو-

سياسي واستخدام الدين كسلاح لأغراض سياسية ـــ آن أوان الاستيقاظ للإندونيسيين واستعادة تراثنا القديم، ليس لنا فقط وإنما لأجل الإنسانية ككل. وذلك لأن العالَم في حاجة شديدة للحكمة العميقة القارَّة في قلب حضارة نوسانتارا، ففي هذا العالم غالبًا ما تؤدي الاختلافات العرقية والسياسية والدينية إلى العداوة والعنف.

٩١- عبر روح التواضع واحترام الحكمة القابعة - رغم إهمالها غالبًا - في قلب كل ثقافة ودين، ندعو الناس أصحاب النية السليمة من كل إيمان وأمة لمشاركة إندونيسيا لرفض أي وكل أشكال الاستبداد وتعزيز انبثاق حضارة عالَمية مُسبغ عليها نُبل الأخلاق.

الجزء التاسع

دعونا نختار التَّعَاطُف

٩٢- تُعلّمنا كل الأديان واقعيًا أن الطريق للـ «خلاص» الفردي والجَمْعِي، مهما كان تعريفه، يتطلب القدرة على الارتقاء فوق المصلحة الشخصية المغرورة عبر تحوُّل يصيب قلب الإنسان وحيازة حالة من النبل الجوّاني.

٩٣- تصف عديد الشخصيات الدينية ذات المكانة هذه العملية بوصفها "تنقية للروح"، وهو ما منح الفرصة لانبثاق حالة جوّانية من الاستنارة.

٩٤- يقال إن هذا النبل الجوّاني أو الروحي يجد تعبيره في العالَم الذي نحياه في هيئة سمة كريمة وسلوك كريم، فرديًا وجَمْعِيًا ـــ وذلك لأن مجتمعًا من الأفراد الذين يتمتعون بنبل روحاني سيسعون بشكل طبيعي لبناء مجتمع نبيل وحضارة تتأسس على قيم نبيلة، مثل التواضع والتَّعَاطُف والامتنان والأغراض النافعة.

اللَّـهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّـهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ.

~ القرآن الكريم، ٢٤ : ٣٥.

«ضوء الشمس هو نفسه أينما وقع، لكن أسطحًا لامعة كالماء، والمرايا والمعادن المصقولة يمكنها عكسه بشكل كامل. وهكذا يكون النور الإلهي. إنه يسقط بالتساوي وبدون تحيُّز على كل القلوب، لكن وحدها القلوب النقية والنظيفة للخيِّرين والمقدسين يمكنها عكسه بشكل كامل».

~ سيري راماكريشنا Sri Ramakrishna

"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ: (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)».

~ محمد (صلَّى الله عليه وسلَّم).

«طُوبَى للأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، فَإِنَّهُمْ سَيَرَوْنَ اللهَ".

~ متى ٥ : ٨.

«مَنْ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى جَبَلِ الرَّبِّ، وَيَقِفَ فِي بَيْتِهِ الْمُقَدَّسِ؟ ٤ إِنَّهُ صَاحِبُ الْيَدَيْنِ الطَّاهِرَتَيْنِ وَالْقَلْبِ النَّقِيِّ. ذَاكَ الَّذِي لَا يَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى الْبَاطِلِ، وَلَا يَحْلِفُ مُنَافِقًا».

~ المزامير ٢٤ : ٣-٤.

« لَوْ كُنْتُ أَتَكَلَّمُ بِلُغَاتِ النَّاسِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَلَيْس عِنْدِي مَحَبَّةٌ، لَمَا كُنْتُ إِلاَّ نُحَاسًا يَطِنُّ وَصَنْجًا يَرِنُّ!".

~ كونشو لأ، ١٣ : ١.

"في اعتيادي طويلًا على تأمُّلِ الحُبِّ والتَّعَاطُف،
نسيتُ كل الاختلاف بين نفسي والآخرين".
~ ميلاريبا Milarepa.

«وكما تجمع النحلةُ الرحيقَ وتغادر دون أن تجرح الزهرة، أو تنتقص من لونها أو أريجها، كذلك تَدَعُون حكيمًا يمكث بقرية».
~ الداماباداا، (Dhammapada, IV, ٤٩).

"لَا يُؤْذُونَ وَلاَ يُسِيئُونَ فِي كُلِّ جَبَلِ قُدْسِي، لأَنَّ الأَرْضَ تَمْتَلِئُ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّبِّ كَمَا تَغْمُرُ الْمِيَاهُ الْبَحْرَ".
~ إشعياء ١١ : ٩.

«يمتلك هو (راما Rama) تعاطفًا، وحِسًّا بالعدالة والشجاعة، ولا يُمَيِّزُ بين البشر ـــ كبيرهم أو صغيرهم، أميرهم أو فلاحهم؛ يمتلك نفس نظرة المراعاة للجميع .... كان مقصد راما المتعلق بالتجَسُّدِ ككل متعلقًا بإزالة الخوف من قلوب الرجال والآلهة، وإقامة السلام، واللطف، والعدالة في العالَم".
~ الراماياانا The Ramayana.

"[فلتـ]دع هؤلاء الذين قُدِّرَ لهم تَرَؤس الدولة يطيعون قاعدتين أملاهما أفلاطون Plato ـــ الأولى، يجب عليهم أن يحرسوا أحوال رفقائهم في الوطن ويرونهم كمرجع في كل ما يفعلون، وينسون مصالحهم الشخصية؛ الثانية، أن يهتموا بكل الجسد السياسي، وألا يهملوا باقي الجوانب الخاصة به بينما يحرسون جانبًا آخر منه. فكما تكون الوصاية على قاصر، يُمَارَس الإشراف على الدولة للمنفعة، ليس لمنفعة من تم ائتمانهم عليها، وإنما لمنفعة من ائتمنوهم لرعايتهم".

~ شيشرون، On Moral Duties (De Officiis), I ,٢٥.

”لا نمتلك حكومة مسلحة بقوة قادرة على الصراع مع الرغبات الإنسانية التي لا يكبح جماحها الدين والأخلاقية. يمكن للجشع، أو المَطْمَع، أو الانتقام، أو الشجاعة تحطيم أقوى خيوط الدستور المتينة كما يخترق الحوتُ شبكةً. لقد كُتِبَ دستورنا للأشخاص الأخلاقيين والمتدينين فقط. وهو غير ملائم بالكليَّة لأي حكومة لناس آخرين“.

~ جون أدامز John Adams.

”أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ. لَا يُمْكِنُ أَنْ تُخْفَى مَدِينَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَبَلٍ؛ ١٥ وَلاَ يُضِيءُ النَّاسُ مِصْبَاحًا ثُمّ يَضَعُونَهُ تَحْتَ مِكْيَالٍ، بَلْ يَضَعُونَهُ فِي مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ لِيُضِيءَ لِجَمِيعِ مَنْ فِي الْبَيْتِ“.

~ متى ٥ : ١٤ – ١٥.

”عندما تُجسِّد قريةُ الطاو Tao، فهي مَحْمِيَّة؛ وعندما تجسِّد دولة الطاو، تزدهر؛ وعندما يُجسِّد العالَم الطاو، يكشف عن كماله“.

~ طاو تي شينج، Tao Te Ching, V.٥٤.

يقال إن بوذا وشيفا جوهران متمايزان.

وهما بالفعل مختلفان، رغم ذلك يستحيل اعتبارهما مختلفين في الأساس،

وذلك لأن جوهر بوذا وجوهر شيفا واحد.

[إنهما يبدوان] مختلفين، رغم ذلك [يكونان] واحدًا (bhinneka tunggal ika)،

وذلك لأن الحقيقة لا تتجزأ.

~ إمبو تاتنولار، سوتاسوما، Mpu Tantular, Sutasoma، ١٣٩ : ٥.

"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ".

~ القرآن الكريم، ٣٠ : ٣٠-٣٢.

الجزء العاشر

الحضارة مؤسسة على تقسيم العمل
دور إسلام نوسانتارا

٩٥- إن التهديد الحضاري للطغيان الذي يطرحه نسق محدد من الدوجما، والسلطة السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا يصل لدرجة كبيرة بحيث تعجز أمة واحدة، أو منظمة دينية أو حركة سياسية على مواجهة هذا التهديد بمفردها.

٩٦- بالتالي، ناشدت حركة جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة الناسَ أصحاب النفوس الصافية من كل إيمان ليشاركوا في بناء إجماع عالمي يهدف إلى منع استخدام الإسلام كسلاح في السياسة، سواء أقام بذلك المسلمون أم غير المسلمين، وللحدِّ من انتشار الكراهية الجماعية من خلال تعزيز انبثاق نظام عالمي عادل ومُتَجَانِس بحق، يتأسس على احترام الحقوق والكرامة المتساوية لكل إنسان.

٩٧- وفي التحرك بتوافق مع مبدأ تقسيم العمل تتحرك كل من جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة بشكل مُنظَّم، ومؤسسي لمواجهة هذه العناصر البَالِيَة والتي تمثل المُتَغَيِّرات المشروطة تاريخيًا داخل الفقه الإسلامي والتي تمنح نفسها للاستبداد، عبر خلق إطار عمل لاهوتي لإعادة زرع التعاليم

الإسلامية في سياقها وإصلاح المبادئ الإشكالية داخل نسق الأرثوذوكسية الإسلامية.

٩٨- وندعو الآخرين للانضمام إلينا في مسعانا، وأن يضعوا هذه الجهود في إطار مبادرة أوسع بكثير لرفض أي وكل أشكال الاستبداد وتعزيز انبثاق حضارة عالَمية مُسبغ عليها نُبل الأخلاق.

الجزء الحادي عشر

نحو إطار عمل لاهوتي
لإعادة زرع التعاليم الإسلامية في سياقها
وإصلاح المبادئ الإشكالية داخل نسق الأرثوذوكسية الإسلامية

§١١،١
العناصر المتعالية والعناصر المشروطة تاريخيًا للأرثوذوكسية الإسلامية
(ثوابت ومُتَغَيِّرات)

٩٩- تَنْبع غالبية الصراعات السياسية داخل العالَم الإسلامي - وبين المسلمين وغير المسلمين على المستوى العالَمي - من إخفاق العالَم الإسلامي في التَّكَيُّفِ بسلام وانسجام مع وقائع حضارتنا العالَمِيَّة المعاصرة.

١٠٠- ثمَّ عاملٌ يساهم في هذا الإخفاق ـــ بالفعل، ربما يكون العامل الأساسي ـــ وهو عقلية مسيطرة تنتشر بين المسلمين وتميل إلى النظر للأرثوذوكسية الكلاسيكية للإسلام باعتبارها منظومة غير مُتَغَيِّرَة من القواعد الدينية والإرشاد.

١٠١- والذين يعتبرون التعاليم الإسلامية غير مُتَغَيِّرَة هم، بحسب التعريف،

عاجزون عن الاستجابة لظروف الحياة الآخذة في التغيُّر وفق سلوك ملائم وفَعَّال. إنهم يخفقون في استيعاب الطبيعة المعقدة للأرثوذوكسية الإسلامية التي تطورت على مدى عدد من القرون استجابةً للوحي الإلهي والظروف التاريخية (أي، الظروف السوسيو-ثقافية، والسياسية، والعسكرية) التي واجهتها المجتمعات المسلمة في نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

١٠٢-وكما أقَرَّ غالبية العلماء (الباحثين المسلمين) تقليديًا، تتكون الأرثوذوكسية الإسلامية من عناصر متعالية (ثوابت) واستجابات مشروطة بالواقع التاريخي (مُتَغَيُّرات)، والتي يمكن جعلها ملائمة لمواجهة ظروف الحياة المُتَغَيِّرَة والتفكير فيها.

١٠٣- ولتقدير هذا التمييز التحليلي، من الضروري التمييز بين القيم الروحية (أي الأساسية) للإسلام وتعبيراتها المشروطة، وبما يتضمن مبادئ الأرثوذكسية الإسلامية المنبثقة من داخل نسق الحضارة الإسلامية في الشرق الأوسط.

١٠٤- تتضمن العناصر المتعالية (الثابتة) في السلام مجموعة من الرسائل الثابتة المتضمنة في النصوص باعتبارها إرشادات (تُعْرَف أيضًا باسم الشريعة) والتي تناسب كل المسلمين في كل زمان ومكان. قد توصَف هذه القيم الأزلية باعتبارها دين الإسلام، لو أننا نرغب في أن يشير مصطلح الدين لكل ما هو نبيل ودائم.

١٠٥- تُشَكِّل العناصر المؤقتة في الأرثوذوكسية الإسلامية، على الجانب المقابل، استجابات مُحَدَّدَة تاريخيًا لظروف معينة من جهة المسلمين. يمكن وصف هذه الاستجابات باعتبارها التَّجَلِّي التاريخي (أو الحضاري) للإسلام، والتي حدثت في نطاق مناطق محددة في لحظات مُحَدَّدَة من الزمان، في الأصل عند العرب، والحوضين الثقافيين الفارسي والتركي، غالبًا في هيئة استجابة للصراع المسلح مع الدول المجاورة وإدارة المناطق والشعوب المُحْتَلَّة.

١٠٦- تحتوي الأرثوذوكسية الإسلامية على ميكانيزمات جوّانية، تتضمن علم أصول الفقه – منهجية الاستدلال الشرعي المُسْتَقِل المُسْتَخْدَمَة في إنشاء

الفقه أو القانون الإسلامي (الذي يتم الخلط بينه وبين الشريعة) –الذي يسمح للباحثين المسلمين بضبط العناصر المؤقتة للأرثوذوكسية الإسلامية استجابة لظروف الحياة الآخذة في التغيُّر. تستتبع هذه الميكانيزمات الجوّانية عملية من الاستدلال الشرعي المُسْتَقِل المعروف بالاجتهاد، والذي تم إبطاله عند الباحثين المسلمين السُنّيين منذ خمسة قرون تقريبًا.

١٠٧– لو أراد المسلمون الحياة في سلام مع أنفسهم والعالَم الحديث، يصبح شرطًا أساسيًا الإقرارُ والاعترافُ بأن سياقَ الحضارةِ العالَمِيَّة يختلف بعمق عن ذلك الذي تكشَّف فيه الإسلام للنبي محمد صلَّى الله عليه وسَلَّم، وأن الظروف التي انبثقت فيها العناصر المؤقتة للأرثوذوكسية الإسلامية أصبحت متعصبة قرب نهاية العصر الوسيط.

§١١,٢
تستلزم الأوضاع المُتَغَيِّرَة اجتهادًا جديدًا لضمان الخير للبشرية (مقاصد الشريعة)

١٠٨– لقد اجتاحت تَغَيُّرات سياسية واقتصادية وتكنولوجية وسوسيو–ثقافية العالَمَ في القرون الأخيرة مُحَوِّلَةً، بحق، الظروف التي يلزم على المسلمين العيش فيها وممارسة إيمانهم. وتتضمن هذه التطوُّرات التي تسارعت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ الحرب العالَمِيَّة الأولى:

- i- تحوُّل كامل في النظام السياسي العالمي؛
- ii- تَغَيُّرات أساسية في الديموغرافيا؛
- iii- ارتقاء القواعد السلوكية المجتمعية؛
- iv- العولمة، التي تُقاد بواسطة التطوُّرات العلمية والتكنولوجية التي تسمح بوسائل الاتصالات العامة، والسفر، وانبثاق اقتصاد عالَمي متكامل بإحكام.

١٠٩– ولليوم، لا يتواجد جهد منظَّم من جانب السلطات المسلمة لجعل العناصر

المؤقتة – أي، "القيم الإجرائية" المُحَدَّدَة تاريخيًا – في الأرثوذكسية الإسلامية تتلاءم للتفكير في هذه التَغَيُّرات ومواجهتها. قد تُنْسَب الأزمة الراهنة للعالَم المسلم بشكل كبير إلى هذا الإخفاق كما أُثْبِتَ بواسطة جهود المتطرفين لإعادة تأسيس خلافة إسلامية؛ والإطاحة بالدول القومية؛ ورفض القوانين المُسْتَقاة من المعالجات السياسية الحديثة؛ وإعادة إحياء العناصر البَالِيَة في الفقه (والتي يتم الخلط بينها وبين الشريعة دائمًا)، مثل الجهاد الهجومي، والاستعباد، وإخضاع الكفار، ورجم الزناة، وإعدام المثليين جنسيًا، وقطع أيدي اللصوص.

§١١,٢,١
تحوُّل النظام السياسي العالَمي

١١٠- قبل الثورتين الأمريكية والفرنسية، وبالتحديد قبل الحرب العالَمِيَّة الأولى، تكوَّنَت خريطة العالَم السياسية بشكل أساسي من إمبراطوريات وممالك متناحرة واتحادات قَبَلِيَّة. وواقعيًا، اعتنقت كُلُّ الدولِ الناشئة دينًا رسميًا تشكلت مبادؤه الأرثوذوكسية و/ أو تعززت بواسطة الحاكِم ومسؤولي الدولة الإدارية.

١١١- داخل العالَم الإسلامي، أكَّدت الخلافة العثمانية (١٣٦٢ – ١٩٢٤ م) ادعاءها بتجسيد المثال الأرثوذوكسي لمجتمع إسلامي مُوَحَّدٍ يقوده حاكم مسلم تقي التزم بالمبادئ الأساسية للإسلام (السني) الأرثوذوكسي. وبالمثل، أسست السلالة الصفوية وخلفاؤها في إيران حيازتهم للسلطة السياسية على المبادئ أو التعاليم الأساسية للإسلام (الشيعي) الأرثوذوكسي.

١١٢- وكان التمتُّع الكامل بالامتيازات من جانب المنتمين لهذه الإمبراطوريات مؤسسًا على مدى تطابق هويتهم الدينية مع الهوية الدينية للإمبراطورية. على سبيل المثال، خلقت الخلافة العثمانية تمييزًا طال بشكل منظَّم غير المسلمين عبر تطبيق مدى موسَّع من المبادئ الإسلامية الأرثوذكسية

التي تحكم المعاملة مع غير المسلمين الذين تم غزوهم، أو الذميين كما فعل حكام شيعة وسنيون آخرون عبر العالَم الإسلامي، باستثناء نوسانتارا (أرخبيل الملايو) وجاوة بالتحديد.

١١٣- وشاع تواجد قيود أشد في أوروبا. قبل العصر الحديث، لم يكن من المسموح بشكل عام للمسلمين الإقامة في دول تدين بالمسيحية، والتي بدورها اضطهدت الطوائف المسيحية المحظورة بشكل مستمر ومارست التمييز ضد اليهود ككل بشكل منظَّم.

١١٤- أحدث انهيار هذه البنية الجيو-سياسية في أعقاب الكولونيالية والحرب العالَمِيَّة الأولى تضليلًا وهزة عنيفة لكل من العالَم الإسلامي والغرب. أزاح كمال أتاتورك Kemal Ataturk الخلافة العثمانية عام ١٩٢٤، بعد سنوات قليلة فقط من الثورة البلشفية وانحلال إمبراطوريتي هابسبورغ Habsburg وهوهنزوليرن Hohenzollern في أوروبا.

١١٥- وأصبح العالَم الإسلامي لأول مرة بدون خليفة منذ وفاة النبي محمد صلَّى الله عليه وسلَّم في عام ٦٣٢ م، وعقب انقطاع قصير تَلَا الغزو المغولي لبغداد في عام ١٢٥٨.

١١٦- شهدت العقود اللاحقة عددًا من التَغَيُّرات العميقة في النظام السياسي العالَمي، منها:

i- انقسام العالَم إلى دول قومية ذات سيادة بدلًا من إمبراطوريات؛

ii- التَّبَنِّي الصريح أو المؤسس على حكم الواقع لهوية علمانية بواسطة الدول القومية الحديثة ومفهوم المواطنة المتساوية، والذي لم تَعُد فيه مكانة المرء مُقْتَرِنَة بهويته أو هويتها الدينية؛

iii- انبثاق منظمات بين الحكومات من بلاد مختلفة ـــ مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE، ومنظمة التعاون الإسلامي OIC، ومنظمة التجارة العالَمِيَّة WTO ـــ واتفاقيات متعددة الجوانب والأطراف ونظام صارم من الحوكمة المستندة إلى قواعد في مجال العلاقات الدولية.

١١٧- ولقد أزاحت هذه التطوُّرات الجيو-سياسية، لمدى كبير، النموذجَ السابق للدول المتجاورة المنخرطة في عداء دائم وحرب متكررة، وكانت الحدود حينئذ تتمتع بحراسة مشددة وحُدِّدَت العلاقات الدولية في الغالب بواسطة الإمكانات العسكرية للحاكم وحساباته.

§١١,٢,٢
التَغَيُّرات في الديموجرافيا العالَمِيَّة ومقتضايتها للأرثوذوكسية الإسلامية

١١٨- لقد حدثت تحوُّلات ديموجرافية عميقة على مدار القرنين الماضيين، وتركت أثرًا على التوزيع الجغرافي والمكانة السياسية/ القانونية لعديد السكان المتدينين عبر العالَم. وفيما يتعلق بالمسلمين تحديدًا: لقد حوَّلت الكولونيالية الأوروبية، وحركات الاستقلال اللاحقة، وهجرة المسلمين للغرب - بشكل أساسي - طبيعة وبنية الحكومات التي تحيا في مجالها أغلبية المسلمين الممارسين لإيمانهم.

١١٩- وكما تمت الإشارة في نقطة ١١٠ ونقطة ١١٣ أعلاه: تواجد ارتباط قوي بشكل عام بين الهوية الدينية لدولة ما والمكانة القانونية الممنوحة لمواطنيها المتعددين. وتمتَّع معتنقو الدين الرسمي بمكانة ذات امتياز مقابل المنتمين لمجموعات دينية أخرى، سواء أكانوا أغلبية أم غير ذلك. ولقد تغيَّر هذا الموقف بشكل هائل في أغلب بقاع العالَم المعاصر مع قدوم الدول القومية العلمانية.

١٢٠- على امتداد عصر ما قبل الحداثة ـــ مع وجود استثناءات ملحوظة أثناء أزمنة الحرب الأهلية، على سبيل المثال في زمان الإصلاح البروتستانتي ـــ مال الصراع الديني للحدوث على مستوى دولي، بشكل عام في شكل حرب بين دول مختلفة دينيًا (وفي الغالب عِرْقِيًّا). ترادفت الصراعات العسكرية بين المسلمين والمسيحيين على سبيل المثال مع الحرب بين الدول المسلمة

والمسيحية. وعلى مدار ٨ قرون من الحرب بين الإمبراطورية الرومانية الشرقية وعديد الخلافات الإسلامية – ومنها خلافة الخلفاء الراشدين، والخلافة الأموية، والخلافة العباسية، والأتراك العثمانيون ـــ بلغت أوجها عقب سقوط القسطنطينية في عام ١٤٥٣، تبعتها أربعة قرون من الصراع بين الإمبراطورية العثمانية وإمبراطورية هابسبورغ.

١٢١- انبثقت تعاليم محددة للأرثوذوكسية الإسلامية من سياق الصراع العسكري المُمْتَد بين الدول المسلمة وغير المسلمة. على سبيل المثال، واحد من القوانين الأساسية في الأرثوذوكسية الإسلامية القائم على افتراض وجود حالة من العداء بين المسلمين وغير المسلمين.

١٢٢- ليس من الصعب فهم أصل هذا المبدأ المُحَدَّد واستمراره. فمن اضطهاد المسلمين الأوائل بمكة حتى العصر الحديث، لعب هذا المبدأ دورًا في ضمان بقاء المسلمين وازدهارهم، فقد تعرضت كينونتهم السياسية – وبالتالي، تمتُّعهم بمكانة قانونية كاملة داخل دولة إسلامية – للتهديد عن طريق الدول المجاورة غير المسلمة. في هذا السياق الما-قبل حداثي، كان من الضروري لبقاء المجموعات المسلمة، وبقاء دولة إسلامية ما، أن يكون المسلمين منتبهين للتهديد العسكري المفروض بواسطة الدول المجاورة غير المسلمة، وبشكل ضمني، بواسطة غير المسلمين الذين سُمِحَ لهم بالتنقل على امتداد حدودهم.

١٢٣- حرست القوة العسكرية للدولة الإسلامية ـــ مقترنة مع محاربين مسلمين مسلحين أيقاظ – الحدود (الرباط) وقامت بتأمين السكان المسلمين الذين يحيون في الدولة (دار الإسلام) من المجتمعات المنظمة المجاورة غير المسلمة (دار الحرب أو دار الكفر).

١٢٤- في العالَم المعاصر، لم يَعُد الصراع الديني مترادفًا مع الحرب بين دولتين متناحرتين و/ أو الهجمات الإرهابية المرتَكَبَة بواسطة فاعلين لا ينتمون للدولة ويرفضون وجود الدولة القومية الحديثة ذاتها.

١٢٥- يحيا الآن أكثر من ٤٠ مليون مسلم في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويقيم

أكثر من ٣٠٠ مليون آخرين باعتبارهم أقليات دينية في دول يحكمها غير المسلمين، منها الهند والصين وروسيا وإثيبوبيا وسريلانكا وميانمار. لا تقدم تعاليم الإسلام الأرثوذوكسي حُكْمًا للكيفية التي يجب على المسلمين التأقلم وفقها تحت ظروف كهذه. على العكس، تُحَرِّم نصوص الفقه الكلاسيكية على المسلمين المكوث في دار الحرب/ دار الكفر، وذلك لأن هذه النصوص تفترض أن حالة الحرب الدائمة – التي قد تَقْطَعْها، على أقصى تقدير، معاهدة مؤقتة – ستتواجد دومًا بين المسلمين وغير المسلمين "حتى نهاية الزمان".

١٢٦– كان هذا هو التعليل العقلي الذي وَظَّفَته داعش عندما ناشدت المسلمين الذين يحيون في الغرب لممارسة الهجرة لخلافتها، أو ذبح الكفار الذين يقيمون في بلادهم.

١٢٧– وكما أوضحت نقطة رقم ١٣ في إعلان جيراكان بيمودا أنسور المتعلق بالإسلام للإنسانية: «لو لم يواجه المسلمون التعاليم الأساسية للأرثوذوكسية الإسلامية التي تجيز العنف وتأمر به، يمكن لأي أحد، في أي وقت، تسخير تعاليم الإسلام الأرثوذوكسية لمواجهة ما يدَّعون أنها القوانين والسلطة غير الشرعية لدولة كافرة ويذبحون أخوانهم المواطنين بصرف النظر عن كونهم يعيشون في عالَم إسلامي أو في الغرب. وهذا هو الخيط الدموي الرابط بين الكثير من الأحداث الحالية، من مصر وسوريا واليمن إلى شوارع مومباي وجاكارتا وبرلين ونيس وستوكهولم ووستمنستَر».

١٢٨– وكما يحيا عدد متزايد من المسلمين ويعمل جنبًا إلى جنب مع غير المسلمين على امتداد العالَم المعاصر، صارت التعاليم البَالِيَة للأرثوذوكسية الإسلامية – مثل "قانون العداوة" المتواجد منذ ١٤٠٠ عام والمُوَجَّه لغير المسلمين – تتزايد وتيرة تهديدها لسلامة المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

١٢٩– وبدلًا من ضمان أمن الدولة ومواطنيها، يُشَكِّل النشر المستمر لـ "قانون العداوة" صيغة لعدم الاستقرار الاجتماعي، والعنف الجماعي والإبادة

الجماعية، وهو ما أظهرته الصراعات الدامية المستعرة الآن على امتداد مساحة كبيرة لمناطق مأهولة بالمسلمين، من أفريقيا والشرق الأوسط لحدود الهند وما بعدها؛ والاضطراب الاجتماعي المتفاقِم عبر العالَم الإسلامي؛ والانتشار غير المُراقَب للتطرف الديني والإرهاب؛ والمَدّ المتزايد من الإسلاموفوبيا ضمن السكان غير المسلمين، في استجابة طردية لهذه التطوُّرَات والذكريات التاريخية المزعجة التي تقوم بإحيائها بين سكان متعددين [على مختلف المستويات] كالمسيحيين الأوروبيين، والدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، والهندوسيين بجنوب آسيا.

§١١,٢,٣
القواعد السلوكية المجتمعية المتطورة ومقتضايتها للأرثوذوكسية الإسلامية

١٣٠- على امتداد القرنين المنصرمين، مرَّ العالَم بتغيُّر زلزالي في مصطلحات القواعد السلوكية المجتمعية السائدة. ولنقتبس ثلاثة أمثلة متعلقة – بشكل خاص – بالفقه الإسلامي: منذ فجر التاريخ الإنساني حتى القرن التاسع عشر، كانت العبودية مقبولة على نطاق واسع في الكثير من أجزاء العالَم إن لم يكن في أغلبها. كانت الكولونيالية والإمبريالية ممارستين اعتياديتين، وكذلك كانت الأشكال القاسية للعقوبات الإجرامية.

١٣١- في قرون سابقة، لم يكن سلوك داعش ليبدو مألوفًا فقط، وإنما عاديًا كذلك في سياق الحرب الدينية. تقتبس تسجيلات داعش الترويجية المبادئ المؤسَّسَة للأرثوذوكسية الإسلامية وتلتزم بها إلى حدٍّ كبير، من جهة اتصالها بشَنِّ الحربِ وحُكْم (إدارة) دولة إسلامية ما. توضح حقيقة كون سلوك داعش الآن يتم تصوُّره، على نطاق واسع، باعتباره منحرفًا مقدارَ التغيُّر الذي طال القواعد السلوكية المجتمعية على مدار القرنين الماضيين، داخل العالَم الإسلامي وعالَميًا كذلك.

١٣٢- منع الإمبراطورية البريطانية لتجارة العبيد، وفُرِضَ هذا المنع بواسطة البحرية الملكية؛ والحركات المضادة للإمبريالية في القرن العشرين؛ وأشكال المنع ضد "العقاب القاسي وغير المعتاد"؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تَبَنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٨، تُمَثِّل كل هذه الأمثلة معالم ساهمت في انبثاق منظومة عالمية وجديدة للقواعد السلوكية.

١٣٣- في الغرب أصبح العديد من هذه القواعد السلوكية المجتمعية مُمَأسسة في هيئة تشريع تتبناه الحكومات المُنْتَخَبَة ديمقراطيًا للدول القومية الحديثة، بتأييد السلطات الدينية والعلمانية.

١٣٤- ولقد تَبَنَّت الكثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة هذه القواعد السلوكية الجديدة كذلك (مثل منع الرِّق وعدم تطبيق الحدود مثل الرجم وقطع الأيدي)، لكن حدث ذلك بفارق أساسي. لم تتم للآن في العالَم الإسلامي عملية مُنَظَّمَة لإعادة غرس التعاليم الإسلامية في سياقها (أي الإصلاح) بطريقة تواجه العناصر البَالِيَة في الفقة بشكل فعَّال، ونتيجة لذلك لم تتأسس قواعد سلوكية جديدة مع القوانين المرتبطة بها باعتبارها التعبير الشرعي والقانوني للأرثوذوكسية الإسلامية، والمؤيدة من السلطات الدينية والعلمانية.

١٣٥- يميل العالَم الإسلامي والغرب لرؤية هذه القواعد السلوكية المتطورة، والتاريخ السابق عليها، وفق طريقتين مختلفتين للغاية. في عقود حديثة، أصبح من الشائع بشكل متزايد في أوروبا وأمريكا الشمالية الحكم على الشخصيات التاريخية - والحضارة الغربية ككل - بمقياس القواعد السلوكية المعاصرة بينما يعفون ثقافات أخرى من النقد.

١٣٦- تميل المجتمعات المسلمة، على الجانب المقابل، لتبجيل رؤية تقديسية (كسِيَرِ القديسين/ هايغوغرافية) فيما يتعلق بأمور كهذه. على سبيل المثال، من الشائع للمسلمين وصف الغزو العربي لبلاد الشام، وفارس، وأفريقيا الشمالية؛ وتدمير الهند؛ والحكم العثماني في جنوب شرق أوروبا باعتباره

"تحريرًا" لسكان هذه المنطقة بدلًا من الإقرار بالطبيعة الإمبريالية/ الكولونيالية للدول الإسلامية التي حكمتها النُخَب العربية والتركية، قبل العصر الأوروبي للاستكشاف بكثير.

١٣٧- بالمثل، ليس من غير الشائع للمسلمين المعاصرين التحدث عن الطبيعة "الإنسانية" للرِّقِ الإسلامي، بدون الإقرار بالكيفية التي أصبح بها عشرات الملايين من البشر عبيدًا في المقام الأول، والأثر المُدَمِّر لهذا الأمر على حيواتهم، وعائلاتهم ومجتمعاتهم ككل.

١٣٨- إن العناصر الأساسية في الفقه الإسلامي، والتي ظلَّت جزءًا مُكَمِّلًا للأرثوذوكسية الإسلامية حتى يومنا هذا، كانت مُصَمَّمَة لإدارة المناطق التي تم غزوها وسكان هذه المناطق. يعكس استمرار هذه التعاليم البَالِيَة – والطريقة التي تُسْتَغَل بها بواسطة المتطرفين بشكل فعَّال – العقلية المتواجدة بين المسلمين الذين يميلون لرؤية الأرثوذوكسية الكلاسيكية للإسلام باعتبارها منظومة من الهدى والقواعد الدينية غير المُتَغَيِّرَة.

١٣٩- وبدلًا من إنكار الواقع التاريخي أو المعاصر، من الضروري – لسلامة الاجتماع المسلم والعالَم ككل – أن يستدعي الباحثون المسلمون (العلماء)، والنخب السياسية والمفكرون والمُعَلِّمون وقادة الرأى الآخرون الشجاعةَ اللازمة للإفصاح بشكل صريح عن أن الظروف المُتَغَيِّرَة تتطلب مراجعة العناصر الثابتة والمُحَدَّدَة تاريخيًا للتعاليم الواردة في القانون الإسلامي، والتي صارت الآن بالية.

§١١,٢,٤

العولمة، التي تقاد بواسطة التطوُّرات العلمية والتكنولوجية التي تسمح بوسائل الاتصالات العامة، والسفر، وانبثاق اقتصاد عالَمي متكامل بإحكام

١٤٠- لقد مَكَّن التقدُّم العلمي والتكنولوجي على مدار القرنين الماضيين – والذي

عُزِّزَ بواسطة انتشار التعليم العالَمي، والمنهجية العلمية، والاستخدام الذكي لرأس المال – من تطوُّر وسائل الاتصالات العامة، والسفر وانبثاق اقتصاد عالَمي متكامل بإحكام، والذي لم ينتشل أغلبية سكان العالَم من الفقر فقط، وإنما قرَّبَ أشخاصًا من ثقافات وأديان متعددة ليصبحوا في تواصل حميم مع بعضهم البعض وفق مقياس لم يسبق له مثيل.

١٤١- إن استخدام الألياف الضوئية والتقنيات الخلوية، والإنترنت والهواتف الذكية مَكَّنَ المعلومات من الانتقال من جزء ما من العالم لجزء آخر بسرعة الضوء، وبالتي يصبح من المستحيل منع الأحداث في منطقة ما من التأثير سريعًا على مناطق أخرى.

٢٤١- إن اضطهاد المسلمين في ميانمار وسريلانكا ـــ والمَدّ المتصاعد من الإسلاموفوبيا في الغرب ـــ يرتبطان مباشرة بهذه التطوُّرات، وكذلك نجاح تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تستخدم تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتشجيع الهجوم على غير المسلمين عبر العالَم.

١٤٣- تحيا غالبية سكان العالَم الآن في مدن، وبالتالي يعتمدون على الأداء السَلِس لاقتصاد عالمي متكامِل بإحكام في معاشهم اليومي. تُمَثِّل هذه التطوُّرات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية إنجازًا تاريخيًا. لكنها تُمَثِّل كذلك نقطة ضعف لم يسبق لها مثيل، كما كتب الرئيس الإندونيسي السابق هـ. ي. الحاج عبد الرحمن وحيد في مقال إبداعي، "الإسلام الصحيح ضد الإسلام الخاطئ Right Islam vs. Wrong Islam"، والذي نشرته صحيفة وول ستريت Wall Street Journal في الثلاثين من شهر ديسمبر عام ٢٠٠٥: "بُنِيَ كل صرح الحضارة الحديثة على الأسس الاقتصادية والتكنولوجية التي يأمل الإرهابيون في هدمها ... مثل الكثير من أقفاص صيد السمك عقب إعصار تسونامي".

١٤٤- بمعنى آخر، لقد جَلَبَ التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي الحضارة لمفترق الطرق الحالي، مع فرص أكبر في الارتقاء – أو الدمار الشامل – من

أي وقت سابق.

١٤٥- بمشيئة الله تعالى، قد يشهد القرن الواحد والعشرون انبثاق حضارة عالمية بحق، حضارة تُقَدِّم فرصة لم يسبق لها مثيل للناس من كل إيمان وأمة للتعاون والمساهمة في بناء حياة أفضل لأنفسهم وأبنائهم.

١٤٦- لإحراز هذه الإمكانية يلزم علينا تعزيز انبثاق حضارة عالَمية تتحلى بالأخلاق الكريمة، لكي لا تقودنا الإرادة الفطرية الإنسانية، وتهديد الطغيان الذي يطرحه نسق محدد من الدوجما، والسلطة السياسية والاقتصادية، والتكنولوجيا للمستقبل البائس الذي توقَّعه جورج أورويل George Orwell في روايته ١٩٨٤، والتي كانت صورتها الأبرز لـ "حذاء يطأ وجه إنسان ـــ للأبد".

١١,٣§
الله ليس في حاجة إلى دفاع من أحد

١٤٧- وجَّه هـ ي. الحاج عبد الرحمن وحيد خطابه للحاجة إلى إعادة غرس التعاليم الإسلامية في سياقها خلال حياته الطويلة والمُثْمِرَة، بما تتضمنه من اعتلائه منصب الرئيس العام للمجلس التنفيذي لنهضة العلماء لمدة خمسة عشر عامًا، من ١٩٨٤ إلى ١٩٩٩. في مقالة إبداعية معنونة بـ « الله ليس في حاجة إلى دفاع من أحد – Tuhan Tak Perlu Dibela"، قَدَّمَ الرئيس وحيد دفاعًا لاهوتيًا عميقًا عن حرية الفكر، والضمير والتعبير، وهو الأمر الذي يسهم في خلق إطار عمل لاهوتي لإعادة غرس التعاليم الإسلامية في سياقها، لتتناسب وسياق القرن الواحد والعشرين.

١٤٨- ولذلك، يدمج بيان نوسانتارا النَّصَّ الكامل لـ «الله ليس في حاجة إلى دفاع من أحد»، والذي يوضح سبب استلزام الظروف المُتَغَيِّرَة لاجتهاد جديد لضمان سلامة ورخاء الإنسانية (مقاصد الشريعة):

كتب مصطفى بصري[١٣] في قصيدته الله أكبر «لو كَفَرَ سكان الأرض قاطبةً (٦ بليون إنسان)؛ وهم الذين لا يَزِنُون مقدار ذرة من الغبار، بالله أو آمنوا به، فإن ذلك لا ينتقص شيئًا من عظمته».

فإن أحدًا (أو شيئًا) لا يمكنه أبدًا أن يضر الله ذا القدرة الكلية والوجود المطلق والحقيقة الأزلية. وانطلاقًا من أن الله هو الرحمن الرحيم، فإنه لا يعادي أحدًا. وهكذا فإن من يزعمون أنهم يدافعون عن الله أو النبي أو الإسلام؛ إما أنهم يخدعون أنفسهم، أو أنهم يتلاعبون بالدين لخدمة أغراضهم الدنيوية السياسية الخاصة، وهو ما ظهر جليًا في موجة الغضب المُفْتَعَل التي اجتاحت العالم الإسلامي منذ عدة سنوات، كرَدِّ فعلٍ على الصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي التي نشرتها إحدى الصحف الدنماركية. والحق أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم الأكثر فهمًا وإحاطة بمشيئة الله وإرادته، ويسعون بجرأة إلى فرض فهمهم المحدود لتلك المشيئة على الآخرين، إنما يقعون في الشرك- ولو دون دراية - لأنهم يضعون أنفسهم في موضع الند المساوي لله.

إن واجبنا كمسلمين أن نسأل أنفسنا: لماذا تنعدم حريات التعبير والاعتقاد في كل ما يُسمى بالعالم الإسلامي؟ وذلك بدلًا عن أن ندين بخشونة معتقدات الآخرين وأقوالهم، أو نروِّعهم بالتهديد والعنف لإكراههم وتقييد حريتهم؛ على نحو ما يفعل مَنْ يسنون القوانين لخدمة مصالحهم الخاصة، مثل المادة ٢٩٥-C من القانون الجنائي الباكستاني الخاصة بتجريم "تدنيس اسم النبي محمد"، والتى تحكم بالموت على من يقترف تلك الجريمة بوصفه مشركًا. وبحسب تعريف محكمة الشريعة الفيدرالية الباكستانية لهذه المادة، فإنها تتضمن ما يلي:

«سب النبي أو إهانته شفويًا أو كتابة، أو التحدُّث عنه وعن آله على نحو

١٣- ينحدر من سلالة ممتدة من القادة الدينيين من ذوي النفوذ والتأثير، ويرأس الشيخ الحاج مصطفى بصري Kyai Haji Mustofa Bisri مدرسة روضلاتوث ثوليبان Raudlatuth Tholibin الداخلية الإسلامية فى ريمبانج بجاوة الوسطى. ويوقره الجميع كعالم دين وشاعر وروائي ورسام ومثقف مسلم. وقد ترك تأثيرًا قويًا على التطور الاجتماعي والتعليمي والديني لجماعة نهضة العلماء على مدى الثلاثين عامًا الماضية.

ينطوي على المهانة والازدراء، والتهجُّم على شرفه وكرامته على نحو مُسيء، والحطّ من قدره وإظهار عدم التأدب عند ذكر اسمه، وإظهار العداوة والكراهية له أو لأهله وصحابته والمسلمين، أو الافتراء عليه وعلى آله؛ وبما يتضمنه ذلك من نشر ما يسيء إليه وإلى أهله، والاعتراض على ما قرره وحكم به بأي طريقة، وإنكار السنة أو ازدرائها وعدم احترامها، وإنكار حقوق الله ورسوله، والتمرد عليهما"[١٤].

والحق أن مثل تلك القوانين القمعية ذات الصياغة المبهمة عن عمد تؤدي - بدلًا عن صون الله أو الإسلام أو النبي - إلى تقوية شوكة أصحاب الأجندات السياسية؛ وبحيث تعمل «كسيف ديموقليس Damocles" لا على مجرد تهديد الأقليات الدينية فحسب، بل وحق غالبية المسلمين أنفسهم في الحديث عن دينهم بحرية، دون أن تهددهم ثورات غضب الأصوليين الذين لا يجاوز ما يدعونه من "الدفاع عن الدين» حدود أنه مجرد ذريعة لمبالغتهم في تقدير قيمة أنفسهم، وذلك مع ملاحظة أن قوتهم تظهر من خلال الحكومات وسواد الناس.

وليس بمقدور أي مُلاحِظ موضوعي أن ينكر أن المجتمع الباكستاني - مثل الكثير من المجتمعات الإسلامية - قد غرق في موجة من العنف نتيجة لتلك القوانين التي يؤشر وجودها على حضور التطرُّف الديني وافتقاد الروحانية الحقَّة التي يؤدي غيابها إلى أن يظل المعنى العميق للإسلام وغايته النبيلة محجوبين عن الفهم الإنساني.

فالحق أن ما يقرره الأمر القرآني في الآية الذائعة "لا إكراه في الدين"- والذي سبق المادة ١٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من ثلاثة عشر قرنًا[١٥]- ينبغي أن يكون مصدر إلهام وهداية للمجتمعات الإسلامية إلى طريق الحرية والتسامح الديني.

---

14 Mohammad Asrar Madani, Verdict of Islamic Law on Blasphemy and Apostasy. Lahore, Pakistan: Idara-e-Islamiat, 1994.

١٥ - لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويتضمن هذا الحق حرية المرء في تغيير دينه ومعتقده، وحريته سواء كفرد أو مجتمع مع غيره في الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها.

ويُشار هنا إلى أن كلمة "الشريعة" تشير في معناها القرآني الأصلي إلى "الطريق إلى الله"، وليس إلى جملة ما تم سنُّه من قوانين على مدى القرون اللاحقة لوفاة النبي. ومن هنا أنه من الضروري، عند النظر في الأحكام المتعلقة بالرِّدَةِ والزندقة، أن نمايز بين القرآن - الذي يمثل المادة الأولية للكثير من القوانين والأحكام الإسلامية - وبين تلك القوانين والأحكام نفسها. لأنه وبالرغم من إلهية مصدرها وهو القرآن، فإنها تبقى من صنع الإنسان؛ وبما يجعلها موضوعًا للتأويل والمراجعة بالتالي.

وعلى سبيل المثال، فإن عقوبة الردة هي جزءٌ من تراث فرضته الظروف التاريخية والحسابات السياسية التي تعود إلى الحقبة المبكرة لتاريخ الإسلام؛ حينما جرت مطابقة الرِّدَة مع الفرار من جيش الخليفة وعدم الانصياع لسلطته؛ وبما ينطوي عليه ذلك من دلالة الخيانة العظمى والتمرُّد. ومن هنا فإنه ينبغي النظر إلى فرض هذه العقوبة القاسية للردة على أنه نتاج تاريخي وسياسي ثانوي لتلك الظروف التي تحددها حسابات وملاءمات إنسانية؛ وذلك بدلًا عن افتراض أن الإسلام والشريعة يفرضان للأبد هذه العقوبة على من يقوم بتبديل دينه.

وقد أدى التطور التاريخي واستخدام لفظ "الشريعة" للإشارة إلى جملة ما جرى سنّه وفرضه من قوانين وأحكام، بغير العارفين لهذا التاريخ إلى الخلط بين تلك القوانين والأحكام التي صاغها الإنسان، وبين الوحي؛ وبما يعنيه ذلك من التعالي بما هو محض نتاج للفهم الإنساني - الذي هو مشروطٌ دومًا بتحديدات الزمان والمكان - إلى مقام الإلهي.

والحق أن الفهم الصحيح للشريعة يكشف عن أنها تتضمن وتُعَبِّر عن منظومة القيم الإنسانية الخالدة؛ وأما ما يُسمى بالقانون الإسلامي فإنه نتاج الاجتهاد الذي يعتمد على الظروف (حيث الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا)، وهو ما يجعله في حاجة إلى مراجعة دائمة طبقًا للتغيُّر الدائم للظروف والأحوال؛ وذلك لكيلا يصبح هذا القانون جامدًا مصمتًا، وغير مناسب للزمان وللظروف التي يعيشها المسلمون الآن، بل وغير متناسب

مع القيم الخالدة للشريعة.

وعلى مدى التاريخ الإسلامي، فإن العديد من الفقهاء المسلمين الكبار قد كانوا على دراية عميقة بتراث التصوُّف، كما أقروا بالحاجة إلى إيجاد نوع من التوازن بين حَرفية القانون من جهة، وبين روحه من جهة أخرى. والحق أن الحسَّ الإنساني العميق والطبيعة الروحية للتصوف الإسلامي قد أتاحت للإسلام التكيُّف بيسر مع الممارسات الاجتماعية والثقافية المختلفة؛ حيث انتشر الإسلام على رقعة واسعة تمتد من الجزيرة العربية التي شهدت مولده إلى المشرق وشمال أفريقيا والساحل والصحراء الإفريقية وفارس وأسيا الوسطى وجنوبها وأرخبيل الهند الشرقية. وفي تقدير الكثيرين أن غالبية المسلمين في معظم تلك الأقاليم قد اختطوا لأنفسهم شكلًا في ممارسة التقوى الدينية يرجع أصله للتصوُّف سواء على نحو مباشر أو غير مباشر. ولعل عظمة تراث الفن والعمارة الإسلاميين - من عجائب فاس وغرناطة إلى إسطنبول وأصفهان وسمرقند وأجرا- لتشهد طابورًا طويلًا من أقطاب التصوف والطوائف [أو النقابات الحِرَفيَّة في العصور الوسطى، والتي كانت تتشكل من اتحاد لرجال يشتغلون في تجارة محددة للحفاظ على علو قيمة منتجاتهم ليجنوا أكبر قدر ممكن من الفائدة] والفنانين الذين يعملون منفردين، والذين جاهدوا كأفراد وطوائف «لإضفاء العظمة والجلال على المادة، ليتسنى لهم تحويل البيئة التي صنعها الإنسان بيده إلى مُناظر حقيقي للطبيعة، وفسيفساء من أعاجيب إلهية تكشف في كل مكان عن عمل الإنسان كخليفة لله على الأرض"[١٦].

والحق أن عظمة الحضارة الإسلامية الكلاسيكية - التي تجسِّد قيم الشمولية الإنسانية والكونية- إنما تنبع من النضج العقلي والروحي الذي نشأ عن صهر المؤثرات العربية والإغريقية واليهودية والمسيحية والفارسية. ولقد كان مما أبكاني في أثناء زيارتي لفاس بالمغرب قبل عدة سنوات هو رؤيتى

16 Seyyed Hossein Nasr سيد حسين نصر in *Persia, Bridge of Turquoise*, 1975, New York Graphic Society.

لشرح ابن رشد للأخلاق النيقوماخية[١٧]؛ فلم يزل باقيًا ومحفوظًا. وإذا لم يكن ذلك من أجل أرسطو ونَصّه الكبير، فلأنه كان يمكن أن يكون أنا نفسي (دون هذا التراث الغني) مسلمًا أصوليًّا متطرفًا.

ويُشار هنا إلى أنه من العوامل العديدة التي ساهمت في الانحطاط التاريخي المديد لحضارة العرب والمسلمين على العموم ووقف حائلًا دون إسهامهم في تطور العالم الحديث، هو ما تحقق من انتصار الإكراهات الدينية المعيارية (الصورية) على التراث الكلاسيكي للنزعة الإنسانية الإسلامية. فإن امتصاص المؤثرات الأجنبية، وخصوصًا في حقل التفكير الـتأملي وبناء الفرد والعلوم العقلية المُسْتَقِلة التي لا تخضع لإكراهات النزعة المدرسية الدينية، قد تعرض للانسحاق أمام آليات السيطرة الذاتية التي مارستها السلطات الدينية والحكومية؛ على نحو أصاب المجتمعات الإسلامية بالشلل.

ولا تزال تلك الآليات نفسها تعمل في عالمنا المعاصر، ليس فقط في شكل قوانين الردة والزندقة التي تضيق معها حدود الخطاب المقبول في العالم الإسلامي، والتي تمنع المسلمين من التفكير بحرية «خارج الصندوق»، ليس في الدين فقط، بل وفي غيره من مجالات الحياة والأدب والعلم والثقافة على العموم.

فهم الدين هو عملية مفتوحة

يعيش كل من يسعى مخلصًا إلى فهم دينه في عملية تطوير دائمة ومفتوحة لهذا الفهم، لأن خبرته واستبصاراته تؤدي به إلى نوع من الإدراك المتجدد للحقيقة. ومن هنا ما يقوله الله في كتابه العزيز: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» (٤١ : ٥٣).

---

١٧ يعتبر Nicomachian Ethics أو Nicomachean Ethics من أهم أعمال أرسطو في الأخلاق، وفيه ينظم القيم كما تم فهمها بشكل لائق في عصره من خلال تحديد ما يستقيم أخلاقيًا في كل موقف وما يتم اعتباره كذلك على سبيل الخطأ، وقد كتبه أرسطو في ١٠ كُتب عام ٣٥٠ ق.م. (المترجم).

فإنه لا شيء في الوجود مُكتفٍ بذاته إلا الله. فكل واحدٍ من الكائنات الحية يعتمد في وجوده على الآخر، وكلها تدين بوجودها لله. ولأنها توجد في الزمان والمكان، فإن إدراك الواحد من مخلوقات الله للحقيقة يختلف عن إدراك الآخر، لأنه يكون مشروطًا بالمعرفة والخبرات الشخصية لكل واحدٍ منهم.

وكما سبقت الإشارة، فإن القرآن يرى أن العالم، وأن كل معرفة يمكن أن نتحصّل عليها منه، هي مجرد آيات ترشدنا إلى معرفة الله. وقد مايز العلماء المسلمون تقليديًّا بين ثلاثة أصناف من المعرفة: الأول منها هو «علم اليقين» الذي هو علم استدلالي، وموضوعه المعرفة التي يشيع النظر إليها من العلماء والمثقفين ورجال الدين على أنها معرفة صادقة. وثانيها هو «عين اليقين» الذي ينطوي على مستوى أعلى من الصدق مقارنة بالنوع الأول؛ حيث يشهد المرء فيه، على نحو مباشر، أن معارفه حول ظاهرة موضوعية ما معارفٌ صادقة ودقيقة. وأما النوع الثالث فهو «حق اليقين» الذي هو المعرفة الكاملة التي تتحقق بالخبرة الشخصية المباشرة؛ وتتمثل في اتصال أولياء الصوفية بالله.

إن الحقيقة المتعلقة بإشارة القرآن إلى الله على أنه "الحق" في غاية الدلالة. وإذا كان على المعرفة الإنسانية- والحال كذلك- أن تبلغ "الحق"، فإن الحرية الدينية تكون أمرًا في غاية الضرورة والحيوية. وهكذا فإن البحث عن "الحق" سواء من خلال العقل أو الذوق أو أي أشكال متنوعة من الممارسة الروحية، لا بد أن يكون مسموحًا به بحرية ودون أي تضييق. ودون الحرية لن تقدر الروح الإنسانية أن تبلغ الحق المطلق الذي هو بطبيعته حرية غير مشروطة.

إن الجهود العقلية والذوقية هي مجرد مقدمات في طريق البحث عن "الحق". وإن هدف المرء كمسلم أن يسلّم أمره لله أو الحق المطلق؛ وليس للمفاهيم العقلية والذوقية الموصلة للحقيقة القصوى. ودون الحرية فإن الإنسان يمكنه فقط أن يحقق إشباعه الذاتي من خلال نوع من المعرفة الظنية بالحق؛ وذلك بدلًا عن معرفة الحق الخالص نفسه.

إن الاستعداد الروحي لكل فرد يلعب بالضرورة دورًا حاسمًا في إمكان بلوغه

"الحق"؛ حتى أن التعبير الخاص عن الحق كما يفهمه شخصٌ ما يمكن أن يختلف عن التعبير الذي يخص شخصًا آخر. ويُقَدِّر الإسلام تلك الاختلافات، كما يُقَدِّر الحرية الدينية نفسها؛ حيث يعترف لكل إنسان بالحق في أن يعرف الله بحسب ما تفرضه ممكناته وميوله الخاصة؛ وهو ما يُعَبِّر عنه الحديث القدسي[١٨] القائل: «أنا عند ظن عبدي بي». وبالطبع فإن مجاهدة المرء (من جذر كلمة جهاد نفسها) لكي يعرف الله لا بد أن تكون أصيلة ومخلصة لكي تقوده إلى حالٍ من السمو الذاتي؛ وهي الحال التي يعاين فيها البشر حضور الله الذي لا يقبل الوصف، كما يعاينون فناءهم في حضرته. وغالبًا ما يرفض الأصوليون تلك الأفكار، بسبب معارفهم الضحلة بالدين، وبسبب فقرهم الروحي. فإنه يجب، بالنسبة لهم، معرفة الله على نحو من التنزيه الكامل، وعلى أنه أبعد من أن يبلغه أحدٌ من البشر؛ وبكيفية لا يمكن معها لأي إنسان أن يأمل في معاينة الحضرة الإلهية. وتلك الرؤى مغلوطة تمامًا؛ لأن القرآن نفسه يذكر: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ» (٢ : ١١٥).

لا يمكن لشيء ما أن يمثل قيدًا على الحق المطلق. ويؤكد الصوفية- الذين يسعون إلى أن يبلغوا بالمسلمين النوع الثالث من المعرفة "حق اليقين"- على قيمتي الحرية والتنوع؛ لكونهما انعكاسًا لإرادة الله ومشيئته، ولأنهما يَحولان دون الخلط المتعمد بين الفهم الإنساني (الذي هو محدود ويقبل الخطأ) وبين العلم الإلهي. ومن جهة أخرى، فإن الإيمان والإسلام لا يكفيان في مستواهما العقلي فقط، بل لا بد أن يجاهد المسلم على نحو دائم لكي يعاين الحضور الإلهي (الذي هو الإحسان). فإنه دون هذه المعاينة للحضور الإلهي، ستظل الممارسة الدينية للمسلم ذات طابع نظري فقط؛ وبما يعنيه ذلك من أن الإسلام لم يصبح حقيقة مُعاشة ومُختبرة بعد.

والمُلاحظ أن الإكراهات والعقوبات المفروضة على حرية البحث والتعبير الدينيين، تعيق الفاعلية التطورية المتنامية لعملية الفهم الديني وتحكم عيها

---

١٨ ينظر المسلمون إلى الحديث القدسي على أنه كلمات الله التي أعاد النبي ترديدها، وتم تسجيلها بحسب شروط الإسناد (سلسلة التَثَبُّت المُكَوَّنَة من الشهود الذين سمعوا النبي يقول الحديث).

بالاضمحلال والجمود؛ وذلك عبر الخلط بين ما تقدمه السلطة التي تمارس الإكراه من فهم آنٍ ومحدود للحقيقة وبين الحقيقة نفسها؛ وبحيث ينتهي الأمر بها إلى تحويل الدين من كونه طريقًا (أو وسيلة) إلى الله، إلى أن يصبح هو نفسه الغاية التي تحتل مكان الله؛ وهي غاية تفرض حدودها وتعيِّن ملامحها تلك السلطة التي تستهدف تحقيق القوة الدنيوية.

وبمقدورنا رؤية تلك الإكراهات، وهي قيد العمل، في المحاولات التي تقوم بها منظمة المؤتمر الإسلامي OIC، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتقييد حرية التعبير وفرض حظر عالمي ملزم على أي نقد للإسلام، لمنع ما يُسمى بازدراء الأديان. وسواء كان الدافع لهذه الجهود الاهتمام المخلص بأمور الإنسانية، أو الحسابات السياسية، فإنها جهود بائسة مضللة؛ لأنه يتم استغلالها مباشرة من جانب الأصوليين الذين يرغبون في تفادي أي نقدٍ لمحاولتهم تضييق مجال الخطاب المتعلق بالإسلام، ولمحاولتهم إدخال مليار وثلاثمائة مليون مسلم إلى سجن الدوجماطيقية الضيق الخانق.

وإذا كان الاهتمام بالعداء الموجّه للإسلام والمسلمين أمر حيوي ومشروع، فإنه ينبغي الإقرار بأن السبب الأعظم لذلك العداء يتمثل في سلوك قطاع من المسلمين أنفسهم، وأعني بهم أولئك الذين ينشرون نوعًا من الفهم المتزمت العنيف والرجعي والعنصري للإسلام؛ وهو الفهم الذي يثير ويثبِّت مخاوف غير المسلمين وأحكامهم المسيئة للإسلام والمسلمين على العموم.

إن على الحكومات الغربية- بدلًا عن الكبح القانوني لأعمال النقد والمناظرة؛ الذي يؤدى فحسب إلى تشجيع جهود الأصوليين المسلمين في فرض فهم للإسلام آحادي ومتزمت وخالٍ من الروحانية على العالم بأسره- أن تدافع بحزم عن حرية التعبير على نطاق عالمي، وليس في الدول الغربية فقط، كما تنص على ذلك المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[١٩].

١٩ «لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، ويتضمن هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة، دون التقيُّد بالحدود الجغرافية».

إن هؤلاء الذين يجاهدون بتواضع من أجل أن يسلّموا أمرهم لله حقًا، لا يزعمون أنهم يفهمون الحق أفضل من غيرهم، بل إنهم يقنعون بالعيش في سلام مع الآخرين، رغم ما قد يكون بينهم وبين هؤلاء الآخرين من اختلاف في الرؤى والسبل.

إن الدفاع عن حرية التعبير لا يعني على الإطلاق الحضّ على عدم احترام معتقدات الآخرين؛ بل إنه يضمر إيمانًا بحكم الله أعظم من الإيمان بحكم البشر. وبعيدًا عن أخبار الاضطرابات والعنف اليومية، فإن الغالبية العظمى من مسلمي العالم يداومون على التعبير عن حبهم للنبي؛ وذلك بالسعي إلى التأسّي بما تعلموه عن حياته المسالمة المتسامحة، ودون أن يمارسوا سلوكًا عنيفًا حتى ضد هؤلاء الذين يستخفون بنبيهم، أو يزعمون امتياز وسمو فهمهم للحق. فمثل هؤلاء المسلمين يعيشون طبقًا لنَصِّ الآية القرآنية: "وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا" (٢٥ :٦٣).

§١١,٤
التنافر أو المعرفي وتحدّي الحداثة

١٤٩- بناء على نطاق واسع من الأسباب - التي تتضمن أنماط السلوك الفردية والجَمْعِيَّة المُشَكَّلَة بواسطة تراث عام وتصورات مشتركة عن الماضي - تظل نسبة مُعْتَبَرَة من المسلمين مُحْتَجَزَة في إطار عقلي يرى الإسلام بما هو سياسي جوهريًا (أي، استعلائي)، رغم حقيقة أن هذه العقلية تنشئ تنافرًا معرفيًا وتؤدي إلى اغتراب عميق عن بيئة المرء عندما يُواجَه بالواقع الحالي للحضارة العالَمِيَّة.

١٥٠- عندما يُواجَه الكثير من المسلمين بالتباين الواضح بين التعاليم البَالِيَة للأرثوذكسية الإسلامية والواقع المعاصر، فإنهم يلتزمون بسلوك مُضْطَهَد ويلومون الآخرين على الفشل العالَمي في عكس صورة ظروف الماضي

السياسية والديموغرافية والسوسيو-ثقافية، والتي تواجدت فيها المجتمعات المسلمية في حالة دائمة من الصراع مع بقية الإنسانية، يجاهدون باستمرار في سبيل السيادة السياسية والعسكرية.

١٥١- لأكثر من ألف عام، كانت المجتمعات المسلمة على العموم ناجحة في منافستها مع المجتمعات غير المسلمة، وهذه حقيقة تميل إلى زيادة توقهم الجَمْعي للماضي سوءًا.

١٥٢- يقدم القرن الواحد والعشرون فرصة لم يسبق لها مثيل قط للمسلمين كي يتعاونوا مع غير المسلمين ـــ لمصلحتنا المشتركة، وعلى مقياس كوني بحق ـــ وبذلك يُنَفِّذون المهمة النبوية التي تعلقت بإتمام الإطار الأخلاقي للإنسانية وأن يخدموا [في الحياة] باعتبارهم رحمة للعالَمين.

١٥٣- لكن، وبدلًا من قبول الواقع المعاصر بامتنان والتكيُّف وِفْقه، يسعى الكثير من المسلمين لتغيير الواقع نفسه، واستعادة الشروط السياسية والديموغرافية والسوسيو-ثقافية للعصر الوسيط كما لو أن ذلك ليس ممكنًا فقط، وإنما هو أمر لازم ومحمود في عيني الله، بصرف النظر عن الانفصال والمعاناة غير المحسوبة التي ستكون مطلوبة لإحداث مثل هذا الأمر.

١٥٤- وبالنسبة لشخص أمين فكريًا ومُطَّلع بالحقائق محل البحث، من الواضح أن الكثير من أعضاء داعش (وليس كلهم بالطبع)، وتنظيم القاعدة، والأخوان المسلمين، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني وجماعات إسلاموية أخرى لا حصر لها، يؤمنون بحق بالتعاليم الإشكالية للأرثوذوكسية الإسلامية ويمتلكون جسارة تجاه قناعاتهم لدرجة استعدادهم للمعاناة والموت في سبيل اعتقاداتهم.

١٥٥- والسؤال هو: هل [نـ]متلك الشجاعة للدفاع عن اعتقاداتنا – ونتمتع بالجَلَد الجسدي، والفكري، والروحي – المطلوبة لمواجهة هذا التحدِّي والثبات حين السير عبر الصعوبات التي حتمًا ستواجه هؤلاء الساعين لإعادة غرس التعاليم الإسلامية في سياقها (أي الإصلاح) لتحرير

الإسلام من أسر التاريخ والتوفيق بين العناصر المشروطة تاريخيًا بالإسلام (المُتَغَيُّرات) مع واقع حضارة القرن الحادي والعشرين؟

١٥٦- واثقين أن هذه المهمة نبيلة، ومفروضة علينا باعتبارنا ورثة إيمان نبيل وحضارة نبيلة، فإننا ننضم للحاج يحي خليل ستاكوف Kyai Haji Yahya Cholil Staquf في أننا: "لن نتوقف في منتصف الطريق ولن نهجر هذا الطريق قبل الوصول لهدفنا. لن نعود لمنزلنا [قادمين من ميدان الصراع] إلا والانتصار في أيدينا".

§١١,٥
فقه الحضارة العالَمِيَّة المُتَصَهِّرَة
الفقه الإسلامي من أجل حضارة عالمية واحدة مُتَصَهِّرَة
من التخاصم إلى التعاون

١٥٧- إن انبثاق ما يمكن أن يصبح حضارة عالمية واحدة مُتَصَهِّرَة في نهاية المآل يعتبر واحدًا من الظواهر الأهم للعصر الحديث. وبينما تبرز هذه الحضارة تدريجيًا أكثر فأكثر – عبر عملية متعددة الأجيال وثورية بدأت على مدار قرن مضى – تختبر الثقافات المختلفة والحضارات القديمة للعالَم تحوُّلًا عميقًا، بينما، رغم ذلك، تستبقي العناصر الأساسية لهويتها الفريدة. وتستمر حضارات أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والهند والصين وأرخبيل الملايو في الحفاظ على سمة حضارية متميزة.

١٥٨- بالتالي، يبدو أن عملية ما تجري، ومنها تنبثق حضارة عالمية يمكنها – لعديد الأجيال – أن تتعايش مع الثقافات المحلية المتجذرة بعمق في التاريخ والتقاليد والشروط الدينية/ السوسيو-ثقافية/البيئية المتعلقة بمناطق مُعَيَّنَة.

١٥٩- لهذه التطوُّرات تشعُّبات هائلة المدى للمسلمين وغير المسلمين على حدٍّ سواء.

١٦٠- ولأكثر من ١٤٠٠ عام، وفَّرَ الإسلام بوصلة أخلاقية ـــ في حقيقة الأمر، وفَّر نوعًا من الإرشاد الأخلاقي القياسي ـــ لأتباعه، مُشَكِّلًا السلوك الذي ينخرطون عبره في الواقع المُعاش.

١٦١-وكما تم النقاش في بند ١١,٢§ أعلاه: لقد تميَّز القرن الماضي بتغيُّر سياسي، ديموجرافي، سوسيو-ثقافي، وتكنولوجي هائل، مَهَّدَ انبثاق "واقع حديث" لم يسبق له مثيل تاريخيًا، لم يختبره العلماء (الباحثون المسلمون) ولا توقعوا حدوثه أثناء حياتهم.

١٦٢- عندما يُصر المسلمون على تطبيق تعاليم بالية للأرثوذوكسية الإسلامية لتشكيل سلوكهم وإرشاده في العالَم الحديث، فإنهم يواجهون صعوبات عميقة بشكل طبيعي.

١٦٣-إن الافتراض الأساسي للأرثوذوكسية الإسلامية يتعلق بأن تعاليمها المتعددة يُقصَد منها هداية وإرشاد المسلمين نحو الخير الفردي والجَمْعي. وبسبب الأوضاع المشروطة تاريخيًا التي انبثقت فيها الأرثوذوكسية الإسلامية، تُصّوِّرُ نصوصها ذات السلطة الدولَ الكافرة باعتبارها دار الحرب ـــ المسكونة بأعداء يجب قتالهم وغزوهم ـــ ولا تعطي الأولوية لرخاء غير المسلمين.

١٦٤- منظورًا للفقه من زاوية العصر الذي انبثقت فيه تعاليمه، يمكن اعتباره ناجحًا على المستوى التاريخي لحد كبير ـــ منذ تكوينه حتى فجر العصر الحديث ـــ من جهة انتدابه لحماية حيوات المسلمين ورخائهم.

١٦٥- لا يمكن لأحد الجدال - بشكل يقبله العقل - حول عظمة الحضارة الإسلامية خلال العصر العباسي، ومراكز أخرى من الإزهار الثقافي داخل العالَم الإسلامي ككل. يمكن القول بأن الحضارة الإسلامية ضاهت حضارة الصين والهند واليونان وروما.

١٦٦-من الواضح أن تعاليم الأرثوذوكسية الإسلامية مُتَصَحِّرَة مع فهم للواقع المعاصر (أي الأوضاع) التي صاغ فيها الباحثون المسلمون هذه التعاليم، وبما تتضمنه من العناصر التي أصبحت الآن بالية وإشكالية. وذلك لأن

واقعهم لم يتميَّز بحضارة عالمية مُتَصَهِّرَة واحدة، بل مَيَّزَه بالأحرى تنافس وصراع شرسان بين كينونات سياسية استعلائية دينيًا ومتنافسة.

١٦٧- في عصرنا الحالي سيكون لهذه التعاليم تأثير عكسي، وعلى درجة عالية من الخطورة بحق، لأن المسلمين ينظرون لغير المسلمين أوتوماتيكيًا بعيون الارتياب ـــ إما باعتبارهم أعداء نشطين عدوانيين أو باعتبارهم شعوبًا معرضين للغزو يخضعون لحُكْمِ دولة إسلامية ـــ وهو الأمر الذي يمكن رؤيته من أفعال الجماعات الإرهابية والمَدّ المتصاعد للإسلاموفوبيا حول العالَم.

١٦٨- في حقيقة الأمر، ينفي السعيُ لتطبيق التعاليم البَالِيَة للفقه الكلاسيكي في سياق واقعنا المعاصر الغرضَ الأساسي للأرثوذكسية الإسلامية (مقاصد الشريعة). وذلك لأن التعاليم البَالِيَة للفقه لم تكف عن تقوية خير المسلمين فقط؛ فهي كذلك تهدد حيوات المسلمين وغير المسلمين ورخاءهم بشكل نَشِطٍ وعلى حَدٍّ سواء.

١٦٩- كما لاحظنا أعلاه (انظر نقطة ١٥٧ و١٥٨)، ثمَّة حضارة عالمية تنبثق تدريجيًا يحيا فيها الناس من كل إيمان وعِرْق ويحبون ويعملون جنبًا إلى جنب. بالتعامل مع هذه الحقيقة كمعطى، من الضروري على العلماء (الباحثين المسلمين) تطوير عناصر للفقه الإسلامي الجديد من شأنها أن تعززَ بحق خير المسلمين المعاصرين الذين يحيون في مناطق من العالَم يهيمن عليها غير المسلمين، و/ أو في وسط حضارة عالمية مُتَصَهِّرَة (أي كوزموبوليتانية) واحدة.

١٧٠- من الضروري أيضًا تطوير عناصر لفقه إسلامي جديد من شأنها تقوية رخاء وسلامة المسلمين الذين يقيمون في مناطق تبقى إلى حد كبير ذات ثقافة وتقاليد إسلامية، لكنها مع ذلك متأثرة بالتطوُّرات السياسية، السوسيو-ثقافية والتكنولوجية الحديثة بقوة.

١٧١- في كلتا الحالتين، يجب على الهداية الجديدة محل البحث (الشريعة) تعزيز خير كل البشرية، للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء، وذلك لأنه أصبح

من المستحيل فعليًا – وبالتأكيد من غير المرغوب – عَزْل كل المسلمين عن غير المسلمين اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا وجسديًا، و/ أو إخضاع غير المسلمين لـ ''حُكْم'' الإسلام.

١٧٢- يجب على فقه الحضارة العالَمِيَّة المُتَصَهِّرَة وتنوعاته الإقليمية مواجهة الحاجة للانسجام الاجتماعي على مستوى عالَمي وفي كل منطقة من مناطق العالَم حيث يحيا ويعمل المسلمون بالفعل من خلال عملية إعادة غرس الإسلام في سياقه و''أَقْلَمَته/ توطينه''، كما حدث تاريخيًا في نوسانتارا (أرخبيل الملايو).

١٧٣- عبر عملية من الاجتهاد، يمكننا أن نشهد تطويرًا لإدراك ديني جديد يعكس الظروف الواقعية لحضارتنا الحديثة، ويسهم في انبثاق نظام عالَمي عادِل ومنسجم بحق، يتأسس على احترام الحقوق المتساوية والكرامة المتساوية لكل إنسان.

الجزء الثاني عشر

الوحدة الاجتماعية: الفضيلة الأسمى والأداة الأقوى لتعزيز الصالح العام

١٧٤- إن كراهية الآخرين – سواء أكانت مبنية على ''قَبَلِيّة'' عِرقيَة أم دينية أم إيديولوجية – تعادي الأخلاق الكريمة التي تُمثِّل الأساس الوحيد الآمِن الذي يمكن تشييد حضارة عالمية سلمية ومزدهِرَة عليه.

١٧٥- في أكتوبر عام ١٩٢٦، ألقى مؤسس نهضة العلماء، حضرة شيخ هاشم أشعري Hadratus Shaykh Hasyim Asy'ari خطبة للمؤتمر الافتتاحي للمنظمة والذي أُقيمَ في سورابايا، شرق جاوة. في هذه الخطبة – التي كانت مدمجة في لائحة النظام الأساسي لنهضة العلماء بشكل لا يقبل النقض

(Muqaddimah Qonun Asasi) ـــــ قال كياي هاشم:

كما هو مُتَعارَف عليه عالميًا، البشر كائنات اجتماعية فطريًا، تختلط مع الآخرين؛ وذلك لأنه لا يمكن لأي فرد (ذكرًا كان أو انثى) إشباع حاجته بالتصرف وحيدًا. راغبًا في ذلك أو لا، يلزم على كل إنسان التفاعل اجتماعيًا، وهو التفاعل الذي يجب أن يُسْهِمَ بشكل مثالي في خير كل أعضاء المجتمع الآخرين بينما يحفظهم من الخطر.

إن وحدة القلوب والعقول البشرية، إذ يساعد الناس بعضهم البعض لتحقيق هدف مشترك، لمِن أهم مصادر السعادة الإنسانية والعامل الأقوى لحثِّ البشر على أن يحبوا بعضهم البعض.

وبسبب هذا المبدأ، أصبحت عديد الأمم مزدهرة. فقد أصبح العبيد حُكَّامًا يعززون التطوُّر المُنْتَشِر. ولقد تقدمت الدول؛ وقُوّيَ حُكْم القانون؛ وشُيِّدَت شبكات النقل التي مَكّنَت من ازدهار التبادل الاقتصادي والثقافي. وتنشأ فوائد لا يمكن حصرها من الوحدة الاجتماعية، وذلك لأنها الفضيلة الأسمى والأداة الأقوى لتعزيز الصالح العام.

وختامًا

دعوة للعمل

اقتداءً بروح هاشم أشعري
وآخرين أسَّسوا جمهورية إندونيسيا
باعتبارها دولة قومية متعددة دينيًا وتُقِرُّ التعدُّد،
بناء على مبادئ البانشاسيلا
ومبدأ (الوحدة عبر التعدُّد – Bhinneka Tunggal Ika):

تدعو جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة
الناس ذوي النفوس الصافية من كل إيمان وأمة
ليشاركوا في بناء إجماع عالمي
لمنع استخدام الإسلام كسلاح في السياسة،
سواء أقام بذلك المسلمون أم غير المسلمين،
وللحَدِّ من انتشار الكراهية
من خلال تعزيز انبثاق نظام عالمي عادل ومُتَجَانِس بحق،
يتأسس على احترام الحقوق والكرامة المتساوية
لكل إنسان.

LAMPIRAN V

وثيقـة الأخوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك[20]

مقدمة

يحملُ الإيمانُ المؤمنَ على أن يَرَى في الآخَر أخًا له، عليه أن يُؤازرَه ويُحبَّه. وانطلاقًا من الإيمان بالله الذي خَلَقَ الناسَ جميعًا وخَلَقَ الكونَ والخلائقَ وساوَى بينَهم برحمتِه، فإنَّ المؤمنَ مَدعُوٌّ للتعبيرِ عن هذه الأُخوَّةِ الإنسانيَّةِ بالاعتناءِ بالخَلِيقةِ وبالكَوْنِ كُلِّه، وبتقديمِ العَوْنِ لكُلِّ إنسانٍ، لا سيَّما الضُّعفاءِ منهم والأشخاصِ الأكثرِ حاجَةً وعَوَزًا. وانطلاقًا من هذا المعنى المُتسامِي، وفي عِدَّةِ لقاءاتٍ سادَها جَوٌّ مُفعَمٌ بالأُخوَّةِ والصَّداقةِ تَشارَكنا الحديثَ عن أفراحِ العالم المُعاصِرِ وأحزانِه وأزماتِه سواءٌ على مُستَوى التقدُّم العِلميِّ والتقنيِّ، والإنجازاتِ العلاجيَّة، والعصرِ الرَّقميِّ، ووسائلِ الإعلامِ الحديثةِ، أو على مستوى الفقرِ والحُروبِ، والآلامِ التي يُعاني منها العديدُ من إخوتِنا وأخَواتِنا في مَناطقَ مُختلِفةٍ من العالمِ، نتيجةَ سِباقِ التَّسلُّح، والظُّلمِ الاجتماعيِّ، والفسادِ، وعدَمِ المُساواةِ، والتدهورِ الأخلاقيِّ، والإرهابِ، والعُنصُريَّةِ والتَّطرُّفِ، وغيرِها من الأسبابِ الأُخرى.

ومن خِلالِ هذه المُحادَثاتِ الأخَويَّةِ الصادِقةِ التي دارت بينَنا، وفي لقاءٍ يَملَؤُهُ الأمَلُ في غَدٍ مُشرِق لكُلِّ بني الإنسانِ، وُلِدت فكرةُ «وثيقة الأُخُوَّةِ الإنسانيَّةِ»، وجرى العَمَلُ عليها بإخلاصٍ وجديَّةٍ؛ لتكونَ إعلانًا مُشتَرَكًا عن نَوايا صالحةٍ وصادقةٍ من أجل دعوةِ كُلِّ مَن يَحمِلُونَ في قُلوبِهم إيمانًا باللهِ وإيمانًا بالأُخُوَّةِ الإنسانيَّةِ أن يَتوحَّدُوا ويَعمَلُوا معًا من أجلِ أن تُصبِحَ هذه الوثيقةُ دليلًا للأجيالِ

---

20 Konferensi Internasional untuk Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab3-5 Februari 2019.

القادِمةِ، يَأخُذُهم إلى ثقافةِ الاحترامِ المُتبادَلِ، في جوٍّ من إدراكِ النِّعمةِ الإلهيَّةِ الكُبرَى التي جَعلَتْ من الخلقِ جميعًا إخوةً.

الوثيقة

باسمِ اللهِ الَّذي خَلَقَ البَشَرَ جميعًا مُتَساوِين في الحُقُوقِ والواجباتِ والكَرامةِ، ودَعاهُم للعَيْشِ كإخوةٍ فيما بَيْنَهم ليُعَمِّروا الأرضَ، ويَنشُروا فيها قِيَمَ الخَيْرِ والمَحَبَّةِ والسَّلامِ.

باسمِ النفسِ البَشَريَّةِ الطَّاهِرةِ التي حَرَّمَ اللهُ إزهاقَها، وأخبَرَ أنَّه مَن جَنَى على نَفْسٍ واحدةٍ فكأنَّه جَنَى على البَشَريَّةِ جَمْعاءَ، ومَنْ أَحْيَا نَفْسًا واحدةً فكَأنَّما أَحْيَا الناسَ جميعًا.

باسمِ الفُقَراءِ والبُؤَساءِ والمَحرُومِينَ والمُهمَّشِينَ الَّذين أَمَرَ اللهُ بالإحسانِ إليهم ومَدِّ يَدِ العَوْنِ للتَّخفيفِ عنهم، فرضًا على كُلِّ إنسانٍ لا سيَّما كُلِّ مُقتَدرٍ ومَيسُورٍ.

باسمِ الأيتامِ والأَراملِ، والمُهَجَّرينَ والنَّازِحِينَ من دِيارِهِم وأَوْطانِهم، وكُلِّ ضَحايا الحُرُوبِ والاضطِهادِ والظُّلْمِ، والمُستَضعَفِينَ والخائِفِينَ والأَسْرَى والمُعَذَّبِينَ في الأرضِ، دُونَ إقصاءٍ أو تمييزٍ.

باسمِ الشُّعُوبِ التي فقَدَتِ الأَمْنَ والسَّلامَ والتَّعايُشَ، وحَلَّ بها الدَّمارُ والخَرَابُ والتَّناحُر.

باسمِ «الأُخُوَّةِ الإنسانيَّةِ» التي تَجمَعُ البَشَرَ جميعًا، وتُوحِّدُهم وتُسوِّي بينَهم. باسم تلك الأُخُوَّةِ التي أرهَقَتْها سِياساتُ التَّعَصُّبِ والتَّفرِقةِ، التي تَعبَثُ بمَصائِرِ الشُّعُوبِ ومُقَدَّراتِهم، وأَنظِمةُ التَّرَبُّحِ الأَعْمَى، والتَّوَجُّهاتُ الأيدلوجيَّةِ البَغِيضةِ.

باسمِ الحُرِّيَّةِ التي وَهَبَها اللهُ لكُلِّ البَشَرِ وفطَرَهُم عليها ومَيَّزَهُم بها. باسمِ العَدْلِ والرَّحمةِ، أساسِ المُلْكِ وجَوْهَرِ الصَّلاحِ. باسمِ كُلِّ الأشخاصِ ذَوِي الإرادةِ الصالحةِ، في كلِّ بِقاعِ المَسكُونَةِ.

باسمِ اللهِ وباسمِ كُلِّ ما سَبَقَ، يُعلِنُ الأزهَرُ الشريفُ - ومِن حَوْلِه المُسلِمُونَ في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِها - والكنيسةُ الكاثوليكيَّةُ - ومِن حولِها الكاثوليك من الشَّرقِ والغَرْبِ - تَبنِّي ثقافةِ الحوارِ دَرْبًا، والتعاوُنِ المُشترَكِ سبيلًا، والتعارُفِ المُتَبادَلِ نَهْجًا وطَرِيقًا.

إنَّنا نحن - المُؤمِنين باللهِ وبلِقائِه وبحِسابِه - ومن مُنطَلَقِ مَسؤُوليَّتِنا الدِّينيَّةِ والأدَبيَّةِ، وعَبْرَ هذه الوثيقةِ، نُطالِبُ أنفُسَنا وقادَةَ العالَمِ، وصُنَّاعَ السِّياساتِ الدَّوليَّةِ والاقتصادِ العالَمِيِّ، بالعمَلِ جدِّيًّا على نَشْرِ ثقافةِ التَّسامُحِ والتعايُشِ والسَّلامِ، والتدخُّلِ فَوْرًا لإيقافِ سَيْلِ الدِّماءِ البَرِيئةِ، ووَقْفِ ما يَشهَدُه العالَمُ حاليًّا من حُرُوبٍ وصِراعاتٍ وتَراجُعٍ مناخِيٍّ وانحِدارٍ ثقافيٍّ وأخلاقيٍّ.

ونَتَوجَّهُ للمُفكِّرينَ والفَلاسِفةِ ورِجالِ الدِّينِ والفَنَّانِينَ والإعلاميِّين والمُبدِعِينَ في كُلِّ مكانٍ ليُعِيدُوا اكتشافَ قِيَمِ السَّلامِ والعَدْلِ والخَيْرِ والجَمالِ والأُخُوَّةِ الإنسانيَّةِ والعَيْشِ المُشتَرَكِ، وليُؤكِّدوا أهميَّتَها كطَوْقِ نَجاةٍ للجَمِيعِ، وليَسعَوْا في نَشْرِ هذه القِيَمِ بينَ الناسِ في كلِّ مكان.

إنَّ هذا الإعلانَ الذي يأتي انطِلاقًا من تَأمُّلٍ عَمِيقٍ لواقعِ عالَمِنا المُعاصِرِ وتقديرِ نجاحاتِه ومُعايَشةِ آلامِه ومَآسِيهِ وكَوارِثِه - لَيُؤمِنُ إيمانًا جازمًا بأنَّ أهمَّ أسبابِ أزمةِ العالمِ اليَوْمَ يَعُودُ إلى تَغيِيبِ الضميرِ الإنسانيِّ وإقصاءِ الأخلاقِ الدِّينيَّةِ، وكذلك استِدعاءُ النَّزْعَةِ الفرديَّةِ والفَلْسَفاتِ المادِّيَّةِ، التي تُؤَلِّهُ الإنسانَ، وتَضَعُ القِيَمَ المادِّيَّةَ الدُّنيويَّةَ مَوْضِعَ المَبادِئِ العُلْيَا والمُتسامِية.

إنَّنا، وإنْ كُنَّا نُقدِّرُ الجوانبَ الإيجابيَّةَ التي حقَّقَتْها حَضارَتُنا الحَدِيثةُ في مَجالِ العِلْمِ والتِّقنيةِ والطبِّ والصِّناعةِ والرَّفاهِيةِ، وبخاصَّةٍ في الدُّوَلِ المُتقدِّمةِ، فإنَّا

- مع ذلك - نُسجِّلُ أنَّ هذه القَفزات التاريخيَّةَ الكُبرى والمَحمُودةَ تَراجَعَتْ معها الأخلاقُ الضَّابِطةُ للتصرُّفاتِ الدوليَّةِ، وتَراجَعَتِ القِيَمُ الرُّوحِيَّةُ والشُّعُورُ بالمَسؤُوليَّةِ؛ ممَّا أسهَمَ في نَشْرِ شُعُورٍ عامٍّ بالإحباطِ والعُزْلَةِ واليَأْسِ، ودَفَعَ الكَثِيرينَ إلى الانخِراطِ إمَّا في دَوَّامةِ التَّطرُّفِ الإلحاديِّ واللادينيِّ، وإمَّا في دوامة التَّطرُّفِ الدِّينيِّ والتشدُّدِ والتَّعصُّبِ الأعمى، كما دَفَعَ البعضَ إلى تَبَنِّي أشكالٍ من الإدمانِ والتَّدمِيرِ الذاتيِّ والجَماعيِّ. إنَّ التاريخَ يُؤكِّدُ أنَّ التطرُّفَ الدِّينيَّ والقوميَّ والتعصُّبَ قد أثمَرَ في العالَمِ، سواءٌ في الغَرْبِ أو الشَّرْقِ، ما يُمكِنُ أن نُطلِقَ عليه بَوادِرِ «حربٍ عالميَّةٍ ثالثةٍ على أجزاءٍ»، بدَأَتْ تَكشِفُ عن وَجهِها القبيحِ في كثيرٍ من الأماكنِ، وعن أوضاعٍ مَأساويَّةٍ لا يُعرَفُ - على وَجْهِ الدِّقَّةِ - عَدَدُ مَن خلَّفَتْهم من قَتْلَى وأرامِلَ وثَكالى وأيتامٍ، وهناك أماكنُ أُخرَى يَجرِي إعدادُها لمَزيدٍ من الانفجارِ وتكديسِ السِّلاح وجَلْبِ الذّخائرِ، في وَضْعٍ عالَمِيٍّ تُسيطِرُ عليه الضَّبابيَّةُ وخَيْبَةُ الأملِ والخوفُ من المُستَقبَلِ، وتَتحكَّمُ فيه المَصالحُ الماديَّةُ الضيِّقة.

ونُشدِّدُ أيضًا على أنَّ الأزماتِ السياسيَّةَ الطاحنةَ، والظُّلمَ وافتِقادَ عَدالةِ التوزيعِ للثرواتِ الطبيعيَّة - التي يَستَأثِرُ بها قِلَّةٌ من الأثرياءِ ويُحرَمُ منها السَّوادُ الأعظَمُ من شُعُوبِ الأرضِ - قد أَنْتَجَ ويُنْتِجُ أعدادًا هائلةً من المَرْضَى والمُعْوِزِين والمَوْتَى، وأزماتٍ قاتلةً تَشهَدُها كثيرٌ من الدُّوَلِ، برغمِ ما تَزخَرُ به تلك البلادُ من كُنوزٍ وثَرواتٍ، وما تَملِكُه من سَواعِدَ قَويَّةٍ وشبابٍ واعدٍ. وأمامَ هذه الأزمات التي تجعَلُ مَلايينَ الأطفالِ يَموتُونَ جُوعًا، وتَتحَوَّلُ أجسادُهم - من شِدَّةِ الفقرِ والجوعِ - إلى ما يُشبِهُ الهَيَاكِلَ العَظميَّةَ الباليةَ، يَسُودُ صمتٌ عالميٌّ غيرُ مقبولٍ.

وهنا تَظهَرُ ضرورةُ الأُسرَةِ كنواةٍ لا غِنى عنها للمُجتمعِ وللبشريَّةِ، لإنجابِ الأبناءِ وتَربيتِهم وتَعليمِهم وتَحصِينِهم بالأخلاقِ وبالرعايةِ الأُسريَّةِ، فمُهاجَمةُ المُؤسَّسةِ الأسريَّةِ والتَّقلِيلُ منها والتَّشكيكُ في أهميَّةِ دَوْرِها هو من أخطَرِ أمراض عَصرِنا. إنَّنا نُؤكِّدُ أيضًا على أهميَّةِ إيقاظِ الحِسِّ الدِّينيِّ والحاجةِ لبَعْثِه مُجدَّدًا في نُفُوسِ الأجيالِ الجديدةِ عن طريقِ التَّربيةِ الصَّحِيحةِ والتنشئةِ السَّليمةِ والتحلِّي

بالأخلاقِ والتَّمسُّكِ بالتعاليمِ الدِّينيَّةِ القَوِيمةِ لمُواجَهةِ النَّزعاتِ الفرديَّةِ والأنانيَّةِ والصِّدامِيَّةِ، والتَّطرُّفِ والتعصُّبِ الأعمى بكُلِّ أشكالِه وصُوَرِه.

إنَّ هَدَفَ الأديانِ الأوَّلَ والأهمَّ هو الإيمانُ باللهِ وعبادتُه، وحَثُّ جميعِ البَشَرِ على الإيمانِ بأنَّ هذا الكونَ يَعتَمِدُ على إلهٍ يَحكُمُه، هو الخالقُ الذي أَوْجَدَنا بحِكمةٍ إلهيَّةٍ، وأَعْطَانَا هِبَةَ الحياةِ لنُحافِظَ عليها، هبةً لا يَحِقُّ لأيِّ إنسانٍ أن يَنزِعَها أو يُهَدِّدَها أو يَتَصرَّفَ بها كما يَشاءُ، بل على الجميعِ المُحافَظةُ عليها منذُ بدايتِها وحتى نهايتِها الطبيعيَّةِ؛ لذا نُدِينُ كُلَّ المُمارَسات التي تُهدِّدُ الحياةَ؛ كالإبادةِ الجماعيَّةِ، والعَمَليَّاتِ الإرهابيَّة، والتهجيرِ القَسْرِيِّ، والمُتاجَرةِ بالأعضاءِ البشَرِيَّةِ، والإجهاضِ، وما يُطلَقُ عليه الموت (اللا) رَحِيم، والسياساتِ التي تُشجِّعُها.

كما نُعلنُ – وبحَزمٍ – أنَّ الأديانَ لم تَكُنْ أبَدًا بَرِيدًا للحُرُوبِ أو باعثةً لمَشاعِرِ الكَراهِيةِ والعداءِ والتعصُّبِ، أو مُثِيرةً للعُنْفِ وإراقةِ الدِّماءِ، فهذه المَآسِي حَصِيلَةُ الانحِرافِ عن التعاليمِ الدِّينِيَّة، ونتيجةُ استِغلالِ الأديانِ في السِّياسَةِ، وكذا تأويلاتُ طائفةٍ من رِجالاتِ الدِّينِ – في بعض مَراحِلِ التاريخِ – ممَّن وظَّف بعضُهم الشُّعُورَ الدِّينيَّ لدَفْعِ الناسِ للإتيانِ بما لا علاقةَ له بصَحِيحِ الدِّينِ، من أجلِ تَحقِيقِ أهدافٍ سياسيَّةٍ واقتصاديَّةٍ دُنيويَّةٍ ضَيِّقةٍ؛ لذا فنحنُ نُطالِبُ الجميعَ بوَقْفِ استخدامِ الأديانِ في تأجيجِ الكراهيةِ والعُنْفِ والتطرُّفِ والتعصُّبِ الأعمى، والكَفِّ عن استخدامِ اسمِ اللهِ لتبريرِ أعمالِ القتلِ والتشريدِ والإرهابِ والبَطْشِ؛ لإيمانِنا المُشتَرَكِ بأنَّ اللهَ لم يَخْلُقِ الناسَ ليُقَتَّلوا أو ليَتَقاتَلُوا أو يُعذَّبُوا أو يُضيَّقَ عليهم في حَياتِهم ومَعاشِهم، وأنَّه – عَزَّ وجَلَّ – في غِنًى عمَّن يُدافِعُ عنه أو يُرْهِبُ الآخَرِين باسمِه.

إنَّ هذه الوثيقةَ، إذ تَعتَمِدُ كُلَّ ما سبقَها من وَثائِقَ عالَمِيَّةٍ نَبَّهَتْ إلى أهميَّةِ دَوْرِ الأديانِ في بِناءِ السَّلامِ العالميِّ، فإنَّها تُؤكِّدُ الآتي:

- القناعةُ الراسخةُ بأنَّ التعاليمَ الصحيحةَ للأديانِ تَدعُو إلى التمسُّك بقِيَمِ

السلام وإعلاءِ قِيَمِ التعارُفِ المُتبادَلِ والأُخُوَّةِ الإنسانيَّةِ والعَيْشِ المشترَكِ، وتكريس الحِكْمَةِ والعَدْلِ والإحسانِ، وإيقاظِ نَزْعَةِ التديُّن لدى النَّشْءِ والشبابِ؛ لحمايةِ الأجيالِ الجديدةِ من سَيْطَرَةِ الفكرِ الماديِّ، ومن خَطَرِ سِياساتِ التربُّح الأعمى واللامُبالاةِ القائمةِ على قانونِ القُوَّةِ لا على قُوَّةِ القانونِ.

- أنَّ الحريَّةَ حَقٌّ لكُلِّ إنسانٍ: اعتقادًا وفكرًا وتعبيرًا ومُمارَسةً، وأنَّ التَّعدُّدِيَّةَ والاختلافَ في الدِّينِ واللَّوْنِ والجِنسِ والعِرْقِ واللُّغةِ حِكمةٌ لمَشيئةٍ إلهيَّةٍ، قد خَلَقَ اللهُ البشَرَ عليها، وجعَلَها أصلًا ثابتًا تَتفرَّعُ عنه حُقُوقُ حُريَّةِ الاعتقادِ، وحريَّةِ الاختلافِ، وتجريمِ إكراهِ الناسِ على دِينٍ بعَيْنِه أو ثقافةٍ مُحدَّدةٍ، أو فَرْضِ أسلوبٍ حضاريٍّ لا يَقبَلُه الآخَر.
- أنَّ العدلَ القائمَ على الرحمةِ هو السبيلُ الواجبُ اتِّباعُه للوُصولِ إلى حياةٍ كريمةٍ، يحقُّ لكُلِّ إنسانٍ أن يَحْيَا في كَنَفِه.
- أنَّ الحوارَ والتفاهُمَ ونشرَ ثقافةِ التسامُحِ وقَبُولِ الآخَرِ والتعايُشِ بين الناسِ، من شأنِه أن يُسهِمَ في احتواءِ كثيرٍ من المشكلاتِ الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة التي تُحاصِرُ جُزءًا كبيرًا من البَشَرِ.
- أنَّ الحوارَ بين المُؤمِنين يَعنِي التلاقِيَ في المساحةِ الهائلةِ للقِيَمِ الرُّوحيَّةِ والإنسانيَّةِ والاجتماعيَّةِ المُشترَكةِ، واستثمارَ ذلك في نَشْرِ الأخلاقِ والفَضائلِ العُلْيَا التي تدعو إليها الأديانُ، وتَجنُّبَ الجَدَلِ العَقِيمِ.
- أنَّ حمايةَ دُورِ العبادةِ، من مَعابِدَ وكَنائِسَ ومَساجِدَ، واجبٌ تَكفُلُه كُلُّ الأديانِ والقِيَمِ الإنسانيَّةِ والمَوَاثيقِ والأعرافِ الدوليَّةِ، وكلُّ محاولةٍ للتعرُّضِ لِدُورِ العبادةِ، واستهدافِها بالاعتداءِ أو التفجيرِ أو التهديمِ، هي خُروجٌ صَريحٌ عن تعاليمِ الأديانِ، وانتهاكٌ واضحٌ للقوانينِ الدوليَّةِ.
- أنَّ الإرهابَ البَغِيضَ الذي يُهدِّدُ أمنَ الناسِ، سَواءٌ في الشَّرْقِ أو الغَرْبِ، وفي الشَّمالِ والجَنوبِ، ويُلاحِقُهم بالفَزَعِ والرُّعْبِ وتَرَقُّبِ الأَسْوَأِ، ليس نِتاجًا للدِّين – حتى وإنْ رَفَعَ الإرهابيُّون لافتاتِه ولَبِسُوا شاراتِه – بل هو

نتيجةٌ لتَراكُمات الفُهُومِ الخاطئةِ لنُصُوصِ الأديانِ وسِياساتِ الجُوعِ والفَقْرِ والظُّلْمِ والبَطْشِ والتَّعالِي؛ لذا يجبُ وَقْفُ دَعْمِ الحَرَكاتِ الإرهابيَّةِ بالمالِ أو بالسلاحِ أو التخطيطِ أو التبريرِ، أو بتوفيرِ الغِطاءِ الإعلاميِّ لها، واعتبارُ ذلك من الجَرائِمِ الدوليَّةِ التي تُهدِّدُ الأَمْنَ والسِّلْمَ العالميِّين، ويجب إدانةُ ذلك التَّطرُّفِ بكُلِّ أشكالِه وصُوَرِه.

- أنَّ مفهومَ المواطنةِ يقومُ على المُساواةِ في الواجباتِ والحُقوقِ التي يَنعَمُ في ظِلالِها الجميعُ بالعدلِ؛ لذا يَجِبُ العملُ على ترسيخِ مفهومِ المواطنةِ الكاملةِ في مُجتَمَعاتِنا، والتخلِّي عن الاستخدام الإقصائيِّ لمصطلح «الأقليَّاتِ» الذي يَحمِلُ في طيَّاتِه الإحساسَ بالعُزْلَةِ والدُّونيَّة، ويُمهِّدُ لِبُذُورِ الفِتَنِ والشِّقاقِ، ويُصادِرُ على استحقاقاتِ وحُقُوقِ بعض المُواطِنين الدِّينيَّةِ والمَدَنيَّةِ، ويُؤدِّي إلى مُمارسةِ التميزِ ضِدَّهُم.

- أنَّ العلاقةَ بينَ الشَّرْقِ والغَرْبِ هي ضَرُورةٌ قُصوَى لكِلَيْهما، لا يُمكِنُ الاستعاضةُ عنها أو تَجاهُلُها، ليَغتَنِيَ كلاهما من الحَضارةِ الأُخرى عَبْرَ التَّبادُلِ وحوارِ الثقافاتِ؛ فبإمكانِ الغَرْبِ أن يَجِدَ في حَضارةِ الشرقِ ما يُعالِجُ به بعضَ أمراضِه الرُّوحيَّةِ والدِّينيَّةِ التي نتَجَتْ عن طُغيانِ الجانبِ الماديِّ، كما بإمكانِ الشرق أن يَجِدَ في حضارةِ الغربِ كثيرًا ممَّا يُساعِدُ على انتِشالِه من حالاتِ الضعفِ والفُرقةِ والصِّراعِ والتَّراجُعِ العلميِّ والتقنيِّ والثقافيِّ. ومن المهمِّ التأكيدُ على ضَرُورةِ الانتباهِ للفَوَارقِ الدِّينيّةِ والثقافيّةِ والتاريخيّةِ التي تَدخُلُ عُنْصرًا أساسيًّا في تكوينِ شخصيَّةِ الإنسانِ الشرقيِّ، وثقافتِه وحضارتِه، والتأكيدُ على أهميَّةِ العمَلِ على تَرسِيخِ الحقوقِ الإنسانيّةِ العامّةِ المُشترَكةِ، بما يُسهِمُ في ضَمانِ حياةٍ كريمةٍ لجميعِ البَشَرِ في الشَّرْقِ والغَرْبِ بعيدًا عن سياسةِ الكَيْلِ بمِكيالَيْنِ.

- أنَّ الاعترافَ بحَقِّ المرأةِ في التعليمِ والعملِ ومُمارَسةِ حُقُوقِها السياسيَّةِ هو ضَرُورةٌ مُلِحَّةٌ، وكذلك وجوبُ العملِ على تحريرِها من الضُّغُوطِ التاريخيَّةِ والاجتماعيَّةِ المُنافِيةِ لثَوابِتِ عَقيدتِها وكَرامتِها، ويَجِبُ حِمايتُها أيضًا من

الاستغلالِ الجنسيِّ ومن مُعامَلتِها كسِلعةٍ أو كأداةٍ للتمتُّعِ والتربُّحِ؛ لذا يجبُ وقفُ كل المُمارَساتِ اللاإنسانية والعادات المُبتذِلة لكَرامةِ المرأةِ، والعمَلُ على تعديلِ التشريعاتِ التي تَحُولُ دُونَ حُصُولِ النساءِ على كامِلِ حُقوقِهِنَّ.

- أنَّ حُقوقَ الأطفالِ الأساسيَّةَ في التنشئةِ الأسريَّةِ، والتغذيةِ والتعليمِ والرعايةِ، واجبٌ على الأسرةِ والمجتمعِ، وينبغي أن تُوفَّرَ وأن يُدافَعَ عنها، وألَّا يُحرَمَ منها أيُّ طفلٍ في أيِّ مكانٍ، وأن تُدانَ أيَّةُ مُمارسةٍ تَنالُ من كرامتِهم أو تُخِلُّ بحُقُوقِهم، وكذلك ضرورةُ الانتباهِ إلى ما يَتعرَّضُون له من مَخاطِرَ - خاصَّةً في البيئةِ الرقميَّة - وتجريمِ المُتاجرةِ بطفولتهم البريئةِ، أو انتهاكها بأيِّ صُورةٍ من الصُّوَرِ.
- أنَّ حمايةَ حُقوقِ المُسنِّين والضُّعفاءِ وذَوِي الاحتياجاتِ الخاصَّةِ والمُستَضعَفِينَ ضرورةٌ دِينيَّةٌ ومُجتمعيَّةٌ يَجِبُ العمَلُ على تَوفيرِها وحِمايتِها بتشريعاتٍ حازمةٍ وبتطبيقِ المواثيقِ الدوليَّة الخاصَّةِ بهم.

وفي سبيلِ ذلك، ومن خلالِ التعاون المُشترَكِ بين الكنيسةِ الكاثوليكيَّةِ والأزهرِ الشريفِ، نُعلِنُ ونَتَعهَّدُ أنَّنا سنعملُ على إيصالِ هذه الوثيقةِ إلى صُنَّاعِ القرارِ العالميِّ، والقياداتِ المؤثِّرةِ ورجالِ الدِّين في العالمِ، والمُنظَّماتِ الإقليميَّةِ والدوليَّةِ المَعنِيَّةِ، ومُنظَّماتِ المُجتَمَعِ المدنيِّ، والمؤسساتِ الدينيَّة وقادَةِ الفِكْرِ والرَّأيِ، وأن نَسْعَى لنشرِ ما جاءَ بها من مَبادِئَ على كافَّةِ المُستوياتِ الإقليميَّةِ والدوليَّةِ، وأن نَدعُوَ إلى تَرجمتِها إلى سِياساتٍ وقَراراتٍ ونُصوصٍ تشريعيَّةٍ، ومَناهجَ تعليميَّةٍ ومَوادَّ إعلاميَّةٍ.

كما نُطالِبُ بأن تُصبحَ هذه الوثيقةُ مَوضِعَ بحثٍ وتأمُّلٍ في جميعِ المَدارسِ والجامعاتِ والمَعاهدِ التعليميَّةِ والتربويَّةِ؛ لتُساعِدَ على خَلْقِ أجيالٍ جديدةٍ تحملُ الخَيْرَ والسَّلامَ، وتُدافِعُ عن حقِّ المَقهُورِين والمَظلُومِين والبُؤَساءِ في كُلِّ مكانٍ.

ختامًا:

لتكن هذه الوثيقةُ دعوةً للمُصالَحَة والتَّآخِي بين جميعِ المُؤمِنين بالأديانِ، بل بين المُؤمِنين وغيرِ المُؤمِنين، وكلِّ الأشخاصِ ذَوِي الإرادةِ الصالحةِ؛ لتَكُنْ وثيقتُنا نِداءً لكلِّ ضَمِيرٍ حيٍّ يَنبذُ العُنْفَ البَغِيض والتطرُّفَ الأعمى، ولِكُلِّ مُحِبٍّ لمَبادئِ التسامُحِ والإخاءِ التي تدعو لها الأديانُ وتُشجِّعُ عليها؛ لتكن وثيقتُنا شِهادةً لعَظَمةِ الإيمانِ باللهِ الذي يُوحِّدُ القُلوبَ المُتفرِّقةَ ويَسمُو بالإنسانِ؛ لتكن رمزًا للعِناقِ بين الشَّرْقِ والغَرْبِ، والشمالِ والجنوبِ، وبين كُلِّ مَن يُؤمِنُ بأنَّ الله خَلَقَنا لنَتعارَفَ ونَتعاوَنَ ونَتَعايَشَ كإخوةٍ مُتَحابِّين. هذا ما نَأمُلُه ونسعى إلى تحقيقِه؛ بُغيةَ الوُصولِ إلى سلامٍ عالميٍّ يَنعمُ به الجميعُ في هذه الحياةِ.

الإثنين، ٤ فبراير، ٢٠١٩

شيخ الأزهر الشريف	قداسة البابا
أحمد الطيب	فرانسيس

LAMPIRAN VI

BAHTSUL MASAIL DAN ISTINBATH HUKUM NU: SEBUAH CATATAN PENDEK

Oleh: Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى أله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai *jam'iyyah* sekaligus gerkana *diniyyah islamiyyah* dan *ijtima'iyyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlusunnah wal jama'ah sebagai basis teologi (dasar berakidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfiqih. Dengan mengikuti mazhab fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksebilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hajah*) meskipun kenyataan keseharian para ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hamir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu—untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional—berpaling ke mazhab lain.

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih, NU sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk "bermazhab". Sikap ini secara konsekwen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari refrensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumha dikerangkakan secara sistematik dalam beberapa komponen: "*'ibadah*, *mu'amalah*, *munakahat* (hukum keluarga) dan *jinayah*/*qadla* (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum *bahtsul masail* mengarahkan oreintasinya dalam pengambulan

hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muthlaq* maupun yang *muntasib*. Bila kebetulan ditemukan *qaul manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak diketemukan, maka akan berali ke *qaul mukharraj* (pendapat hasil *takhrij*). Bila terjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pen-*tarjih*-han ahli *tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam *khilaf* akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajiyyah tahsiniyyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyyah* (kebutuhan primer).

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan *bahtsul masail* yang dikoridinasikan oleh syuriyah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengab *masail fiqhiyyah* (masalah fiqih) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasa diikuti oleh syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada syuriyah oleh organisasi ataupun peroranngan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh Syuriyah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Rating ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar.

Dari segi historis dan operasionalitas, *bahtsul masail* NU merupaka forum yang sangat dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembagan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam *bahtsul masail* tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam *kh-*

ilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena "sepakat dalam *khilaf*" ini adalah mengenai status hukum bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram dan syubhat. Ini terjadi sampai Muktamar 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram dan syubhat. Ini sebenarnya langkah antispatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya bisa mengindar dari persoalan bank.

Secara historis forum *bahtsul masail* telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima` Nahdlatul Oelama). Dalam LINO selain memuat hasil *bahtsul masail* juga menjadi ajang diskusi ineteraktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kian lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti *tukaran* (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh memperbolehkan khotbah diterjemahkan sementara Kiai Murtadlo tidak. Sampai sekaang khotbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan.

Sering muncul kritik bahwa *bahtsul masail* NU tidak dinamis, hanya berorientasi pada *qaul* (pernyata verbal) ulam bukan *manhaj* (metodologi) dan Syafi'iyyah sentris. Kritik tersebut sesungguhnya tidak seluruhnya benar. Misalnya dulu forum *bahtsul masail* mengharamkan orang Islam memakai jas dan dasi karena dianggap "*tasyabbuh*" (menyerupai) dengan orang kafir. Tetapi KH. Wahab Hasbullah sendiri setelah merdeka selalu memakai sarung dan dasi. Ini tidak ada dalilnya (*qaul*-nya). Ini berdasarkan *manhaj*. Tidak ada kitab-kitab fiqih yang secara tekstual menulis: *haruma ad-dasi wa al-jas liannahu*..." (diharamkan dasi dan jas karena...). Contoh lain, misalnya para kiai

NU dalam memberikan fatwa hukum sering memakai kaidah-kaidah fiqih atau ushul fiqih. Hanya saja masalahnya para kiai NU meskipun sudah memberi fatwa hukum berdasarkan kaidah fiqih mereka tidak mau kalau tidak ada landasan teks/nash-nya. Jadi kelihatan tekstual tetapi sebetulnya penuangan teks itu setelah melalui proses berfikir *manhaji* yang panjang dan *njilemet*.

Penuangan dasar teks ini, kemudian menimbulkan adanya kesan bahwa kiai NU hanya bermazhab "*fi al-aqwal*" (dalam pendapat hukum) dan tidak "*fi al-manhaj*" (dalam metodelogi). Tetapi sebenarnya para ulama NU juga memegangi dan mempelajari *manhaj* Imam Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti *Waraqat, Hujjat al-Wushul, Jam'u al-Jawami', al-Mustashfa, al-Asybah wan an-Nazhair, Qawaid Ibn Abd al-Salam* dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren. Dalam hal ini metodelogi itu digunakan untuk memperkua pemahaman atas *masail furu'iyyah* (masalah yang tidak prinsip) yang ada pada kitab0kitab fiqih disamping sering juga diterapkan untuk. mengambil langkah *tanzhir al-masail bi nazhairiha* (menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama yang telah ada) tidak untuk *istinbath al-ahkam min mashadiriha al-ashliyyah* (penggalian hukum dari sumber pokoknya). Ini saya kira suautu kekurangan tersendiri.

Bagaimanapun rumusan fiqih yang dikonstruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial politik dan kebudayaan sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqih? Apakah harus *mauquf* (tidak terjawab)? Padahal me-*mauquf*-kan persoalan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama (fuqaha`). Di sinila perlunya "fiqih baru" yang mengakomodir permasalahan-permasalahn baru yang muncul di masyarakat. Dan untuk itu kita harus kembali ke *manhaj* yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan ushul

fiqih serta *qawaid* (kaidah-kaidah fiqih).

Pemikiran tetang perlunya "fiqih baru" ini sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira sejak 1980-an ketika mulai muncul dan marak diskusi tentang "*tajdid*" karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih klasik dalam menjawab persoalan kontemporer di samping adayan ide kontekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan *halaqah* (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriyah dan pengsuh pondok pesantren untuk merumuskan "fiqih baru" itu. Kesepakatan telah dicapai yaitu menambah dan memperluas muatan agenda *bahtsul masail*, yang tidak saja meliputi masalah hukum halal/haram melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan keislamanan dan kajian kitab.

Dalam halaqah ini juga disepakati perlunya melengkapi refrensi *mazahib* selain Syafi'i dan perlunya penyusunan sistematika bahasan yang mencakup pengembangan metode-metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan suatu masalah. Rumusan "fiqih baru" ini kemudian dibahas secara intensif pada muktamar ke-28 di Krapyak, Yogyakarta yang kemudian dikukuhan dalam Munas Alim Ulama di Lampung, 1992. Di dalam hasil Munas tersebut di antaranya disebutkan perlunya bermazhab secara *manhaji* (metodologis) serta merekomendasikan para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk ber-*istinbath* langsung pada teks dasar. Jika tidak mampu maka dilakukan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Bentuknya bisa *istibath* (menggali dari teks asal/dasar) maupun "*ilhaq*" (qiyas).

Pengertian *istinbath al-ahkam* di lingkungan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya,yaitu al-Qur`an dan Sunnah akan tetapi—sesuai dengan sikap dasar bermazhab—men-*tathbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha` dalam konteks permasalahn yang dicari hukumnya. Sedang *istinbath* dalam pengertian pertama (menggali secara langsung dari al-Qur`an dan Hadits) cenderung ke arah prilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sulit kerena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Teru-

tama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh namanya mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertian yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqih sesuai dengan terminologiny yang baku. Oleh karena itu, kalimat *istinbath* dikalangan NU terutama dalam kerja *bahts al-masail*-nya Syuriayh tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasi yang pertama yaitu ijtihad, satu hal yang ulama Syuriyah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalaim *bahts al-masail* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui refrensi (*maraji'*) yaitu *kutub al-fuqaha`* (kitab-kitab karya para ahli fiqih).

Kenyataan mengenai terlalu dominannya mazhab Syafi'i memang ada. Pendapat ulama Syafi'iyyah masih cukup dominan dalam *bahts al-masail* NU. Namun demikian perlu saya jelaskan bahwa dominasi Syafi'i bukan berarti ulama NU menolak pendapat (*aqwal*) ulama di luar Syafi'iyyah. Hal ini dilakukan lantaran para kiai NU memang tidak mempunyai refrensi lain di luar mazhab Syafi'i semisal kitab al-Mudawwanah (Imam Malik), *Kanz al-Wushul* (Bazdawi al-Hanafi), *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ibn Hazm), *Raudlat al-Nazhir fi Jannat al-Munazhir* (Ibnu Qudamah al-Hanbali) dan lain-lain. Karena itu jangan heran jika keputsuan *bahstul masail* selalu sarat dengan kitab-kitab fiqih Syafi'i mulai dari yang paling kecil semisal *Safinat al-Shalah* Karya Imam Nawawi Banten sampai dengan yang paling besar seperti *al-Umm* dan *al-Majmu'*. Sangat sulit dijumpai dalam kepustakaan mereka kitab-kitab lain di luar Syafi'i kecuali sebagian kecil ulama. Ini disamping harganya belum terjangkau juga lantaran kitab-kitab tersebut masih sulit diperoleh di Indonesia. Seandainya mereka mempunya refrensi lain selain mazhab Syafi'i tentu merea akan menerima sepanjang bisa dinalar dan tidak bertentanan dengan akar kultural setempat. Hal ini terbukti dengan kebutusan *bahtsul masail* NU belakangan ini yang diwarnai dengan pendapat di luar mazhab Syafi'i.

Walaupun terlihat kuat pengaruh mazhab Syafi'i bukan berarti me-

nolak apalagi antipati dengan ulama lain. Sejak dulu para ulama tidak mengharuskan Syafi'i saja. Satu misal, masyarakat di banyak daerah menggunakan *qaul* di luar Syafi'i mengenai padi yang belum dizakati tetapi si penuai padi sudah diberi upah. Padahal memberi upah kepada penuai padi (istilah jawa derep) sementara padi dizakati menurut Syafi'i tidak boleh. Akan tetapi sejak dulu, sejak saya masih kecil, upah selalu diberikan sebelum padi dizakati. Pendapat ini diambil dari Imam Ahmad. Semua kiai memakai itu karena mereka umumnya petani. Hanya saja *intiqal* (pindah) ke mazhab-mazhab itu masih menggunakan refrensi kitab Syafi'iyyah yang menyinggung mazhab lain dan mereka tidak pernah mengambil refrensi langsung dari mazhabnya. Baru sekarang ada perkembangan sejumlah kian sudah mengoleksi kitab-kitab non-Syafi'iyyah. Jadi persoalan ini jangan lantas dijadikan dasar kritik. Memang mereka tidak memiliki kitab lain. Misalnya, Kiai Bisri Syansuri pada saat memperbolehkan KB berpegang pada pendapat al-Ghazali yang menyatakan kebolehan KB, meskipun dengan motivasi supaya istri awet muda. Pendapat ini sangat luar biasa sebab dulu kiai-kiai lain masih ketat soal ber-KB ini. Secara budaya NU sudah bisa mempraktikkan pendapat di luar Syafi'i.

Memang harus diakui keputusan Lampung belum operasional di seluruh wilayah NU karena di samping sosialisasinya masih lemahh juga keterbatasan refrensi yang tersedia. Meskipun begitu sudah ada perkembangan misalnya soal *intiqal* atau pindah mazhab. Dulu takut *talfiq* sekarang sudah tidak ada lagi.

Saya masih ingat perkataan Kiai Wahab, meskipun kelakar tetapi sangat menarik. Suatu saat (ketika saya masih di pesantren) saya *sowan* ke Kiai Bisyri Syansuri di Jombang yang kebetulan di sana sedang ada pertemuan Rais Syuriyah PBNU. Di sana ada Kiai Wahab, Kiai Jalil Kudus, Kiai Dahlan dan lain-lain sedang membahas sisa-sisa *bahtsul masail* yang belum dibahas di Muktamar.

Pada waktu itu Kiai Bisri *petentengan* (berdebat sengit) membahas soal Yayasan Yamualim di Semarang yang mengurusi ibadah Haji. Kiai Bisri menenang pendirian Yayasan itu karena tergolng "muamalat

yang tidak jelas". Sementara Kiai Wahab memperbolehkan karena di samping omsetnya cukup besar, NU juga sangat memerlukannya. Saat itu Kiai Wahab sempat bilang "*Pekih iku nek rupek yo diokeh-okeh*" (fiqih kalau sempit ya diupayakan longgar). Pernyataan ini memang kelakar tetapi mengandung nilai filosofis yang tinggi. Maksudnya, fiqih itu merupakan produk *ijtihadi*. Karena produk ijihad naja keputusan fiqih buka merupakan barang sakral, yang tidak boleh dibah meskipun situasi sosial budayanya sudah melaju kencang.

Pemahaman yang mensakralkan fiqih jelas keliru. Di mana-mana yang namanya fiqih adalah "*al-'ilmu bi al-ahkam al-syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah*". Definisi fiqih sebagai *al-muktasab* (suatu yang digali) menunjukkan pada sebuah pemahaman bahwa fiqih lahir melalui serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum sampai pada akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Produk fiqih tidak hanya hasil dari produk penalaran intelektual (rasionalitas) berdasarkan logika-logika keilmuan tertentu teapi juga kerja ilmiah. Contohnya adalah penggunaan metode riset (*istiqra`*) yang dilakukan Imam Syafi'i untuk melahirkan hukum fiqih tentang menstruasi (haid). Para ulama klasik juga sering melibatkan disiplin ilmu lain di luar fiqih untuk menentukan suatu hukum masalah tertentu. Misalnya ilmu falak (*hisab*) dan *ikhtilaf al-mathla'* dalam hal penentuan awal Ramadlan dan Syawwal, *ma'rifat al-qiblah* dan *ma'rifat al-waqti* dalam hal shalat dan penemumuan obat-obatan dalam kontrasepsi (*man' al-haml*, *ibtha` al-haml*) dalam masalah nikah. Semua menunjukkan bahwa fiqih adalah merupakan "produk *ijtihadi*"

Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya fiqih ters berkembang lantaran pertimbangan--pertimbangan sosial-politik dan sosial budaya serta pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami perubahan. Para peletak dasar fiqih, yakni imam mazhab (*mujtahidin*) dalam melakukan formasi hukum Islam meskipun digali langsung dari teks asal (al-Qur`an dan Hadits) namun selalu tidak lepas dari pertimbangan "konteks lingkungan" keduanya

baik asbab al-nuzul maupun asbab al-wurud. Namun konteks lingkungan ini kurang berkembang di kalangan NU. Ia hanya dipandangn sebagai pelengkap (komplemen) yang memperkuat pemahaman karena yang menjadi pembahasannya adalah norma-norma baku yang telah dikodifikasi dalam kitab-kitab, *furu' al-fiqih*. Fungsi *syarah, hasyiyah* dan *ta'liqat* juga dipandang sebagai "figuran" yang hanya berfungsi memperjelas pemahaman teks.

Meskipun di dalam kitab *syarah*, *hasyiyah* dan *ta'liqat* sering ditemukan adanya kritik, penolakkan (*radd*), counter, perlawabab (*i'tiradh*) atas teks-teks matan yang dipelajari dan dibahas, nmunkurang mendapar kejian serius di lingkungan NU.

Karena sadar bahwa fiqih merupakan produk ijtihad, maka paea fuqaha` terdahulu baik *al-`aimmah al-arba'ah* maupun yang lain meskipun berbeda pandangan secara tajam, mereka tetap menghormati pendapat lain, tidak memutlakkan pendapatnya dan menganggap ijtihad fuqaha` lain sebagai keliru. Mereka tetap berpegang pada kaidah "*al-ijthad la yunqadhu bi al-ijtihad",* yakni bahwa suatu ijtihad tidak bisa dibalkan oleh ijtihad lain. Masing-masing mempunya kelebihan dan kelemahan. Hasil ijtihad sesorang fuqaha` mungkin memang tidak pas pada ruang dan waktu tertentu tetapi sesuai untuk ruang dan waktu yang berbeda. Di sinilah fiqih menunjukkan wataknya yang fleksibel, dinamis, realistis dan temporal, tidak kaku dan tidak permanen.

Dalam konteks ini pula maka kriteria *mu'tabar* yang sudah direduksi menjadi hanya melulu kibat-kitab mazhab empat sebetulnya tidak senafas dengan semangat fiqih sebagai produk ijtihad. Mengapa Demikian? Sebab kriteria *mu'tabar* berarti disitu ada pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam lain. Ini sudah menyalahi kaidah "*al-ijtihad la yunqadhu bi al-ijtihad"* diatas. Masalah *kutub al-mu'tabarah* ini dirumuskan di Muktamar Situbondo (tahun 1984). Saat itu saya sebagai ketua komisi dan masih sebagai Rais Syuriah PW.NU Jateng. *Kutub al-mu'tabarah* itu maksudnya kitab-kitab Ahlussunah dan dipersempit lagi kitab-kitab *madzhahib.* Kitab- kitab diluar *ahl madzahib* tidak boleh dipakai. Contohnya

kitab-kitab yang mengkritik *tawasul,* praktik *tawasul,* praktik tarekat, kewalian dan lain-lain seperti karya ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim.

Saat itu saya sudah menentang pendapat ini. Waktu itu saya menggunakan kaidah atau pepatah Arab: "Ambillah yang jernih dan tinggalkan yang keruh (*khudz ma shafa wa da' ma kadara*). Para kiai pada waktu itu tidak setuju dengan pendapat saya dan mereka mengambil sikap *syaddan li al-dzariah* (preventif). Dengan alasan supaya umat tidak terjerumus maka kitab-kitab tersebut dilarang saja. Karena saya kalah suara, saya tidak bisa berbuat lebih. Padahal yang namanya pendapat tentu bisa salah bisa benar karena itu jangan menggunakan pendekatan *like&dislike,* ini *mu'tabar,itu tidak*. Alasan saya disamping untuk menghindari fanatisme bermazhab, juga kitab-kitab yang ditolak itu tidak semuanya bertentangan dengan sunni. Hanya mungkin pada bagian tertentu saja yang kebetulan berbeda. Hanya gara-gara dalam bab "*tawasul"* kitab ini mengecamnya, mengkritik para wali, lintas semua kitab tulisan mereka tidak boleh dipakai. Prinsipnya mana yang "reasonable" dan "applicable" bisa digunakan. Tentu tetap harus mempertimbangkan latar budaya masyarakat agar kita bisa diterima oleh semua komunitas yang majemuk ini.

Lebih jauh harus ditegaskan bahwa Muara fiqih adalah terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Dunia, kekuasaan, Negara, bisa berdiri tegak dengan keadilan meskipun *ma' al-kufri* dan Negara itu akan hancur dengan kezaliman meskipun *ma'a al-muslimin."* Ibnu Taimiyah juga pernah Berkata: "Allah akan menegakkan Negara yang adil meskipun (negara) kafir dan Allah akan menghancurkan negara yang zalim meskipun (Negara) muslim. "Dalam kerangka berfikir ini, maka seandainya ada produk fiqih yang tidak bermuara pada terciptanya sebuah keadilan di masyarakat maka harus ditinggalkan. Misalnya "fiqih politik" (*fiqih siyasah)* yang sering sekali diktum-diktumnya tidak sejalan dengan gagasan demokrasi yang mensyaratkan keadilan dan persamaan hak manusia di depan hukum. Rumusan *figh siyasah* klasik biasanya menempatkan kelompok non-Muslim sebagai "kelas dua" bukan sebagai entitas yang sed-

erajat dengan kaum muslimin. Saya rasa pandangan demikian harus mulai diubah. Sebab pandangan ini selain bertabrakan dengan gagasan demokrasi modern juga bertentangan dengan ide Negara bangsa (*nation-state)* seperti Indonesia Profesionalisme, kemampuan dan kapabilitas mestinya yang menjadi pilihan utama, bukan Muslim atau tidak, bukan laki-laki atau perempuan.

Ada satu contoh kecil, suatu hari saya menitipkan barang kepada seseorang yang dapat dipercaya dan kebetulan ia bukan muslim. Pertanyaanya apakah boleh menitipkan barang kepada dia? Kan lucu kalau tidak boleh. Tentu tidak semua persoalan melibatkan non-muslim dengan dalil demokrasi. Kalau mengenai urusan-urasan yang berkaitan dengan permasalahan umat seperti penyusunan UU zakat tentu mereka tidak boleh dilibatkan, sebab bukan kompetensinya. Jadi, prinsipnya pada kata keadilan (kemaslahatan). Maka kalau ada fiqih-fiqih klasik yang tidak relevan atau tidak bermuara pada keadilan maka harus dibuat fiqih baru. Harus diingat bahwa yang namanya fiqih itu mesti ijtihady. Fiqih siyasah itu itu sendiri bukan sebatas kekuasaan tapi lebih pada kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan kemaslahatan umum. Rasul sendiri pernah berkata: "*Antum a'lamu bi umuri dunyakum."*Artinya: pada wilayah "non ibadah" semisal kepolitikan, umat islam diberi kebebasan penuh untuk merumuskan dasar-dasar politik yang adil dan egaliter sehingga bisa diterima semua pihak. Rumusan itu harus mengacu pada prinsip *maqashid al-syari'ah* yang meliputi lima hal, yaitu (1) melindungi agama (*hifzh al-din*), (2) melindungi jiwa dan kemaslahatan fisik (*hifzh al-nafs),* melindungi kelangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), (4) melindungi akal pikiran (*hifzh al-aql*), dan (5) melindungi harta benda (*hifzh al- mal*). Rumusan lima *maqashid* ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam penyembahan Tuhan dalam arti yang terbatas pada serangkaian perintah dan larangan yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Dalam kerangka pandang ini, maka aspek kehidupan apapun yang melengkupi kehidupan manusia (kecuali yang bersifat ubudiyah murni) harus disikapi dengan meletakan kemasla-

hatan sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan hanya menjaga stabilitas kemaslahatan inilah tugas-tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikianlah catatan pengantar dari saya, selanjutnya kedepan para ahli *bahtsul masail* harus mengantisipasi kemajuan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Artinya bahwa kebutuhan manusia dan proses perubahan itu akan terus bergulir secara cepat. Kalau tidak cepat direspon kita akan ketinggalan dan nanti akan ada satu masalah yang *mauquf* maka hukumnya dosa bagi para ahli fiqih. Dalam merumuskan masalah hukum harus tetap berpegang pada prinsip *maqashid al-syari'ah* serta memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang lebih bersifat nilai (baca: legal value). Nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan seagama serta menjunjung tinggi supermasi hukum Allah. Dengan begitu keputusan *bahtsul masail* tidak kehilangan relevansi dengan semangat demokrasi dan pluralism.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1432 H
28 Maret 2011 M

DR. KH. MA. Sahal Mahfudh

LAMPIRAN VII

PANDANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NU TERHADAP KEHIDUPAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN[21]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ بِصِدْقِ نِيَّةٍ كَفَاهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ شَرِيْعَتِهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَمَنِ اسْتَنْصَرَهُ عَلَى أَعْدَائِهِ وَحَسَدَتِهِ نَصَرَهُ وَتَوَلاَّهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ حَافَظَ دِيْنَهُ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (أَمَّا بَعْدُ) فَقَالَ تَعَالَى فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِيْ الأَرْضِ

I. MUKADDIMAH

1. Negara Republik Indonesia terbentuk melalui proses pertumbuhan dan perjuangan panjang putra-putra bangsa yang penuh pengorbanan. Di dalam proses yang panjang itu, para ulama dan *zu'ama* sebagai bagian dari bangsa ini telah ikut meletakkan dasar-dasar kehidupan kebangsaan Indonesia yang bersatu, terjalin dalam pengelompokan yang berdasar kesukuan dan kedaerahan. Di masa perjuangan melawan penjajahan, Islam telah mendorong sikap dan wawasan keindonesiaan dan terus mengembangkannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu atas berkat rahmat Allah Swt.
2. Dalam proses yang panjang itu, Islam dan umat Islam di kawasan nusantara ini, telah memberikan peran aktifnya berupa amal-amal nyata, membentuk manusia yang beriman, berakhlak karimah, cerdas dan terampil, membangun kehidupan keluarga dan masyarakat

---

21 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

secara baik. Lebih dari itu bahkan melawan dan menolak penjajah, kemudian mempersatukan manusia dan komunitas dalam suatu keluarga besar menjadi satu bangsa, dan pada akhirnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara hingga kemudian mempertahankan serta mengisi kemerdekaan itu.

3. Peranan aktif tersebut disumbangkan oleh Islam dan umat Islam di Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang didasari semangat:

    a. Mengemban tugas "kekhalifahan" –sebagaimana firman Allah:

    وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

    Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." **(QS. al-Baqarah: 30)**

    b. Menegakkan *'adalah*, sebagaimana firman Allah:

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

    Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." **(QS. al-Nisa': 135)**

    c. Memakmurkan bumi Allah, sebagaimana firman Allah:

    هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

    Artinya: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya." **(QS. Hud: 61)**

d. Melaksanakan kewajiban “dakwah” dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana firman Allah:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. **(QS. al-Nahl: 125)**

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” **(QS. Ali Imran: 110)**

Dengan demikian, negara Indonesia bagi umat Islam Indonesia wajib dipelihara dan dikembangkan. Indonesia adalah bangunan yang kita ikut membentuknya sejak awal.

4. Nahdlatul Ulama telah menegaskan hubungan antar agama dan negara dan memposisikan tanggung jawab sebagai umat beragama (Islam) dengan tanggung jawab sebagai warga negara (Indonesia) secara jelas dan proporsional. Konsep kembali ke khittah 1926, dan pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pancasila serta faham tri *ukhuwah* secara terpadu: **Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah** dan **Ukhuwah Basyariyah** merupakan pedoman dasar yang dirasakan sangat gayut atau relevan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga Nahdlatul Ulama.

II. UNIVERSALITAS ISLAM SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. Nahdlatul Ulama meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat universal dan merupakan amanat Allah yang dapat dilaksanakan bagi seluruh kehidupan manusia di wilayah manapun di muka bumi.
2. Universalitas Islam merupakan "kekuatan bagi umat Islam" untuk membangun manusia dan masyarakat di mana saja di muka bumi ini, dalam corak perbedaan kondisi dan budaya masing-masing bangsa. Universalitas Islam mungkin saja memunculkan "penampilan yang berbeda" dalam pelaksanaan atau penerapan ajaran Islam sejalan dengan keberadaan dan adanya perbedaan adat dan *ahwal ijtima'iyyah*.
3. Kerangka pemikiran tersebut membuka sikap lapang dada dan toleransi dalam menyikapi berbagai kenyataan sosial bangsa Indonesia, yang berupa norma-norma kemasyarakatan, adat istiadat, kesadaran hukum dan sikap khas kemajemukan bangsa Indonesia merupakan perwujudan dan nilai itu sejalan dengan ikhtiar mengisi muatan Islam terhadap berbagai hal di atas. Pengemasan budaya lokal dengan muatan ajaran Islam dan pembudayaan dan pentradisian ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sungguh menjadi sangat strategis dan besar andilnya dalam membangun dan membimbing masyarakat Indonesia.
4. Untuk itu, upaya menumbuhkembangkan pemahaman yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan memelihara tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan langkah dan sekaligus sarana yang strategis dalam mempertemukan keyakinan keagamaan dan wawasan kebangsaan.

III. KETERLIBATAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMBENTUKAN KEBANGSAAN INDONESIA

1. Keterlibatan Nahdlatul Ulama, sejak masih menjadi "kekuatan kultural" yaitu ketika berbentuk kelompok orang yang memiliki kesamaan pemahaman dan tradisi keagamaan -sampai dengan menjadi "kekuatan struktural"- yaitu setelah berbentuk organisasi dengan segala kegiatan resminya- merupakan petunjuk yang sangat nyata dari komitmennya terhadap kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Keterlibatan yang tercermin dari wujud komitmen tersebut dapat kita lihat dalam berbagai rangkaian kegiatan:
   a. Dalam ikut membentuk dan mengangkat harkat dan martabat manusia di kawasan nusantara ini, dan mendorongnya untuk senantiasa mengupayakan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, kehidupan yang manfaat dan maslahat di dunia dan akhirat.
   b. Berperan aktif mempersiapkan kemerdekaan dan meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
   c. Ikut serta melawan dan menolak penjajahan, dengan menetapkan "Resolusi Jihad", yang kemudian melahirkan perlawanan rakyat secara frontal, dalam pertempuran "antara hidup dan mati" pada 10 November 1945.
   d. Menegaskan kedudukan Pemerintah Republik Indonesia (dengan semua perangkatnya) dari segi syar'i, Nahdlatul Ulama mendukung serta mempertegas Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 sebagai:

   وَلِيُّ ٱلْأَمْرِ الضَّرُوْرِيُّ بِالشَّوْكَةِ

   Artinya*: Pemegang kekuasaan yang darurat dengan sebab mempunyai kekuatan.*[22]

---

22 Pemberian gelar وَلِيُّ ٱلْأَمْرِ الضَّرُوْرِيُّ بِالشَّوْكَةِ pada Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia berdasarkan keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas 1954, bukan hasil keputusan Muktamar NU. NU hanya menguatkan keputusan Konferensi Alim Ulama yang juga dihadiri oleh para ulama lintas golongan, lihat masalah Nomor: 277.

Hal ini dilandasi kesadaran dan tanggung jawab NU terhadap adanya "pemegang kekuasaan (pemerintahan)" bagi kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

e. Ikut serta mengisi dan membangun masyarakat di wilayah Indonesia melalui kiprahnya dalam berbagai bidang kehidupan; keagamaan, politik kenegaraan, sosial-kemasyarakatan, pendidikan dan *amr ma'ruf nahi munkar* yang merupakan perwujudan dari sikap kritis dan tanggungjawabnya sebagai warga bangsa terhadap perjalanan hidup negerinya.
f. Rangkaian ikhtiar yang terus menerus untuk menghasilkan titik keseimbangan antara dua tuntutan, yakni tuntutan menjaga universalitas Islam dan tuntunan setempat dan sesaat yang lebih bersifat partikularistik, yang antara lain berupa kewajiban untuk senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia.

IV. WAWASAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA

1. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara -di mana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan merupakan "realitas kehidupan" yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah dan melaksanakan amanat-Nya sejalan dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah itu.
2. Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut "kehidupan bersama" seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di

akhirat.

3. Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian maka pemerintah (*umara'*) dan ulama -sebagai pengemban amanat kekhilafahan- serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut.

4. *Umara'* dan ulama *dalam* konteks di atas, merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanatNya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan *ulil amri* yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. **(QS. al-Nisa': 59)**

Ayat ini memberikan pedoman dasar kepada kita mengenai beberapa prinsip dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sebagai berikut:

Pertama, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan ketaatan yang mutlak.

Kedua, bahwa ketaatan kepada *ulil amri* merupakan ketaatan yang bersifat tidak mutlak dan tergantung apakah perintah dan kebijaksanaannya sejalan dengan perintah Allah dan RasulNya.

Ketiga, bahwa *ulil amri* haruslah terdiri atas orang-orang yang mengemban amanat Allah.

Keempat, bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan kontrol dan memberikan koreksi terhadap *ulil amri* dengan menggunakan cara-cara yang baik, sebagaimana pernyataan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq Ra. dalam khutbah pelantikannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِيْ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِيْ اَلصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكِذْبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيْفُ فِيْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ لَهُ حَقَّهُ وَالْقَوِيُّ ضَعِيْفٌ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لاَ يَدَعُ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجِهَادَ فَإِنَّهُ لاَ يَدَعُهُ قَوْمٌ إِلاَّ ضَرَبَهُمُ اللهُ بِالذُّلِّ أَطِيْعُوْنِيْ مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِيْ عَلَيْكُمْ قُوْمُوْا إِلَى صَلاَتِكُمْ رَحِمَكُمُ اللهِ

"Wahai saudara-saudara. Saya telah dipilih menjadi pemimpin, padahal saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Kalau saya berbuat baik (benar), maka dukunglah dan bantulah saya. Kalau saya berbuat salah, maka luruskanlah saya. Kebenaran (kejujuran) adalah amanat (yang harus dilaksanakan) dan kedustaan adalah pengkhianatan (yang harus dihindari). Orang lemah di antara kalian saya pandang sebagai orang kuat dan akan saya berikan haknya (yang belum didapatnya) dan orang kuat di antara kalian saya pandang sebagai orang lemah dan akan saya ambil "hak" dari mereka (untuk diserahkan kepada yang sebenarnya berhak), Insya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kalian meninggalkan jihad (perjuangan) karena tidak ada kelompok yang meninggalkan jihad kecuali mereka akan tertimpa kehinaan dari Allah. Taatilah saya, selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau saya bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban taat kepada saya. Demikianlah, bergegaslah melakukan shalat. Semoga Allah senantiasa merahmati kalian".[23]

Kelima, kekuatan penentu dalam setiap kemungkinan terjadinya perselisihan adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Keenam, bahwa dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan ada-

23 Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Juz II, h. 224.

nya lembaga yang memiliki kebebasan dari (kemungkinan) tekanan dari rakyat dan/atau *ulil amri*, agar dapat memberikan keputusan yang adil.

V. WAWASAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PLURALITAS BANGSA

1. Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan tentang kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakininya sebagai *sunnatullah*. Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya dan sebagainya, adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah.
2. Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah Nahdlatul Ulama meletakkan tata hubungan dan tiga bentuk ukhuwah di atas.
3. Untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tengah kenyataan adanya pluralitas masyarakat tersebut, dengan memahami firman Allah:

   يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

   Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." **(QS. al-Hujurat: 13)**

   Nahdlatul Ulama menerapkan tiga macam pola keterpaduan tata hubungan dengan sesama manusia, yaitu:

   a. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan keagamaan (keislaman), yang lazim disebut dengan *"Ukhuwah Is-*

lamiyah". Ini merupakan persaudaraan sesama muslim, yang tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah/keimanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, *mu'amalah, munakahat* dan *mu'asyarah* (hubungan keseharian) yang pada akhirnya akan menciptakan dan menumbuhkan persaudaraan yang hakiki.

b. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan ikatan kebangsaan dan kenegaraan, yang lazim disebut dengan *"Ukhuwah Wathaniyah".* Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang bersifat *mu'amalah* (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan) di mana mereka sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, kesamaan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

c. Tata hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut dengan *"Ukhuwah Basyariyah"*. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.

4. Di dalam penerapannya, *Ukhuwah Islamiyah* dan *Ukhuwah Wathaniyah* merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan dengan penuh kearifan. Ia harus dipandang sebagai pola tata hubungan yang saling membutuhkan dan saling mendukung, harus diwujudkan serentak dan tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain. Sikap mempertentangkan antara keduanya akan merugikan, baik bagi kehidupan umat Islam di Indonesia maupun kehidupan berbangsa.

5. Sikap yang sehat yang harus diterapkan dalam hubungannya dengan *Ukhuwah Islamiyah* dan *Ukhuwah Wathaniyah* tersebut adalah:

   a. Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak.

   b. Sikap selektif, dalam arti, adanya sikap cerdas dan kritis untuk memilih kepentingan yang terbaik dan yang *ashlah* (lebih memberi masla-

hat) serta *anfa'* (lebih memberi manfaat) dari beberapa pilihan/ alternatif yang ada.

c. Sikap integratif, dalam arti kesediaan menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut, secara benar, adil dan proporsional.

d. Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan siapapun di dalam kegiatan yang bersifat *mu'amalah* (hubungan sesama manusia), bukan yang bersifat ibadah.

6. Lebih dari itu, ukhuwah memang tidak hanya memerlukan keseragaman tetapi juga memerlukan kesediaan untuk "bersatu dalam keanekaragaman". Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ketiga bentuk ukhuwah tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang dan menurut tuntunan syariat.

VI. PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA

1. Dalam kaitannya dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara.
2. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila, Nahdlatul Ulama telah menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih, tercantum dalam "Deklarasi hubungan Pancasila dan Islam", hasil keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983, sebagai berikut:
   a. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
   b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

c. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah *aqidah* dan *syari'ah* meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

d. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.

e. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

VII. TANGGUNG JAWAB NAHDLATUL ULAMA TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DI MASA MENDATANG

1. Umat Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama, sejak semula memandang Indonesia sebagai "kawasan amal dan dakwah".[24*] Indonesia adalah bagian dari bumi Allah, dan (karenanya) merupakan lahan dari ajaran Islam yang universal itu (*Kaffatan linnas* dan *Rahmatan lil 'alamin*).
2. Indonesia dalam berbagai kondisinya, adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Swt., yang wajib disyukuri seluhur-luhurnya, dengan melestarikannya, mengembangkannya dan membangunnya sepanjang zaman. Segala kekurangan dan kelemahannya diperbaiki, dan segala kebaikannya ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai "*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur",* negara adil dan makmur di bawah maghfirah (ampunan) Allah Swt.
3. Dalam menyongsong masa depan, Nahdlatul Ulama bertekad untuk selalu berperan besar dalam meningkatkan kualitas umat, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dengan itulah umat Islam mampu memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai mayoritas bangsa, sebagai khalifah Allah di bumi dan sekaligus sebagai

---

24 Lihat putusan *Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Waqi'iyyah*, nomor masalah 192 (Muktamar XI, tahun 1935 di Banjarmasin).

hamba yang harus selalu mengabdi dan beribadah kepadaNya. Untuk itu, tugas Nahdlatul Ulama pada masa kini dan masa mendatang adalah:

a. Sebagai "kekuatan pembimbing spiritual dan moral umat dan bangsa ini", dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara -politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek- untuk mencapai kehidupan yang maslahat, sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, dunia dan akhirat.

b. Berusaha akan dan terus secara konsisten menjadi "Jam'iyah diniyah/ organisasi keagamaan" yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah Swt., cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera.

c. Berperan aktif memeperjuangkan pemerataan sarana perikehidupan yang lebih sempurna demi mewujudkan keadilan sosial yang diridhai Allah Swt.

d. Menjadikan warga Nahdlatul Ulama dan seluruh warga bangsa Indonesia sebagai warga negara yang senantiasa menyadari tanggung jawabnya dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkan keadilan dan kebenaran, memelihara kemanusiaan dan kejujuran serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

e. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, mandiri, terbebas dari penjajahan dan penganiayaan oleh siapapun dalam bentuk apapun, sehingga nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta ajaran Islam yang lain, dapat dimasyarakatkan dan disatukan dengan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia adalah wilayah atau bagian dari bumi Allah, yang menjadi tempat kaum muslimin menghambakan dirinya kepada Allah Swt., dengan penuh ketenangan dan keleluasaan, dalam seluruh aspek kehidupan.

LAMPIRAN VIII

PANDANGAN NU MENGENAI KEPENTINGAN UMUM (*MASLAHAH ‘AMMAH*) DALAM KONTEKS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA[25]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ

I. MUKADDIMAH

1. Diturunkannya syariat di tengah kehidupan umat manusia adalah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat.

   وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

   Artinya: “Kami mengutus Anda hanya bertujuan memberi rahmat bagi alam semesta”. **(QS. Al-Anbiya’: 107)**

   وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

   Artinya: “Sungguh al-Qur’an itu benar-benar sebagai pemberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin”. **(QS. Al-Naml: 77)**

   Oleh sebab itu, agar keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat dapat terwujud maka segala ikhtiar yang dilakukan umat manusia di muka bumi harus selalu sejalan dengan tuntunan syariat.

---

25 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

2. Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) yang dibenarkan oleh *syara'*.
3. Penggunaan *maslahah 'ammah* sebagai tolok ukur dan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijaksanaan sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan penggunaan maslahah 'ammah tidak pada tempatnya, seperti untuk menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum. Dengan menggunakan *maslahah 'ammah* sebagai pertimbangan untuk menetapkan setiap kebijakan, maka setiap kebijakan yang ditetapkan tidak akan menimbulkan kerugian atau menyalahi kepentingan umat manusia secara luas.

II. Keadaan dan Masalah

1. Dalam suasana pembangunan yang berkembang sangat dinamik dewasa ini, selalu ditemukan istilah kepentingan umum. Meskipun disadari bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas dan dilakukan dengan sebanyak mungkin menyediakan sarana dan fasilitas untuk kepentingan umum, diakui atau tidak, ternyata dalam pelaksanaan pembangunan, batasan untuk kepentingan umum ini sering menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya. Kepentingan umum akhirnya berkembang dalam perspektif yang beragam; ada kepentingan umum menurut versi pengambil keputusan (umara), atau kepentingan umum menurut "selera" sebagian kecil kelompok masyarakat, dan kepentingan umum yang dipersepsi oleh masyarakat.

   Kenyataan yang demikian membawa akibat dan dampak negatif dalam pembangunan. Pemakaian alasan "untuk kepentingan umum" tanpa berpedoman pada *maslahah 'ammah* yang dibenarkan oleh *syara'* akan melahirkan bentuk penyimpangan terhadap hukum syariat dan tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok ma-

syarakat lemah oleh golongan masyarakat yang kuat.

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "Maka tegakkanlah hukum di antara manusia secara benar dan janganlah Anda mengikuti hawa nafsu, yang akan menjerumuskan Anda pada kesesatan, jauh dari jalan Allah." **(QS. Shad: 26)**

فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩)

Artinya: "Maka siapa saja yang bertindak tirani dan memilih kehidupan dunia, maka neraka jahim layak untuk menjadi tempat tinggalnya." **(QS. al-Nazi'at: 23-39)**

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

Artinya: "Andaikan kebenaran mengikuti keinginan mereka, niscaya langit, bumi dan segala isinya akan binasa/rusak/hancur." **(QS. al-Mu'minun: 71)**

2. Kedudukan *maslahah 'ammah* sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebajikan perlu diaktualisasikan sebagai landasan untuk menyikapi masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penggunaan *maslahah 'ammah* dirasakan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkaya dan melengkapi landasan pembuatan keputusan dan kebijaksanaan dari berbagai kasus sosial yang berkaitan dengan dalih kepentingan umum -khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang sering terjadi selama ini-.
3. Untuk menghindari kemudharatan dan dampak negatif pembangunan, maka *maslahah 'ammah* dipandang penting dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi tunggal terhadap wujud dan makna kepentingan umum dalam konteks pembangunan. Dengan *maslahah 'ammah* berarti masyarakat telah merealisasikan tujuan syariat.

III. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. *Maslahah 'ammah* adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan *jalbul manfa'ah* (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan *daf'ul mafsadah* (menghindari kerusakan).

2. *Maslahah 'ammah* harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*al-ushul al-khamsah*), yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.

   أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِيْ بِهَا ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ مَضَرَّةٍ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فِيْ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّنَا نَعْنِيْ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُوْدُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُوْلِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوْتُ هَذِهِ الْأُصُوْلَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

   Artinya: "Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. Dan yang kami maksud dalam statemen ini bukan makna tersebut. Sebab penarikan manfaat dan penolakan bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisir tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan "maslahah" adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (syara'). Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima; yaitu memproteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah."[26]

3. *Maslahah 'ammah* harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan). Adapun sesuatu yang memba-

---

26 Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.) h. 174.

wa manfaat dan meniadakan madharat hanya menguntungkan atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk *maslahah 'ammah*.

4. *Maslahah 'ammah* tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.
5. *Maslahah 'ammah* harus bersifat *haqiqiyah* (nyata) dan tidak *wahmiyah* (hipotesis). Karena itu, untuk menentukan *maslahah 'ammah* harus dilakukan melalui kajian yang cermat atau penelitian, musyawarah dan ditetapkan secara bersama-sama.
6. *Maslahah 'ammah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan dalih untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut di atas harus ditolak.

IV. Prinsip-Prinsip Kepentingan Umum (*Maslahah 'Ammah*) dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

1. Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas). *Maslahah 'ammah* ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

   وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

   Artinya: *"Kami utus Anda (Muhammad), hanya untuk memberi rahmat bagi alam semesta".* **(QS. al-Anbiya': 107)**

2. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum. Dalam hubungan ini, maka prinsip

syura sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an *wa amruhum syura bainahum* (urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka) menjadi sangat strategis.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Artinya: "... dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di internal mereka sendiri." **(QS. Al-Syura: 38)**

3. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang latar belakang agama masyarakatnya berbeda-beda, umat Islam seharusnya mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agamanya dalam bahasa sekaligus menurut argumentasi masyarakat. Dengan demikian maka prinsip-prinsip keagamaan yang pada mulanya (dianggap) bersifat terbatas bisa menjadi milik bersama, milik masyarakat, bangsa dan umat manusia.
4. Jika proses *syura*, di mana kemaslahatan umum ditentukan, harus melalui lembaga perwakilan, maka secara sungguh-sungguh harus diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
   a. Orang-orang yang duduk di dalamnya benar-benar menghayati aspirasi kemaslahatan umum dari segenap rakyat yang diwakilinya, terutama lapisan *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*.
   b. Untuk mengkondisikan komitmen moral dan politik orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut di atas, perlu pola rekruitmen yang memastikan mereka datang dari rakyat dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja/bersuara untuk kepentingan rakyat.
   c. Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama dimusyawarahkan dan diputuskan, benar-benar bebas dari pengaruh ataupun tekanan pihak manapun yang dapat mengganggu tegaknya prinsip kemaslahatan bagi rakyat banyak.
5. Kemaslahatan umum yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-

kebijakan atau undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat (*majlis istisyari*) merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen. Prinsip *tasharuful imam manutun bil maslahah* harus dipahami sebagai prinsip keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemaslahatan yang telah disepakati bersama.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:*"Tindakan penguasa terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan".*

وَقَالَ مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيْمِ

Artinya: "Dan Imam Syafi'i berkata: "Posisi penguasa terhadap rakyat, itu laksana kedudukan wali (pelindung) terhadap anak yatim".[27]

6. Sementara itu rakyat secara keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujukkan dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), lembaga pemerintahan sebagai pelaksana (eksekutif), maupun lembaga peradilan sebagai penegak hukum (judikatif).
7. Dalam mewujudkan *maslahah 'ammah* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ), karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada upaya mendatangkan *maslahah* (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ).

27 Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 121.

LAMPIRAN IX

PANDANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NU TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP[28]

I. MUKADDIMAH

1. Untuk memenuhi tugas-tugas kekhilafahan manusia di muka bumi, Allah Swt. telah menciptakan makhluk ciptaan yang beraneka ragam dan terhampar di muka bumi untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Lingkungan alam merupakan salah satu ciptaan yang secara langsung menjadi hajat kebutuhan umat manusia dalam menjalani kehidupan dan mempertahankan eksistensinya. Karena itu, kehidupan umat manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan alam lingkungannya. Terdapat hubungan saling mempengaruhi antara perilaku kehidupan umat manusia dengan kondisi alam lingkungan.

2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia tidak bisa hanya diwujudkan dengan membangun "aspek manusianya saja", melainkan juga harus diikuti dengan "membangun" alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan. Karena itu, pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup harus inheren dengan usaha pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup umat manusia. Kesadaran terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari kesadaran manusia untuk memenuhi tuntutan agama. Sebagaimana firman Allah:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

28 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

Artinya: *"Dialah yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepadaNya."* **(QS. Hud: 61)**

3. Yang kini menjadi persoalan, sejalan dengan pertumbuhan umat manusia dan perkembangan pembangunan, mulai sering muncul problem lingkungan hidup. Lingkungan hidup kemudian banyak memperoleh perhatian karena sudah menyangkut kondisi pemukiman, lingkungan kerja, pencemaran udara, tanah dan air. Pencemaran menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1984 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Meningkatnya masalah yang muncul dari soal lingkungan hidup seiring dengan pesatnya industrialisasi dan pengguna produk berteknologi tinggi. Demikian juga perkembangan masyarakat di negara-negara berkembang juga sering menimbulkan masalah lingkungan hidup akibat kemiskinan yang memaksa mereka merusak lingkungan alam karena tuntutan hidup. Frekuensi, ruang lingkup dan kualitas masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dari waktu ke waktu terus meningkat. Kondisi seperti itu telah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya:

   ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

   Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) **(QS. al-Rum: 41)**

   Al-fasad (kerusakan) yang timbul akibat ulah manusia itu dapat berupa kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran, banjir dan tercabutnya berkah serta banyaknya bencana.

4. Dalam prakteknya ternyata ajaran agama dan ketentuan hukum yang

mengatur masalah lingkungan hidup belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tokoh-tokoh agama, meskipun ajaran dan ketentuannya cukup mampu mengatasinya. Ajaran agama dan perangkat aturan formal seakan-akan menjadi sebuah pesan moral yang tidak efektif dan tidak memiliki kekuatan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran lingkungan.

5. Lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi pandangan hidup dan isu global dari masyarakat dunia. Bisa dipahami jika masalah lingkungan hidup menjadi isu dan perhatian masyarakat dunia karena dewasa ini ada gejala terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan alam dan perilaku manusia yang tidak mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup.

6. Melihat permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi umat manusia dewasa ini, dan demi kelangsungan kehidupan umat manusia di masa mendatang, maka Nahdlatul Ulama memandang perlu masalah lingkungan hidup dijadikan fokus perhatian umat manusia, terutama masyarakat Indonesia. Dalam rangka itu, perlu ada pengkajian dan pemikiran mengenai fatwa agama yang menjelaskan bagaimana implikasi hukumnya bagi umat manusia yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup.

II. PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Lingkungan hidup merupakan karunia Allah Swt. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggungjawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini dengan sia-sia." **(QS. Ali Imran: 191)**

2. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsesi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama, *al-intifa'* (pendayagunaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. Kedua, *al-i'tibar* (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (*ishlah*) maupun berakibat destruktif (*ifsad*). *Intifa'* terhadap kekayaan alam yang tersedia, banyak disampaikan ayat al-Qur'an, seperti surat al-Nahl ayat 10-11:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١)

Artinya: "Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit untuk Anda. Sebagian air itu menjadi minuman dan sebagian yang lain (berfungsi) sebagai penyubur pepohonan (di tempat yang subur) itulah Anda menggembala ternak. Dengan air itu Dia menumbuhkan tanaman (pertanian); Zaitun, kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sungguh yang demikian itu benar-benar menjadi pertanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berkenan berfikir". **(QS. al-Nahl: 10-11)**

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١)

Artinya: "Dan Kami turunkan air yang diberkati (banyak manfaat-

nya) dari langit, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami). Dan dengan air itu Kami hidupkan tanah yang mati (kering-kerontang), seperti itulah terjadinya kebangkitan kembali (pada hari kiamat nanti)". **(QS. Qaf: 9-11)**

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢)

Artinya: "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan (berpikir serius) makanannya. Sungguh Kami benar-benar telah menuangkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi ini dengan sungguh-sungguh, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu; anggur, dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon kurma (menjadi) kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rerumputan, untuk kesenangan kalian dan binatang-binatang ternak kalian." **(QS. 'Abasa: 24-32)**

Demikian juga banyak hadis Nabi yang menganjurkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan memandang upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad:

وَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيْنَ أَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَقُوْمَ حَتَّى يُغْرِسَهَا فَالْيَغْرِسْهَا فَلَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: "Jika kiamat telah tiba, dan di antara salah seorang di antara kalian ada tanah lapang, dan ia mampu bertindak untuk menanaminya, maka tanamilah, sebab dia akan mendapatkan pahala dengan tindakannya itu." **(HR. Ahmad)**

3. Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara yang sebaik-baiknya pula. Maka atas dasar itu Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup men-

gandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya, diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah.

4. Lingkungan hidup menurut pandangan Nahdlatul Ulama bukan saja merupakan masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dari sudut pandangan ajaran agama telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama Islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam. Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

5. Nahdlatul Ulama berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana firman Allah:

   وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

   Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu, Muhammad), ia berjalan di muka bumi untuk bertindak merusak di bumi (ini) dan menghancurkan tanaman dan binatang-binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan." **(QS. al-Baqarah: 205)**

   Dan firman Allah:

   وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul kalian orang yang beriman". **(QS. al-A'raf: 85)**

Dalam konteks yang berbeda-beda, al-Qur'an menyatakan terjadinnya *al-fasad fil-ardh* (kerusakan di muka bumi) karena beberapa sebab:

a. Perbuatan fisik yang menyimpang dari kewajaran dan tanggung jawab, yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, baik karena tindakan militer (peperangan) maupun tindakan lainnya.

b. Perbuatan maksiat, karena tindakan atau anjuran kemaksiatan kepada Allah akan selalu membawa dampak pada kerusakan di bumi.

III. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH UNTUK MENANGGULANGI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Menghadapi masalah lingkungan hidup yang telah menjadi persoalan dalam kehidupan umat manusia sehari-hari, dan berpedoman pada pandangan dasar Nahdlatul Ulama dalam melihat masalah lingkungan hidup, maka Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama memandang perlunya ditegakkan sejumlah prinsip dan sikap-sikap yang tegas dalam menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Prinsip dan langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan lagi hanya merupakan masalah politis atau ekonomis saja, melainkan juga menjadi masalah teologis (*diniyah*), mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup juga memberi ancaman terhadap kepentingan ritual agama dan kehidupan umat manusia. Karena itu, usaha pelestarian lingkungan hidup harus dipandang dan disikapi sebagai salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh umat manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai perbuatan maksiat (*munkar*) yang diancam dengan hukuman.

   Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika mem-

bahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar.

عِبَارَةٌ **لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ** وَالْمَعْنَى لاَ يُبَاحُ إِدْخَالُ الضِّرَارِ عَلَى إِنْسَانٍ فِيْمَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مِلْكٍ وَمَنْفَعَةٍ غَالِبًا وَلاَ يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِرَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

Ungkapan "la dharara wala dhirara", maksudnya adalah secara umum tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.[29]

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. **(QS. al-A'raf: 56)**

يَنْهَى تَعَالَى عَنِ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَضَرَّهُ بَعْدَ الْإِصْلاَحِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْأُمُوْرُ مَاشِيَةً عَلَى السَّدَادِ ثُمَّ وَقَعَ الْإِفْسَادُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ أَضَرَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعِبَادِ

Artinya: "Allah Ta'ala melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia."[30]

وَلاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

Artinya: "Dari Nabi Saw. ia bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang diam (tidak mengalir), kemudian mandi darinya."[31]

---

29 Abdullah bin Sulaiman, *al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah* pada *al-Asybah wa al-Nadzair,* (Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114.

30 Ibn al-Katsir, *"Tafsir al-Qur'an al-'Azhim,* (...: Dar Thayyibah, 1999), Juz III, h. 429.

31 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz, III, h. 197.

Berhubung pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya, maka ia termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* sehingga penetapan hukumnya diserahkan kepada *ulil amri* dengan memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan.

2. Pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan bidang industri, perlu dijamin kelangsungannya. Namun demikian, pembangunan bidang industri harus dapat menghindari pengaruh sampingan yang dapat merugikan umat manusia secara luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, atau paling tidak dapat menekan pengaruh negatif seminim mungkin. Jika muncul kebutuhan untuk kepentingan pembangunan yang menuntut dilakukannya eksploitasi alam, maka harus ada jaminan bahwa hal itu benar-benar mengandung manfaat dan *maslahah* bagi kepentingan umat manusia dan tidak mendatangkan mafsadah di kemudian hari.
3. Sebagai bangsa yang ingin mengejar ketertinggalan dan merebut kemajuan, pembangunan iptek merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Tetapi pembangunan iptek yang kita kehendaki adalah iptek yang bukan bebas nilai (*value free*) yang seolah-olah berada sendirian di ruang hampa. Industrialisasi dapat dipandang sebagai perwujudan dari konsesi *taskhir* (penguasaan) kekayaan alam seperti yang dijanjikan Allah dalam kitab suci, tetapi industrialisasi yang kita inginkan adalah yang bertanggungjawab kepada Allah yang memberi kekayaan alam dan kepada kesejahteraan serta martabat umat manusia. Isyarat dari industrialisasi seperti itu adalah dinamik tetapi efisien, produktif tetapi tidak ceroboh, kreatif tanpa keserakahan dan rasional tanpa kehilangan hati nurani.
4. Kegiatan dakwah Islamiah seharusnya juga diarahkan untuk mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup. Perlu dilakukan penyadaran secara terus menerus bahwa tanggung jawab penyelamatan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari konsep kekhilafahan manusia di muka bumi secara utuh. Dalam konteks ini para ulama dan tokoh masyarakat seyogyanya menempatkan diri sebagai teladan dan panutan dalam pembangunan lingkungan hidup. Materi dakwah yang mengetengahkan

pesan-pesan agama, seperti pengertian dosa, maksiat, haram dan sejenisnya juga harus ditujukan kepada para perusak lingkungan. Demikian juga pengertian tentang pahala, amal jariyah, wajib dan sejenisnya, harus disampaikan bagi orang yang berikhtiar dan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

5. Pola hidup yang boros (dalam arti yang luas) dan rakus sehingga orang harus mengurus kekayaan alam secara berlebih-lebihan dan tidak bertanggung jawab dengan dalih untuk pembangunan atau kepentingan ekonomi merupakan kenyataan hidup yang harus ditolak, baik karena alasan agama maupun pertimbangan sosial. Sebaliknya perlu ditumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan pola hidup yang hemat dan sederhana serta berorientasi pada masa depan dan menjamin keselamatan hidup umat manusia dan alam.

6. Perlu dilakukan upaya sinkronisasi kegiatan pembangunan dengan usaha pengembangan lingkungan hidup. Selain itu juga perlu ada pendekatan sosial budaya kepada masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan bimbingan yang menjelaskan tentang lingkungan hidup, manfaat lingkungan hidup serta mafsadatnya jika lingkungan hidup tidak dilestarikan.

7. Untuk membentuk kesadaran dan sikap hidup masyarakat yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup diperlukan pendekatan secara yuridis dengan menciptakan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan tersebut secara tegas dan konsisten.[]